



PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN, SE

BUPATI PADANG LAWAS



H. ACHMAD FAUZAN NASUTION, S.H.I., M.Pd.I

WAKIL BUPATI PADANG LAWAS



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029



PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN, SE
BUPATI PADANG LAWAS



H. ACHMAD FAUZAN NASUTION, S.H.I, M.Pd.I
WAKIL BUPATI PADANG LAWAS



BUPATI PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
dan
BUPATI PADANG LAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah di Kabupaten Padang Lawas.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik penurunan/ *cascading* kinerja.
14. Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
15. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang ditargetkan dari hasil kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 2

RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029 dalam bentuk visi, misi Kepala Daerah dan arah pembangunan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

BAB III PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

- (1) RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD yang memuat visi, misi, arah kebijakan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
- (2) RPJMD menjadi pedoman dalam perumusan arah kebijakan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- (3) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bapperida untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala OPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Pengendalian oleh Bapperida meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (5) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (6) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bapperida.
- (7) Kepala Bapperida melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
- (8) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan.
- (9) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perubahan RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Target kinerja dan pagu indikatif yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah per tahun digunakan sebagai ukuran capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan;

- (2) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
- hasil pengendalian dan evaluasi;
 - kondisi strategis daerah; atau
 - fiskal daerah.
- (3) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah dengan ketentuan selama tidak mengubah target kondisi akhir RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI PADANG LAWAS,


PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 20 Agustus 2025
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,


BANGUHUH NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS.
PROVINSI SUMATERA UTARA: (2-74/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan nasional merupakan pemilihan alternatif-alternatif atas sumber daya yang tersedia dan bersifat terbatas. Perencanaan pembangunan dilakukan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang wajib disusun baik mulai dari tingkat pusat maupun daerah dan terangkai dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berakhirnya perodesasi dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah kabupaten Padang Lawas tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 mendorong pelaksanaan penyusunan RPJMD periode Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJMD periode Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai penjabaran atas arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang terjabarkan dalam pembangunan 5 (lima) tahunan. Hal ini merupakan amanat yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah. RPJMD ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Pelaksanaan RPJMD merupakan pelaksanaan dari RPJPD yang terbagi dalam beberapa tahapan perodesasi pembangunan perencanaan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD tersebut merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2045 menjadi sangat penting bagi pembangunan di Kabupaten Padang Lawas. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 perlu untuk ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025 NOMOR 3

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	10
1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2045	12
1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029	12
1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029	13
1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038	13
1.3.5. Hubungan RPJMD dengan RPIK.....	14
1.3.6. Hubungan RPJMD dengan Ripparkab	15
1.3.7. Hubungan RPJMD dengan RIPJPID.....	15
1.4. Maksud dan Tujuan.....	16
1.5. Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAREAH	19
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	20
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah	20
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam.....	32
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	34
2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	39
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas	42
2.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44
2.1.7. Demografi.....	46
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	51
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi.....	52

2.2.2.	Kesehatan untuk Semua	62
2.2.3.	Pendidikan yang Berkualitas dan Merata .	66
2.2.4.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	71
2.2.5.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	73
2.2.6.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	74
2.3.	Aspek Daya Saing Daerah	80
2.3.1.	Daya Saing Sumber Daya Manusia	81
2.3.2.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	81
2.3.3.	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	88
2.3.4.	Transformasi Digital	89
2.3.5.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global ..	91
2.3.6.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	92
2.3.7.	Stabilitas Ekonomi Makro	94
2.4.	Aspek Pelayanan Umum	95
2.4.1.	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	95
2.4.2.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	97
2.4.3.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan.....	98
2.4.4.	Urusan Pemerintah Wajib Layanan Dasar	100
2.4.5.	Urusan Pemerintah Wajib Layanan Non Dasar.....	111
2.4.6.	Urusan Pilihan.....	123
2.4.7.	Penunjang Urusan	126
2.5.	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	131
2.6.	Gambaran Umum Keuangan Daerah	136
2.6.1.	Pendapatan Daerah.....	143
2.6.2.	Belanja Daerah	149
2.6.3.	Pembiayaan Daerah	153
2.6.4.	Proyeksi Keuangan Daerah	155
2.7.	Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.....	166
2.7.1.	Permasalahan Pembangunan	166
2.7.2.	Isu Strategis Global	168
2.7.3.	Isu Strategis Nasional.....	175
2.7.4.	Isu Strategis Regional	179
2.7.5.	Isu Strategis Kabupaten Padang Lawas ...	187
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS	
	PEMBANGUNAN DAERAH	191
3.1.	Visi dan Misi	192
3.2.	Penahapan Pembangunan	207
3.2.1.	2026: Fokus Pembangunan Dasar.....	208

3.2.2.	2027: Peningkatan Kualitas	210
3.2.3.	2028: Pemantapan dan Inovasi	212
3.2.4.	2029: Pemerataan dan Digitalisasi	213
3.2.5.	2030: Optimalisasi dan Keberlanjutan.....	214
3.3.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	215
3.4.	Program Prioritas	229
3.5.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	248
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	251
4.1.	Program Perangkat Daerah	252
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	419
BAB V	PENUTUP	467
5.1.	Kaidah Pelaksanaan	468
5.1.1.	Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan	468
5.1.2.	Kerangka Pengendalian	472
5.1.3.	Sistem Insentif	480
5.1.4.	Mekanisme Perubahan	481
5.1.5.	Komunikasi Publik.....	482
5.2.	Pembiayaan Pembangunan.....	483
5.3.	Kesimpulan	484

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
2.1.	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas	22
2.2.	Potensi Pertambangan di Kabupaten Padang Lawas	25
2.3.	Kondisi DAS terhadap Lahan Kritis di SWP Asahan Barumon Berdasarkan Daerah Administrasi Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara	25
2.4.	Objek/Kawasan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas.....	31
2.5.	Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Padang Lawas .	34
2.6.	Ketersediaan Pangan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023	35
2.7.	Kebutuhan Bahan Pangan Kabupaten Padang Lawas (2023)	36
2.8.	Status Daya Dukung Air Tahun 2025	38
2.9.	Indikator Ketahanan Air	42
2.10.	Indikator Pengelolaan Persampahan	43
2.11.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	44
2.12.	Wilayah Rawan Bencana yang Pernah Terkena Bencana Alam di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023	46
2.13.	Penduduk Kabupaten Padang Lawas Menurut Kelompok Usia (Jiwa).....	47
2.14.	Penduduk Kabupaten Padang Lawas Menurut Kecamatan (Jiwa)	48
2.15.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Padang Lawas Menurut Kecamatan (Jiwa/Km ²)	49
2.16.	Proyeksi Penduduk Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2030	51
2.17.	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Padang Lawas (%)	54
2.18.	Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)	55
2.19.	Indikator Tuberkulosis	65
2.20.	Literasi dan Numerasi.....	70
2.21.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	71
2.22.	Capaian Indikator Sektor Keuangan	85
2.23.	Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Padang Lawas	90
2.24.	Capaian Indikator Integrasi Ekonomi Domestik dan Global .	91
2.25.	Capaian Indikator Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	93
2.26.	Capaian Indikator Stabilitas Ekonomi Makro.....	94
2.27.	Capaian Indikator Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	95
2.28.	Capaian Indikator Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	97
2.29.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan	102
2.30.	Fasilitas Kesehatan	104

2.31.	Tenaga Kesehatan Kabupaten Padang Lawas.....	104
2.32.	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan	105
2.33.	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	107
2.34.	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	109
2.35.	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	109
2.36.	Capaian Kinerja Urusan Sosial	110
2.37.	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja	111
2.38.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	112
2.39.	Capaian Kinerja Urusan Pangan	113
2.40.	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	114
2.41.	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	115
2.42.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	115
2.43.	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	116
2.44.	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	117
2.45.	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	117
2.46.	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	118
2.47.	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal.....	119
2.48.	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga	119
2.49.	Capaian Kinerja Urusan Statistik	120
2.50.	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan	121
2.51.	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan	121
2.52.	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan	122
2.53.	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata.....	123
2.54.	Capaian Kinerja Urusan Pertanian.....	124
2.55.	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	124
2.56.	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan	125
2.57.	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	126
2.58.	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan	127
2.59.	Capaian Indikator Kinerja Keuangan.....	127
2.60.	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan	128
2.61.	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan	129
2.62.	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah	131
2.63.	Capaian SPM Kabupaten Padang Lawas.....	131
2.64.	Kinerja APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 ..	140
2.65.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026-2030 (Rp).....	160

2.66.	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026-2030	163
2.67.	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026-2030.....	165
2.68.	Permasalahan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029	166
3.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Target Indikator	196
3.2.	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Padang Lawas 2025-2029 dengan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2045	204
3.3.	Penyelarasan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.....	206
3.4.	Penahapan Pembangunan	207
3.5.	Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029.....	216
3.6.	Program Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah.....	229
3.7.	Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029	234
3.8.	Produksi Kelapa Sawit dan Karet (Ton)	248
3.9.	Destinasi Wisata Kabupaten Padang Lawas	249
4.1.	Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030.....	253
4.2.	Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap 6 PHTC RPJMD Provinsi Sumatera Utara	300
4.3.	Dukungan Program Daerah Terhadap Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten Padang Lawas	301
4.4.	Dukungan Kabupaten Padang Lawas terhadap PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	306
4.5.	Dukungan Kabupaten Padang Lawas terhadap Program Prioritas dan Proyek Strategis Provinsi Sumatera Utara	326
4.6.	Indikator Kinerja Utama	420
4.7.	Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Padang Lawas dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional	421
4.8.	Indikator Kinerja Daerah	429
4.9.	Proyeksi Indikator SPM	458
5.1.	Identifikasi Risiko Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi RPJMD Kabupaten Padang Lawas.....	476

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
1.1.	Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	11
1.2.	Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral	11
2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Padang Lawas	21
2.2.	Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Padang Lawas.....	23
2.3.	Persentase Kemiringan Lahan di Kabupaten Padang Lawas	23
2.4.	Peta Curah Hujan Kabupaten Padang Lawas	26
2.5.	Peta Potensi Kawasan Hutan Kabupaten Padang Lawas.....	27
2.6.	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas (Poin)	39
2.7.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	40
2.8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	43
2.9.	Indeks Risiko Bencana (Poin)	45
2.10.	Piramida Penduduk Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 .	50
2.11.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (%).....	53
2.12.	Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin	57
2.13.	PDRB ADHB dan PDRB ADHK Per Kapita Kabupaten Padang Lawas (Rp Ribu)	58
2.14.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Agustus) (%).....	59
2.15.	Gini Ratio Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Maret) (%).....	60
2.16.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Poin)	61
2.17.	Indeks Pembangunan Manusia Penduduk Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Padang Lawas	62
2.18.	Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Tahun)	63
2.19.	Prevalensi Stunting (%)	64
2.20.	Indeks Pendidikan (Poin).....	67
2.21.	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Tahun).....	68
2.22.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Tahun)	69
2.23.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas (%)	72
2.24.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	74
2.25.	Indeks Perlindungan Anak (Poin)	75
2.26.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (Poin)	76

2.27.	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin).....	77
2.28.	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	78
2.29.	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin).....	79
2.30.	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	80
2.31.	Angka Ketergantungan (Per 100 Penduduk).....	81
2.32.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	82
2.33.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (%).....	83
2.34.	Rasio PDRB Jasa Keuangan (%)	84
2.35.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%).....	86
2.36.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	87
2.37.	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Padang Lawas (Poin)	88
2.38.	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Padang Lawas.....	99
2.39.	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Padang Lawas (%)	101
2.40.	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Padang Lawas (%)	102
2.41.	Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024	143
2.42.	Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 (Rp Miliar).....	144
2.43.	Rasio Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 (%)	145
2.44.	Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024	146
2.45.	Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 (%)	147
2.46.	Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024.....	148
2.47.	Realisasi dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024	149
2.48.	Struktur Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)	150
2.49.	Struktur Belanja Operasi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)	151
2.50.	Struktur Belanja Modal Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)	152
2.51.	Realisasi Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan SiLPA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024	154
5.1.	Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan	470
5.2.	Kerangka Kerja MRPN	473
5.3.	Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD .	474



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada di daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah dan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik. Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan wilayahnya.

Dalam pemerintahan, perencanaan pembangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang diwujudkan dalam sebuah sistem perencanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut juga diamanatkan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Karena itu, dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu daerah, pemerintah daerah perlu menyusun dokumen perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka

menengah, dan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan.

Menurut amanat Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang–Undang, menyatakan bagi daerah yang jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati telah berakhir maka untuk mengisi kekosongan jabatan diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Untuk menindaklanjuti amanat Undang–Undang tersebut mengenai penyusunan dokumen perencanaan daerah, maka berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu kabupaten yang Kepala Daerahnya dilantik tanggal 20 Februari 2025 sehingga sesuai dengan Inmendagri No. 2 Tahun 2025, Dokumen RPJMD harus ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 6 (enam) bulan setelah dilantik Kepala Daerah. Oleh karena itu, Kabupaten Padang Lawas mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang ditetapkan oleh Perkada. RPJMD Kabupaten Padang Lawas disusun dengan mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Inmendagri No. 2 Tahun 2025. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas berdasarkan pada visi dan misi Kepala terpilih. RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 merupakan periode awal dari RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025–2045.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025–2029 perlu

menyelaraskan dengan dokumen Nasional, Provinsi dan Daerah sehingga menghasilkan dokumen yang sinergis dan terpadu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas juga harus berpedoman pada RPJMN Tahun 2025–2029 untuk menjaga sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat impact maupun outcome pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat outcome, prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan isu–isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronasi kebijakan.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 – 2028 berkomitmen dalam menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals / SDGs*). Keselarasan pembangunan dilakukan dengan memerhatikan arahan-arahan dalam KLHS RPJMD 2025-2029, khususnya dengan memerhatikan isu-isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan di Kabupaten Padang Lawas memprioritaskan sinergi permasalahan pembangunan dalam KHLS sehingga tercipta harmonisasi perencanaan pembangunan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan, serta implementasi dari periode awal dari RPJPD untuk mewujudkan Kabupaten Padang Lawas yang Maju di Sumatera Utara. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas 2025-2029 diharapkan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi, serta mengakomodir pencapaian indikator serta target pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 berpedoman pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan yuridis dan praktis. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang

- Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 23. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
 24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 929);
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 76);

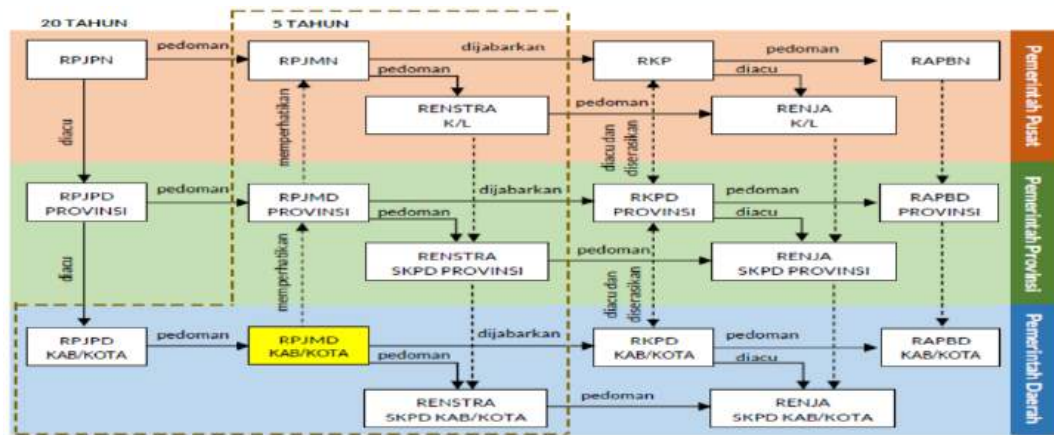
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 2); dan
38. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 Nomor 2).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, di samping berpedoman pada RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2017-2037, serta hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019–2024. Selain dokumen-dokumen perencanaan di atas, perlu juga memperhatikan dokumen rencana

pembangunan yang relevan, seperti agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

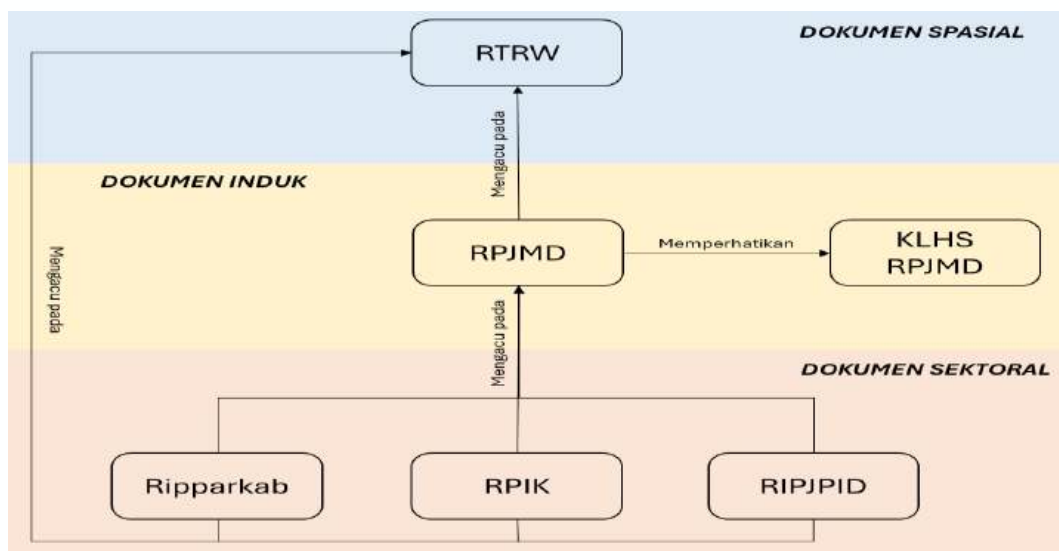
Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025–2029 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Adapun keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dokumen RPJMD juga memiliki kaitan dengan dokumen perencanaan sektoral lainnya. Hubungan antar dokumen tersebut diilustrasikan pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, yang menjadi pedoman strategis untuk pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun. RPJMD disusun dengan memedomani visi, misi, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD, sehingga terdapat kesinambungan antara rencana jangka panjang dan jangka menengah. RPJMD memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Padang Lawas selaras dengan tujuan jangka panjang. Pada tahap pertama pembangunan (periode 2025-2029) difokuskan pada penguatan transformasi pembangunan.

RPJMD menguraikan Indikator Utama Pembangunan (IUP) dari RPJPD ke dalam target yang lebih spesifik dan terukur untuk periode lima tahun. RPJMD berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan visi jangka panjang RPJPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di Kabupaten Padang Lawas berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis 20 tahun ke depan.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 untuk memastikan sinkronisasi antara agenda pembangunan daerah dan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus menyelaraskan sasaran, strategi, dan program pembangunan dengan prioritas nasional, seperti delapan Asta Cita, 17 program prioritas, dan proyek strategis nasional (*Quick Wins*) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kewenangan serta karakteristik

spesifik Kabupaten Padang Lawas, seperti potensi agribisnis dan tantangan infrastruktur. Penyelarasan ini memungkinkan Kabupaten Padang Lawas untuk mendukung pencapaian tujuan nasional, seperti transformasi ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. RPJMD tidak hanya menjadi alat untuk mewujudkan visi daerah, tetapi juga berkontribusi pada agenda nasional melalui program-program yang terintegrasi dan selaras dengan RPJMN.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 merupakan instrumen wajib yang digunakan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS memastikan bahwa setiap sasaran dan program dalam RPJMD telah mempertimbangkan aspek lingkungan hidup sehingga pembangunan di Kabupaten Padang Lawas dapat berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Hasil dari KLHS digunakan untuk menyempurnakan tujuan dan sasaran RPJMD dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam, mitigasi dampak lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. KLHS membantu memastikan bahwa RPJMD tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 disusun dengan memedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038 untuk memastikan bahwa rencana pembangunan selaras dengan struktur dan pola ruang wilayah. RTRW memberikan acuan mengenai pemanfaatan ruang, seperti penetapan kawasan pertanian, permukiman,

atau industri yang harus diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program RPJMD. Setiap program pembangunan dalam RPJMD, seperti pembangunan infrastruktur atau pengembangan kawasan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan agar tidak menyimpang dari arah kebijakan spasial daerah. Penyelarasan ini penting untuk menciptakan pembangunan yang terencana, terarah, dan tidak menimbulkan konflik penggunaan lahan. RPJMD memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Padang Lawas dapat berjalan secara terintegrasi, mendukung efisiensi sumber daya, dan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian fungsi ruang.

1.3.5. Hubungan RPJMD dengan RPIK

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan utama di tingkat kabupaten yang memuat visi, misi, dan strategi pembangunan selama lima tahun. RPJMD menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), di mana RPIK harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD. Hal ini memastikan bahwa pengembangan sektor industri tidak menyimpang dari tujuan umum daerah, seperti peningkatan ekonomi dan pemberdayaan sumber daya daerah, serta mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) untuk integrasi nasional.

Hubungan ini bersifat hierarkis, di mana RPJMD memberikan arah kebijakan umum, sementara RPIK berfungsi sebagai penjabaran sektoral yang lebih rinci, termasuk perwilayahan industri, pemberdayaan usaha kecil menengah, dan sasaran produksi. RPIK mendukung pencapaian target RPJMD melalui fokus pada isu strategis, seperti pertumbuhan ekonomi berbasis industri dengan memperhatikan potensi sumber daya daerah dan rencana tata ruang wilayah. Integrasi ini membantu pemerintah kabupaten dalam mengalokasikan anggaran dan sumber daya secara efektif untuk pembangunan yang berkelanjutan.

1.3.6. Hubungan RPJMD dengan Ripparkab

RPJMD sebagai rencana pembangunan jangka menengah daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (Ripparkab) yang fokus pada pengembangan sektor pariwisata. Ripparkab dirancang untuk mendukung visi dan misi RPJMD, terutama dalam aspek peningkatan ekonomi melalui pariwisata dengan mempertimbangkan potensi wisata lokal dan isu strategi. Hubungan ini memastikan bahwa rencana pariwisata tidak terpisah dari kerangka pembangunan daerah secara keseluruhan, sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian target RPJMD, seperti pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Secara struktural, Ripparkab merupakan penjabaran sektoral dari RPJMD, yang mencakup pemetaan destinasi wisata, strategi pemasaran, dan pengembangan infrastruktur. Hal ini membantu dalam sinkronisasi antar dokumen perencanaan, di mana RPJMD memberikan pedoman umum, sementara Ripparkab memberikan detail operasional untuk sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten dapat mengoptimalkan sumber daya untuk membangun pariwisata yang kompetitif, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diuraikan dalam RPJMD.

1.3.7. Hubungan RPJMD dengan RIPJPID

RPJMD berfungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) yang bertujuan memajukan iptek di tingkat kabupaten. RIPJPID disusun untuk selaras dengan prioritas pembangunan dalam RPJMD, seperti inovasi untuk mendukung sektor ekonomi dan sosial, serta menjadi bagian integral dari proses perencanaan daerah. Hubungan ini memastikan bahwa pemajuan IPTEK tidak terisolasi, melainkan mendukung pencapaian tujuan RPJMD melalui identifikasi potensi dan pemetaan kebutuhan teknologi lokal.

RIPJPID menjadi peta jalan strategis yang induktif, didasarkan pada analisis isu dalam RPJMD, dengan jangka waktu lima tahun yang sama. Ini

memungkinkan sinkronisasi antara rencana umum daerah dan inisiatif Iptek, termasuk kolaborasi dengan lembaga penelitian. RIPJPID memperkuat RPJMD dengan menyediakan kerangka untuk pengembangan teknologi yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kompetitif di daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah dan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun kesepakatan, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2025-2029 agar terarah, terpadu dan berkesinambungan, sedangkan tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah, melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas untuk 5 (lima) tahun ke depan dan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing- masing perangkat daerah berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
4. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selama periode 2025-2029.

5. Menjadi tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
6. Menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab yang sepenuhnya mengacu kepada Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD yang terdiri atas 5 (lima) BAB, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Lawas.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum daerah menjelaskan beberapa aspek, di antaranya adalah: (1) Aspek geografi dan demografi, (2) Aspek kesejahteraan masyarakat, (3) Aspek daya saing daerah, serta (4) Aspek pelayanan umum. Selain itu, menjelaskan gambaran keuangan daerah dan berbagai permasalahan pembangunan serta isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 disertai dengan tujuan dan sasaran RPJMD. Selain itu, menjelaskan berbagai strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Di samping itu, bab ini juga menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terkait target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan secara substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah



BAB II

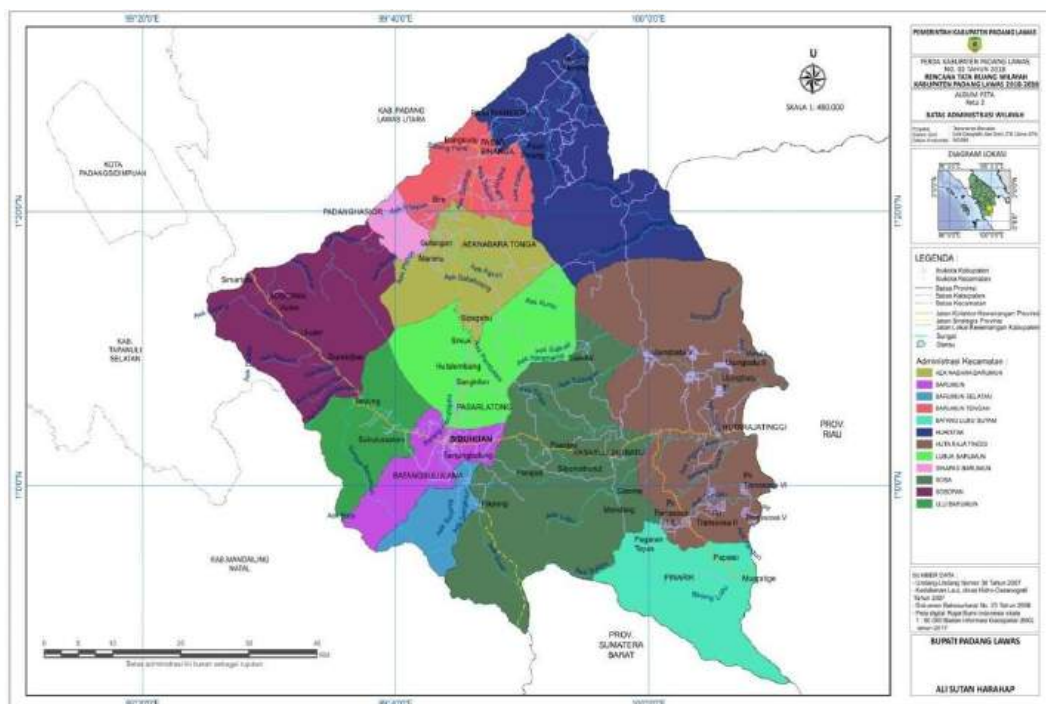
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan fondasi utama dalam memahami karakteristik wilayah serta potensi dan tantangan pembangunan sebuah daerah atau negara. Keduanya saling terkait erat dan mempengaruhi arah serta strategi pembangunan secara menyeluruh.

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Lahirnya Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007. Dimulai dengan 9 kecamatan, wilayah ini kemudian berkembang pesat hingga mencakup 17 kecamatan. Jantung pemerintahan Kabupaten Padang Lawas berdenyut di Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon. Membentang seluas 3.912,18 km², batas-batas wilayah Padang Lawas bersentuhan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara di utara, Kabupaten Rokan Hulu di timur, Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat) dan Kecamatan Siabu (Mandailing Natal) di selatan, serta Kecamatan Gunung Malintang, Sayur Matinggi, dan Batang Angkola (Tapanuli Selatan) di barat. Peta wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada gambar berikut ini. Wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 303 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Hutaraja Tinggi adalah wilayah yang paling luas di Kabupaten Padang Lawas yaitu sebesar 663,24 km², sementara Kecamatan Barumon Baru adalah kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya yaitu sebesar 13,73 km². Informasi mengenai peta administrasi dan luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Padang Lawas tersaji dalam gambar dan tabel berikut:



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Padang Lawas
Sumber: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

Letak geografis Kabupaten Padang Lawas adalah antara $0^{\circ}45'$ LU - $1^{\circ}33'$ LU dan $99^{\circ}24'$ BT - $100^{\circ}11'$ BT. Kabupaten Padang Lawas, dengan karakteristik geografisnya, memberikan kontribusi signifikan bagi wilayah sekitarnya dan Provinsi Sumatera Utara. Di bidang ekonomi, potensi pertanian dan perkebunan kelapa sawit serta karet menjadi motor penggerak utama, menyumbang pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung ketahanan pangan provinsi. Dari sisi infrastruktur, keberadaan jaringan transportasi strategis memfasilitasi konektivitas dan distribusi, mendorong pertumbuhan regional. Upaya konservasi sumber daya alam mencerminkan kontribusi lingkungan hidup kabupaten. Selain itu, potensi pariwisata alam dan budaya menjanjikan dampak ekonomi dan promosi daerah. Secara keseluruhan, Padang Lawas aktif berperan dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara di berbagai sektor.

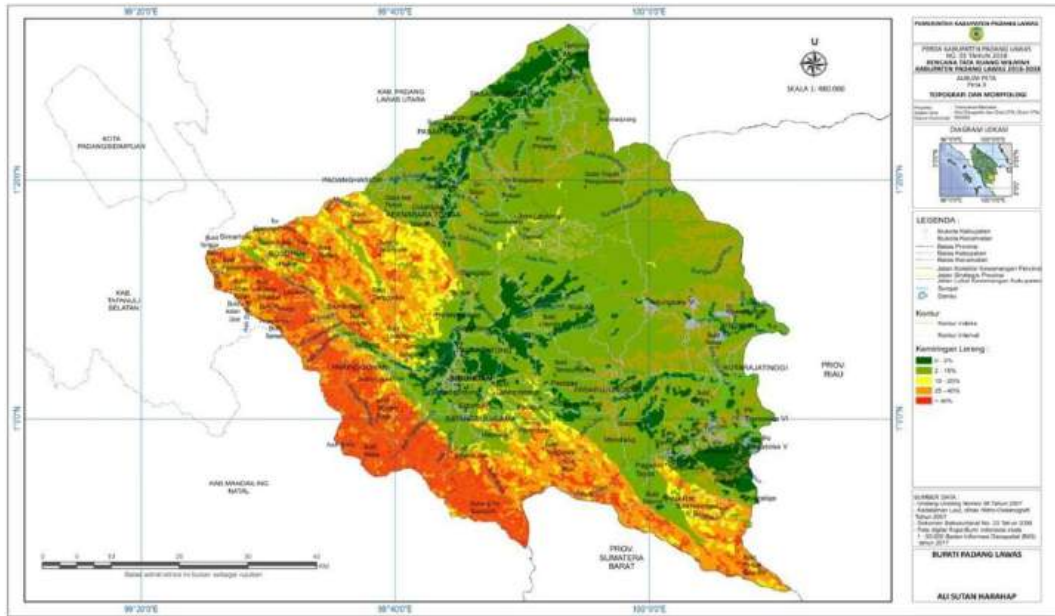
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Distribusi Luas (%)
1	Sosopan	22	-	435,18	11,12
2	Ulu Barumun	15	-	207,43	5,30
3	Barumun	16	1	126,10	3,22
4	Barumun Baru	13	-	13,73	0,35
5	Barumun Selatan	11	-	109,87	2,81
6	Lubuk Barumun	24	-	289,58	7,40
7	Sosa	16	-	283,52	7,25
8	Sosa Julu	12	-	155,95	3,99
9	Ulu Sosa	11	-	211,67	5,41
10	Sosa Timur	13	-	159,55	4,08
11	Batang Lubu Sutam	20	-	184,75	4,72
12	Hutaraja Tinggi	26	-	663,24	16,95
13	Huristak	27	-	523,59	13,38
14	Barumun Tengah	29	-	119,40	3,05
15	Aek Nabara Barumun	25	-	329,36	8,42
16	Sihapas Barumun	13	-	48,25	1,23
17	Barumun Barat	10	-	51,01	1,30
Kabupaten Padang Lawas		303	1	3.912,18	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

A. Topografi dan Ketinggian Lahan

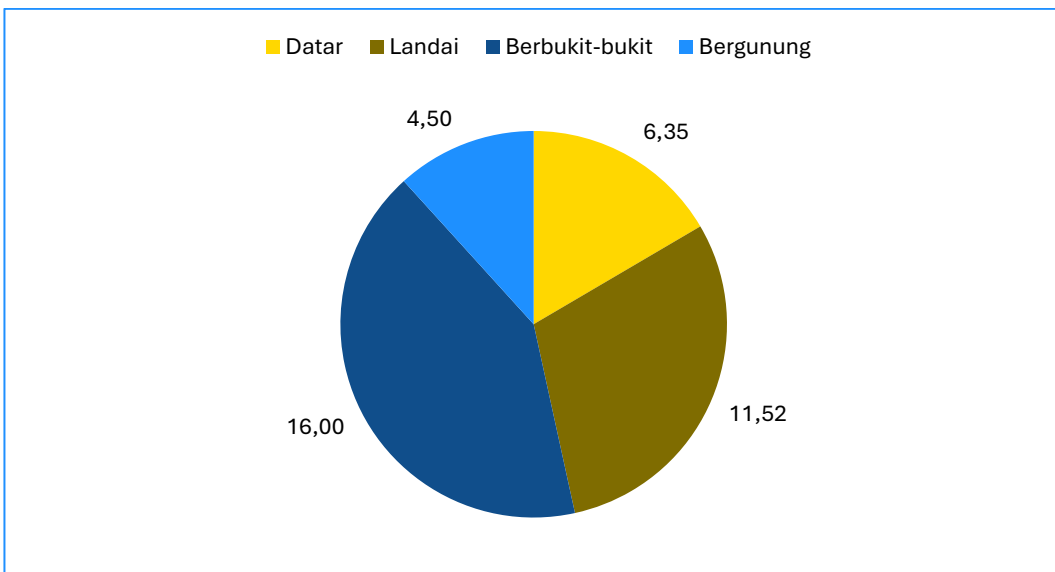
Secara geografis, Kabupaten Padang Lawas terbagi menjadi dua karakteristik utama. Wilayah timur, dengan topografi datar hingga landai (17,87% dari luas wilayah), memiliki tanah subur dan beriklim basah, namun menghadapi tantangan banjir dan kekeringan akibat kerusakan lingkungan. Sementara itu, wilayah barat didominasi pegunungan (66,13% bergunung dan 16% berbukit) yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Area ini memiliki variasi kondisi tanah dan iklim, menyimpan potensi hidrologi, dan sebagian berfungsi sebagai zona konservasi DAS Barumun. Informasi mengenai kondisi dan persentase kemiringan lahan Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2. Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Padang Lawas

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

Ketinggian lahan di Kabupaten Padang Lawas berkisar antara 0 hingga 1.915 meter di atas permukaan laut (mdpl), menghasilkan variasi iklim yang signifikan. Wilayah dataran rendah memiliki ketinggian beberapa meter di atas permukaan laut dengan iklim cukup panas (hingga 34,4 °C). Sementara itu, daerah berbukit memiliki kemiringan landai dan beriklim sedang, dan wilayah dataran tinggi memiliki suhu minimal yang lebih rendah (hingga 17,7 °C).



Gambar 2.3. Persentase Kemiringan Lahan di Kabupaten Padang Lawas

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

B. Geologi

Kabupaten Padang Lawas memiliki struktur geologi yang kompleks, didominasi oleh tiga formasi utama. Formasi pra-Tertier, batuan Permokarbon yang membentuk inti Pegunungan Bukit Barisan, merupakan lapisan tertua dan sebagian tertutup endapan dari zaman Tertier (sedimen) dan Kuartar (material vulkanis atau alluvium). Formasi ini dapat dijumpai di bagian selatan Kecamatan Sosa, Barumon, Ulu Barumon, dan Sosopan. Di atasnya, formasi Tertier terbagi menjadi Paleogen (Tertier tua) yang mengalami pelipatan okling dan tersebar di wilayah tengah hingga barat, serta Neogen (Tertier muda) yang ditemukan di beberapa kecamatan lainnya. Lapisan termuda adalah formasi Kuartar, yang tersusun atas batuan granit dan liparit, dan terdeteksi di wilayah perbatasan selatan Kecamatan Sosa, Barumon, dan Ulu Barumon. Struktur geologi Kabupaten Padang Lawas yang kompleks dan didominasi bentang alam perbukitan berpotensi menimbulkan tanah longsor, dengan sebagian besar Kecamatan Sosopan sebagai area rawan. Di sisi lain, kompleksitas geologi ini juga menyimpan potensi sumber daya mineral dan energi yang dapat dikembangkan, seperti timah, batu bara, dan bahan bakar fosil.

Kabupaten Padang Lawas menunjukkan keberagaman potensi sumber daya alam di sektor energi dan mineral. Potensi panas bumi sebagai energi alternatif sejajar dengan beberapa wilayah lain di Sumatera Utara. Cadangan minyak bumi sebesar 2000 MSTB telah terbukti dan diproduksi di Barumon Tengah. Batu bara ditemukan di lima belas titik wilayah, termasuk Sosopan, Ulu Barumon, dan Batang Lubu Sutam. Timah putih juga menjadi potensi bahan galian untuk industri dan konstruksi. Potensi kekayaan mineral dan energi Kabupaten Padang Lawas sangat beragam, mulai dari logam (emas, timah), non-logam (dolomit, bentonit, marmer, pasir kwarsa, kapur tohor), hingga sumber energi (batu bara, panas bumi, minyak dan gas bumi). Guna merealisasikan potensi ekonomi ini, diperlukan eksplorasi lanjutan untuk mengidentifikasi cadangan yang terukur dan layak untuk dikembangkan.

Informasi lebih lanjut mengenai potensi pertambangan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2. Potensi Pertambangan di Kabupaten Padang Lawas		
No	Kecamatan	Potensi Pertambangan
1	Sosa	Batu Bara
2	Batang Lubu Sutam	Batu Bara, Timah, Emas
3	Hutaraja Tinggi	-
4	Lubuk Barumun	-
5	Ulu Barumun	Batu Bara, Batu Pasir, Timah, Emas
6	Sosopan	Batu Bara, Marmer, Kapur Tohor, Emas, Bentonite
7	Barumun Tengah	Minyak Bumi, Pasir Kuarsa, Laterit
8	Huristak	Laterit, Pasir Kuarsa

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018- 2038

C. Hidrologi

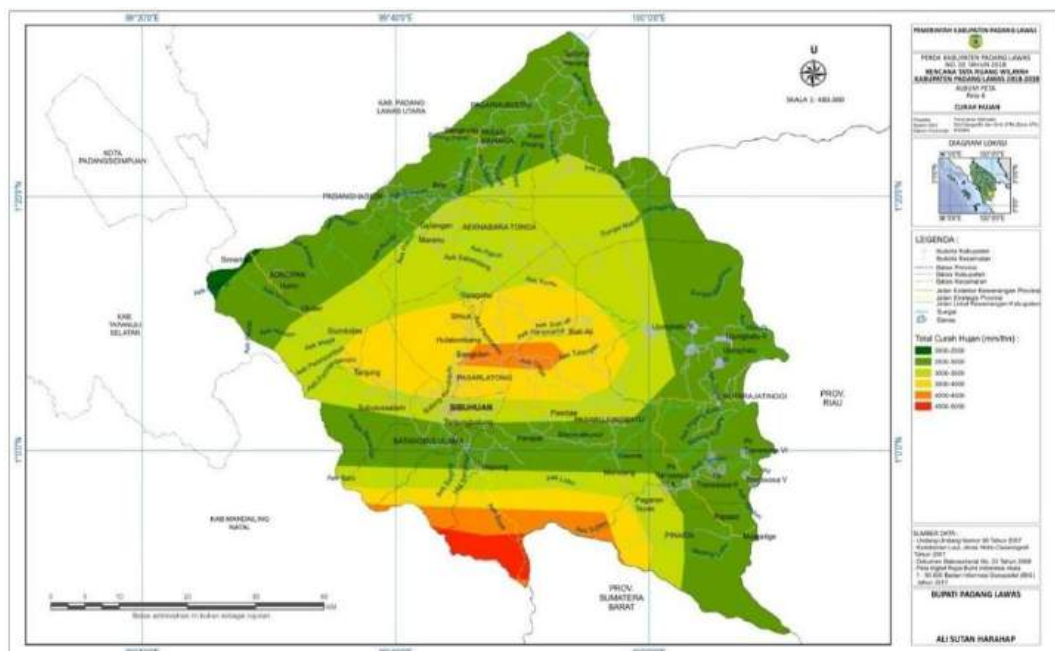
Kabupaten Padang Lawas memiliki potensi sumber air yang signifikan dari air permukaan (sungai, danau) dan air bawah tanah, yang terkelompok dalam DAS lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota, terutama DAS Barumun-Kualu (meliputi Barumun dan Aek Sosa). Data menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Padang Lawas tidak kritis (102.521,64 ha), dengan lahan sangat kritis terkecil (2.515,11 ha). Sungai-sungai besar seperti Barumun dan Sosa berpotensi sebagai sumber air untuk berbagai keperluan, namun degradasi lahan di hulu mengancam dengan risiko banjir saat musim hujan. Informasi lahan kritis berdasarkan DAS tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.3. Kondisi DAS terhadap Lahan Kritis di SWP Asahan Barumun Berdasarkan Daerah Administrasi Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara		
Kategori Lahan	Padang Lawas	Sumatera Utara
Tidak Kritis	102.521,64	1.605.118,20
Potensial Kritis	82.679,32	1.023.269,34
Agak Kritis	26.026,61	1.015.544,40
Kritis	18.755,46	538.930,28
Sangat Kritis	2.515,11	235.628,02
Tubuh Air	1.016,07	141.910,42

Sumber: BPDAS Asahan Barumun (Review Lahan Kritis di SWP DAS Asahan Barumun) Tahun 2021

D. Klimatologi

Kabupaten Padang Lawas memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin pasat dan muson. Seperti wilayah lain di Indonesia, daerah ini mengalami dua musim utama, yaitu kemarau dan penghujan, dengan musim hujan berlangsung dari November hingga Februari. Pada tahun 2023, curah hujan di kabupaten ini meningkat menjadi 2.304,7 mm, dengan puncaknya di Desember (529,7 mm) dan terendah di Juni (32,9 mm). Jumlah hari hujan juga bertambah menjadi 219 hari, dengan Desember mencatat hari hujan terbanyak (29 hari) dan April paling sedikit (17 hari). Selain itu, penyinaran matahari tahun 2023 juga meningkat menjadi 63,7 jam, dengan durasi terpanjang di Juni (7,2 jam) dan terpendek di Januari (4,2 jam). Kondisi curah hujan di Kabupaten Padang Lawas tersaji pada gambar berikut:



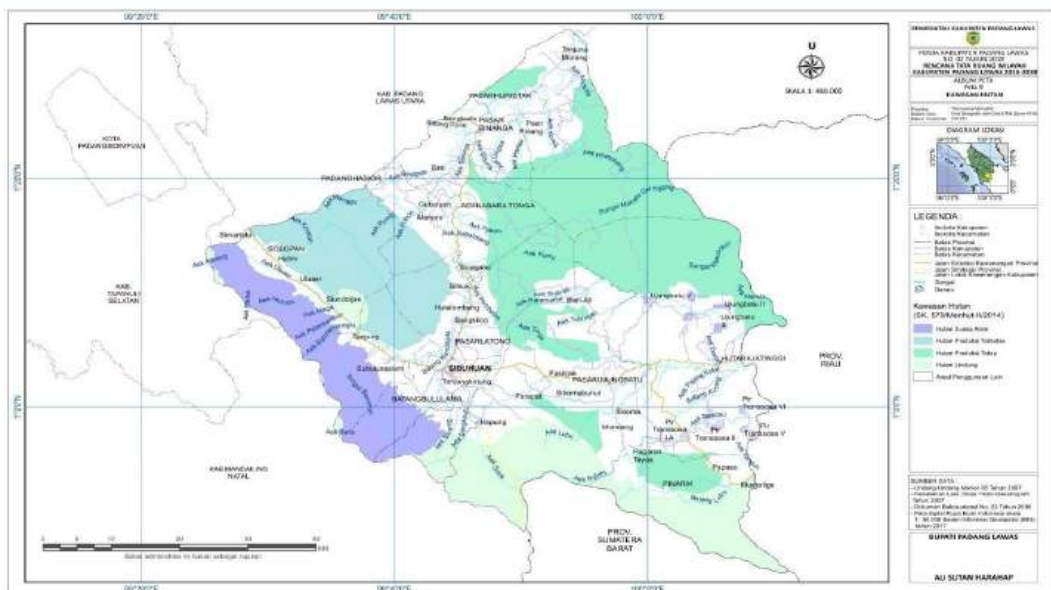
Gambar 2.4. Peta Curah Hujan Kabupaten Padang Lawas

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

Suhu dan kelembaban udara di wilayah ini terus menunjukkan tren kenaikan. Rata-rata suhu pada 2023 mencapai 26,1°C dengan kelembaban 80,03%. Suhu tertinggi terjadi pada Mei dan Juni (27,1°C), sedangkan terendah di Januari (25,2°C). Sementara itu, kelembaban udara paling tinggi terjadi di Desember (86,4%) dan terendah di Juni (73,6%).

E. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, maka luas kawasan hutan di Kabupaten Padang Lawas adalah sebesar 43.791 ha. Wilayah Kabupaten Padang Lawas yang termasuk dalam kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Peta potensi kawasan hutan di Kabupaten Padang Lawas disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2.5. Peta Potensi Kawasan Hutan Kabupaten Padang Lawas

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

1. Hutan lindung

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Padang Lawas adalah seluas 43.791 ha. Kawasan hutan lindung ini terdapat di:

- Kecamatan Barumun dengan luas ± 2.692 ha;
- Kecamatan Batang Lubu Sutam dengan luas ± 17.047 ha;
- Kecamatan Sosa dengan luas ± 21.422 ha;
- Kecamatan Sosopan dengan luas ± 2.025 ha;
- Kecamatan Ulu Barumun dengan luas ± 605 ha.

2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Padang Lawas adalah kawasan resapan air. Kawasan resapan air ini umumnya terdapat di bagian hulu DAS Kualuh Barumun dan sistem DAS Rokan, yang terdapat di Kecamatan Sosopan, Kecamatan Huristak, Kecamatan Barumun Tengah, Kecamatan Lubuk Barumun, Kecamatan Ulu Barumun, Kecamatan Barumun, Kecamatan Sosa, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kecamatan Barumun Selatan, Kecamatan Batang Lubu Sutam dan Kecamatan Aek Nabara Barumun.
3. Kawasan perlindungan setempat
Kabupaten Padang Lawas terdapat 2 DAS yaitu DAS Kualuh Barumun dan DAS Rokan. Sungai ini memberi kemakmuran bagi masyarakat di sekitarnya untuk bercocok tanam dan sebagai sumber air minum atau air baku. Kawasan perlindungan setempat yaitu:
 - a. Kawasan sempadan sungai, kawasan ini meliputi sungai-sungai yang berada di kabupaten, dengan ketentuan:
 - 1) Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - 2) Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - 3) Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
 - b. Kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar mata air juga meliputi ketentuan yang sama dengan kawasan sempadan sungai yang berada di kawasan hutan lindung.

4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas:

a. Kawasan suaka margasatwa

Kawasan suaka alam di wilayah Kabupaten Padang Lawas mempunyai luas sebesar ±31.658 ha. Kawasan suaka alam ini terdapat di Kecamatan Barumon, Kecamatan Sosopan, Kecamatan Ulu Barumon dan Kecamatan Barumon Selatan. Sedangkan kawasan suaka margasatwa yaitu Suaka Marga Satwa Barumon.

b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :

- 1) Candi, meliputi Candi Simaputung di Kecamatan Barumon Tengah, Candi Tandihat (Jorang Balanga I, II, III) di Kecamatan Barumon Tengah, Candi Sisangkilon di Kecamatan Lubuk Barumon dan Candi Muara Gambaran di Kecamatan Batang Lubu Sutam;
- 2) Rumah adat meliputi Bagas Godang Hasahatan Julu di Kecamatan Barumon, Bagas Godang Janjilobi di Kecamatan Barumon, Bagas Godang Unte Rudang di Kecamatan Barumon Tengah dan Bagas Godang Huta Nopan di Kecamatan Lubuk Barumon;
- 3) Kearifan lokal meliputi Makam Parmata Sapihak di Kecamatan Barumon, Makam Bujing Sambilan Jogi di Kecamatan Lubuk Barumon, Makam Jired I, II, III di Kecamatan Sosopan.

5. Kawasan rawan bencana

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Padang Lawas terdiri atas kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan kebakaran lahan dan kawasan rawan bencana angin puting beliung tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Lawas.

6. Kawasan lindung geologi Kawasan lindung geologi meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuan cekungan air tanah (CAT) Pekanbaru dan CAT Pasar Sibuhuan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038, kawasan budidaya terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas Kabupaten Padang Lawas seluas ±39.249 ha, tersebar di Kecamatan Sihapas Barumon, Kecamatan Lubuk Barumon, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kecamatan Sosopan dan Kecamatan Ulu Barumon;
 - b. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dengan luas ±99.511 ha, tersebar di Kecamatan Barumon Tengah, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Huristak, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kecamatan Lubuk Barumon dan Kecamatan Sosa.
2. Kawasan peruntukan pertanian meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah seluas +8.782 ha, tersebar di Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Barumon Selatan, Kecamatan Barumon, Kecamatan Ulu Barumon, Kecamatan Sosa, Kecamatan Sihapas Barumon, Kecamatan Barumon Tengah, Kecamatan Sosopan, Kecamatan Huristak, Kecamatan Aek Nabara Barumon dan Kecamatan Lubuk Barumon;
 - b. Kawasan peruntukan pertanian lahan kering seluas ±17.502 ha, tersebar di Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Barumon Selatan, Kecamatan Barumon, Kecamatan Ulu Barumon, Kecamatan Sosa, Kecamatan Sihapas Barumon, Kecamatan Barumon Tengah, Kecamatan Sosopan, Kecamatan Huristak, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kecamatan Hutaraja Tinggi dan Kecamatan Lubuk Barumon;

- c. Kawasan pertanian bagi komoditas tanaman pangan serta didukung prasarana irigasi teknis diarahkan menjadi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang terdiri dari lahan basah, termasuk rawa dan pertanian lahan kering;
 - d. Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kawasan peruntukan perkebunan seluas +119.848 ha, tersebar di seluruh kecamatan.
 4. Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Padang Lawas tersebar di seluruh kecamatan.
 5. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap dikembangkan di seluruh kecamatan dan kawasan peruntukan budidaya perikanan dikembangkan di seluruh kecamatan.
 6. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan pertambangan mineral dan kawasan pertambangan minyak bumi tersebar di seluruh kecamatan sedangkan untuk kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Padang Lawas berada di Kecamatan Sosa, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Ulu Barumun dan Kecamatan Sosopan.
 7. Kawasan peruntukan industri terdiri dari industri besar, industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan.
 8. Kawasan pariwisata di Kabupaten Padang Lawas yang terdiri dari 20 objek/kawasan seperti tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Objek/Kawasan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas

No	Nama Desa	Kecamatan	Tempat Wisata	Jenis Wisata
1	Sayur Matua	Aek Nabara Barumun	Pertanian Berbasis Teknologi (Dewi Tani)	Wisata Agro
2	Aliaga	Hutaraja Tinggi	Danau Buatan	Wisata Buatan
3	Tamiang	Batang Lubu Sutam	Air Terjun Sampuran	Wisata Alam, Wisata Tirta.
4	Siparau	Barumun Tengah	Candi Sipamutung	Wisata Sejarah, Wisata Spritual, Wisata Budaya.
5	Paringgonan	Ulu Barumun	Aek Milas	Wisata Alam

No	Nama Desa	Kecamatan	Tempat Wisata	Jenis Wisata
6	Siraisan	Ulu Barumun	Aek Siraisan	Wisata Alam
7	Botung	Batang Lubu Sutam	Air Terjun Sipatabung	Wisata Alam, Wisata Tirta
8	Sihiuk	Lubuk Barumun	Air Terjun Sihiuk	Wisata Alam, Wisata Tirta
9	Hapung	Ulu Sosa	Aek Hapung	Wisata Alam
10	Parapat	Ulu Sosa	Goa Liang Namuap	Wisata Alam
11	Ujung Batu	Sosa	Danau Gayambang	Wisata Alam
12	Siborna	Sosa Julu	Aek Lakkut	Wisata Alam
13	Sangkilon	Lubuk Barumun	Candi Sangkilon	Wisata Sejarah, Wisata Spritual, Wisata Budaya
14	Sayur Mahincat	Barumun Selatan	Tor Sinaongan	Wisata Alam
15	Binabo Jae	Barumun Baru	Makam Ompung Parmata Sapihak	Wisata Sejarah
16	Hasahatan	Barumun Baru	Bagas Godang	Wisata Sejarah, Wisata Budaya.
17	Hutabaru Siundol	Sosopan	Sungai Oruon	Wisata Alam, Wisata Tirta
18	Padang Garugur	Barumun Tengah	Candi si Djoreng Belangah, Danau si Djoreng Belangah, Lubang Jepang dan Hulu Balang	Wisata Alam, Wisata Tirta, Wisata Sejarah
19	Binanga Tolu	Sosopan	Air Mancur dan Budidaya Ikan Air Tawar	Wisata Alam, Wisata Tirta
20	Ujung Batu III	Hutaraja Tinggi	Agro dan Kebudayaan	Wisata Agro

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas

9. Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas permukiman perkotaan seluas ±9.262 ha dan permukiman perdesaan seluas ±17.994 ha, tersebar di seluruh kecamatan.

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Wilayah Kabupaten Padang Lawas berpotensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik geografis dan sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah. Pengembangan potensi kewilayahan tersebut dilakukan berbasiskan kawasan sesuai dengan regulasi perencanaan, yaitu melalui penetapan kawasan-kawasan strategis kabupaten serta mendorong perwujudan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Koridor pembangunan kewilayahan dikembangkan dengan mengacu pada sistem wilayah atau sistem kota-kota

di Kabupaten Padang Lawas yang diwujudkan dalam penetapan pusat-pusat kegiatan lokal dan mendorong terwujudnya pusat-pusat kegiatan nasional dan pusat-pusat kegiatan wilayah saling terkoneksi.

Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Padang Lawas ditetapkan berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berdasarkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional sistem perkotaan di Kabupaten Padang Lawas adalah:

1. Tidak terdapat PKN di Kabupaten Padang Lawas;
2. Tidak terdapat PKW di Kabupaten Padang Lawas;
3. Kota Sibuhuan sebagai PKL.

Di samping itu untuk mengefektifkan pengembangan Kabupaten Padang Lawas, maka hierarki sistem kota atau pusat-pusat pelayanan tersebut dikelompokkan menjadi wilayah pengembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perwilayahan pengembangan tersebut, antara lain yaitu:

- Kedudukan dan peran wilayah yang dicerminkan oleh keterkaitan masing-masing bagian wilayah;
- Sistem jaringan transportasi yang memungkinkan terbentuknya aksesibilitas antar bagian-bagian wilayah;
- Daya tarik-menarik kota yang diperlihatkan oleh fungsi dan peranan kota terhadap kota-kota lainnya;
- Homogenitas (kesamaan) potensi sumber daya yang dapat didayagunakan;
- Kondisi fisik dan faktor administrasi dan pendeliniasian batas wilayahnya;
- Pertimbangan rencana struktur perwilayahan yang sudah ada

Dengan demikian rencana sistem perkotaan dan wilayah pengembangan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Padang Lawas

No	Ibukota Kecamatan	Hirarki /Peran	Jenis Pusat Kegiatan	Fungsi Utama
1	Kota Sibuhuan (Kecamatan Barumun)	PKL	Sistem perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> o Sebagai pusat pemerintahan o Pusat koleksi dan distribusi
2	Kota Binanga (Kecamatan Barumun Tengah)	PPK	Sistem perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> o Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa o Kota Binanga sebagai simpul transportasi udara
3	Pasar Ujung Batu (Kecamatan Sosa)	PPK	Sistem perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> o Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa o Pasar Ujung Batu sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa
4	Kota Sosopan (Kecamatan Sosopan)	PPL	Sistem pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
5	Pasar Paringgonan (Kecamatan Ulu Barumun)	PPL	Sistem pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
6	Pasar Latong (Kecamatan Lubuk Barumun)	PPL	Sistem pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
7	Kota Huristak (Kecamatan Huristak)	PPL	Sistem pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
8	Kota Hutaraja Tinggi (Kecamatan Huta Raja Tinggi)	PPL	Sistem pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
9	Kota Pinarik (Kecamatan Batang Lubu Sutam)	PPL	Sistem pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Padang Lawas Tahun 2018-2038

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Daya dukung lingkungan mencerminkan kemampuan ekosistem untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia maupun makhluk hidup lain, seperti air bersih, udara segar, dan bahan pangan. Ketika suatu wilayah melebihi kapasitas daya dukungnya, maka sumber daya alam cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitas akibat pemanfaatan yang tidak seimbang. Di sisi lain, daya tampung lingkungan menggambarkan kemampuan lingkungan untuk menahan dampak

dari aktivitas manusia tanpa mengakibatkan kerusakan yang permanen. Hal ini termasuk kemampuan lingkungan menyerap limbah dan polutan dalam kadar tertentu. Menjaga keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung menjadi kunci utama agar pembangunan dan aktivitas manusia tidak merusak lingkungan sehingga keberlanjutan ekosistem tetap terjaga untuk generasi mendatang.

A. Daya Dukung Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Daya dukung pangan merupakan kemampuan lingkungan untuk menyediakan bahan pangan bagi penduduk di suatu wilayah. Kondisi daya dukung pangan dibedakan menjadi sudah terlampaui dan belum terlampaui yang ditentukan berdasarkan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan pangan yang dikonversikan ke dalam bentuk energi dengan satuan kalori.

Tabel 2.6. Ketersediaan Pangan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

No	Komoditas	Jenis Komoditas	Produksi (Ton/Tahun)	Energi/100 gram	Ketersediaan (Kkal/Tahun)
1	Peternakan	Sapi Potong	477.530,00	350	1.671.355.000.000,00
		Kerbau	213.300,00	350	746.550.000.000,00
		Kambing	159.690,00	350	558.915.000.000,00
		Domba	78.660,00	350	275.310.000.000,00
2	Perikanan	Ikan	4.363,64	100	4.363.640.000,00
3	Unggas	Ayam Kampung	388.955,00	250	972.387.500.000,00
		Telur Ayam Kampung (40-60 Gram/Butir)	3,22	174	5.600.651,10
		Ayam Pedaging	591.306,00	298	1.762.091.880.000,00
		Itik	14.299,00	321	45.899.790.000,00
4	Hortikultura	Jagung	870,44	350	3.046.540.000,00
		Kedelai	467,4	400	1.869.600.000,00
		Ubi Kayu	4.018,78	270	10.850.706.000,00
		Ubi Jalar	1.035,23	150	1.552.845.000,00
		Kacang Tanah	104,74	550	576.070.000,00
		Kacang Hijau	115,8	370	428.460.000,00
5	Pertanian	Padi (Beras = 0,64 * GKG)	48.596,23	355,15	172.591.379.930,77
Jumlah Total			1.983.315,48		6.227.794.011.581,87

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029

Kebutuhan bahan pangan di Kabupaten Padang Lawas tahun 2023 berdasarkan KLHS menunjukkan kebutuhan total energi untuk memenuhi jumlah penduduk yang mencapai 275.648 jiwa. Dengan demikian ketersediaan energi pangan sebesar 6.227.794.011.581,87 per tahun masih dapat memenuhi kebutuhan daerah. Kebutuhan bahan pangan merupakan faktor penting dalam perencanaan ketahanan pangan suatu daerah karena berkaitan langsung dengan jumlah penduduk dan kecukupan gizi masyarakat. Pada tahun 2023, Kabupaten Padang Lawas mencatat kebutuhan energi pangan yang bervariasi di setiap kecamatan sesuai dengan jumlah penduduknya, sehingga menjadi acuan utama dalam memastikan distribusi dan ketersediaan pangan yang seimbang di seluruh wilayah.

Tabel 2.7. Kebutuhan Bahan Pangan Kabupaten Padang Lawas (2023)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Kalori (Kkal/Hari)
1	Sosopan	10.877,00	8.337.220.500,00
2	Ulu Barumun	17.749,00	13.604.608.500,00
3	Barumun	43.681,00	33.481.486.500,00
4	Barumun Selatan	8.417,00	6.451.630.500,00
5	Barumun Baru	13.095,00	10.037.317.500,00
6	Lubuk Barumun	21.513,00	16.489.714.500,00
7	Sosa	21.072,00	16.151.688.000,00
8	Ulu Sosa	9.470,00	7.258.755.000,00
9	Sosa Julu	11.100,00	8.508.150.000,00
10	Batang Lubu Sutam	8.364,00	6.411.006.000,00
11	Hutaraja Tinggi	40.923,00	31.367.479.500,00
12	Sosa Timur	8.796,00	6.742.134.000,00
13	Huristak	19.027,00	14.584.195.500,00
14	Barumun Tengah	16.888,00	12.944.652.000,00
15	Aek Nabara Barumun	14.035,00	10.757.827.500,00
16	Sihapas Barumun	6.117,00	4.688.680.500,00
17	Barumun Barat	4.524,00	3.467.646.000,00
Total		275.648,00	211.284.192.000,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel tersebut, kebutuhan bahan pangan di Kabupaten Padang Lawas tahun 2023 menunjukkan total energi sebesar 211.284.192.000 Kkal per tahun dengan jumlah penduduk mencapai 275.648 jiwa. Kecamatan

dengan kebutuhan energi tertinggi adalah Barumun dengan 43.681 jiwa yang membutuhkan 33.481.661.000 Kkal per tahun. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduknya yang paling besar dibanding kecamatan lain. Disusul oleh Kecamatan Hutaraja Tinggi dengan 40.923 jiwa yang memiliki kebutuhan energi sebesar 31.367.479.500 Kkal per tahun, kemudian Kecamatan Sosa dengan 21.072 jiwa yang membutuhkan 15.161.688.000 Kkal per tahun. Kecamatan Lubuk Barumun juga memberikan kontribusi signifikan dengan jumlah penduduk 21.513 jiwa dan kebutuhan energi sebesar 16.489.714.500 Kkal, serta Huristak dengan 19.027 jiwa dan kebutuhan energi 14.584.195.500 Kkal.

B. Daya Dukung Air

Air bersih juga merupakan kebutuhan dasar manusia, selain pangan. Air dimanfaatkan baik secara langsung untuk konsumsi, kegiatan domestik (mandi, mencuci, dsb.), maupun dalam kegiatan penggunaan lahan untuk menghasilkan produk, termasuk pangan. Adanya keterbatasan jumlah ketersediaan air bersih yang dapat digunakan akan menjadi masalah apabila kebutuhan yang ada lebih tinggi dibandingkan ketersediaannya. Tabel berikut memberikan gambaran umum tentang status daya dukung air di Kabupaten Padang Lawas. Secara umum Kabupaten Padang Lawas memiliki surplus ketersediaan air yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya air. Pemerintah perlu mengambil langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dengan mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 2.8. Status Daya Dukung Air Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk (2025)	Ketersediaan Air (m ³ /th)	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /thn)	Kebutuhan Air untuk Kegiatan Ekonomi berbasis Lahan (m ³ /thn)	Kebutuhan Air Total (m ³ /thn)	Selisih	Status DD Air
Aek Nabara Barumun	11.307	755.372.775	606.312	284.374.152	284.980.464	470.392.311	Surplus
Barumun	18.637	263.342.423	1.887.019	75.329.028	77.216.047	186.126.376	Surplus
Barumun Barat	45.988	101.194.989	195.437	49.848.191	50.043.628	51.151.361	Surplus
Barumun Baru	8.813	309.218.685	565.704	32.711.688	33.277.392	275.941.293	Surplus
Barumun Selatan	13.791	270.583.587	363.614	47.848.644	48.212.258	222.371.328	Surplus
Barumun Tengah	22.753	286.985.818	729.562	136.597.293	137.326.854	149.658.964	Surplus
Batang Lubu Sutam	22.383	630.038.989	361.325	55.504.532	55.865.857	574.173.132	Surplus
Huristak	9.823	1.299.111.982	821.966	586.893.490	587.715.456	711.396.526	Surplus
Hutaraja Tinggi	11.768	1.594.929.439	1.767.874	646.890.937	648.658.811	946.270.628	Surplus
Lubuk Barumun	8.606	631.004.075	929.362	266.038.344	266.967.706	364.036.370	Surplus
Sasopan	42.423	1.086.829.402	469.886	14.672.085	15.141.971	1.071.687.431	Surplus
Sihapas Barumun	8.955	113.767.013	264.254	58.355.459	58.619.713	55.147.300	Surplus
Sosa	1.937	940.531.353	91.031	244.734.048	245.644.358	694.886.995	Surplus
Sosa Julu	17.429	306.282.953	47.952	152.419.320	152.898.840	153.384.113	Surplus
Sosa Timur	14.811	324.153.425	379.987	151.270.124	151.650.112	172.503.313	Surplus
Ulu Barumun	6.476	279.923.863	766.757	20.339.100	21.105.857	258.818.006	Surplus
Ulu Sosa	4.834	290.729.230	409.104	68.464.764	68.873.868	221.855.362	Surplus
Padang Lawas	288.165	9.484.000.000	11.907.994	2.892.291.199	2.904.199.193	6.579.800.807	Surplus

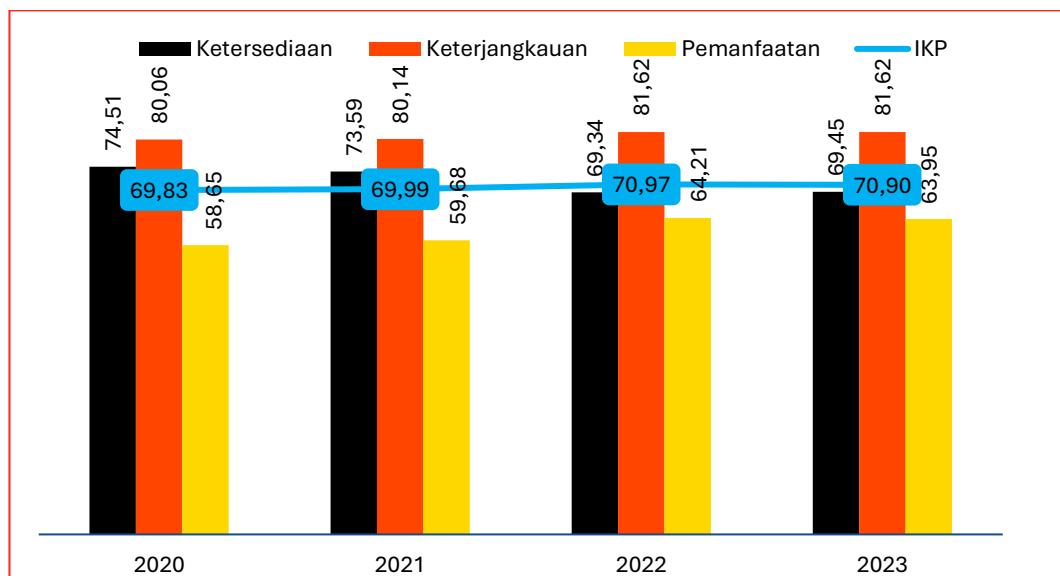
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029

2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan adalah fondasi penting bagi stabilitas sosial dan ekonomi suatu daerah. Ketahanan energi mengacu pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber energi secara efisien dan berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan mengembangkan energi terbarukan seperti surya, angin, dan biomassa. Sementara itu, ketahanan air menuntut pengelolaan sumber daya air yang optimal, menjamin ketersediaan air bersih untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim.

A. Pangan

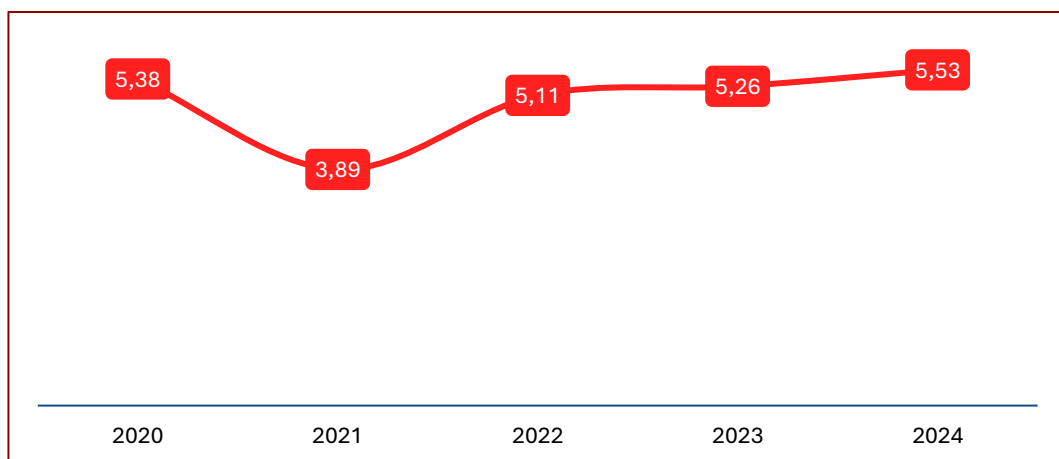
Kemandirian pangan menjadi aspek penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan meningkatkan produksi pangan lokal dan diversifikasi sumber pangan, daerah dapat mengurangi ketergantungan pada impor yang rentan terhadap fluktuasi pasar global. Strategi ketahanan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas lingkungan hidup.



Gambar 2.6. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas (Poin)

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional

Berdasarkan data pada gambar tersebut, terlihat bahwa Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 69,83 poin pada tahun 2020 menjadi 70,90 poin pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa tidak adanya peningkatan yang signifikan dari ketahanan pangan Kabupaten Padang Lawas. Apabila dilihat berdasarkan komponen penyusunnya, Aspek Ketersediaan mengalami penurunan dari 74,51 poin pada tahun 2020 menjadi 69,45 poin pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh semakin kurangnya produksi pangan daerah Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah sebaiknya mengidentifikasi permasalahan dari produktivitas pangan daerah sehingga ketersediaan pangan dapat terjaga.



Gambar 2.7. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data pada gambar tersebut, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan meningkat sejak tahun 2021 sebesar 3,89 persen menjadi 5,53 persen pada tahun 2024, di mana secara kuantitas hal ini menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 15.526 orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pangan hariannya pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu memastikan distribusi pangan dan stabilitas harga agar seluruh masyarakat dapat mengonsumsi pangan yang cukup tanpa terkecuali.

B. Energi

Berketahanan energi merupakan kemampuan suatu daerah untuk memastikan pasokan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan dalam

menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, krisis geopolitik, atau gangguan infrastruktur. Hal ini mencakup diversifikasi sumber energi, seperti memanfaatkan energi terbarukan (matahari, angin, hidro) dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Konsumsi listrik per kapita adalah indikator yang mengukur rata-rata penggunaan listrik per orang dalam suatu negara atau wilayah dalam periode tertentu, biasanya diukur dalam satuan kilowatt-hour (kWh) per kapita per tahun. Indikator ini digunakan untuk menilai akses masyarakat terhadap energi, karena listrik merupakan kebutuhan primer yang mendukung aktivitas rumah tangga, industri, dan sektor lainnya.

Porsi EBT dalam bauran energi primer adalah persentase kontribusi energi baru terbarukan (seperti tenaga surya, angin, air, biomassa, panas bumi, dan lainnya) terhadap total pasokan energi primer yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, termasuk untuk pembangkit listrik, industri, transportasi, dan sektor lainnya. Bauran energi primer mencakup semua sumber energi, baik terbarukan (EBT) maupun tak terbarukan (batubara, minyak bumi, gas alam).

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu menjamin ketersediaan pasokan energi listrik yang mencukupi kebutuhan domestik dan non domestik. Untuk mendukung penggunaan energi yang ramah lingkungan, Kabupaten Padang Lawas juga memiliki potensi EBT, seperti tenaga surya, biomassa, sungai, dan angin sehingga ke depannya hal ini dapat dimanfaatkan agar kebutuhan energi domestik dan non domestik dapat terpenuhi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup

C. Air

Berketahanan air merupakan kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya air secara berkelanjutan di tengah tekanan, seperti kekeringan, banjir, polusi, atau pertumbuhan populasi. Konsep ini mencakup pengelolaan air yang terintegrasi, mulai dari penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, hingga perlindungan ekosistem air seperti sungai dan danau.

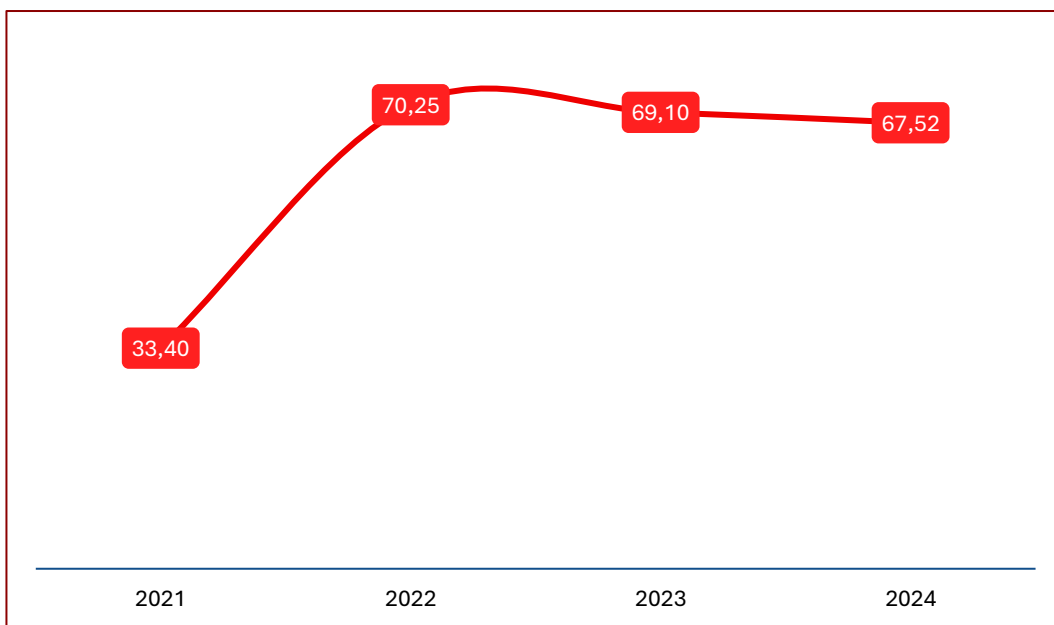
Tabel 2.9. Indikator Ketahanan Air					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Aman (%)	15,00	16,00	20,50	22,00	25,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas

Kapasitas air baku adalah jumlah total air bersih yang belum diolah dari berbagai sumber, seperti sungai, danau, waduk, mata air, atau air tanah yang dapat disediakan dan dialirkan ke instalasi pengolahan air untuk diolah menjadi air minum yang layak konsumsi. Indikator ini menjadi penentu utama dalam perencanaan serta kelangsungan sistem penyediaan air minum untuk memastikan pasokan dapat memenuhi permintaan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk periode 2020-2024, data belum tersedia dan akan dilakukan perhitungan ke depannya. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Aman meningkat dari 15,00 persen pada tahun 2020 menjadi 25,00 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menjalankan programnya dalam menjamin ketersediaan air yang mana bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan infrastruktur seperti bendungan, sistem irigasi, dan teknologi daur ulang air, suatu wilayah dapat mengurangi risiko krisis air. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi untuk menggunakan air secara bijak guna mendukung keberlanjutan sumber daya air.

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas adalah kondisi di mana udara, air, tanah, dan ekosistem dapat menopang kehidupan sehat masyarakat dan keberlangsungan kehidupan flora dan fauna. Kualitas lingkungan yang baik mencakup pengendalian pencemaran dengan penerapan standar lingkungan yang ketat untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas industri, pertanian, dan permukiman.



Gambar 2.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan hasil evaluasi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2021 sebesar 33,40 poin meningkat hingga tahun 2024 mencapai 67,52 poin. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui program-program pengelolaan lingkungan hidup. Pelestarian keanekaragaman hayati dan pemulihan kawasan hijau berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, pengelolaan limbah yang efektif sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pengurangan limbah melalui konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta pengelolaan limbah berbahaya dan domestik secara terintegrasi dapat mencegah kerusakan lingkungan dan risiko kesehatan masyarakat. Sampah yang tidak terkelola juga menjadi isu yang perlu diperhatikan di Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 2.10. Indikator Pengelolaan Persampahan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (%)	N/A	N/A	19,78	N/A	N/A
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	15,68	15,73	15,78	15,85	15,90

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas

Pelayanan pengelolaan sampah hingga tahun 2024 hanya sebesar

15,90 persen. Hal ini berarti bahwa masih banyak rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berupaya untuk meningkatkan cakupan pengelolaan sampah dengan meningkatkan sarana dan prasarana persampahan, armada pengangkutan sampah, serta menyediakan tempat pengelolaan sampah untuk diolah. Dalam memastikan lingkungan hidup yang berkualitas, maka masyarakat harus memiliki akses terhadap sanitasi yang layak.

Tabel 2.11. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	52,46	59,62	65,52	68,32	69,00

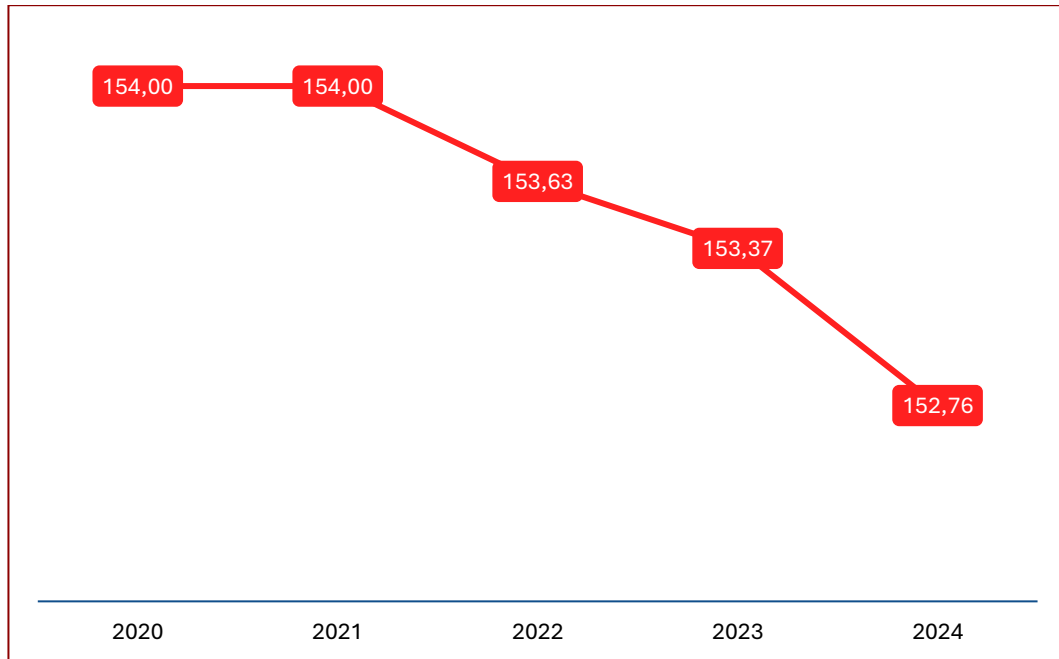
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus memastikan agar setiap warganya memperoleh akses terhadap sanitasi layak. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu membangun infrastruktur sanitasi yang layak pada seluruh wilayah permukiman agar setiap masyarakat dapat merasakan lingkungan hidup yang berkualitas

2.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah kemampuan masyarakat dan ekosistem dalam menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari dampak bencana alam serta perubahan iklim yang semakin sering terjadi. Bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, dan gelombang panas dapat menimbulkan kerusakan besar, baik secara fisik maupun sosial ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas mitigasi dan adaptasi, termasuk sistem peringatan dini dan pendidikan kesiapsiagaan, sangat penting untuk memperkecil risiko dan dampaknya. Selain itu, perubahan iklim menuntut penyesuaian kebijakan dan strategi pembangunan yang mempertimbangkan ketahanan lingkungan dan masyarakat. Pengelolaan lahan yang berkelanjutan, konservasi sumber daya alam, serta diversifikasi mata pencaharian merupakan beberapa langkah untuk meningkatkan daya tahan komunitas terhadap perubahan lingkungan. Resilensi ini mendukung

pencapaian pembangunan berkelanjutan yang tangguh menghadapi berbagai tantangan iklim dan bencana di masa depan.



Gambar 2.9. Indeks Risiko Bencana (Poin)

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Nasional

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Padang Lawas menurun dari 154,00 poin pada tahun 2020 menjadi 153,00 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa adanya peningkatan dalam upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Padang Lawas. Namun, penurunan ini tidak terlalu signifikan selama periode tersebut. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebaiknya membangun infrastruktur daerah yang tangguh terhadap bencana serta menyediakan sistem peringatan dini agar masyarakat dapat memitigasi risiko bencana yang dihadapi. Selain itu, masyarakat perlu ditingkatkan kesadaran dan pengetahuannya terkait kebencanaan.

Adapun wilayah rawan bencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12. Wilayah Rawan Bencana yang Pernah Terkena Bencana Alam di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Bencana Yang Pernah Terjadi
1	Sosopan	Kebakaran hutan dan lahan, kebakaran rumah, banjir
2	Ulu Barumun	Kebakaran hutan dan lahan, kebakaran Rumah
3	Barumun Baru	Kebakaran rumah, banjir
4	Barumun	Kebakaran rumah, kebakaran hutan dan lahan, banjir
5	Lubuk Barumun	Kebakaran hutan dan lahan, kebakaran rumah
6	Aek Nabara Barumun	Kebakaran hutan dan lahan, banjir
7	Barumun Tengah	Kebakaran rumah, kebakaran hutan dan lahan
8	Barumun Selatan	Banjir
9	Huristak	Kebakaran rumah, kebakaran hutan dan lahan, orang hanyut, banjir
10	Ulu Sosa	Kebakaran rumah
11	Sihapas Barumun	Kebakaran Rumah
12	Batang Lubu Sutam	Banjir
13	Sosa	Banjir, kebakaran rumah, kebakaran hutan dan lahan
14	Sosa Julu	Banjir, kebakaran hutan dan lahan
15	Sosa Timur	Banjir

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas

2.1.7. Demografi

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari struktur, distribusi, dan dinamika penduduk dalam suatu wilayah. Aspek demografi meliputi jumlah penduduk, struktur usia, jenis kelamin, tingkat kelahiran, kematian, migrasi, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Informasi demografis sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, baik untuk sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun pelayanan publik lainnya. Data penduduk menurut kelompok usia sebagai berikut:

Tabel 2.13. Penduduk Kabupaten Padang Lawas Menurut Kelompok Usia (Jiwa)

Kelompok Usia	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	26.799	26.820	26.934	30.650	32.119
5-9	29.030	29.118	29.284	27.948	27.381
10-14	27.590	27.781	27.907	28.193	28.310
15-19	26.300	26.282	26.397	25.349	25.370
20-24	25.674	25.514	25.415	24.701	24.210
25-29	23.064	23.179	23.346	24.848	25.250
30-34	21.801	22.028	22.311	22.578	22.890
35-39	17.541	17.782	18.083	20.191	21.068
40-44	15.646	15.916	16.218	16.637	17.100
45-49	13.358	13.684	14.058	14.739	15.200
50-54	10.819	11.121	11.461	12.075	12.539
55-59	8.576	8.875	9.204	9.829	10.229
60-64	6.258	6.524	6.814	7.519	7.990
65-69	4.308	4.566	4.824	5.162	5.480
70-74	2.533	2.777	3.050	3.026	3.270
75+	1.714	1.832	1.969	2.203	2.358
Total	261.011	263.799	267.275	275.648	280.764
Pertumbuhan Penduduk (%)	-7,19	1,04	1,35	3,13	1,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 261.011 jiwa pada tahun 2020 menjadi 280.76 jiwa pada tahun 2024 atau bertambah sebanyak 19.753 jiwa dalam 5 tahun. Pada tahun 2024, penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 181.846 jiwa, sementara penduduk usia tidak produktif sebanyak 98.918 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk meningkat dari -7,19 persen pada tahun 2020 menjadi 1,86 persen pada tahun 2024. Dengan mengacu pada karakteristik demografi yang disajikan, pemerintah daerah harus bisa memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat pada setiap kelompok usia terpenuhi. Data penduduk menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14. Penduduk Kabupaten Padang Lawas Menurut Kecamatan (Jiwa)

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Distribusi (%)
Sosopan	10.389	10.463	10.570	10.877	11.047	3,93
Ulu Barumun	16.700	16.903	17.161	17.749	18.115	6,45
Barumun	53.200	41.490	42.180	43.681	44.640	15,90
Barumun Selatan	7.954	8.039	8.150	8.417	8.578	3,06
Barumun Baru	...	12.434	12.642	13.095	13.385	4,77
Lubuk Barumun	20.024	20.341	20.726	21.513	22.036	7,85
Sosa	38.858	19.838	20.257	21.072	21.631	7,70
Ulu Sosa	...	9.130	9.213	9.470	9.607	3,42
Sosa Juli	...	10.470	10.681	11.100	11.384	4,05
Batang Lubu Sutam	12.383	8.129	8.170	8.364	8.451	3,01
Hutaraja Tinggi	43.605	39.476	39.823	40.923	41.501	14,78
Sosa Timur	...	8.640	8.684	8.796	8.856	3,15
Huristak	18.652	18.690	18.784	19.027	19.156	6,82
Barumun Tengah	20.454	16.364	16.471	16.888	17.089	6,09
Aek Nabara Barumun	13.107	13.300	13.537	14.035	14.361	5,11
Sihapas Barumun	5.685	5.778	5.890	6.117	6.269	2,23
Barumun Barat	...	4.234	4.336	4.524	4.658	1,66
Padang Lawas	261.011	263.719	267.275	275.648	280.764	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 penduduk Kabupaten Padang Lawas terbanyak berada pada Kecamatan Barumun sebanyak 44.640 jiwa atau sebesar 15,90 persen total penduduk dan Kecamatan Hutaraja Tinggi sebanyak 41.501 jiwa atau sebesar 14,78 persen dari total penduduk, sementara penduduk yang paling sedikit berada pada Kecamatan Barumun Barat sebanyak 4.658 jiwa atau sebesar 1,66 persen. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan. Pemerintah perlu memetakan kebutuhan pelayanan dasar sesuai dengan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan. Kepadatan Penduduk pada Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut:

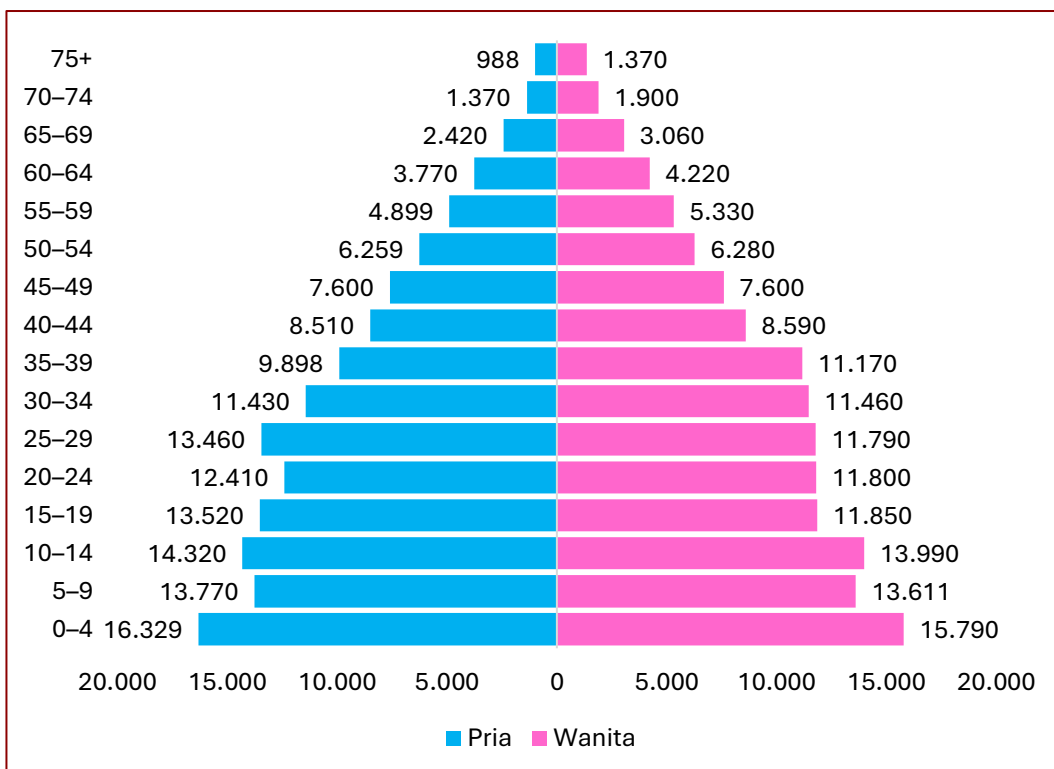
Tabel 2.15. Kepadatan Penduduk Kabupaten Padang Lawas Menurut Kecamatan (Jiwa/Km²)

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Sosopan	23,87	24,04	24,29	24,99	25,38
Ulu Barumun	80,51	81,49	82,73	85,57	87,33
Barumun	421,89	329,02	334,50	346,40	354,00
Barumun Selatan	72,39	73,17	74,18	76,61	78,07
Barumun Baru	-	905,61	920,76	953,75	974,87
Lubuk Barumun	69,15	70,24	71,57	74,29	76,10
Sosa	137,06	69,97	71,45	74,32	76,29
Ulu Sosa	-	43,13	43,53	44,74	45,39
Sosa Juli	-	67,14	68,49	71,18	73,00
Batang Lubu Sutam	67,03	44,00	44,22	45,27	45,74
Hutaraja Tinggi	65,75	59,52	60,04	61,70	62,57
Sosa Timur	-	54,15	54,43	55,13	55,51
Huristak	35,62	35,70	35,88	36,34	36,59
Barumun Tengah	171,31	137,05	137,95	141,44	143,12
Aek Nabara Barumun	39,80	40,38	41,10	42,61	43,60
Sihapas Barumun	117,82	119,75	122,07	126,78	129,93
Barumun Barat	-	83,00	85,00	88,69	91,32
Padang Lawas	66,72	67,41	68,32	70,46	71,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Kepadatan penduduk Kabupaten Padang Lawas terus meningkat dari 66,72 jiwa/km² pada tahun 2020 menjadi 71,77 jiwa/km² pada tahun 2024. Penduduk paling padat berasal dari Kecamatan Barumun Baru yang mencapai 974,89 jiwa/km² dan Kecamatan Barumun sebanyak 354 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk, terutama pada beberapa kecamatan tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Pemerintah harus memastikan ketersediaan ruang yang cukup untuk tempat tinggal pada wilayah yang padat penduduk.

Distribusi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar piramida penduduk berikut:



Gambar 2.10. Piramida Penduduk Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah, 2025)

Piramida penduduk Kabupaten Padang Lawas berbentuk ekspansif, di mana hal ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk usia muda lebih besar dibandingkan penduduk lansia. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta lapangan pekerjaan untuk kelompok usia muda.

A. Proyeksi Penduduk

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas meemproyeksikan jumlah penduduk pada periode pembangunan jangka menengah, di mana hal ini dilakukan untuk memastikan pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas tahun 2025-2030 dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 2.16. Proyeksi Penduduk Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2030

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	291,13	296,51	301,85	307,13	312,36	317,51
Pria (Ribuan Jiwa)	146,05	148,63	151,19	153,71	156,21	158,66
Wanita (Ribuan Jiwa)	145,08	147,88	150,66	153,42	156,15	158,85
Sex Ratio (Per 100 Wanita)	100,67	100,51	100,35	100,19	100,04	99,88
0-14	88,64	89,16	89,69	90,22	90,75	91,27
15-64	185,18	188,1	191,07	194,08	197,14	200,23
65+	17,31	19,25	21,09	22,83	24,47	26,01
Dependency Ratio (Per 100 orang)	54,28	57,64	57,98	58,25	58,44	53,79

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah, 2025)

Jumlah penduduk di Kabupaten Padang Lawas diproyeksikan meningkat dari 291,13 ribu jiwa pada tahun 2025 mencapai 317,51 ribu jiwa pada tahun 2030. Sementara itu, *sex ratio* diproyeksikan menurun dari 100,67 per 100 wanita pada tahun 2025 menjadi 99,88 per 100 wanita pada tahun 2030. Hal ini menandakan bahwa akan semakin banyak penduduk wanita dibandingkan penduduk laki-laki hingga tahun 2030. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus memastikan agar pembangunan yang dilaksanakan berwawasan gender. Selanjutnya, *dependency ratio* diproyeksikan menurun dari 54,28 per 100 orang pada tahun 2025 menjadi 53,79 per 100 orang pada tahun 2030. Hal ini menandakan bahwa hingga tahun 2030 semakin banyak penduduk usia produktif di Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu memanfaatkan potensi ketersediaan penduduk usia produktif ini untuk mendorong pembangunan daerah, seperti peningkatan lapangan kerja untuk masyarakat dan peningkatan pendidikan dan pelatihan untuk angkatan kerja.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat mencakup berbagai dimensi yang berkaitan dengan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu daerah. Fokusnya adalah memastikan masyarakat memiliki akses yang

cukup terhadap kebutuhan dasar, daya beli yang memadai, pelayanan sosial, dan kesempatan untuk berkembang secara sosial dan ekonomi.

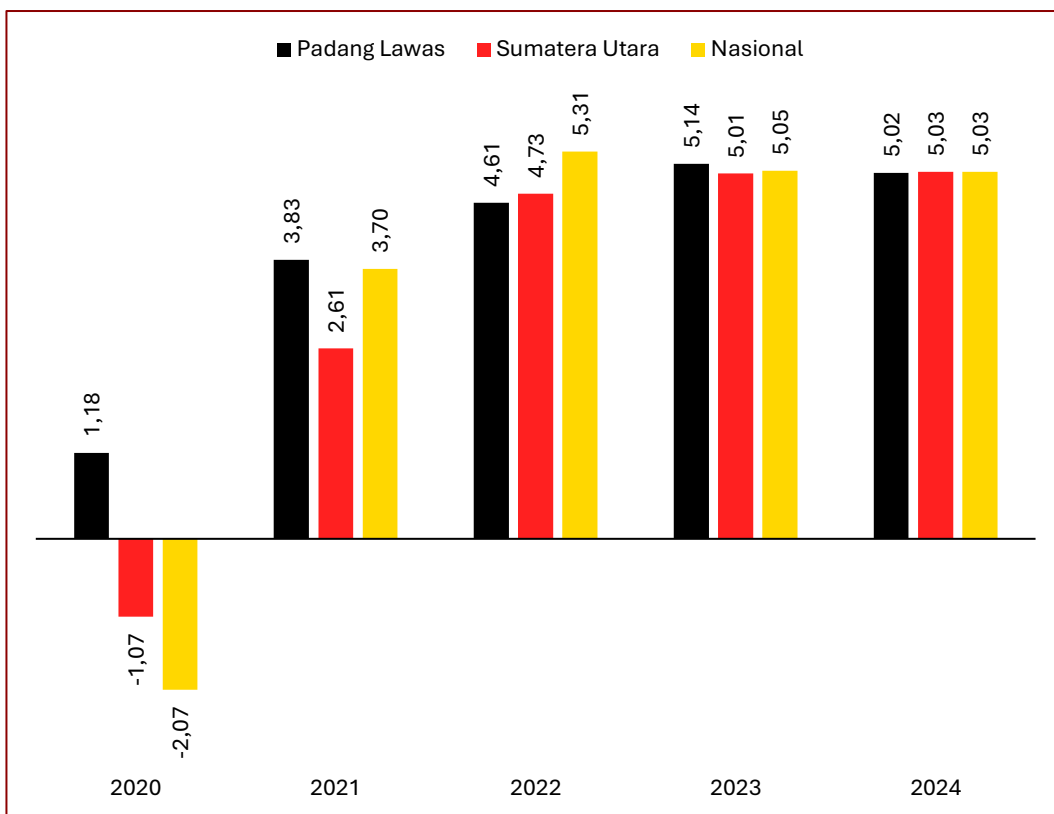
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan Ekonomi merupakan kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, termasuk akses terhadap pekerjaan, pendapatan, dan kesempatan ekonomi yang adil.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian wilayah secara makro dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode waktu tertentu. Indikator pertumbuhan PDRB menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK).

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menjadikan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat atau bertambah dan berimbas pada meningkatnya kemakmuran masyarakat, dimana meningkatnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.11. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas terus mengalami fluktuasi yang signifikan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas pasca pandemi terus mengalami kenaikan, angka tertinggi terjadi pada 2023 sebesar 5,14 persen, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 5,02 persen. Hal serupa terjadi pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, dimana pertumbuhan ekonomi yang terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -1,07 persen meningkat hingga tahun 2024 mencapai 5,03 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional meningkat hingga tahun 2023 mencapai 5,05 persen, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 5,03 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara, serta nasional hampir setara.

Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:

Tabel 2.17. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Padang Lawas (%)

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,45	5,39	5,12	5,26	4,94
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,59	3,78	8,28	3,91	3,06
C	Industri Pengolahan	1,05	2,47	3,74	3,41	4,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,82	3,67	4,34	5,65	8,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	3,02	-3,20	7,91
F	Konstruksi	-5,18	1,77	4,12	6,55	4,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,35	2,86	4,35	4,76	6,41
H	Transportasi dan Pergudangan	-8,53	3,33	5,04	9,44	5,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,70	1,10	4,11	8,53	7,37
J	Informasi dan Komunikasi	9,19	5,70	5,35	7,63	6,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,75	5,98	5,03	5,41	5,72
L	Real Estate	3,71	0,12	3,30	5,26	6,38
M,N	Jasa Perusahaan	-1,55	-1,03	2,50	7,78	5,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,51	-0,18	3,02	1,05	4,93
P	Jasa Pendidikan	2,10	3,13	3,10	6,39	6,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,96	-1,52	5,50	6,27	7,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	-0,62	5,83	4,30	6,60	7,55
Laju Pertumbuhan		1,18	3,83	4,61	5,14	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal dari Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,55 persen, kemudian Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,91 persen, dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,83 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi yang terendah berasal Sektor

Pertambangan dan Penggalian bertumbuh sebesar 3,06 persen, kemudian Sektor Konstruksi sebesar 4,30 persen, dan Sektor Industri Pengolahan sebesar 4,73 persen.

Kontribusi setiap lapangan usaha terhadap perekonomian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18. Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)						
Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	47,62	49,49	50,31	51,41	53,01
B	Pertambangan dan Penggalian	0,51	0,49	0,49	0,48	0,44
C	Industri Pengolahan	17,51	17,48	17,32	16,52	16,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,19	0,18	0,18	0,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	15,96	15,08	15,03	15,11	14,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,04	6,77	6,51	6,34	6,22
H	Transportasi dan Pergudangan	1,16	1,13	1,13	1,25	1,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,03	0,96	0,91	0,92	0,90
J	Informasi dan Komunikasi	0,62	0,61	0,59	0,58	0,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,78	0,79	0,77	0,74	0,70
L	Real Estate	3,73	3,50	3,45	3,33	3,18
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,86	2,61	2,43	2,29	2,24
P	Jasa Pendidikan	0,38	0,36	0,34	0,33	0,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,49	0,45	0,45	0,46	0,44
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Kontribusi PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

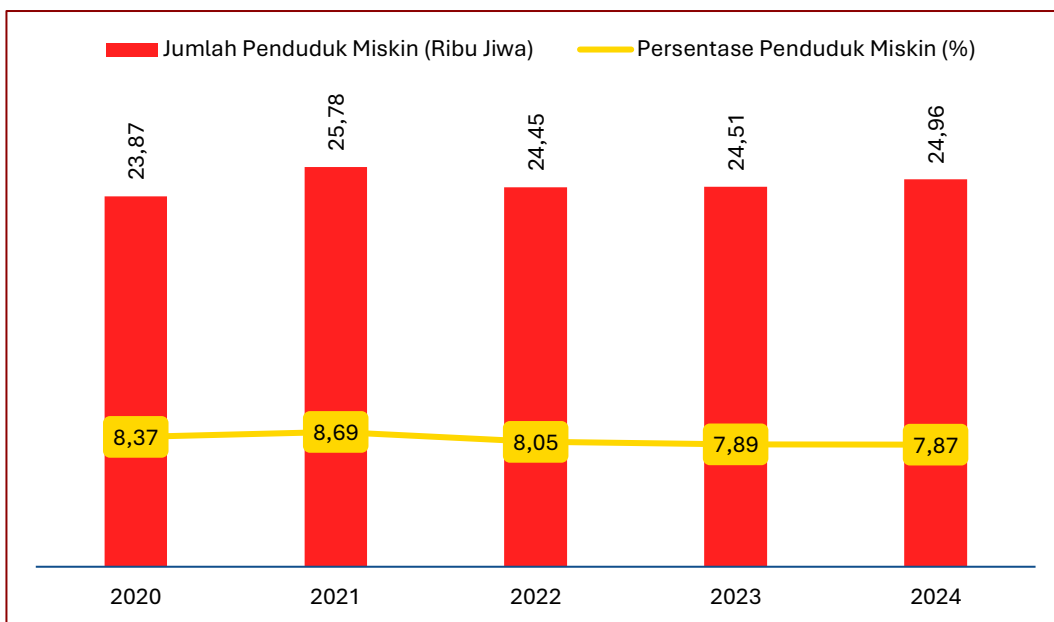
Kontribusi PDRB terbesar berasal dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selama 5 tahun terakhir, di mana kontribusinya terus bertumbuh dari 47,62 persen pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mencapai

53,01 persen, kemudian Sektor Industri Pengolahan yang mengalami penurunan dari 17,51 persen pada tahun 2020 menjadi 16,32 persen pada tahun 2024, dan Sektor Konstruksi yang menurun dari 15,96 persen pada tahun 2020 menjadi 14,17 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian daerah masih didominasi oleh Sektor Primer. Untuk mempercepat perkembangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu mendorong hilirisasi agar produk-produk yang dihasilkan bukan produk mentah saja, namun juga menghasilkan nilai tambah sehingga lebih bernilai ekonomis.

B. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi standar hidup dan kebutuhan dasar tertentu, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan yang diukur secara ekonomi dalam bentuk pendapatan dan pengeluaran. Kemiskinan berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga indikator ini selalu menjadi fokus pada intervensi pembangunan. Pengukuran jumlah penduduk miskin dilakukan dengan menggunakan garis kemiskinan, yaitu nilai minimal pengeluaran per kapita per bulan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami penurunan sebagaimana digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 2.12. Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin

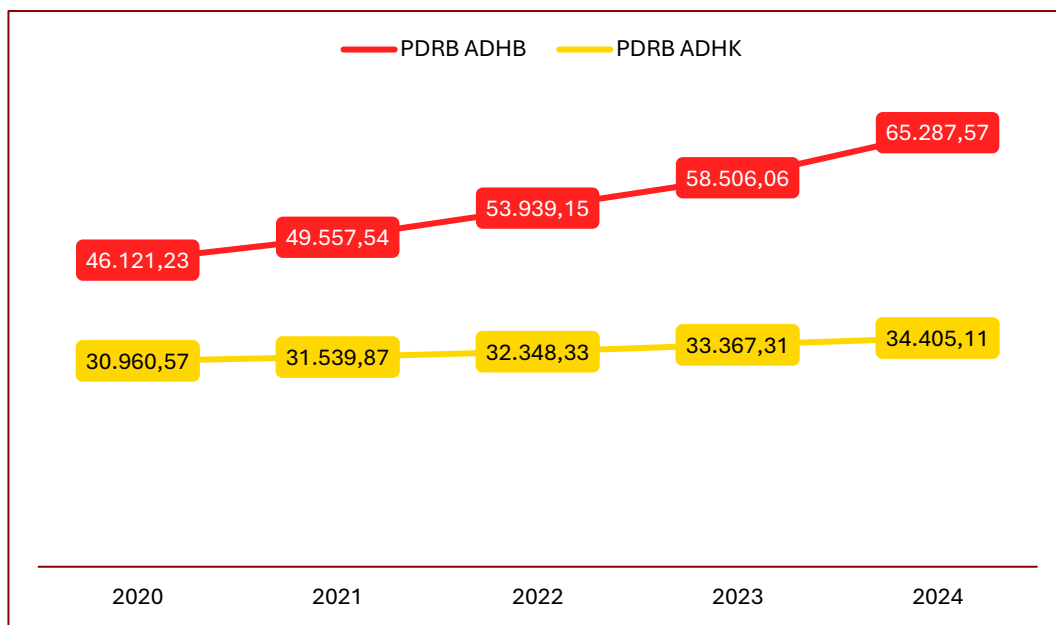
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Lawas mengalami penurunan dari 8,37 persen pada tahun 2020 menjadi 7,87 persen pada tahun 2024, sementara itu jika kita lihat dari jumlah penduduk miskin relatif sama dari 23,87 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 24,96 ribu jiwa pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa ada peningkatan jumlah penduduk miskin.

Di masa mendatang, penurunan kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas perlu dioptimalkan guna meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tabel berikut menyajikan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dan nasional selama lima tahun terakhir

C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut dalam periode waktu tertentu. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 2.13. PDRB ADHB dan PDRB ADHK Per Kapita Kabupaten Padang Lawas (Rp Ribu)

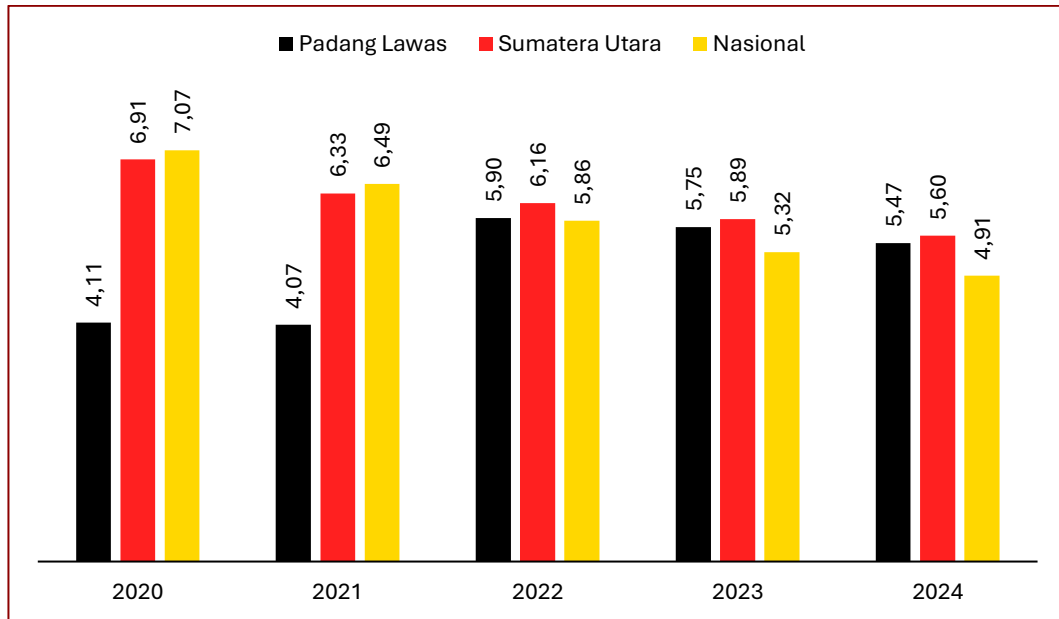
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan data dari BPS, PDRB ADHB meningkat dari Rp 46.121,23 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp 65.287,57 ribu pada tahun 2024, sementara PDRB ADHK mengalami peningkatan dari Rp 30.960,57 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp 34.405,11 ribu pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pendapatan penduduk mengalami peningkatan selama periode terkait. Namun, perlu diperhatikan bahwa PDRB Per Kapita juga termasuk penduduk usia tidak produktif sehingga perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Dalam meningkatkan capaian ini, maka perlu meningkatkan produksi pada setiap sektor lapangan usaha, terutama sektor unggulan yang berkontribusi besar bagi perekonomian Kabupaten Padang Lawas.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka menggambarkan kondisi pengangguran pada suatu daerah yang diukur dari jumlah penduduk menganggur dari seluruh angkatan kerja yang tersedia pada satu waktu tertentu. Tingkat pengangguran yang semakin tinggi dapat berdampak bagi penurunan produktivitas pada suatu daerah. Selain itu, pengangguran yang tinggi juga dapat berdampak bagi perekonomian daerah secara keseluruhan karena

lemahnya daya beli masyarakat akibat kurangnya pendapatan. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada gambar berikut:



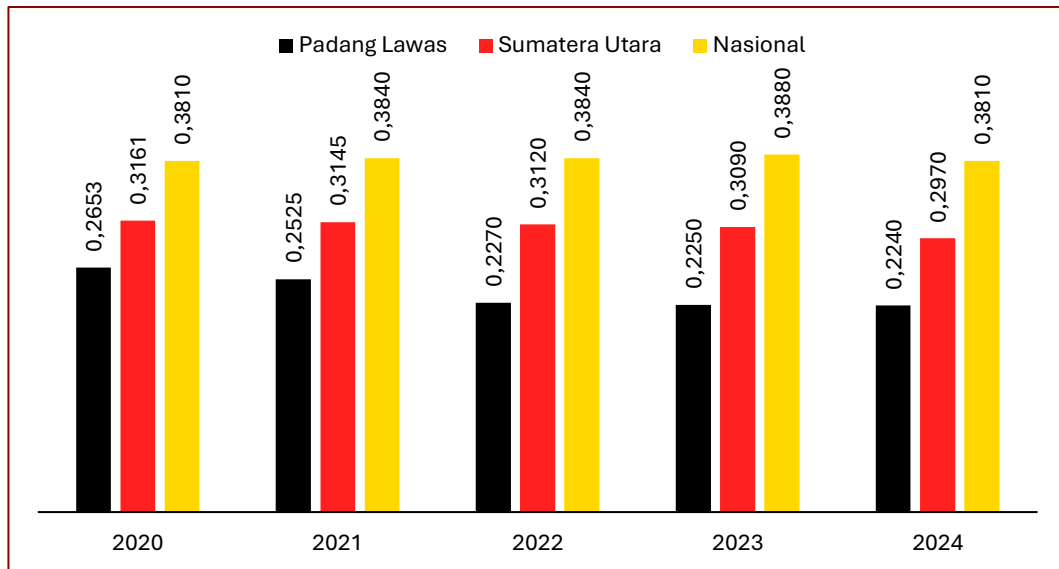
Gambar 2.14. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Agustus) (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 4,11 persen pada tahun 2020 menjadi 5,90 persen pada tahun 2022, namun menurun hingga tahun 2024 mencapai 5,47 persen. Apabila dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Lawas masih lebih rendah. Namun peningkatan yang cukup pesat hingga di atas 5 persen sejak tahun 2022 mengindikasikan bahwa semakin rendahnya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah daerah harus mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh angkatan kerja, serta memastikan ketersediaan lapangan kerja di daerahnya.

E. Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang paling umum digunakan untuk menganalisis tingkat kesenjangan di suatu daerah adalah Gini Ratio, nilainya berkisar antara 0 sampai 1.



Gambar 2.15. Gini Ratio Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Maret) (%)

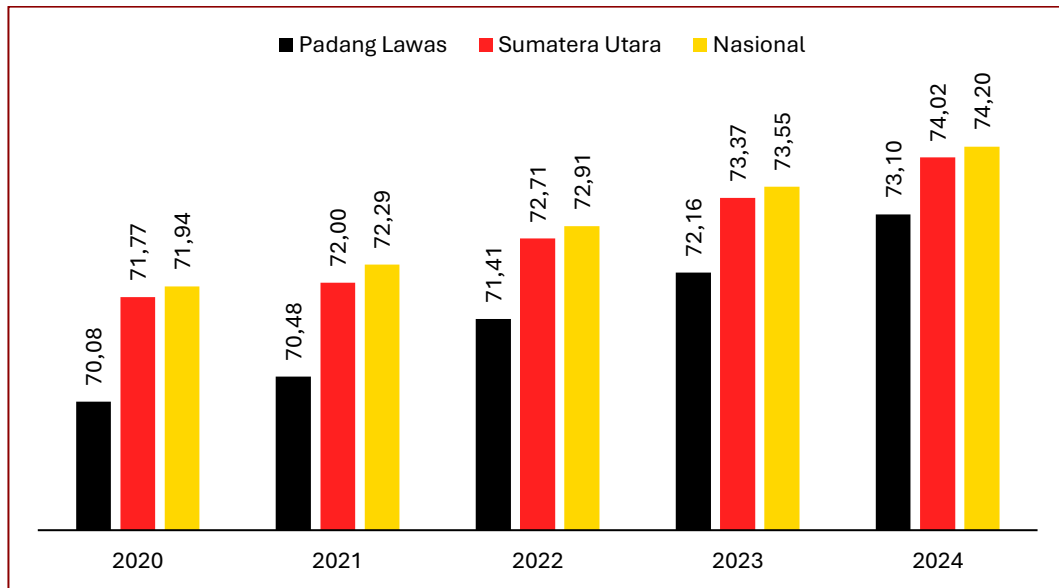
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gini Ratio Kabupaten Padang Lawas terus mengalami penurunan dari 0,2653 poin pada tahun 2020 menjadi 0,2240 poin pada tahun 2024. Indeks gini Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2024 termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dengan nilai indeks gini $< 0,3$. Ketimpangan pendapatan Kabupaten Padang Lawas juga lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas diimbangi dengan terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Meskipun demikian, perlu dicermati apakah semakin banyaknya masyarakat yang miskin sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin rendah.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan suatu wilayah dari sisi manusia. Nilai IPM berkisar dari 0 sampai 1 dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang lebih baik yang berarti masyarakat memiliki kesehatan yang baik, akses pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. IPM digunakan sebagai alat untuk memetakan kemajuan pembangunan suatu daerah dan membuat kebijakan yang bertujuan

meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

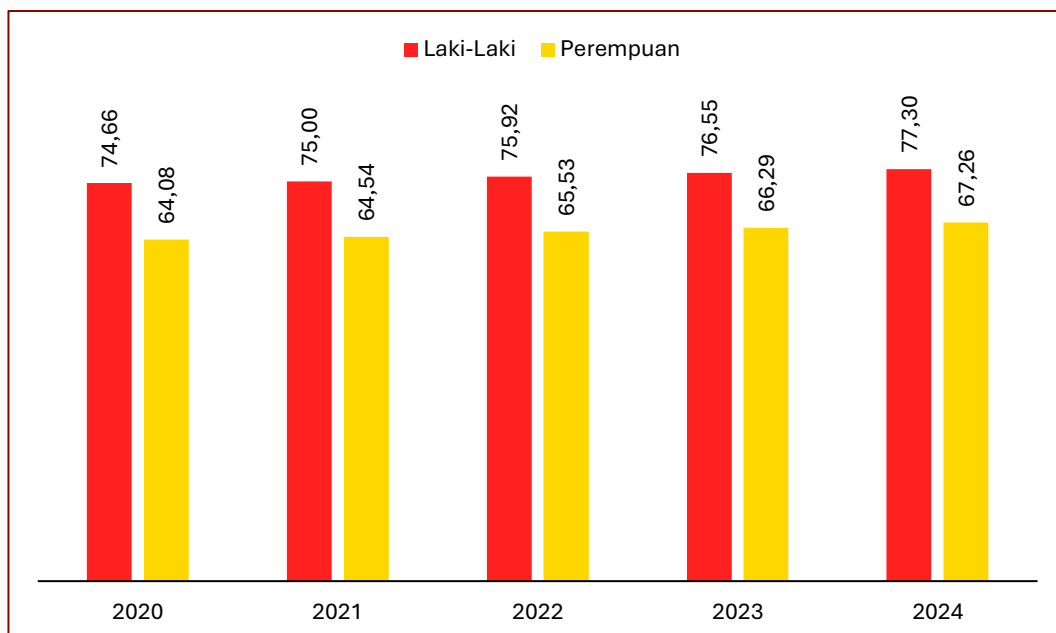


Gambar 2.16. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Poin)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 70,08 poin pada tahun 2020 menjadi 73,10 poin pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan bahwa semakin baiknya pembangunan manusia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Meskipun demikian, capaian IPM Kabupaten Padang Lawas masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terus berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat sehingga diharapkan akan mempercepat peningkatan pembangunan manusia secara inklusif.

Perkembangan Indeks Pembangunan Laki-Laki dan Perempuan sebagai berikut:



Gambar 2.17. Indeks Pembangunan Manusia Penduduk Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Padang Lawas

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data dari BPS, dapat dilihat bahwa IPM penduduk laki-laki meningkat dari 74,66 poin pada tahun 2020 menjadi 77,30 poin pada tahun 2024, sementara IPM penduduk perempuan cenderung berfluktuasi dari 64,08 poin pada tahun 2020 menjadi 67,26 poin pada tahun 2024. IPM penduduk laki-laki selalu lebih besar dibandingkan IPM penduduk perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Kabupaten Padang Lawas masih lebih banyak dirasakan oleh penduduk laki-laki dibandingkan perempuan.

2.2.2. Kesehatan untuk Semua

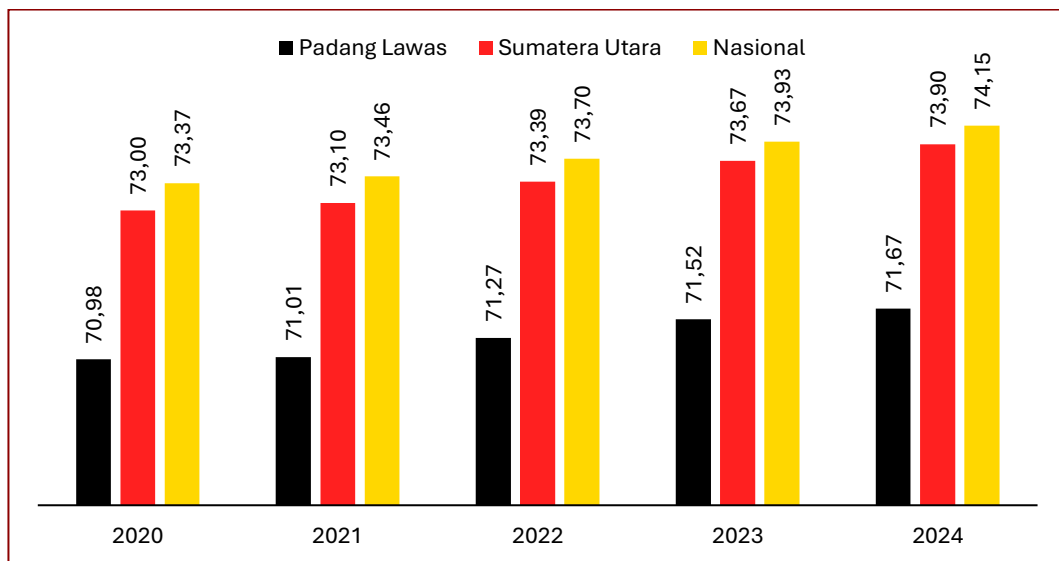
Kesehatan untuk semua merupakan prinsip fundamental yang menekankan pentingnya akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini berarti bahwa kesehatan bukan hanya hak individu, tetapi tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan, mulai dari pencegahan, pengobatan, hingga rehabilitasi. Penerapan kebijakan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan diharapkan kesenjangan dalam akses layanan kesehatan dapat diminimalisir sehingga

kualitas hidup masyarakat secara umum meningkat dan tujuan pembangunan kesehatan nasional dapat tercapai.

Pemenuhan kesehatan untuk semua juga mencakup upaya pencegahan berbagai penyakit dan penanganan masalah kesehatan secara holistik dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Pemerintah bersama pemangku kepentingan perlu mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan infrastruktur kesehatan, serta memberdayakan masyarakat agar lebih aktif dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungannya.

A. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup adalah perkiraan jumlah rata-rata tahun yang akan dijalani seseorang sejak lahir, dengan asumsi kondisi kesehatan dan lingkungan tetap stabil. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas sistem kesehatan suatu negara. Semakin tinggi usia harapan hidup, semakin baik pula gambaran kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Perkembangan usia harapan hidup Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:



Gambar 2.18. Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Tahun)

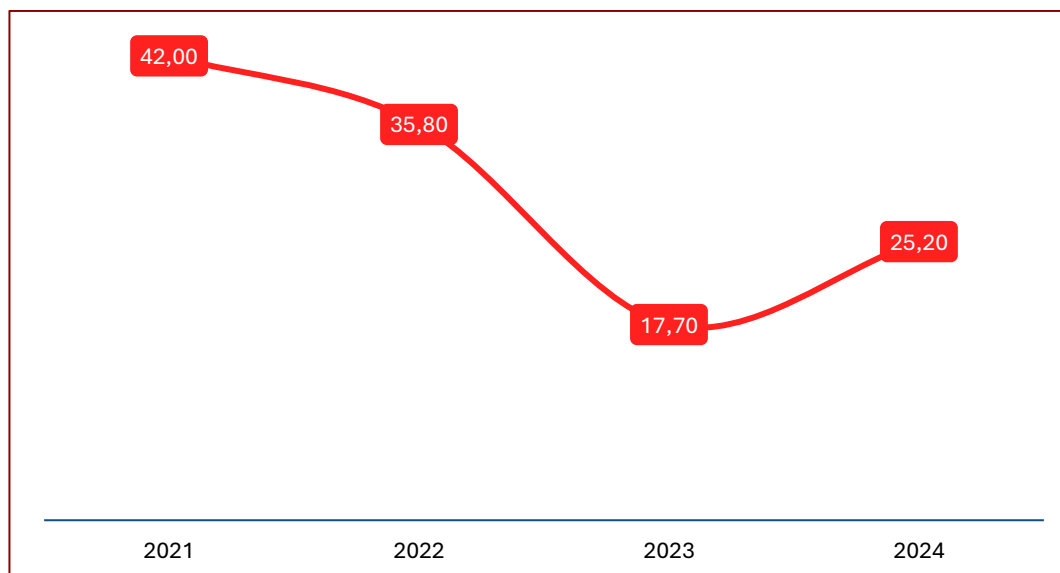
Sumber: Badan Pusat Statistik

Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 70,98

tahun pada tahun 2020 menjadi 71,67 tahun pada tahun 2024. Capaian ini lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan nasional. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin baiknya akses kesehatan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas, namun masih perlu ditingkatkan agar mengimbangi capaian Provinsi Sumatera Utara dan nasional. Pemerintah perlu memperhatikan beberapa wilayah yang mungkin belum memperoleh akses kesehatan, melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan pemerataan dokter dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah.

B. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting adalah persentase anak-anak usia di bawah lima tahun yang mengalami kondisi tubuh lebih pendek dari standar pertumbuhan normal akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu lama. Stunting tidak hanya menunjukkan masalah pertumbuhan fisik, tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif dan kesehatan jangka panjang anak. Tingginya angka prevalensi stunting menjadi salah satu indikator penting dalam menilai status gizi dan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di negara berkembang.



Gambar 2.19. Prevalensi Stunting (%)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas

Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Lawas menurun dari 42,00 persen pada tahun 2021 menjadi 17,70 persen pada tahun 2023, Hal ini

menunjukkan bahwa semakin baiknya hasil dari program peningkatan gizi dan kesehatan anak. Meskipun demikian, pada tahun 2024 Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Lawas 25,20 persen mengalami kenaikan di karenakan hasil survei ini tidak selesai karena kendala intern dari Tim Survei Padang Lawas, di mana Pelaksanaan Survei hanya sampai di tahap 3, yaitu Pengumpulan Data.

SMALL AREA ESTIMATION (SAE) di Kabupaten/kota yang tidak selesai Survei termasuk Kabupaten Padang Lawas dilakukan SAE karena:

1. Tidak dapat dilakukan Pengumpulan data (alasan Keamanan).
2. Jumlah sampel tidak terpenuhi karena *Response Rate* (RR) Blok Sensus dan/atau RR Rumah Tangga <70%
3. RSE (*Relative Standar Error*) Tinggi (>25%).

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas ke depannya harus konsisten dan lebih inovatif dalam menurunkan prevalensi *stunting*. Pemerintah juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi gizi yang cukup dan seimbang, serta meningkatkan jangkauan masyarakat terhadap makanan yang sehat.

C. Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*. Penyakit TBC terutama menyerang paru-paru dan dapat memengaruhi organ lain dalam tubuh. TBC menyebar melalui udara ketika seseorang yang mengidap TBC paru batuk, bersin, atau berbicara sehingga membahayakan orang di sekitarnya yang menghirup bakteri tersebut. Penyakit ini menjadi fokus perhatian karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.19. Indikator Tuberkulosis

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	29,01	43,78	42,77	60,77	65,94
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	88,59	90,09	91,20	91,35	84,12

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas

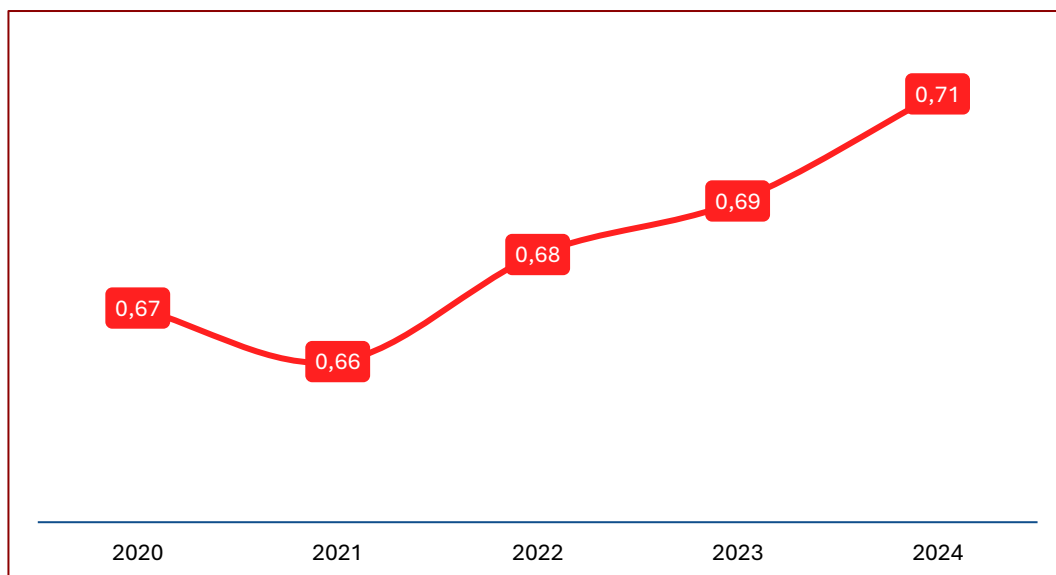
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berupaya untuk mencegah penyebaran penyakit TBC melalui peningkatan kesadaran masyarakat terkait gejala TBC, peningkatan imunisasi TBC untuk mencegah keterpaparan masyarakat dan penularan dari TBC, serta metode pengobatan dan teknologi kesehatan dalam menangani atau mengobati penyakit TBC.

2.2.3. Pendidikan yang Berkualitas dan Merata

Pendidikan yang berkualitas dan merata merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan mampu bersaing di era globalisasi. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter serta nilai-nilai moral yang kuat. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, menyediakan fasilitas yang memadai, tenaga pendidik yang profesional, serta kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pemerataan pendidikan memastikan setiap orang, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, memiliki akses yang sama terhadap pembelajaran berkualitas. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membuka peluang yang adil bagi semua anak bangsa. Pemerintah harus meningkatkan infrastruktur pendidikan, memberikan pelatihan bagi guru, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan pendidikan yang berkualitas dan merata, diharapkan tercipta masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi.

A. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah indeks yang digunakan untuk mengukur pembangunan pendidikan yang mengukur akses siswa terhadap pendidikan, kualitas tenaga pendidik, dan sarana-prasarana sekolah di suatu daerah.



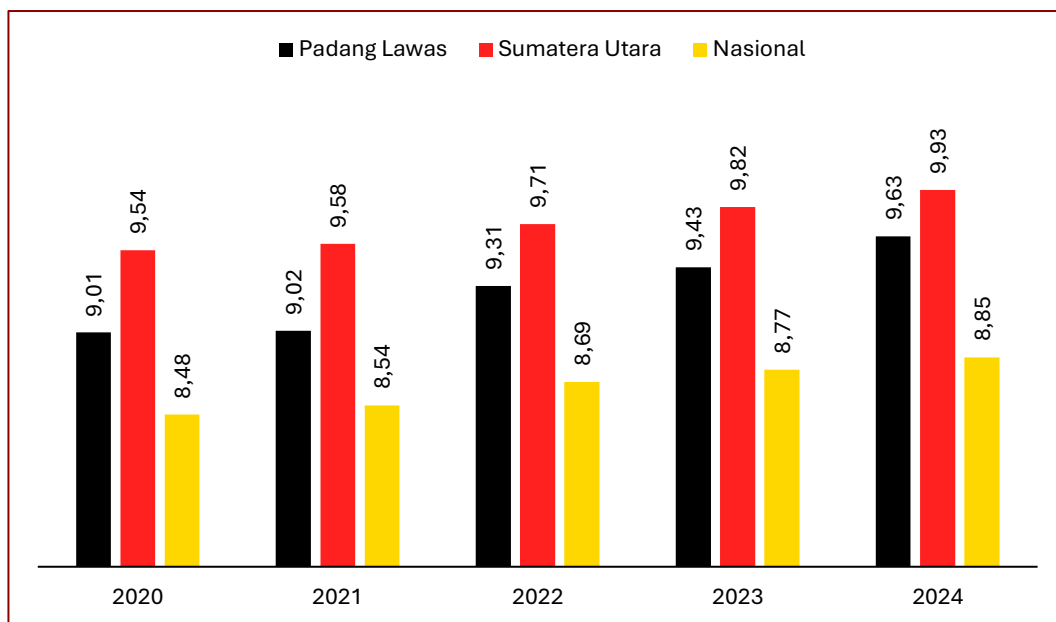
Gambar 2.20. Indeks Pendidikan (Poin)

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas

Indeks Pendidikan meningkat dari 0,67 poin pada tahun 2020 menjadi 0,71 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa terjadi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2024. Hal ini dapat disebabkan oleh semakin baiknya akses pendidikan oleh masyarakat, meratanya distribusi guru, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, meningkatkan kualitas dan distribusi guru secara merata, serta meningkatkan fasilitas sekolah.

B. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia tertentu, biasanya usia 15 tahun ke atas. Angka ini mencerminkan pencapaian pendidikan secara aktual dalam suatu populasi. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka tingkat pendidikan masyarakat cenderung lebih baik, yang berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional.

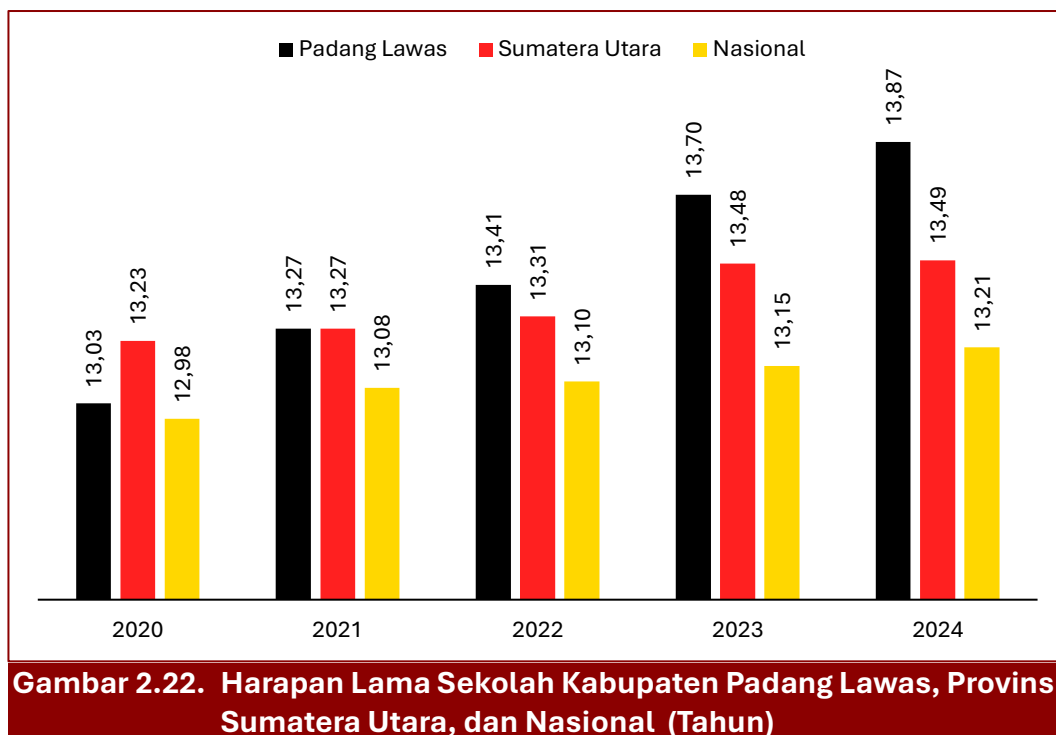


Gambar 2.21. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Tahun)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Lawas meningkat dari 9,01 tahun pada tahun 2020 mencapai 9,63 tahun pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya lama pendidikan yang ditempuh masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Meskipun demikian, hal ini menandakan bahwa pendidikan tertinggi yang ditempuh masyarakat Kabupaten Padang Lawas hanya sampai pada jenjang pendidikan SMP kelas 3. Capaian ini juga masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara, namun lebih tinggi dibandingkan nasional.

Sementara itu, harapan lama sekolah adalah perkiraan jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak ketika memulai pendidikan dasar, dengan asumsi tingkat partisipasi dan kelulusan saat ini tetap konstan. Harapan lama sekolah menggambarkan potensi pencapaian pendidikan di masa depan dan menjadi salah satu indikator penting dalam perencanaan kebijakan pendidikan. Dengan meningkatnya harapan lama sekolah, diharapkan generasi mendatang akan mendapatkan pendidikan yang lebih panjang dan berkualitas, mendukung kemajuan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 13,03 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,87 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini juga berhasil melampaui Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2022 dan terus berlanjut hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan masyarakat Kabupaten Padang Lawas untuk menempuh pendidikan semakin tinggi hingga jenjang pendidikan Diploma I.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan sekolah, dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga masyarakat secara inklusif dapat memperoleh hak yang sama dalam menempuh pendidikan.

C. Literasi dan Numerasi

Literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami informasi tertulis, yang memungkinkan individu untuk mengakses pengetahuan, berkomunikasi dengan efektif, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan profesional. Sementara itu, numerasi

adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan angka serta konsep matematika dasar guna menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.20. Literasi dan Numerasi

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kemampuan Literasi SD (Poin)	43,84	45,19	46,54	55,47	56,82
Kemampuan Literasi SMP (Poin)	25,54	28,75	31,96	46,14	49,35
Kemampuan Numerasi SD (Poin)	21,03	26,91	32,79	47,54	53,42
Kemampuan Numerasi SMP (Poin)	13,10	19,14	25,18	31,22	49,60

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas

Literasi dan Numerasi pada SD dan SMP mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data literasi dan numerasi SD serta SMP dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan dengan kenaikan paling signifikan terjadi antara 2022-2023 dan berlanjut hingga 2024, terutama pada Numerasi SMP yang meningkat dari 31,22 poin menjadi 49,60 poin. Literasi SD secara konsisten memiliki poin tertinggi sebesar 56,82 poin pada tahun 2024, diikuti Numerasi SD sebesar 53,42 poin, sementara Literasi dan Numerasi SMP menunjukkan laju kenaikan lebih cepat. Lonjakan ini mengindikasikan adanya perubahan signifikan dalam sistem pendidikan atau metode pengajaran yang perlu diteliti lebih lanjut untuk mempertahankan tren positif ini.

D. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan literasi telah berkembang di suatu daerah melalui pengembangan perpustakaan sebagai wahana belajar bagi masyarakat. Indeks ini mencerminkan kualitas dan efektivitas sistem pendidikan serta akses masyarakat terhadap sumber belajar. Tingginya indeks literasi menunjukkan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang memadai, yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup.

Tabel 2.21. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
UPLM	Keterangan	2022	2023	2024
UPLM 1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,0010	0,1212	0,0072
UPLM 2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan	0,4493	0,0714	1,0000
UPLM 3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan	0,0000	0,0561	0,0193
UPLM 4	Tingkat Kunjungan Pustaka	0,3151	0,0268	1,0000
UPLM 5	Perpustakaan Ber-SNP	1,5348	1,0000	1,0000
UPLM 6	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan	0,2238	1,0000	1,0000
UPLM 7	Jumlah Pemustaka	0,4216	1,0000	1,0000
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		42,08	46,79	60,24

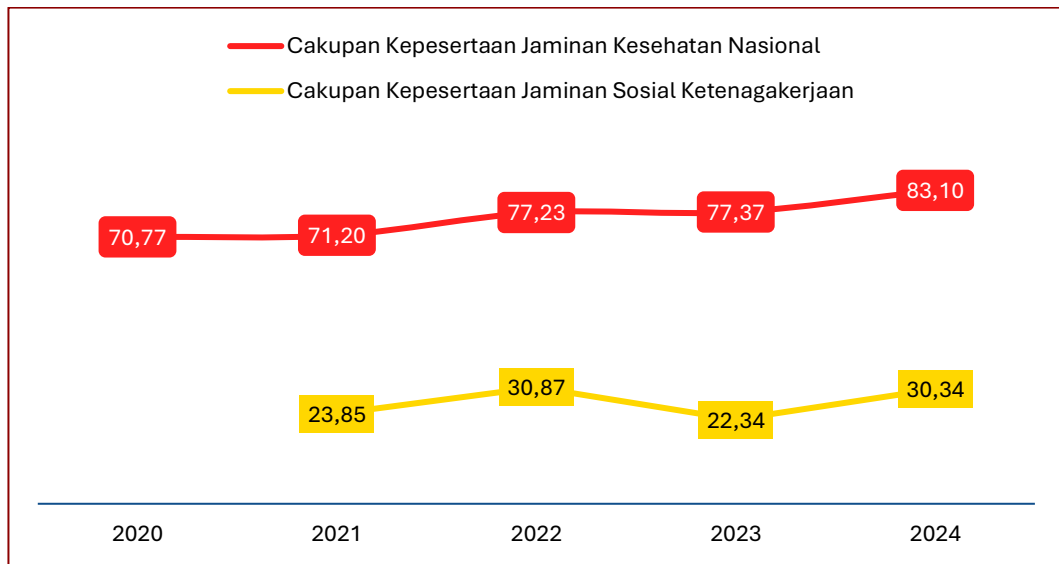
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Padang Lawas

IPLM Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 42,08 poin pada tahun 2022 menjadi 60,24 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber pembelajaran masyarakat semakin membaik dalam meningkatkan literasi masyarakat. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya komponen penyusun indeks tersebut, yaitu UPLM 2 dan UPLM 4. Peningkatan pada indeks ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang menyuarakan atau menghimbau masyarakat lainnya untuk meningkatkan literasinya melalui membaca buku di perpustakaan, serta semakin lengkapnya pemustaka yang tersedia pada masing-masing perpustakaan sesuai dengan standar yang berlaku. Sementara itu, yang menjadi perhatian adalah menurunnya UPLM 1 dan UPLM 3, di mana hal ini menandakan bahwa semakin kurangnya pelayanan pada perpustakaan dan masih kurang meratanya ketersediaan tenaga pemustaka di perpustakaan. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu memastikan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan secara merata pada tiap wilayah dan memastikan pemerataan tenaga pemustaka pada setiap perpustakaan sesuai dengan kebutuhan.

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif adalah sistem perlindungan yang dirancang untuk mampu merespons perubahan kondisi sosial dan ekonomi

secara cepat dan fleksibel. Model perlindungan ini bertujuan memberikan jaminan sosial yang tepat sasaran dan efektif kepada kelompok rentan, khususnya saat menghadapi krisis seperti pandemi, bencana alam, atau perubahan ekonomi yang mendadak. Sistem perlindungan sosial yang adaptif mengintegrasikan berbagai skema, seperti bantuan tunai, jaminan kesehatan, perlindungan ketenagakerjaan, dan program pemberdayaan masyarakat.



Gambar 2.23. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas (%)

Sumber: Dinas Kesehatan & Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Padang Lawas meningkat signifikan dari tahun 2020 sebesar 70,77 menjadi 71,20 persen pada tahun 2021 dan 83,10 persen pada tahun 2024. Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 23,85 persen pada tahun 2021 mengalami penurunan 22,34 Persen pada tahun 2023 dan mengalam Peningkatan menjadi 30,34 persen pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan terjadi Data Fluktuatif di karenakan belum Optimalnya kesadaran Masyarakat terhadap Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Namun, capaian ini juga menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan tersebut. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program terkait melalui edukasi dan sosialisasi sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan akses kesehatan yang setara.

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

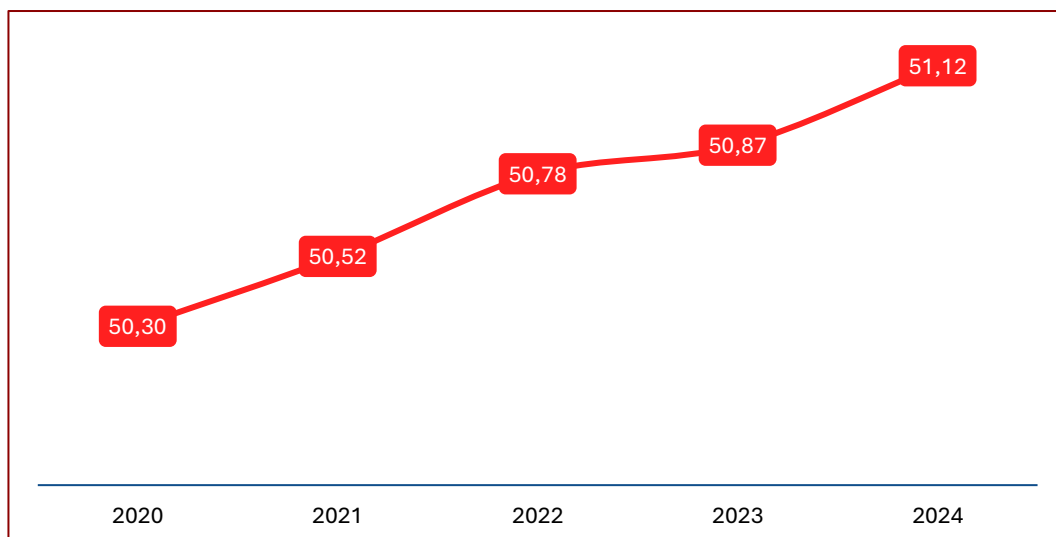
Beragama maslahat dan berkebudayaan maju menekankan pentingnya pemahaman agama yang moderat dan berorientasi pada kebaikan bersama serta perkembangan budaya yang dinamis dan inklusif. Pendekatan beragama yang maslahat mengedepankan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan persatuan sehingga dapat memperkuat harmoni sosial dan memperkuat keberagaman bangsa.

A. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama mengukur tingkat keharmonisan dan toleransi antar umat beragama dalam suatu masyarakat atau negara. Indeks ini menilai seberapa baik berbagai kelompok agama dapat hidup berdampingan secara damai, menghormati perbedaan, dan menjalin kerja sama sosial. Tingginya indeks kerukunan berkontribusi pada stabilitas sosial, mencegah konflik, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan nasional. Pada Kabupaten Padang Lawas tidak pernah terjadi konflik terkait keagamaan.

B. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah alat ukur yang menilai perkembangan dan pelestarian budaya dalam sebuah negara atau komunitas. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti pelestarian warisan budaya, partisipasi masyarakat dalam aktivitas budaya, serta inovasi dan kreativitas dalam seni dan kebudayaan. Pembangunan kebudayaan yang baik menjadi fondasi penting dalam menjaga identitas nasional sekaligus memperkuat daya saing bangsa.



Gambar 2.24. Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas

Indeks Pembangunan Kebudayaan meningkat dari 50,30 poin pada tahun 2020 menjadi 51,12 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kebudayaan daerah berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terus berupaya untuk menanamkan nilai-nilai budaya pada masyarakatnya melalui keluarga, pendidikan melalui muatan lokal, dan pelestarian cagar budaya yang ada, serta penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kebudayaan.

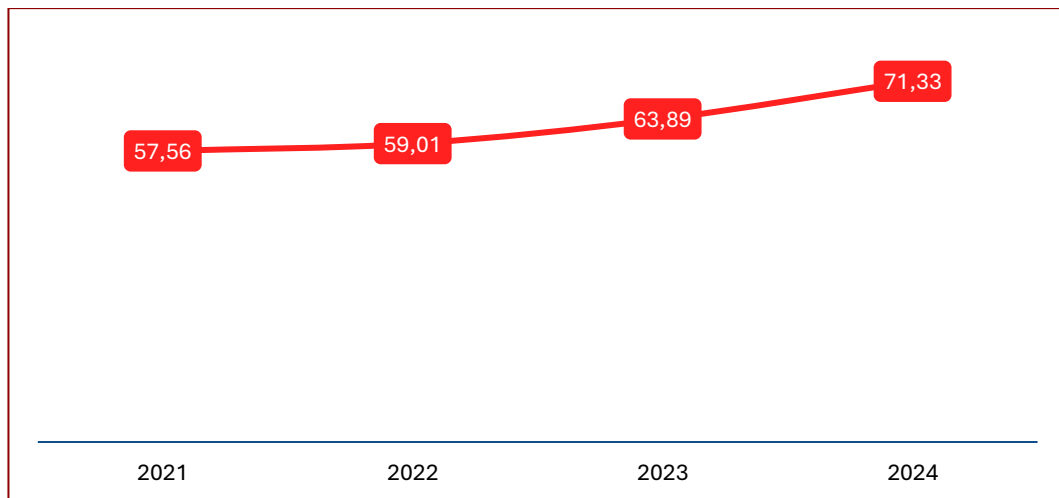
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas merupakan pondasi utama dalam membangun masyarakat yang sehat, harmonis, dan produktif. Kualitas keluarga dipengaruhi oleh aspek psikologis, fisik, serta sosial yang mendukung tumbuh kembang anggota keluarga secara optimal. Keluarga yang berkualitas dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang baik, menanamkan nilai-nilai moral, dan membentuk karakter generasi penerus bangsa. Kesetaraan gender adalah prinsip penting yang menjamin kesempatan, hak, dan peran yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Mewujudkan kesetaraan gender akan meningkatkan partisipasi perempuan, memajukan pembangunan ekonomi, serta memperkuat keadilan sosial. Sementara itu,

masyarakat inklusif berkomitmen untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi seluruh individu tanpa diskriminasi, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal lainnya. Masyarakat seperti ini memastikan akses yang sama terhadap layanan sosial, pendidikan, dan kesempatan ekonomi bagi semua pihak.

A. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak mengukur efektivitas dan cakupan upaya dalam melindungi hak-hak anak serta menjamin kesejahteraan mereka. Indeks ini menilai berbagai aspek seperti akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi, dan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal. Indeks yang tinggi menunjukkan bahwa negara atau komunitas berhasil menciptakan kondisi yang aman dan ramah anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.



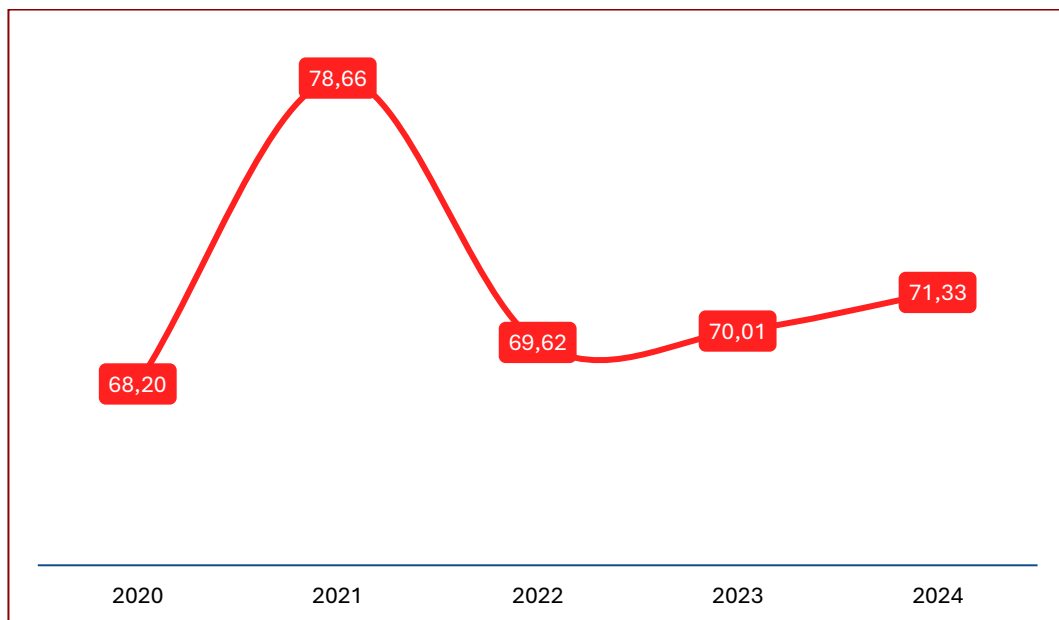
Gambar 2.25. Indeks Perlindungan Anak (Poin)

Sumber: Siperindu.online

Indeks Perlindungan Anak meningkat dari 57,56 poin pada tahun 2021 menjadi 63,89 poin pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya perlindungan terhadap anak di Kabupaten Padang Lawas. Dalam rangka meningkatkan indeks ini, maka Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu menyusun regulasi dan kebijakan yang melindungi hak-hak anak, serta perlindungan terhadap berbagai tindakan negatif, serta menegakkannya secara adil sehingga setiap anak merasa aman dan nyaman.

B. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana perlindungan khusus diberikan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi rentan atau menghadapi situasi khusus, seperti anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, anak jalanan, anak dengan disabilitas, atau anak yang berhadapan dengan hukum.



Gambar 2.26. Indeks Perlindungan Khusus Anak (Poin)

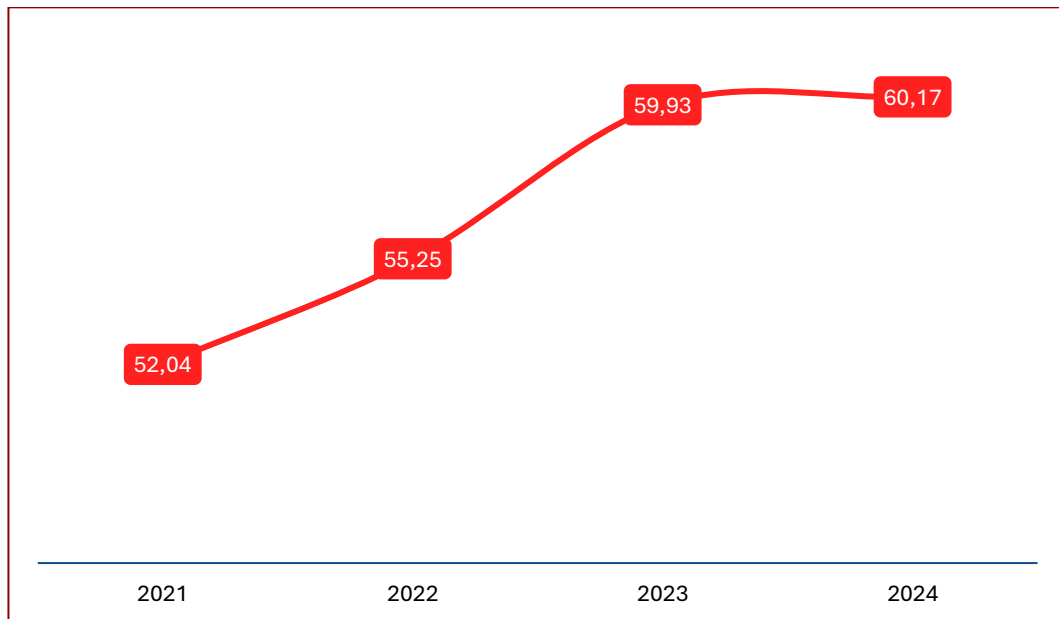
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak meningkat dari 68,20 poin pada tahun 2020 menjadi 78,66 poin pada tahun 2021, namun menurun pada tahun 2022 menjadi 69,62 poin dan berangsur meningkat hingga tahun 2024 menjadi 71,33 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak korban kekerasan, eksploitasi, anak jalanan, atau anak dengan kebutuhan khusus telah membaik. Layanan, kebijakan, dan mekanisme perlindungan khusus semakin efektif dalam memenuhi kebutuhan dan hak anak-anak tersebut. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan capaian tersebut, melalui penambahan fasilitas dan program rehabilitasi fisik, psikososial, dan hukum untuk anak

yang membutuhkan perlindungan khusus, peningkatan pelayanan terhadap anak-anak rentan, serta mengembangkan sistem pelaporan yang aman dan terpercaya.

C. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga adalah ukuran yang menilai kualitas dan kesejahteraan keluarga dalam hal aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Indeks ini mencakup faktor-faktor seperti tingkat pendidikan orang tua, kondisi kesehatan keluarga, kepastian ekonomi, dan keharmonisan rumah tangga. Keluarga yang berkualitas menjadi pondasi penting bagi pembangunan masyarakat yang sehat dan produktif.



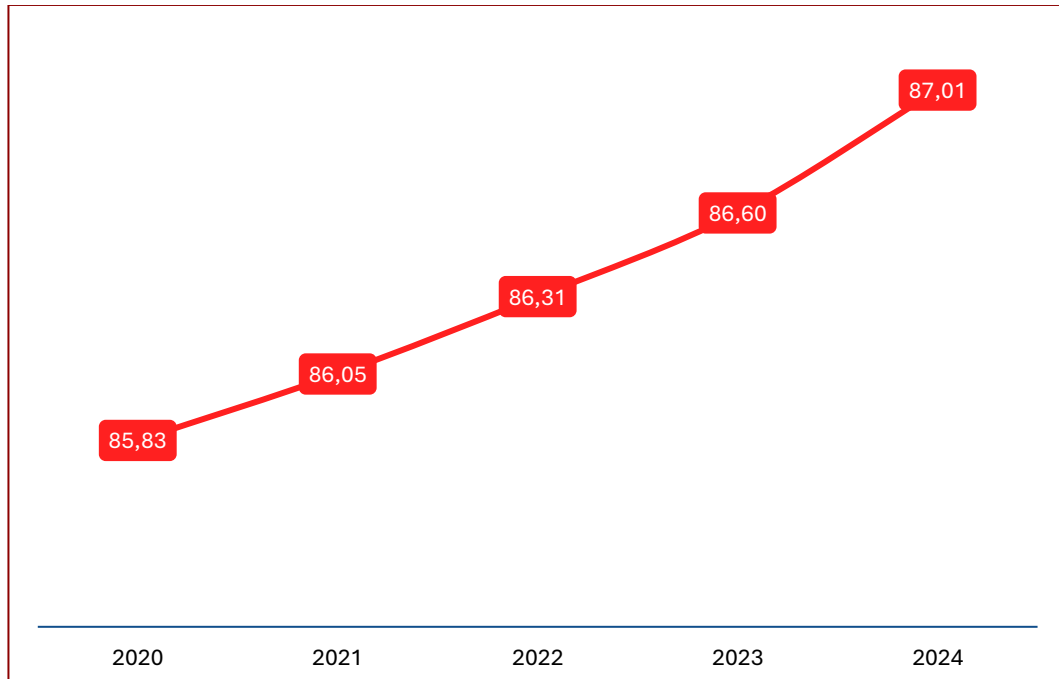
Gambar 2.27. Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)

Sumber: Siperindu.online

Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 52,04 poin pada tahun 2021 menjadi 60,17 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya pembangunan keluarga di Kabupaten Padang Lawas. Indeks ini dapat ditingkatkan melalui program-program pembinaan terhadap keluarga, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang setara pada setiap keluarga, dan penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

D. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merepresentasikan rasio perbandingan antara akses pembangunan pada penduduk wanita dan penduduk pria. Dengan kata lain, IPG membandingkan antara IPM wanita dan IPM pria. Angka IPG sebesar 1 mengindikasikan kesetaraan akses pendidikan dan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk wanita dan pria.



Gambar 2.28. Indeks Pembangunan Gender (Poin)

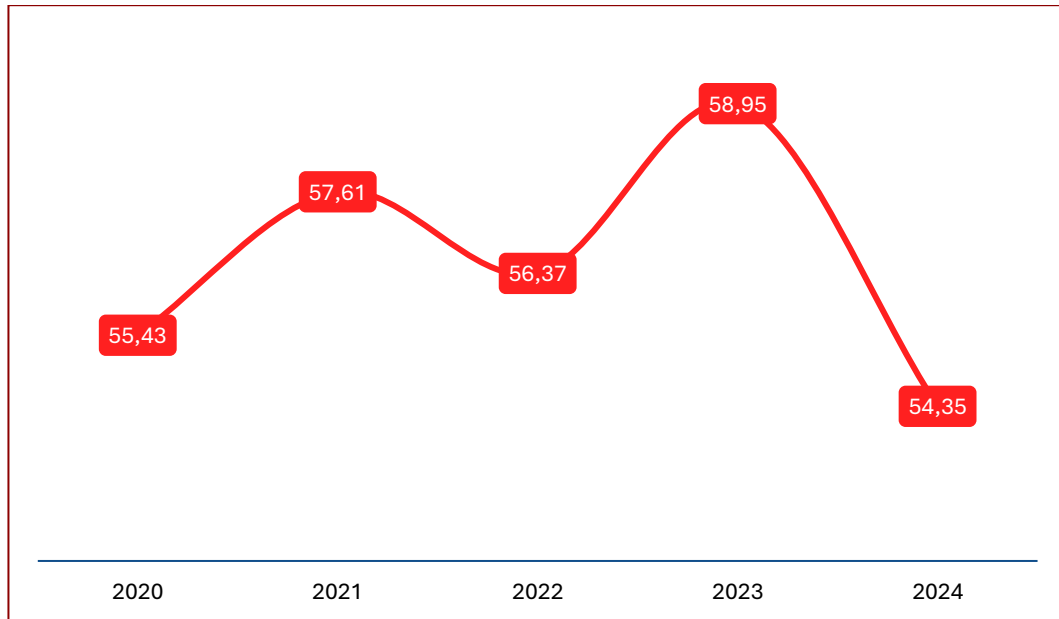
Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Gender terus meningkat setiap tahunnya dari 85,83 poin pada tahun 2020 menjadi 87,01 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa akses pembangunan yang dirasakan oleh penduduk perempuan semakin setara dengan yang dirasakan oleh penduduk pria. Peningkatan ini perlu terus dijaga melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, terutama pada penduduk perempuan sehingga pada akhirnya mencapai kesetaraan dengan penduduk pria.

E. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan peran dari penduduk perempuan dalam pembangunan ekonomi dan daerah. Dengan

meningkatnya IDG, maka mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk perempuan yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah.



Gambar 2.29. Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)

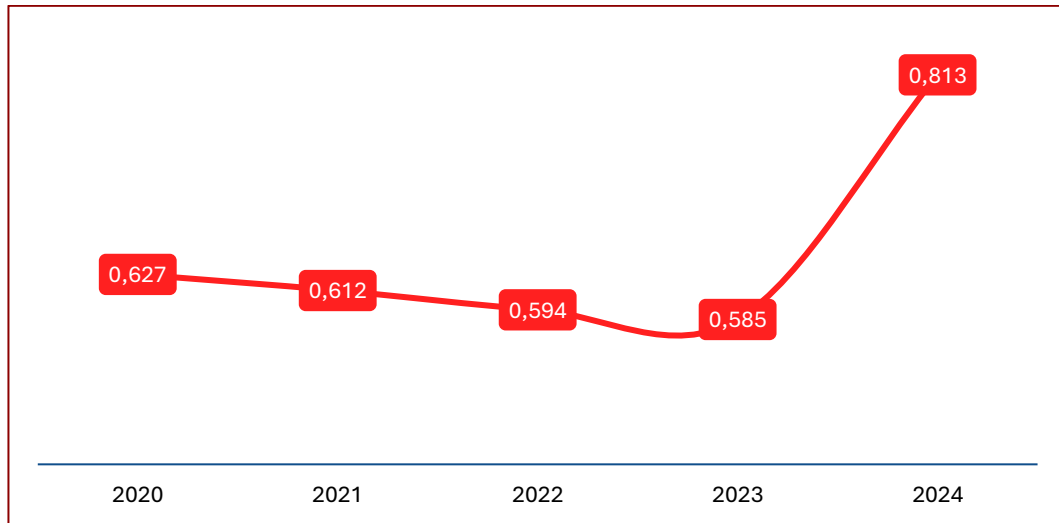
Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Pemberdayaan Gender selama tahun 2020-2024 berfluktuasi di mana pada tahun 2020 sebesar 55,43 poin menurun pada tahun 2024 menjadi 54,35 poin. Hal ini menandakan bahwa semakin berkurangnya peran penduduk perempuan dalam pembangunan daerah. Penurunan ini dapat disebabkan oleh semakin berkurangnya angkatan kerja wanita atau banyaknya wanita yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga atau melanjutkan pendidikan. Pemerintah dapat menyikapi hal tersebut dengan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi penduduk wanita, serta memberikan pelatihan dan pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja wanita yang sesuai dengan kebutuhan usaha.

F. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan ketimpangan penduduk perempuan terhadap penduduk pria dari segi akses pembangunan (kesehatan dan pendidikan) serta pemberdayaan (angkatan kerja dan partisipasi politik). IKG yang tinggi menunjukkan bahwa perempuan mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, atau layanan

kesehatan dibandingkan dengan laki-laki. IKG yang rendah menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses yang lebih setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek pembangunan.



Gambar 2.30. Indeks Ketimpangan Gender (Poin)

Sumber: Badan Pusat Statistik

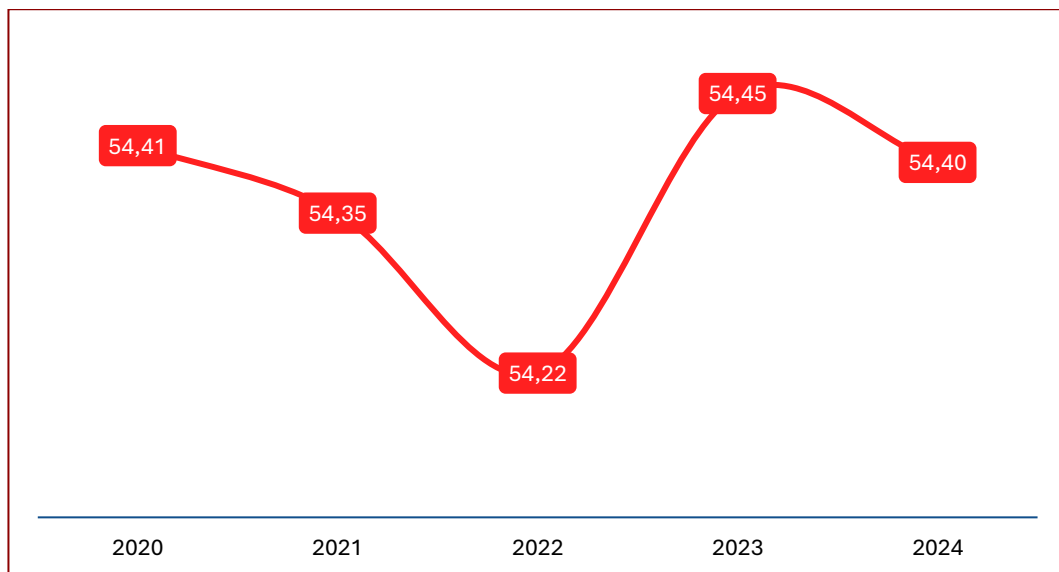
Indeks Ketimpangan Gender meningkat cukup tinggi dari 0,627 poin pada tahun 2020 menjadi 0,813 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin timpangnya kesetaraan gender antara penduduk wanita dan pria. Tingginya ketimpangan ini mengindikasikan adanya ketidaksetaraan bagi penduduk perempuan, mulai dari akses kesehatan, partisipasi terhadap pembangunan daerah. Pemerintah perlu meningkatkan perlindungan terhadap penduduk perempuan dalam memperoleh hak, serta pemberdayaan terhadap penduduk perempuan agar terlibat dalam pembangunan ekonomi daerah.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah mengacu pada kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Daya saing daerah ditentukan oleh berbagai faktor seperti infrastruktur yang memadai, kualitas sumber daya manusia, iklim usaha, inovasi teknologi, serta kebijakan pemerintah.

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kemampuan suatu daerah dalam menghadapi persaingan global dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. SDM yang berkualitas tidak hanya ditandai oleh tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi juga keterampilan, kreativitas, kesehatan, dan adaptabilitas terhadap perubahan teknologi dan pasar kerja. Ketersediaan tenaga kerja atau penduduk produktif dapat dilihat dari angka ketergantungan, di mana indikator ini menggambarkan jumlah penduduk usia non-produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif



Gambar 2.31. Angka Ketergantungan (Per 100 Penduduk)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Angka Ketergantungan selama 5 tahun cenderung berfluktuasi, di mana pada tahun 2024 mencapai sebesar 54,40 per 100 orang penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa sebanyak 100 orang penduduk usia produktif menanggung kurang lebih 55 orang penduduk usia tidak produktif. Capaian ini menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia non-produktif dibandingkan penduduk usia produktif pada Kabupaten Padang Lawas

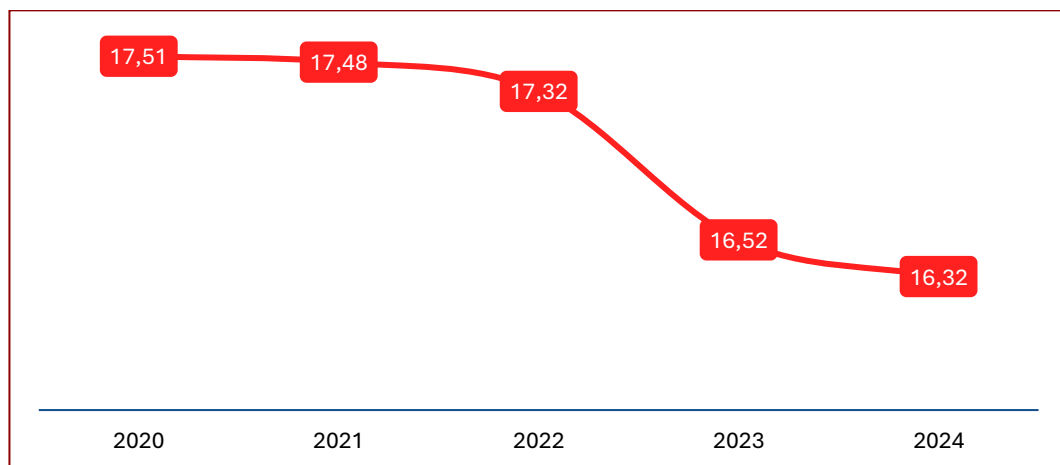
2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta inovasi merupakan

pendorong utama peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah. Kemajuan Iptek memungkinkan penggunaan sumber daya secara lebih efisien, penciptaan produk dan jasa baru, serta peningkatan kualitas produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun global. Inovasi, baik dalam proses maupun produk, menjadi kunci dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha lokal, mendorong tumbuhnya industri kreatif, serta memperluas lapangan kerja. Sinergi antara teknologi, inovasi, dan sumber daya manusia yang kompeten mempercepat transformasi ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tinggi dan berorientasi ekspor.

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan merupakan kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB daerah. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah. Perkembangan Rasio PDRB Industri Pengolahan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.32. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

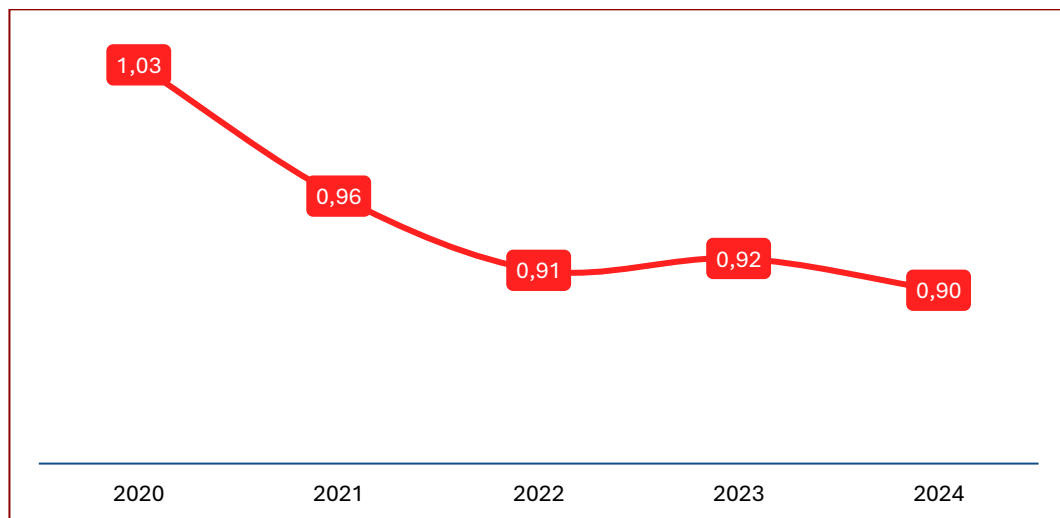
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan data BPS, Rasio PDRB Industri Pengolahan menurun dari 17,51 persen pada tahun 2020 menjadi 16,32 persen pada tahun 2024. Hal ini berarti bahwa semakin rendahnya produksi Sektor Industri Pengolahan pada Kabupaten Padang Lawas. Penurunan ini dapat disebabkan oleh semakin rendahnya produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan produk hilirisasi.

Maka dari itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas sektor industri melalui riset dan inovasi. Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan investasi pada teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk-produk hilirisasi.

B. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum merupakan rasio yang mengukur kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap perekonomian daerah. Sektor ini menjadi representasi dari Sektor Pariwisata karena sektor ini berkontribusi bagi akomodasi (hotel, penginapan, dll.) Makan dan Minum (restoran, café, dll.).



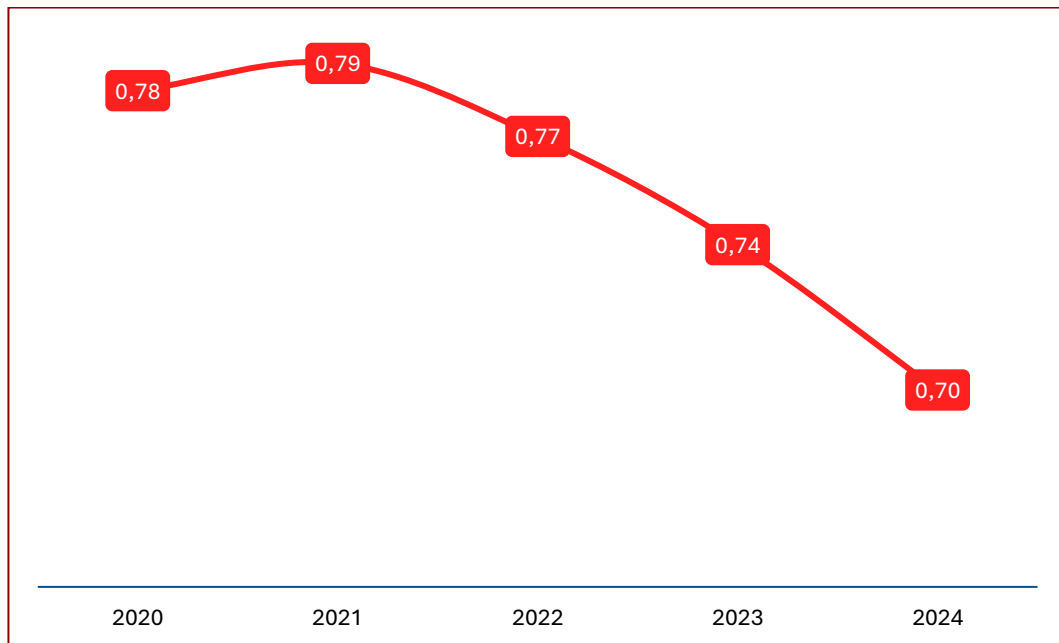
Gambar 2.33. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum menurun dari 1,03 persen pada tahun 2020 menjadi 0,90 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin rendahnya kontribusi sektor terkait dalam perekonomian Kabupaten Padang Lawas. Penurunan ini dapat disebabkan oleh menurunnya daya tarik daerah dalam menarik turis atau wisatawan domestik dan asing yang berkunjung ke daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan daya saing destinasi wisata sehingga diharapkan tingkat kunjungan wisatawan semakin meningkat dan berkontribusi bagi usaha sekitar.

C. Sektor Jasa Keuangan

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan menggambarkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perekonomian daerah. Sektor ini juga berperan penting bagi perekonomian daerah karena berperan sebagai sumber pendanaan dari aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat. Perkembangan rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.34. Rasio PDRB Jasa Keuangan (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Padang Lawas, terjadi penurunan kontribusi dari 0,78 persen pada tahun 2020 menjadi 0,70 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin rendahnya nilai produksi yang dihasilkan dari Sektor Jasa Keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh masih kurangnya kuantitas penyedia jasa keuangan di Kabupaten Padang Lawas, serta rendahnya literasi masyarakat dalam memanfaatkan produk-produk keuangan.

Tabel 2.22. Capaian Indikator Sektor Keuangan

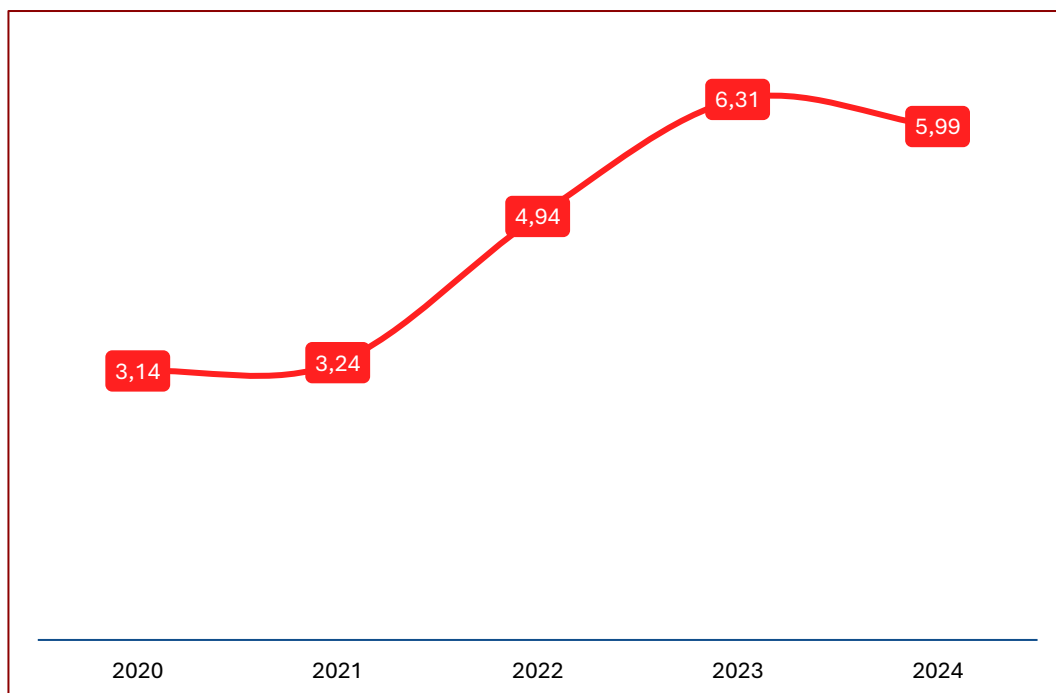
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Akses Keuangan Daerah (Poin)	N/A	N/A	2,37	2,36	2,41
Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (ADHB) (%)	0,016	0,018	0,018	0,018	0,015
Total Kredit/PDRB ADHB (%)	0,094	0,095	0,081	0,067	0,065

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia (diolah, 2025)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (*supply side*) dan permintaan (*demand side*) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Capaian IKAD pada tahun 2024 sebesar 2,41 poin dengan kategori mulai berkembang. Data pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa masih rendahnya peran dari penyaluran kredit dan simpanan masyarakat dalam mendorong perekonomian daerah. Masyarakat perlu diedukasi terkait produk-produk keuangan dan manfaatnya sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai PDRB dari Sektor Jasa Keuangan di Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah dan pelaku usaha juga perlu mendorong inovasi dan diversifikasi dari produk-produk keuangan.

D. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah ukuran yang menunjukkan persentase jumlah wirausahawan aktif dalam suatu populasi atau angkatan kerja tertentu. Rasio ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan bisnis dan usaha mandiri yang menjadi indikator penting dalam menilai dinamika ekonomi serta potensi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.



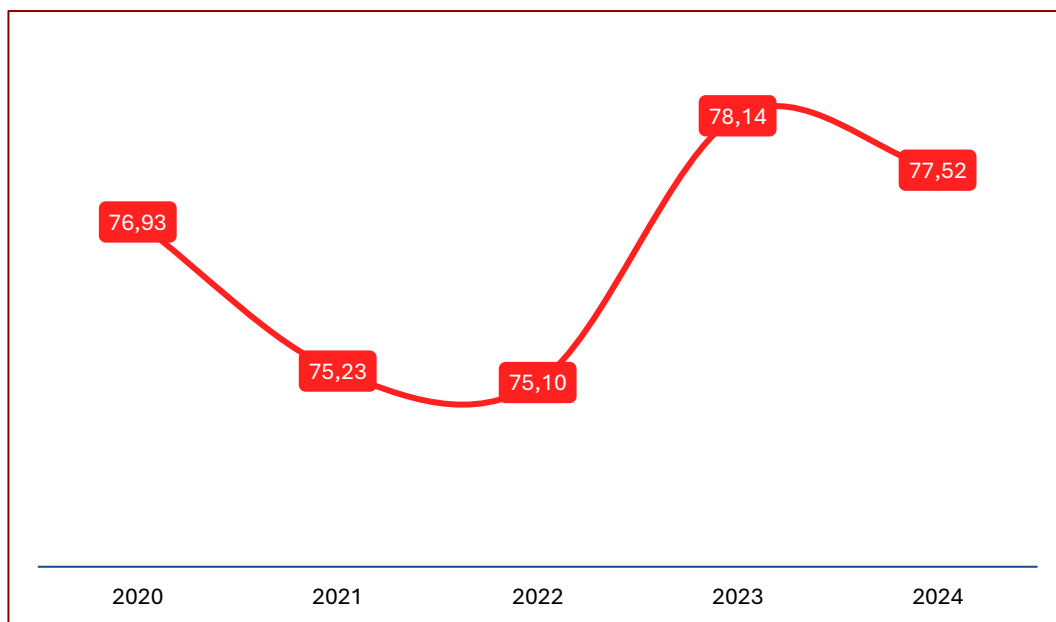
Gambar 2.35. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Rasio Kewirausahaan daerah meningkat dari 3,14 persen pada tahun 2020 menjadi 5,99 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin banyaknya masyarakat yang membuka usaha sendiri sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Peningkatan ini merupakan hal yang positif yang berarti pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk berwirausaha melalui kemudahan akses permodalan kepada pelaku usaha, keringanan pajak, atau pun peningkatan kapasitas pelaku usaha sehingga ke depannya semakin banyak masyarakat yang berwirausaha dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan ketersediaan tenaga kerja pada suatu daerah, baik yang sedang bekerja atau pun yang sedang mencari kerja. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada gambar berikut:



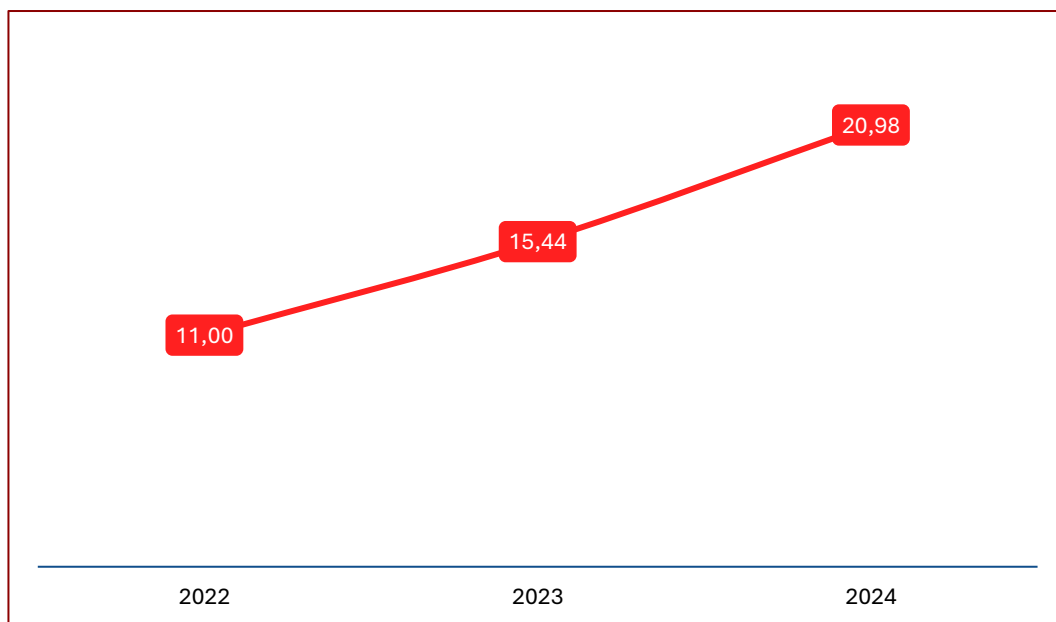
Gambar 2.36. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

TPAK Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 76,93 persen pada tahun 2020 mencapai 77,52 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin banyaknya supply tenaga kerja yang tersedia di daerah. Hal ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan daerah. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja yang tersedia melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan sehingga mampu bersaing sesuai dengan tuntutan industri saat ini dan di masa mendatang.

F. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah alat ukur yang menilai kemampuan suatu daerah dalam menciptakan, mengadopsi, dan menyebarkan inovasi untuk mendukung pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.37. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Padang Lawas (Poin)

Sumber: Kepmendagri

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan dari 11,00 poin menjadi 20,98 poin dari tahun 2022-2024. Hal ini menandakan bahwa Inovasi Daerah Kabupaten Padang Lawas masih berada pada kategori “Kurang Inovatif”. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus berupaya untuk mendorong setiap perangkat daerah dalam melakukan inovasi sesuai dengan bidangnya agar kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dapat meningkatkan inovasi daerah melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta pemberian insentif bagi inovasi-inovasi yang dihasilkan. Selain itu, pemerintah juga dapat menjalin kemitraan dengan akademisi dan lembaga riset, serta sektor swasta untuk mendukung pengembangan inovasi yang relevan.

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru menjadi aspek penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ekonomi hijau fokus pada pengembangan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya alam, serta mampu mengurangi emisi karbon dan limbah. Prinsip ini mendukung pelestarian ekosistem darat dan

keberlangsungan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Sementara itu, ekonomi biru menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan, seperti perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan dari laut, dan pelestarian ekosistem laut. Penerapan ekonomi biru bertujuan menjaga kesehatan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

2.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek kehidupan dan kegiatan ekonomi suatu daerah, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan layanan publik. Penerapan transformasi digital meliputi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), otomasi, *big data*, kecerdasan buatan, serta *platform* digital dalam berbagai sektor seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan industri.

Transformasi digital memperkuat daya saing daerah dengan membuka akses pasar yang lebih luas, mempercepat inovasi, dan menciptakan model bisnis baru yang adaptif terhadap perubahan global. Selain itu, transformasi ini juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

A. Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital merupakan indikator yang mengukur tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Indeks ini mencerminkan seberapa jauh masyarakat telah mengadopsi teknologi digital dan kemampuan mereka dalam mengakses serta menggunakan informasi secara efektif. Peningkatan indeks masyarakat digital sangat penting dalam mendorong inklusi digital dan mempercepat transformasi teknologi di era modern.

Tabel 2.23. Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Padang Lawas					
Pilar	2023	2024	Sub Pilar	2023	2024
Infrastruktur dan Ekosistem	57,98	46,87	Akses dan Adopsi Teknologi	59,48	62,58
			Ekosistem Pembelajaran	50,42	35,51
			Digitalisasi Pemerintah	70,30	44,89
Keterampilan Digital	64,39	57,49	Komplementaritas	62,81	56,48
			Pengenalan	65,25	57,31
			Keamanan TIK	65,06	58,65
Pemberdayaan	28,91	22,85	Konsumen/Pengguna	31,72	27,40
			Penjual/Penyedia	26,10	18,30
Pekerjaan	37,06	34,18	Permintaan	53,65	56,66
			Penawaran	20,48	11,70
Indeks Masyarakat Digital				47,20	40,18

Sumber: *imdi.sdmdigital.id*

Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Padang Lawas mengalami penurunan dari 47,20 poin pada tahun 2023 menjadi 40,18 poin pada tahun 2024. Pada Pilar Infrastruktur dan Ekosistem mengalami penurunan dari 57,98 poin pada tahun 2023 menjadi 46,87 poin pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan bahwa semakin rendahnya ketersediaan dan adopsi teknologi di Kabupaten Padang Lawas. Dilihat dari sub-pilarnya, Ekosistem Pembelajaran dan Digitalisasi Pemerintah mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa semakin rendahnya penerapan teknologi digital dalam proses pembelajaran di sekolah, di mana hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas pembelajaran menggunakan teknologi. Di sisi pemerintah, semakin rendahnya capaian ini menandakan bahwa kurangnya penerapan teknologi dalam pelayanan publik. Masih banyaknya situs dan aplikasi yang rusak menjadi salah satu penyebab menurunnya sub-pilar digitalisasi pemerintah. Di samping itu, perlu peningkatan kualitas dan keterampilan ASN dalam mengoperasikan teknologi digital untuk pelayanan publik.

Pilar Keterampilan Digital mengalami penurunan dari 64,39 poin pada tahun 2023 menjadi 57,49 poin pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan dari seluruh komponen penyusun Pilar Keterampilan Digital. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendahnya keterampilan masyarakat

dalam memahami penggunaan berbagai jenis teknologi dan alat komunikasi digital. Untuk menyikapi hal tersebut, maka sebaiknya pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan pemahaman masyarakat melalui edukasi, terutama pendidikan pada sekolah atau sosialisasi melalui media digital.

Pilar Pemberdayaan mengalami penurunan dari 28,91 poin pada tahun 2023 menjadi 22,85 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendahnya pemanfaatan teknologi digital, baik dalam hal produktif, maupun konsumtif. Penurunan ini menjadi perhatian karena hal ini menandakan semakin rendahnya masyarakat yang menggunakan teknologi digital dalam aktivitasnya.

Pilar Pekerjaan mengalami penurunan dari 37,06 poin pada tahun 2023 menjadi 34,18 poin pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital, sementara permintaannya semakin meningkat. Untuk menyikapi hal tersebut, maka sebaiknya keterampilan tenaga kerja ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan digital sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global merupakan upaya menghubungkan pasar, produksi, dan sumber daya antar wilayah di dalam negeri dengan pasar serta jaringan ekonomi internasional. Dengan integrasi yang kuat, daerah dapat memanfaatkan keunggulan komparatif, memperluas akses pasar bagi produk lokal, serta menarik investasi asing dan teknologi baru. Hal ini memperkuat daya saing regional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.24. Capaian Indikator Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
PMTB terhadap PDRB (%)	23,96	24,01	23,86	24,14	23,96
Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	44,42	46,11	47,38	47,46	47,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas (Diolah, 2025)

PMTB terhadap PDRB relatif stabil berada pada kisaran 23-24 persen selama tahun 2020-2024, di mana pada tahun 2024 mencapai 23,96 persen kembali. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran untuk barang fisik dan non-fisik relatif tidak meningkat atau pun menurun selama periode tersebut. Sementara itu, Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB mengalami peningkatan dari 44,42 persen pada tahun 2020 menjadi 47,66 persen pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak barang dan jasa yang diekspor dari Kabupaten Padang Lawas di pasar domestik dan internasional. Meskipun demikian, ekspor barang dan jasa yang berasal dari Kabupaten Padang Lawas harus dicermati apakah ekspor dari barang mentah yang lebih banyak atau ekspor barang bernilai tambah. Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan ekspor pada produk hilirisasi atau produk yang bernilai tambah untuk mempercepat pembangunan daerah.

2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan perdesaan memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang saling melengkapi. Kawasan perkotaan biasanya menjadi pusat kegiatan industri, jasa, inovasi, dan konsentrasi modal, sedangkan kawasan perdesaan merupakan basis utama sektor pertanian, agroindustri, dan sumber daya alam.

Pengembangan yang seimbang dan sinergis antara perkotaan dan perdesaan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan, menekan urbanisasi yang tak terkendali, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Pendekatan pembangunan wilayah yang terintegrasi harus mendukung peningkatan infrastruktur, akses pasar, kapasitas sumber daya manusia, dan teknologi di kedua wilayah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Tabel 2.25. Capaian Indikator Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (%)	44,42	46,11	47,38	47,46	47,66
Indeks Desa Membangun (Poin)	0,5792	0,5807	0,5902	0,6159	0,6217
Persentase Desa Mandiri (%)	N/A	N/A	N/A	0,33	0,33

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Padang Lawas, Kemendes

Data Indeks Infrastruktur dan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur belum tersedia untuk tahun 2020-2024 dan akan dilakukan perhitungan indikator ke depannya. Indikator tersebut merupakan indikator penting untuk menggambarkan kondisi infrastruktur daerah. Rumah tangga yang memiliki akses hunian layak dan terjangkau meningkat dari 44,42 persen pada tahun 2020 menjadi 47,66 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam menyediakan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketersediaan rumah yang layak untuk masyarakat melalui pembangunan dan rehabilitasi. Indeks Desa Membangun Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 0,5792 poin pada tahun 2020 menjadi 0,6217 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyaknya desa yang meningkat statusnya di Kabupaten Padang Lawas. Pembangunan desa yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas sudah cukup baik. Persentase Desa Mandiri pada tahun 2023-2024 hanya sebesar 0,33 persen atau sebanyak 1 desa dari 303 desa. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dalam melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan desa dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi.

2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas ini mencakup pengendalian inflasi, kestabilan nilai tukar, kesehatan fiskal daerah, serta tingkat pengangguran yang terkendali. Pemerintah Daerah perlu menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, mengelola anggaran dengan hati-hati, serta memastikan likuiditas dan ketersediaan kredit untuk sektor produktif. Stabilitas ekonomi makro juga berperan dalam menjaga kepercayaan pelaku ekonomi, mencegah volatilitas pasar, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Tabel 2.26. Capaian Indikator Stabilitas Ekonomi Makro

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,107	0,101	0,147	0,125	0,019
Tingkat Inflasi (Kota Padangsidempuan) (%)	3,27	1,49	6,40	2,95	2,46

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas (Diolah, 2025)

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB menggambarkan kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan data historis, rasio ini meningkat dari 0,107 persen pada tahun 2020 menjadi 0,019 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih kecilnya kontribusi pajak daerah bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Padang Lawas. Sementara itu, tingkat inflasi Kabupaten Padang Lawas mengacu pada inflasi Kota Padang Sidempuan, di mana inflasi mengalami peningkatan dari 3,27 persen pada tahun 2020 menjadi 6,40 persen pada tahun 2022, lalu menurun hingga tahun 2024 mencapai 2,46 persen. Penurunan ini menandakan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa semakin membaik setelah puncaknya pada tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan kerjasama dengan beberapa daerah sekitarnya agar menjaga ketersediaan dan distribusi barang dan jasa kepada masyarakat.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum mencakup seluruh upaya dan kegiatan pemerintah daerah dalam memberikan layanan dasar yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Pelayanan ini meliputi sektor pendidikan, kesehatan, perizinan, keamanan, administrasi kependudukan, serta infrastruktur publik seperti air bersih, listrik, dan transportasi. Pelayanan umum sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat rasa keadilan sosial, serta mendukung pembangunan yang inklusif. Peningkatan pelayanan dapat dilakukan melalui digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik.

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Regulasi yang baik harus mampu menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan publik, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2.27. Capaian Indikator Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	97,14
Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	40,68	40,05	46,78	46,31	58,54
Indeks SPBE (Poin)	N/A	N/A	N/A	2,02	2,17
Indeks Pelayanan Publik (Poin)	N/A	2,30	3,07	2,75	4,10
Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	N/A	83,64	83,26	84,03	88,66
Indeks Integritas Nasional (Poin)	N/A	72,72	71,45	73,52	76,14

Sumber: KemenPAN-RB & *jaga.id*

Indeks Reformasi Hukum baru dilakukan perhitungan pada tahun 2024 sehingga tahun 2020-2023 belum memiliki data capaian. Pada tahun 2024 Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Padang Lawas sebesar 97,14 poin. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan reformasi hukum semakin baik di

Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terus berupaya untuk memperkuat regulasi dan menegakkan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat. Pada tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Padang Lawas ini berada pada angka 40,68 dengan predikat C (kurang) dan meningkat menjadi 58,54 pada tahun 2024. Pencapaian ini sudah berada pada predikat CC (Cukup). Data ini mengindikasikan perlunya upaya yang serius dan konsisten dari Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam melakukan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah daerah di masa mendatang. Pada tahun 2021 Indeks SPBE mencapai nilai 1,37 poin meningkat hingga tahun 2024 menjadi 2,17 poin, di mana capaian ini masih berada dalam predikat Kurang. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka instansi pusat dan pemerintah daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja tata kelola SPBE dan manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2021 sebesar 2,30 poin meningkat hingga tahun 2024 mencapai 4,10 poin dengan kategori B. Hal ini berarti bahwa unit pelayanan di Kabupaten Padang Lawas sudah menerapkan kebijakan pelayanan, namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sudah memiliki sarana prasarana yang cukup dan memiliki beberapa media sebagai informasi pelayanan publik serta media konsultasi dan pengaduan, dan sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal. Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat dari 84,03 poin pada tahun 2023 menjadi 88,66 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa

akepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas semakin membaik. Indeks Integritas Nasional adalah pengukuran tingkat risiko korupsi di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Indeks Integritas Nasional di Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 72,72 poin pada tahun 2021 dengan kategori “Rentan” menjadi 76,14 poin pada tahun 2024 yang berada pada kategori “Waspada”. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan yang bersih dan transparan kepada masyarakat.

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Hukum Berkeadilan adalah prinsip hukum yang menjamin perlakuan sama, transparansi, dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Hukum yang berkeadilan menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan menjamin hak-hak dasar setiap individu, sekaligus mendukung penegakan tata kelola pemerintahan yang baik. Keamanan Nasional yang Tangguh mencakup kemampuan suatu negara dalam menjaga kedaulatan, melindungi warga dan sumber daya dari ancaman baik internal maupun eksternal. Keamanan yang tangguh menjadi prasyarat stabilitas sosial dan politik yang memungkinkan pembangunan ekonomi dan sosial berjalan lancar. Demokrasi Substansial mengacu pada penerapan demokrasi yang tidak sekadar prosedural, tetapi juga mencakup pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Demokrasi substansial memastikan bahwa kekuasaan dijalankan untuk kesejahteraan rakyat secara nyata

Tabel 2.28. Capaian Indikator Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

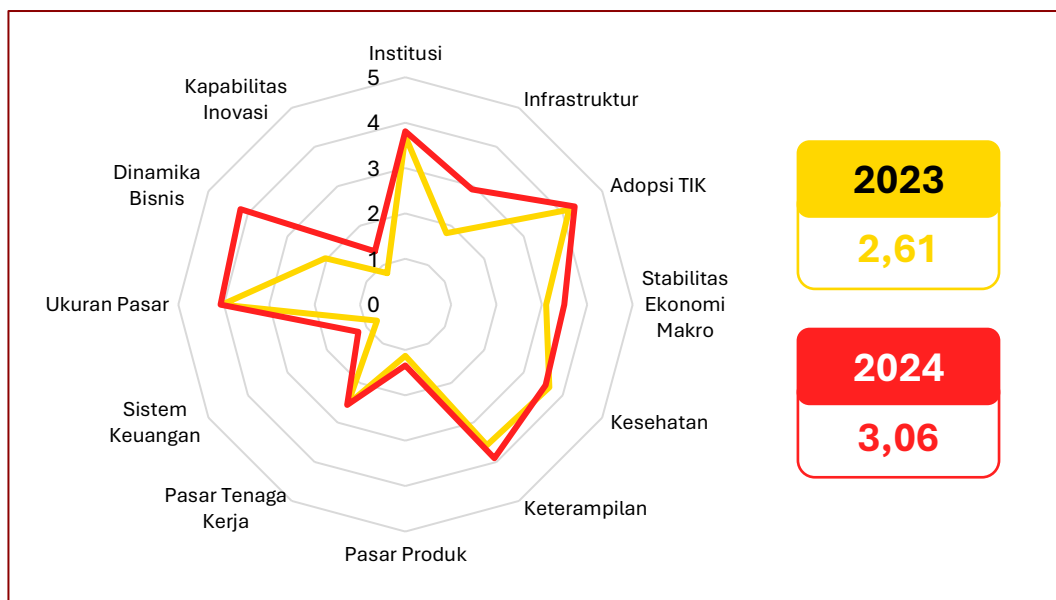
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda (%)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Poin)	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas

Penegakan Perda merupakan seberapa efektif suatu daerah dalam menegakkan Peraturan Daerahnya. Capaian 95,00 persen hingga tahun 2024 menandakan bahwa masih adanya Perda yang belum ditegakkan secara efektif oleh Kabupaten Padang Lawas. Indeks Ketentraman dan Ketertiban belum memiliki data capaian, namun akan dilakukan perhitungan indeks ke depannya. Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Satpol PP dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gantar kawasan merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah di tengah dinamika geopolitik yang kompleks. Ketangguhan diplomasi mengedepankan kemampuan negosiasi, diplomasi multilateral, serta pembangunan kemitraan strategis dengan negara-negara tetangga untuk menciptakan perdamaian dan kerja sama yang berkelanjutan. Di sisi lain, pertahanan berdaya gantar kawasan mengacu pada strategi pertahanan yang efektif dan kuat, yang tidak hanya mampu menghadirkan kekuatan militer yang handal, tetapi juga mengoptimalkan sinergi antara unsur militer, ekonomi, teknologi, dan intelijen. Hal ini bertujuan untuk mencegah agresi dan menjaga kedaulatan serta integritas wilayah dari berbagai ancaman.



Gambar 2.38. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Padang Lawas

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Indeks Daya Saing Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menciptakan kondisi yang mendukung aktivitas ekonomi, menarik investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. IDSD mencerminkan kekuatan kompetitif suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam aspek-aspek seperti Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar, dan Ekosistem Inovasi. IDSD Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 2,61 poin pada tahun 2023 menjadi 3,06 poin pada tahun 2024. Komponen IDSD paling tinggi adalah adopsi TIK yang pada tahun 2024 telah mencapai nilai 4,30 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur digital di Kabupaten Padang Lawas semakin membaik sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses dan inovasi produk yang berujung pada peningkatan ekonomi yang produktif.

Namun, komponen yang masih lemah pada daya saing daerah Kabupaten Padang Lawas adalah Sistem Keuangan, di mana pada tahun 2024 memiliki nilai 1,20 poin. Hal ini menandakan bahwa kurangnya ketersediaan lembaga keuangan yang memadai di Kabupaten Padang Lawas. Selain itu, yang menjadi penyebab adalah kurangnya literasi masyarakat dalam memahami produk perbankan. Kedua adalah Pasar Produk, yaitu kondisi

persaingan usaha di daerah. Capaian komponen ini untuk Kabupaten Padang Lawas sebesar 1,34 poin, hal ini mengindikasikan bahwa persaingan bisnis di Kabupaten Padang Lawas dinilai kurang sehat. Masih adanya praktik monopoli pada beberapa bidang usaha dapat menjadi salah satu penyebab dari persaingan yang kurang sehat tersebut. Ketiga adalah Kapabilitas Inovasi, di mana pada tahun 2024 mencapai nilai sebesar 1,35 poin. Hal ini menandakan bahwa masih lemahnya kemampuan Kabupaten Padang Lawas dalam menciptakan produk yang inovatif. Kurangnya kesadaran dan kapasitas inovasi masyarakat dapat menjadi penyebab dari lemahnya nilai ini.

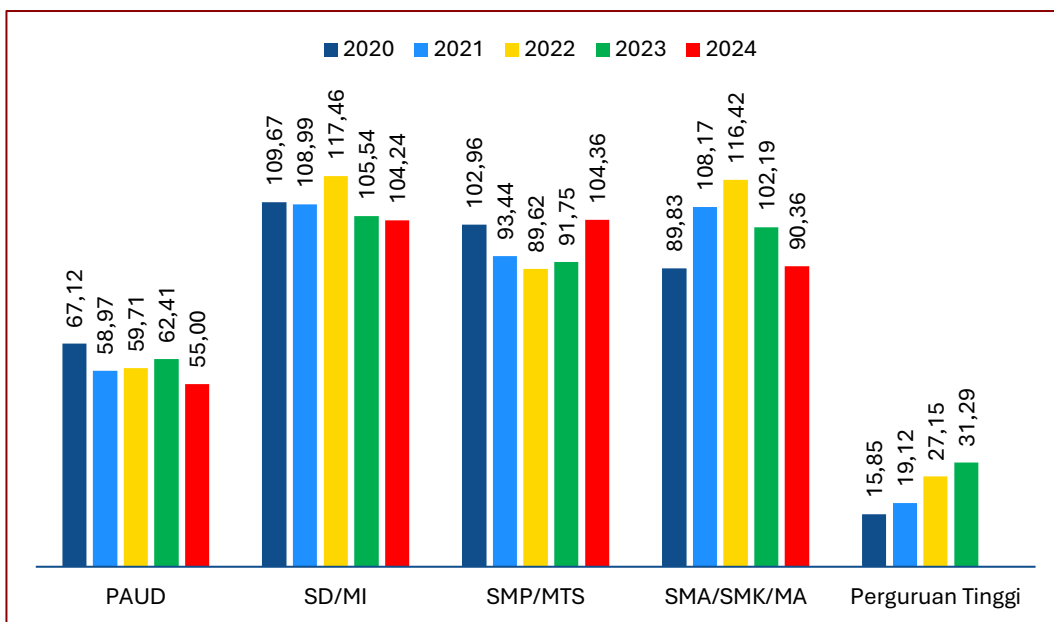
2.4.4. Urusan Pemerintah Wajib Layanan Dasar

Layanan Pemerintah Wajib Dasar adalah serangkaian pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata. Layanan ini mencakup sektor-sektor penting seperti pendidikan dasar, pelayanan kesehatan primer, penyediaan air bersih, sanitasi, kesejahteraan sosial, dan keamanan masyarakat.

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu layanan pemerintah wajib dasar yang berperan krusial dalam membentuk sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan akses pendidikan dasar yang inklusif, berkualitas, dan merata bagi seluruh anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis. Untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, maka dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APK merupakan indikator yang mengukur persentase jumlah murid yang terdaftar di suatu jenjang pendidikan dibandingkan dengan total populasi usia yang seharusnya mengikuti jenjang pendidikan tersebut, tanpa memperhitungkan apakah murid tersebut berusia standar atau tidak. APK dapat lebih dari 100% karena termasuk peserta didik yang tidak sesuai usia.

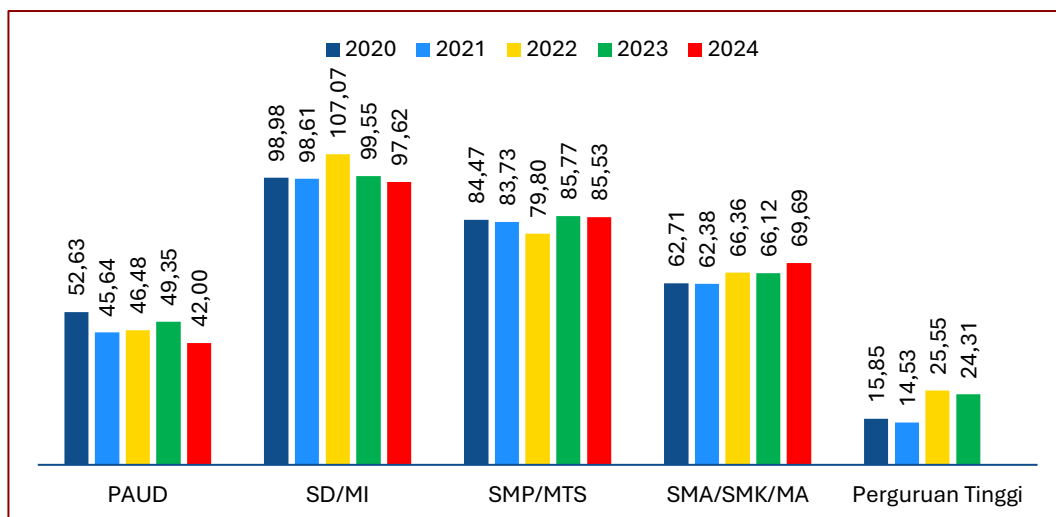


Gambar 2.39. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Padang Lawas (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Padang Lawas pada jenjang pendidikan PAUD cenderung menurun dari 67,12 persen pada tahun 2020 menjadi 55,00 persen pada tahun 2024, kemudian SD/MI cenderung menurun dari 109,67 persen pada tahun 2020 menjadi 104,24 persen pada tahun 2024. Sementara, untuk jenjang pendidikan SMP/MTS relatif meningkat, sementara untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA meningkat pada tahun 2022, lalu menurun pada tahun 2024. Pada jenjang perguruan tinggi, APK terus mengalami peningkatan yang signifikan dari 15,85 persen pada tahun 2020 menjadi 31,29 persen pada tahun 2024.

APM adalah persentase jumlah murid yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu yang benar-benar terdaftar pada jenjang tersebut dibandingkan dengan total populasi usia standar jenjang pendidikan itu.



Gambar 2.40. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Padang Lawas (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan PAUD cenderung menurun dari 52,63 persen pada tahun 2020 menjadi 42,00 persen pada tahun 2024. Kemudian, jenjang pendidikan SD/MI pun relatif menurun dari 98,98 persen pada tahun 2020 menjadi 97,62 persen pada tahun 2024. Sementara, untuk SMP/MTS dan SMA/SMK/MA relatif meningkat selama tahun 2020-2024. Pada jenjang Perguruan Tinggi pun cenderung meningkat dari 15,85 persen pada tahun 2020 menjadi 25,55 persen pada tahun 2022, lalu menurun pada tahun 2024 menjadi 24,31 persen.

Jika dilihat berdasarkan perkembangannya, hal ini menandakan bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum memperoleh akses pendidikan yang sama. Capaian kinerja pendidikan Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:

Tabel 2.29. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	10,33	11,32	11,78	11,20	11,28
Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	52,63	45,64	46,48	49,35	42,00
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,98	98,61	91,35	99,55	97,62
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	77,55	85,73	88,19	86,50	85,53

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/ MI/ Paket A	11,64	95,30	91,34	97,20	89,40
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/ MTs/ Paket B	84,80	84,30	88,18	92,30	86,13
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	98,83	102,00	100,00	100,00	100,00
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	97,07	87,00	98,00	99,00	99,00
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	86,32	95,12	94,32	99,00	78,01
Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,10	0,30	2,00	0,10	0,25
Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,20	0,70	2,00	0,30	0,29
Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	91,78	91,86	92,54	92,67	93,00
Ruang kelas SD/MI kondisi baik (%)	75,15	78,22	79,65	80,20	80,70
Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik (%)	60,52	62,22	63,75	64,33	65,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas, BPS Kabupaten Padang Lawas

Penduduk yang berkualifikasi pendidikan tinggi meningkat dari 10,33 persen pada tahun 2020 menjadi 11,28 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Hal ini harus didorong oleh pemerintah daerah agar semakin banyak masyarakat yang memiliki kualifikasi sehingga mampu berdaya saing dalam dunia usaha dan industri ke depannya. Data ketersediaan ruang kelas dalam kondisi baik pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs masih belum maksimal, dapat dilihat masih adanya sebesar 19,30 persen kelas yang tidak dalam kondisi baik pada jenjang SD/MI dan sebanyak 35,00 persen kelas yang tidak dalam kondisi baik pada jenjang SMP/MTs. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berupaya untuk melakukan renovasi pada sekolah-sekolah dan menyediakan, serta memperbaiki fasilitas sekolah.

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan layanan dasar yang wajib disediakan oleh

pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas. Fokus utama adalah pelayanan kesehatan primer, pencegahan penyakit, serta promosi hidup sehat yang menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.

Tabel 2.30. Fasilitas Kesehatan					
Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit	2	1	1	2	2
Puskesmas Rawat Inap	4	4	4	4	4
Puskesmas Non Rawat Inap	12	12	12	12	13
Klinik Pratama	2	2	2	2	6
Posyandu	343	304	340	340	232
Rasio Rumah Sakit (1 : 100.000)	1 : 130.506	1 : 263.719	1 : 267.275	1 : 137.824	1 : 140.382

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas (Diolah, 2025)

Data pada tabel tersebut menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terus berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui pembangunan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah. Namun, untuk rasio rumah sakit terhadap total penduduk menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Lawas hingga saat ini justru belum mampu memenuhi standar 1 : 100.000. Dalam menyikapi hal ini, maka sebaiknya Pemerintah mempertimbangkan penambahan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya sehingga setiap masyarakat dapat memperoleh hak yang sama. Data terkait tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31. Tenaga Kesehatan Kabupaten Padang Lawas					
Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Dokter	108	56	43	66	124
Dokter Gigi	11		12	16	21
Perawat	217	247	133	146	354
Bidan	693	717	587	536	959
Tenaga Kefarmasian	33	30	32	262	100
Tenaga Kesehatan Masyarakat	60	-	35	63	124
Tenaga Kesehatan Lingkungan	14	-	13	15	25
Tenaga Gizi	17	15	22	43	60

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Ahli Teknologi Laboratorium Medik	14	-	33	40	60
Rasio Dokter (1 : 1.000)	1 : 2.417	1 : 4.709	1 : 6.216	1 : 4.176	1 : 2.264

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Padang Lawas. Hal ini menandakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan akses dan layanan kesehatan kepada masyarakatnya. Namun, rasio dokter masih belum memenuhi standar 1 : 1.000 hingga tahun 2024. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan ketersediaan dokter di daerahnya sekaligus melakukan pemerataan distribusi dokter ke seluruh wilayah administrasinya.

Tabel 2.32. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Neonatal (Per 1.000 KH)	4,57	3,81	1,88	7,65	8,27
Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH)	3,55	7,62	1,88	8,44	9,17
Angka Kematian Balita (Per 1.000 KH)	0,76	1,27	0,13	8,83	9,62
Angka Kematian Ibu (Per 1.000 KH)	152,25	101,60	80,87	137,39	156,53
Balita Gizi Kurang (%)	3,73	3,73	3,76	3,90	2,30
Balita Gizi Buruk (%)	0,05	0,02	0,73	0,45	0,60

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada waktu tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKN di Kabupaten Padang Lawas menunjukkan penurunan signifikan dari 4,57 pada tahun 2020 menjadi 1,88 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2022, di antara 1.000 kelahiran hidup ada 1-2 bayi yang meninggal sebelum usia satu bulan. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum berusia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 AKB di Kabupaten Padang Lawas mengalami fluktuasi. AKB tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 7,62 dan yang paling terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 1,88. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten

Padang Lawas pada tahun 2022, di antara 1.000 kelahiran hidup ada 1-2 bayi yang meninggal sebelum usia satu tahun. Angka Kematian Balita (AKBa) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada waktu tertentu dan meninggal sebelum mencapai umur lima tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKBa di Kabupaten Padang Lawas terus mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2022, AKBa Kabupaten Padang Lawas sebesar 0,13, yang berarti pada 1.000 kelahiran hidup terdapat 0-1 balita meninggal sebelum mencapai umur lima tahun. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian perempuan selama kehamilan atau 42 hari setelah melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. AKI di Kabupaten Padang Lawas mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, di mana AKI Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2020 sebesar 152,25 menurun menjadi 80,87 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 80-81 kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada periode tersebut per 100.000 kelahiran hidup. Terkait dengan status gizi anak, persentase balita kurang mengalami peningkatan dari 3,73 persen pada tahun 2020 menjadi 3,76 persen pada tahun 2022. Sementara itu, untuk persentase gizi buruk pada balita terjadi peningkatan dari tahun 2020 hanya sebesar 0,05 persen menjadi 0,73 persen pada tahun 2022. Terkait hal ini perlu dilakukan intervensi pemberian makanan bergizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Layanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan fungsi penting pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah. Layanan ini meliputi pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase, serta pengelolaan tata ruang wilayah yang terencana. Pekerjaan Umum bertugas memastikan infrastruktur yang kokoh,

aman, dan berkelanjutan sehingga mendukung mobilitas dan konektivitas antarwilayah, mengurangi risiko bencana, serta meningkatkan produktivitas ekonomi. Penataan Ruang berfokus pada pengaturan penggunaan lahan dan tata letak wilayah agar pembangunan berjalan terkoordinasi, harmonis, dan ramah lingkungan. Dengan pengelolaan ruang yang baik, konflik pemanfaatan lahan dapat diminimalkan dan kualitas hidup masyarakat meningkat.

Tabel 2.33. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (%)	17,74	18,92	17,68	18,39	17,73
Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik (%)	46,22	51,22	67,96	66,67	59,00
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	28,13	37,81	34,41	37,17	47,00
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik (%)	25,00	27,00	32,00	38,00	43,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada kondisi jalan masih terdapat banyak permasalahan, di mana pada tahun 2024 hanya sebesar 17,73 persen jalan dalam kondisi baik. Sementara itu, pada tahun 2024 jembatan dalam kondisi baik sebanyak 59,00 persen dari jumlah jembatan yang ada, jaringan irigasi sebanyak 47,00 persen dari panjang jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Padang Lawas, dan drainase dalam kondisi baik sebesar 43,00 persen. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebaiknya meningkatkan alokasi anggaran untuk perbaikan dan perawatan infrastruktur daerahnya agar aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan bagian penting dari layanan pemerintah wajib dasar yang bertujuan menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat. Pemerintah berperan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perumahan serta kawasan permukiman yang memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kenyamanan.

Tabel 2.34. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Layak Huni (%)	60,90	62,00	64,20	66,00	67,00
Luasan Kawasan Kumuh (%)	35,33	34,66	33,63	31,00	30,33

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas

Persentase rumah layak huni meningkat dari 60,90 persen pada tahun 2020 menjadi 67,00 persen pada tahun 2024. Sementara, persentase luasan kawasan kumuh masih berada di atas 30 persen hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak rumah yang tidak layak huni dan kawasan perkumuhan kumuh. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu memfokuskan anggaran untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat dan menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Pemerintah wajib menjamin perlindungan warga dari berbagai ancaman, baik berupa tindak kriminal, gangguan ketertiban, bencana, maupun konflik sosial. Pelayanan ini meliputi pengelolaan sistem keamanan publik, penegakan hukum, pengaturan ketertiban lalu lintas, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, serta pemberdayaan masyarakat melalui sistem keamanan lingkungan dan kegiatan sosial.

Tabel 2.35. Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	100	100	100
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100	100	100	100
Cakupan Pelayanan Kebakaran (%)	78	80	80	80	80
Tingkat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran (menit)	> 15	> 15	> 15	> 15	> 15

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan data tersebut ketersediaan perlindungan Linmas sudah memenuhi standar kebutuhan pada 1 wilayah kerja, kemudian tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) selalu terselesaikan. Namun, cakupan pelayanan kebakaran masih sebesar 80 persen pada tahun 2024. Begitu pula dengan tingkat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran yang masih membutuhkan waktu lebih dari 15 menit. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan cakupan wilayah pemadam kebakaran dengan membangun Posko Pemadam Kebakaran pada wilayah yang sulit terjangkau atau jauh dari Posko Pemadam Kebakaran lainnya.

F. Sosial

Urusan Sosial merupakan bagian dari layanan pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan dan pelayanan sosial kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Pemerintah harus menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar sosial melalui berbagai program perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial. Urusan ini meliputi penanganan masalah kemiskinan, pemenuhan hak-hak sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta pengembangan jejaring sosial dan komunitas yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat pelayanan rehabilitasi korban bencana, penyalahgunaan narkoba, dan penanganan sosial lainnya.

Tabel 2.36. Capaian Kinerja Urusan Sosial

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0,30	0,50	0,70	0,90	1,00
Persentase PPKS yang tertangani (%)	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas

Disabilitas yang bekerja di sektor formal meningkat setiap tahunnya dari 0,30 persen pada tahun 2020 menjadi 1,00 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat rentan/disabilitas yang diserap oleh perusahaan. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu

menjaga dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja disabilitas melalui peningkatan keterampilan masyarakat disabilitas dan menyusun regulasi atau kebijakan agar perusahaan wajib menyerap tenaga kerja disabilitas. Persentase PPKS yang tertangani juga meningkat dari 40,00 persen pada tahun 2020 menjadi 60,00 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak PPKS yang terpenuhi kebutuhannya. Capaian ini harus ditingkatkan dengan pemetaan PPKS dan distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran.

2.4.5. Urusan Pemerintah Wajib Layanan Non Dasar

Urusan Pemerintah Wajib Layanan Non Dasar adalah urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang tidak termasuk dalam layanan dasar (seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dll) namun tetap penting untuk menunjang pembangunan dan pelayanan publik.

A. Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja adalah bidang yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia melalui penyediaan layanan ketenagakerjaan. Fokusnya meliputi peningkatan keterampilan, penempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta pengembangan kewirausahaan.

Tabel 2.37. Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3 (%)	7,27	8,16	10,75	10,00	9,91
Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan (%)	0,45	0,70	0,68	0,77	0,59

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas

Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3 cenderung meningkat dari 7,27 persen pada tahun 2020 menjadi 9,91 persen pada tahun 2024. Secara umum, tren ini dapat menunjukkan bahwa terjadi kenaikan tingkat pendidikan lulusan yang didaftarkan atau diukur, namun pada dua tahun terakhir rasio tersebut mulai stabil atau sedikit menurun. Persentase pencari kerja yang terdaftar dan

berhasil ditempatkan naik dan turun secara fluktuatif dari 0,45 persen menjadi 0,59 persen 2020 sampai 2024. Kenaikan penempatan tenaga kerja dari 2020 ke 2021 dan dari 2022 ke 2023, menandakan perbaikan dalam penempatan tenaga kerja. Penurunan yang terjadi pada 2024 dapat disebabkan oleh faktor eksternal yang mempengaruhi penempatan kerja seperti perubahan pasar tenaga kerja, ekonomi, atau kebijakan. Rasio lulusan pendidikan tinggi mengalami peningkatan hingga 2022, kemudian mulai sedikit menurun atau stabil. Penempatan pencari kerja menunjukkan fluktuasi dengan puncak tertinggi tahun 2023, namun menurun di tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu memberikan perhatian khusus untuk memahami faktor penyebab penurunan rasio lulusan dan penurunan penempatan kerja pada tahun terakhir agar dapat mengoptimalkan kebijakan terkait sumber daya manusia.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan ini fokus pada upaya pemerintah dalam meningkatkan peran serta perempuan dalam berbagai bidang kehidupan serta memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan aman.

Tabel 2.38. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
TPAK Perempuan (%)	65,84	65,14	65,89	67,08	65,86
Kasus KDRT (Kasus)	2	2	3	3	2
Status Kabupaten Layak Anak (Kategori)	N/A	N/A	Pratama	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas, KemenPPA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan relatif stabil sejak tahun 2020-2024 pada angka 65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk wanita yang lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga atau melanjutkan pendidikan Kasus KDRT selama tahun 2020-2024 tercatat kurang dari 3 kasus pada setiap tahunnya. Hasil evaluasi Kabupaten Layak Anak pada tahun 2022 berada pada status Pratama. Pemerintah Kabupaten Padang

Lawas perlu meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam menyiapkan tenaga kerja perempuan. Di samping itu, perlu penguatan regulasi dan kebijakan terkait perlindungan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus sehingga setiap anak berkebutuhan khusus/rentan dapat hidup dengan aman di Kabupaten Padang Lawas.

C. Pangan

Urusan Pangan meliputi pengelolaan ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan keberlanjutan pasokan pangan bagi masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan pangan terpenuhi secara mencukupi, aman, dan bergizi untuk menunjang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.39. Capaian Kinerja Urusan Pangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	75,20	75,60	85,30	86,00	88,60
Ketersediaan Pangan Utama (%)	23,11	18,19	15,24	16,25	60,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas, Badan Pangan Nasional

Skor Pola Pangan Harapan meningkat dari 75,20 poin pada tahun 2020 meningkat hingga tahun 2024 menjadi 88,60 poin. Ketersediaan pangan utama juga semakin meningkat dari 23,11 persen pada tahun 2020 menjadi 60,00 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat. Namun, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebaiknya memastikan ketersediaan dan distribusi pangan secara merata di seluruh wilayah. Selain itu, perlu sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya mengonsumsi pangan yang beragam.

D. Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam serta kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah

pencemaran serta kerusakan lingkungan.

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (Poin)	N/A	80,00	92,47	51,67	50,00
Indeks Kualitas Udara (Poin)	N/A	82,00	58,75	93,81	91,02
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin)	N/A	N/A	52,28	53,39	54,12

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan data tersebut, Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Padang Lawas sudah sangat baik, di mana pada tahun 2024 mencapai nilai sebesar 91,02 poin walaupun menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, untuk kualitas air dan tutupan lahan masing-masing sebesar 50,00 poin dan 54,12 poin. Pemerintah perlu berupaya untuk memastikan air yang aman bagi masyarakat dengan melakukan perbaikan habitat sungai, dan pengendalian sedimentasi untuk menjaga kualitas air alami, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di industri, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber air bersih dan tidak membuang limbah sembarangan. Untuk upaya meningkatkan kualitas tutupan lahan, Pemerintah dapat mengatur pemanfaatan lahan dengan zonasi yang memperhatikan konservasi dan aktivitas ekonomi dan memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan, kawasan lindung, dan kawasan ekosistem penting lainnya.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan ini meliputi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mencakup pencatatan kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, serta pencatatan penduduk lainnya secara akurat dan terintegrasi. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan layanan yang cepat dan tepat untuk menghasilkan data kependudukan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2.41. Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)	88,04	90,41	92,09	95,14	98,83
Rasio bayi berakte kelahiran (%)	85,78	86,77	90,57	91,63	92,18
Rasio pasangan berakte nikah (%)	50,69	43,69	49,85	52,14	56,04

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan data tersebut, masih banyak masyarakat yang belum mengurus keperluan administrasinya kepada pemerintah. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya capaian indikator-indikator pada tabel tersebut. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus keperluan administrasinya serta meningkatkan sistem pelayanan yang responsif dan terpadu agar masyarakat dapat dengan mudah dan cepat dalam mengurus dokumen administrasinya

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa agar dapat mandiri, produktif, dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran dalam membina, membimbing, dan mendukung desa serta komunitas agar mampu mengelola potensi lokal secara optimal.

Tabel 2.42. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Desa Mandiri	0	0	0	1	1
Desa Maju	2	2	3	9	10
Desa Berkembang	104	100	123	202	213
Desa Tertinggal	177	189	165	87	77
Desa Sangat Tertinggal	20	12	12	4	2

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kemendes

Pada tahun 2023 Kabupaten Padang Lawas berhasil memiliki 1 desa dengan status desa mandiri, sementara desa maju terus meningkat dari 2 desa pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menjadi 10 desa. Kabupaten Padang Lawas masih memiliki sebanyak 77 desa tertinggal dan 2 desa sangat tertinggal pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu

mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan status seluruh desa di Kabupaten Padang Lawas.

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan ini berfokus pada pengelolaan dan pengendalian jumlah, kualitas, dan distribusi penduduk untuk mendukung pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan. Pemerintah daerah bertugas melaksanakan program keluarga berencana (KB) serta kebijakan pengendalian penduduk lainnya demi tercapainya kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang lebih baik.

Tabel 2.43. Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate (Anak Per Wanita)	3,19	3,14	3,10	3,13	3,02
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Anak Per 1.000 Wanita)	33,78	33,55	33,15	30,50	28,50
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (%)	39,88	40,37	40,68	41,43	41,10
Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	28,15	27,85	27,35	25,00	21,30
Rasio Akseptor KB (%)	70,00	74,00	80,90	81,10	82,00

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS

Total Fertility Rate menurun dari 3,19 pada tahun 2020 menjadi 3,02 pada tahun 2024. ASFR menurun dari 33,78 anak per wanita pada tahun 2020 menjadi 28,50 per wanita pada tahun 2024. Prevalensi kontrasepsi modern meningkat dari 39,88 persen pada tahun 2020 menjadi 41,10 persen pada tahun 2024. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi menurun dari 28,15 persen pada tahun 2020 menjadi 21,30 persen pada tahun 2024. Rasio Akseptor KB meningkat dari 70,00 persen pada tahun 2020 menjadi 82,00 persen pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas masih perlu untuk mengedukasi pasangan yang belum melaksanakan program KB dalam mendukung penurunan laju pertumbuhan penduduk.

H. Perhubungan

Urusan Perhubungan mencakup penyelenggaraan sistem dan layanan transportasi yang mendukung kelancaran mobilitas barang dan orang di wilayah daerah. Tujuannya adalah meningkatkan konektivitas, keselamatan, dan efisiensi transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.44. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Konektivitas (%)	20,48	19,55	19,33	19,06	19,06
Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Rambu-Rambu terhadap Kondisi Ideal (%)	60,00	60,00	60,00	62,00	62,00

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas

Rasio konektivitas menurun dari 20,48 persen pada tahun 2020 menjadi 19,06 persen pada tahun 2024. Kelengkapan rambu-rambu lalu lintas meningkat dari 60,00 persen pada tahun 2020 menjadi 62,00 persen pada tahun 2024. Penurunan rasio konektivitas menandakan bahwa semakin rendahnya akses antar daerah akibat kerusakan infrastruktur penghubung antar wilayah. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan konektivitas antar daerah melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan transportasi, serta pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada titik-titik yang seharusnya memiliki rambu-rambu lalu lintas.

I. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika berfokus pada pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyebaran informasi yang efektif untuk mendukung pelayanan publik, pemerintahan yang transparan, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Tabel 2.45. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	52,00	62,00	72,00	82,00	92,00
Persentase rumah tangga dengan akses internet (%)	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Padang Lawas semakin baik. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas di masa mendatang perlu membangun infrastruktur telekomunikasi di beberapa wilayah yang masih belum memiliki akses telekomunikasi dan internet.

J. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Urusan ini fokus pada pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta usaha kecil dan menengah sebagai pilar ekonomi yang penting bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.46. Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	1,00	1,20	1,60	1,80	2,00
Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian (%)	0,40	0,40	0,60	0,80	0,80
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	4,75	11,33	11,80	12,00	15,00
Persentase Koperasi Aktif (%)	5,00	6,00	7,00	8,00	26,50

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas

Koperasi aktif meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar 26,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya untuk mendorong pengembangan koperasi. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas ke depannya akan mendorong digitalisasi koperasi sehingga menjangkau lebih banyak anggota dan meningkatkan efisiensi operasional.

K. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal fokus pada pengelolaan dan peningkatan investasi di daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah berperan aktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor, baik domestik maupun asing.

Tabel 2.47. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan Realisasi Investasi (%)	0,86	12,39	1,08	1,50	1,47
Realisasi PMDN/PMA (Rp Miliar)	5.581,06	5.926,28	6.660,48	6.776,71	7.582,94
Jumlah Investor PMDN/PMA (Perusahaan)	10	19	20	23	25
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (%)	1,95	1,08	1,08	1,50	1,47

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas

Penanaman Modal di Kabupaten Padang Lawas cenderung meningkat setiap tahunnya, di mana dapat dilihat bahwa realisasi investasi yang meningkat dari Rp 5.581,06 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 7.582,94 miliar pada tahun 2024. Begitu juga dengan jumlah investor yang meningkat dari 10 perusahaan menjadi 25 perusahaan. Meskipun investasi meningkat, namun penyerapan tenaga kerja masih sangat rendah di mana pada tahun 2024 hanya sebesar 1,47 persen. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu berupaya untuk memperkuat regulasi dan kebijakan terkait penyerapan tenaga kerja lokal pada investasi yang masuk.

L. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi pemuda serta mendorong kegiatan olahraga sebagai bagian dari pembentukan karakter, kesehatan, dan prestasi bangsa. Pemerintah daerah berperan dalam menyediakan fasilitas, program, dan dukungan yang memadai untuk pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga.

Tabel 2.48. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Wirausaha Muda (%)	N/A	69,44	59,51	59,51	70,00
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	23,00	23,00	23,00	23,00	54,00
Jumlah atlet berprestasi (Orang)	35	35	35	35	35
Jumlah prestasi olahraga	2	2	2	2	3
Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas

Persentase wirausaha muda menunjukkan tren positif dengan

kenaikan signifikan di tahun 2024 mencapai 70,00 persen, di mana hal ini menandakan perkembangan usaha muda yang menjanjikan. Pelatih yang bersertifikasi sempat membaik secara signifikan, namun konsistensi perlu ditingkatkan agar capaian tersebut dapat dipertahankan dan terus dikembangkan. Jumlah atlet berprestasi dan prestasi olahraga berfluktuasi setiap tahunnya sehingga diperlukan strategi yang lebih baik untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi secara berkelanjutan. Secara umum, capaian pada urusan kepemudaan dan olahraga menunjukkan kemajuan yang positif namun masih memerlukan perhatian dan strategi untuk peningkatan yang berkelanjutan.

M. Statistik

Urusan Statistik berfokus pada penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data statistik yang akurat dan terpercaya untuk mendukung perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel 2.49. Capaian Kinerja Urusan Statistik

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Statistik (Poin)	N/A	N/A	N/A	1,52	1,60
Buku Kabupaten dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

N. Persandian

Urusan Persandian berkaitan dengan pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi atau informasi rahasia pemerintah daerah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian data serta komunikasi resmi pemerintah. Saat ini Kabupaten Padang Lawas masih belum menerapkan persandian dalam komunikasi antar perangkat daerah sehingga ke depannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas meningkatkan cyber security dalam menjamin keamanan datanya.

O. Kebudayaan

Urusan Kebudayaan berfokus pada pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas dan kekayaan daerah yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Pemerintah daerah bertugas menjaga warisan budaya sekaligus mendorong kreativitas dan inovasi budaya untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.50. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Kegiatan)	2	1	10	10	10
Benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan (Objek)	10	26	26	26	26
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Objek)	20	20	20	20	20
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Objek)	26	26	26	26	26

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Lawas

Data tersebut menunjukkan sebanyak 26 objek yang terdiri dari benda, situs, dan cagar budaya sudah terdata dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah akan meningkatkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan Masyarakat dan menjaga kelestarian budaya benda dan tak benda.

P. Perpustakaan

Urusan Perpustakaan berfokus pada penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi, literasi, dan edukasi masyarakat. Pemerintah daerah berperan dalam menjamin akses luas masyarakat terhadap sumber ilmu pengetahuan dan budaya melalui layanan perpustakaan yang modern dan ramah pengguna.

Tabel 2.51. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Minat Baca (Poin)	2,58	3,05	7,00	43,00	50,26
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (Orang)	191	389	408	1.154	495
Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	N/A	N/A	4,00	5,00	10,20

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Padang Lawas

Indeks minat baca meningkat dari 2,58 poin pada tahun 2020 menjadi 50,26 poin pada tahun 2024, sementara tingkat kunjungan menurun pada tahun 2024 menjadi sebanyak 495 orang pengunjung. Pustkawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat meningkat dari 4,00 persen pada tahun 2022 menjadi 10,20 persen pada tahun 2024. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa keinginan masyarakat untuk membaca semakin tinggi. Penurunan kunjungan masyarakat ke perpustakaan dapat disebabkan oleh semakin banyaknya buku-buku yang berbentuk digital sehingga tingkat kunjungan ke perpustakaan mengalami penurunan. Ketersediaan SDM perpustakaan yang memiliki sertifikat masih sangat kecil sehingga diperlukan pelatihan dan pengembangan keterampilan SDM perpustakaan agar memberikan pelayanan yang optimal bagi pengunjung dan tata kelola perpustakaan.

Q. Kearsipan

Urusan Kearsipan berfokus pada pengelolaan dan pemeliharaan arsip atau dokumen pemerintah secara sistematis, agar informasi penting dapat tersimpan dengan aman, mudah ditemukan, dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan administratif, hukum, dan sejarah.

Tabel 2.52. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Poin)	42,54	N/A	15,64	15,85	15,00
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	15,00	18,60	9,30	9,30	45,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Padang Lawas

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah mengalami penurunan dari 42,54 poin pada tahun 2020 menjadi 15,00 poin pada tahun 2024. Sementara, perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku meningkat dari 15,00 persen pada tahun 2020 menjadi 45,00 persen pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan arsipnya melalui digitalisasi

dokumen-dokumen pemerintah agar dokumen penting pemerintah dapat terjaga dengan baik.

2.4.6. Urusan Pilihan

Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk dipilih dan diselenggarakan sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan kemampuan daerah masing-masing. Urusan ini bersifat tidak wajib, tetapi dapat dijadikan prioritas daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan.

A. Pariwisata

Urusan Pariwisata berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan potensi wisata daerah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat ekonomi lokal, serta melestarikan nilai budaya dan lingkungan.

Tabel 2.53. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	680	1.375	1.450	1.500	2.250

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas

Jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat dari 680 orang pada tahun 2020 menjadi 2.250 orang pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas ke depannya perlu meningkatkan daya tarik sektor pariwisatanya mengingat sektor ini merupakan sektor pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menjadi multiplier effect bagi kemajuan ekonomi daerah.

B. Pertanian

Urusan Pertanian meliputi pengelolaan sumber daya pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, peningkatan produksi, dan kesejahteraan petani di daerah. Fokusnya adalah pada pengembangan sektor pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Tabel 2.54. Capaian Kinerja Urusan Pertanian					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	5,52	5,10	4,78	4,73	4,38
Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB (%)	34,34	37,03	38,47	39,64	41,61
Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%)	1,83	1,82	1,89	1,90	1,88
Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan (Rp Juta/kapita)	73,21	87,37	82,74	116,55	125,73

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas, BPS

Berdasarkan data dari BPS, penyumbang perekonomian terbesar dari Sektor Pertanian berasal dari Sub-Sektor Perkebunan, di mana kontribusinya terus meningkat dari 34,34 persen pada tahun 2020 mencapai 41,61 persen pada tahun 2024. Sementara itu, sektor Pertanian dan Peternakan mengalami penurunan dari tahun 2020-2024. Dari sisi produktivitas, Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan mengalami peningkatan dari Rp 73,21 juta per kapita menjadi Rp 125,73 juta per kapita. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya nilai yang dihasilkan oleh setiap orang tenaga kerja pada sektor tersebut.

C. Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan meliputi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, menjaga kelestarian ekosistem laut, dan mendukung ketahanan pangan.

Tabel 2.55. Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	0,27	0,25	0,24	0,24	0,23
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.010,52	3.937,66	4.223,69	4.092,94	4.142,88

Sumber: Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Padang Lawas, BPS Kabupaten Padang Lawas

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB rendah dan menurun dari

0,27 persen pada tahun 2020 menjadi 0,23 persen pada tahun 2024. Kondisi geografis Kabupaten Padang Lawas tidak mendekati laut sehingga kontribusi sektor perikanan hanya berasal dari pembudidaya perikanan. Namun, Kabupaten Padang Lawas memiliki perikanan budidaya di wilayahnya yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya melalui hilirisasi produk perikanan budidaya sehingga memiliki nilai tambah.

D. Perdagangan

Urusan Perdagangan mencakup pengelolaan dan pengembangan aktivitas perdagangan di daerah untuk meningkatkan perekonomian, memperluas pasar, dan melindungi konsumen.

Tabel 2.56. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	6,95	6,69	6,42	6,25	6,13
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	33,33	44,44	55,56	55,56	66,67

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas, BPS Kabupaten Padang Lawas

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB mengalami penurunan dari 6,95 persen pada tahun 2020 menjadi 6,13 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa adanya pergeseran aktivitas ekonomi ke sektor lapangan usaha lainnya. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok meningkat dari 33,33 persen pada tahun 2020 menjadi 66,67 persen pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu memperhatikan ketersediaan dan kondisi sarana prasarana perdagangan agar para pedagang dapat berjualan di tempat yang layak dan masyarakat dapat berbelanja dengan nyaman. Di samping itu, pemerintah juga perlu memastikan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok terdistribusi dengan lancar kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan transportasi.

E. Perindustrian

Urusan Perindustrian meliputi pengembangan dan pengelolaan sektor industri di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing produk lokal.

Tabel 2.57. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi jumlah IKM (%)	81,00	91,00	88,00	70,00	90,00

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas

Proporsi jumlah IKM meningkat dari 81,00 persen pada tahun 2020 menjadi 90,00 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin bertumbuhnya Industri Kecil dan Menengah yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus menyikapi hal ini dengan memberikan dukungan berupa bantuan peralatan atau teknologi, serta inovasi pada produk-produk yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah di daerah.

2.4.7. Penunjang Urusan

Penunjang Urusan adalah kegiatan atau layanan yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan utama agar dapat berjalan efektif dan efisien. Meskipun bukan urusan inti, penunjang ini sangat penting untuk kelancaran operasional dan pelaksanaan program di berbagai sektor.

A. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan adalah proses penyusunan rencana yang sistematis untuk mengarahkan pembangunan daerah agar tercapai tujuan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi dasar pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan di berbagai sektor.

Tabel 2.58. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dokumen RPJPD yang Ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RPJMD yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RKPД yang Ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RTRW yang Ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Padang Lawas

Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas dibidangi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah hingga tahun 2024 masih belum memiliki data karena merupakan indikator yang baru, namun ke depannya akan dilakukan perhitungan indeks. Capaian kinerja selama tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang utama sudah tersusun dengan baik. Meskipun demikian, pemerintah wajib memperhatikan dokumen perencanaan yang telah tersusun agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

B. Keuangan

Urusan Keuangan merupakan fungsi penunjang yang mengelola seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan.

Tabel 2.59. Capaian Indikator Kinerja Keuangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK atas Pelaporan Keuangan (Level)	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	4,25	4,39	5,39	4,95	3,88
RoA BUMD (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah

Berdasarkan data pada tabel tersebut, Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menurun pada tahun 2023 dan 2024 dari WTP menjadi WDP. Kabupaten Padang Lawas mengalami penurunan kemampuan dalam menghasilkan pendapatannya sendiri. Hal ini ditunjukkan dari penurunan rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah dari 4,25 persen pada tahun 2020 menjadi 3,88 persen pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kualitas sistem pelaporan keuangan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan yang solutif dan adaptif sehingga daerah memiliki kemampuan dari segi finansial dalam pembiayaan pembangunan Kabupaten Padang Lawas. Data indikator RoA BUMD masih belum tersedia karena belum terdapat BUMD di Kabupaten Padang Lawas, namun Kabupaten Padang Lawas berencana untuk membangun BUMD di daerah sehingga indikator ini tetap dipertahankan dan akan dihitung ketika BUMD sudah beroperasi.

C. Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan ini fokus pada pengelolaan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah melalui manajemen kepegawaian dan program pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai.

Tabel 2.60. Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	N/A	N/A	N/A	73,00	70,00
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas

Data tersebut menunjukkan bahwa masih sedikit ASN yang mengikuti

Pendidikan dan pelatihan, serta memiliki sertifikasi. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan meningkatkan partisipasi ASN dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas ASN.

D. Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) berfungsi sebagai penunjang dalam menyediakan data, informasi, dan inovasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah secara efektif dan berbasis bukti. Data terkait urusan penelitian dan pengembangan tidak tersedia karena belum ada inovasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas ke depannya akan berupaya untuk menghasilkan inovasi-inovasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan daerah.

E. Pengawasan

Urusan Pengawasan berperan sebagai fungsi penunjang untuk memastikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan, efektif, dan efisien, serta meminimalkan risiko penyimpangan.

Tabel 2.61. Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Persepsi Korupsi (Poin)	66,84	78,37	74,00	72,00	74,00
Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B (%)	70,00	70,00	80,00	95,00	95,00
Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	75,38	82,05	82,74	80,12	85,00
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Level)	2	2	2	2	2
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Level)	N/A	1	1	2	2

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, skor IPK adalah 66,84 poin,

lalu naik tajam menjadi 78,37 poin di tahun 2021. Meskipun sempat turun sedikit menjadi 74,00 pada tahun 2022 dan 72,00 pada 2023, indeks ini kembali pulih ke angka 74,00 poin pada tahun 2024. Indeks Persepsi Korupsi mengalami peningkatan, menandakan adanya upaya yang berkelanjutan dalam mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi.

Perubahan ini menunjukkan kesadaran dan upaya yang terus berlangsung dalam peningkatan transparansi dan penurunan praktik korupsi. Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B juga menunjukkan peningkatan yang konsisten. Dari 70,00 persen pada 2020 dan 2021, naik menjadi 80,00 persen di tahun 2022, dan kemudian mencapai 95 persen pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini mencerminkan perbaikan kualitas manajemen dan tata kelola organisasi perangkat daerah secara signifikan. Temuan BPK atau Inspektorat yang berhasil ditindaklanjuti juga mengalami peningkatan dari 75,38 persen di 2020 menjadi 82,05 persen di 2021, lalu meningkat lagi menjadi 82,74 persen di 2022. Meskipun sedikit menurun pada 2023 menjadi 80,12 persen, angka ini kembali naik menjadi 85 persen pada tahun 2024. Ini menggambarkan komitmen yang meningkat dalam menindaklanjuti temuan audit dan pengawasan. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tetap stabil pada level 2 selama lima tahun terakhir, yang menandakan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan, namun masih dalam tahap pengembangan yang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berada pada level 1 di tahun 2021 dan 2022, kemudian naik menjadi level 2 di tahun 2023 dan 2024. Ini menunjukkan adanya penguatan kapasitas aparat pengawas intern yang lebih baik dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berfokus memperbaiki sistem pengendalian intern dan kapasitas pengawas untuk mencapai tingkat maturitas yang lebih tinggi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

F. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah (Setda) merupakan unit penunjang utama yang mengkoordinasi dan mendukung kelancaran administrasi pemerintahan daerah serta pelaksanaan tugas kepala daerah dan perangkat daerah lainnya.

Tabel 2.62. Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi SAKIP (Poin)	C	C	C	CC	CC

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan data pada tabel, nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Padang Lawas meningkat dari C pada tahun 2020 menjadi CC pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas semakin baik dalam mencapai target dari kinerja yang diharapkan.

2.5. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan kualitas pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga negara. SPM mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas, merata, dan tidak diskriminatif, serta menjadi acuan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya. SPM juga berfungsi sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.63. Capaian SPM Kabupaten Padang Lawas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi					OPD penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
I PENDIDIKAN									
A. Pendidikan Dasar dan Menengah									
1	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 tahun	Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	95,31	95,39	96,44	96,67	98,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi					OPD penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
2	Kemampuan Literasi SD/MI	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Nilai	43,84	45,19	46,54	52,47	53,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Kemampuan Numerasi SD/MI	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Nilai	21,03	26,91	32,79	47,54	51,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Iklm Keamanan SD/MI	Indeks Iklm Keamanan di Satuan Pendidikan	Nilai	67,03	68,40	69,77	70,61	73,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Iklm Kebinekaan SD/MI	Indeks Iklm Kebinekaan di Satuan Pendidikan	Nilai	53,67	56,19	58,71	66,85	67,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Iklm Inklusivitas SD/MI	Indeks Iklm Inklusivitas di Satuan Pendidikan	Nilai	48,11	50,83	53,55	56,37	57,41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Kemampuan Literasi SMP/MTs	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Nilai	25,54	28,75	31,96	46,14	57,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Kemampuan Numerasi SMP/MTs	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Nilai	50,72	51,44	52,68	53,22	55,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Iklm Keamanan SMP/MTs	Indeks Iklm Keamanan di Satuan Pendidikan	Nilai	56,53	59,21	61,89	64,61	67,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Iklm Kebinekaan SMP/MTs	Indeks Iklm Kebinekaan di Satuan Pendidikan	Nilai	46,88	52,20	57,52	64,16	67,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Iklm Inklusivitas SMP/MTs	Indeks Iklm Inklusivitas di Satuan Pendidikan	Nilai	41,12	45,73	50,34	54,95	54,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi					OPD penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
B Pendidikan Kesetaraan									
1	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Kesetaraan	Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	15,26	15,38	15,62	15,76	21,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									
1	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	57,43	59,76	61,52	63,42	80,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	8,25	8,72	10,84	12,22	15,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4	Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D IV	Persen	47,85	48,22	49,64	49,83	50,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
II Kesehatan									
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	54,00	51,33	51,33	61,10	66,90	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	38,20	44,00	44,00	62,60	63,20	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	52,2	51,20	51,20	66,40	63,00	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	40,00	46,30	46,30	45,00	66,00	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	100,00	99,03	99,03	98,00	100,00	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	85,00	26,30	6,50	31,10	38,00	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi					OPD penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	33,00	74,00	48,00	48,00	98,00	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	6,66	3,60	10,25	75,82	84,00	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	24,00	31,70	30,00	310,00	184,00	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	71,24	79,00	68,38	100,90	127,00	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara dterduga tuborkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	15,20	24,70	53,34	96,90	69,50	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	20,80	100,00	100,00	73,20	88,70	Dinas Kesehatan
III Pekerjaan Umum									
1	Penyediaan kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	15,00	15,66	20,50	22,00	25,00	Dinas Pekerjaan Umum
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
IV Perumahan Rakyat									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perkimhub
2	Fasilitasi penyediaan	Jumlah warga	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi					OPD penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
	rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota	negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni							Perkimhub
V Trantibumlinmas									
1	Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban umum	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satpol PP & Damkar
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	BPBD
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	BPBD
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	BPBD
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satpol PP & Damkar
VI Sosial									
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	0,00	0,00	0,00	29,50	14,20	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	40,00	20,00	20,00	60,00	46,00	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh	Persen	87,00	100,00	100,00	98,00	44,50	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi					OPD penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
		rehabilitasi sosial di luar panti							
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	13,30	26,60	29,40	46,00	34,00	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	78,60	77,70	78,90	80,10	80,90	Dinas Sosial

2.6. Gambaran Umum Keuangan Daerah

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas tahun 2025 – 2029 memuat ringkasan kondisi keuangan daerah. Ringkasan ini setidaknya meliputi analisis keadaan keuangan daerah pada periode 2020 – 2024 serta proyeksi kondisi keuangan selama pelaksanaan RPJMD 2025 – 2029. Gambaran keuangan tersebut dilakukan melalui kajian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah alat utama dari kebijakan fiskal daerah yang memegang peran penting dan strategis dalam pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya dalam pelaksanaan RPJMD periode 2025 - 2029. APBD memiliki peran strategis yang berkaitan dengan tiga fungsi utama pemerintah, yakni: (i) pengalokasian sumber daya ekonomi; (ii) pendistribusian barang dan jasa; serta (iii) menjaga stabilitas dan percepatan kinerja ekonomi.

Penyusunan ringkasan kondisi keuangan daerah bertujuan untuk menganalisis capaian penggunaan keuangan daerah di masa lalu sekaligus memberikan proyeksi guna mengevaluasi kemampuan daerah mendanai

program pembangunan selama periode yang akan datang. Pemerintah menggunakan APBD dalam bentuk belanja daerah untuk menjalankan program pembangunan pemerintahan. Belanja daerah ini diharapkan mampu memberikan dorongan dan stimulasi terhadap perkembangan ekonomi lokal sehingga menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas secara lebih luas dan merata.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Padang Lawas dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Semua ini bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, sesuai peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan mengutamakan keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat. Selain itu, Kabupaten Padang Lawas juga mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Tujuannya adalah agar aset dan sumber daya daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Padang Lawas menerapkan prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah yang mencakup: (1) pendapatan yang direncanakan adalah perkiraan yang rasional dan terukur, sementara belanja yang dianggarkan menjadi batas maksimal pengeluaran; (2) penganggaran pengeluaran harus didasarkan pada kepastian penerimaan daerah yang cukup, dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan tanpa ketersediaan anggaran di APBD atau Perubahan APBD; (3) semua penerimaan dan

pengeluaran daerah dalam tahun anggaran harus tercatat dalam APBD dan dibukukan pada rekening Kas Umum Daerah.

Rencana pendanaan dalam rancangan teknokratik RPJMD menjadi dasar untuk memberikan gambaran dan rekomendasi tentang kerangka pendanaan pembangunan yang nantinya akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan, seperti Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja SKPD. Dalam hal visualisasi dan aktualisasi perubahan, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada kepentingan masyarakat. Hal ini tidak hanya diukur dari besarnya alokasi anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian keuangan daerah.
2. Mengembangkan kerangka hukum dan administrasi untuk pembiayaan dan investasi yang berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel, adil, dan sesuai norma.
3. Menerapkan prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa daerah secara profesional dan bertanggung jawab.
4. Meningkatkan kualitas standar dan sistem akuntansi serta pelaporan keuangan daerah, termasuk peran auditor independen dalam pemeriksaan, pemberian opini, evaluasi kinerja anggaran, dan memastikan keterbukaan informasi anggaran kepada publik.
5. Memperkuat aspek pembinaan dan pengawasan keuangan daerah, baik melalui pengawasan internal (fungsional) maupun pengawasan eksternal yang melibatkan partisipasi masyarakat.
6. Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah yang dapat menyediakan data anggaran yang tepat dan akurat sebagai komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah.

Keuangan daerah mengacu kepada semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan belanja dan pembiayaan daerah dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Sistematika dalam memberikan gambaran ringkas keuangan daerah terbagi ke dalam dua sub utama, yaitu (1) kinerja keuangan di masa lalu, dan (2) proyeksi keuangan di masa depan. Kinerja keuangan di masa lalu menggambarkan pelaksanaan APBD yang memberikan gambaran ringkas terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan keuangan di Kabupaten Padang Lawas selama periode 2020 sampai dengan 2024. Proyeksi keuangan di masa depan akan memberikan gambaran ringkas proyeksi keuangan daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2025 – 2029 yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mewujudkan harapan pembangunan dalam melaksanakan RPJPD Periode Pertama.

Tabel berikut adalah realisasi pendapatan daerah periode 2020-2024:

Tabel 2.64. Kinerja APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024

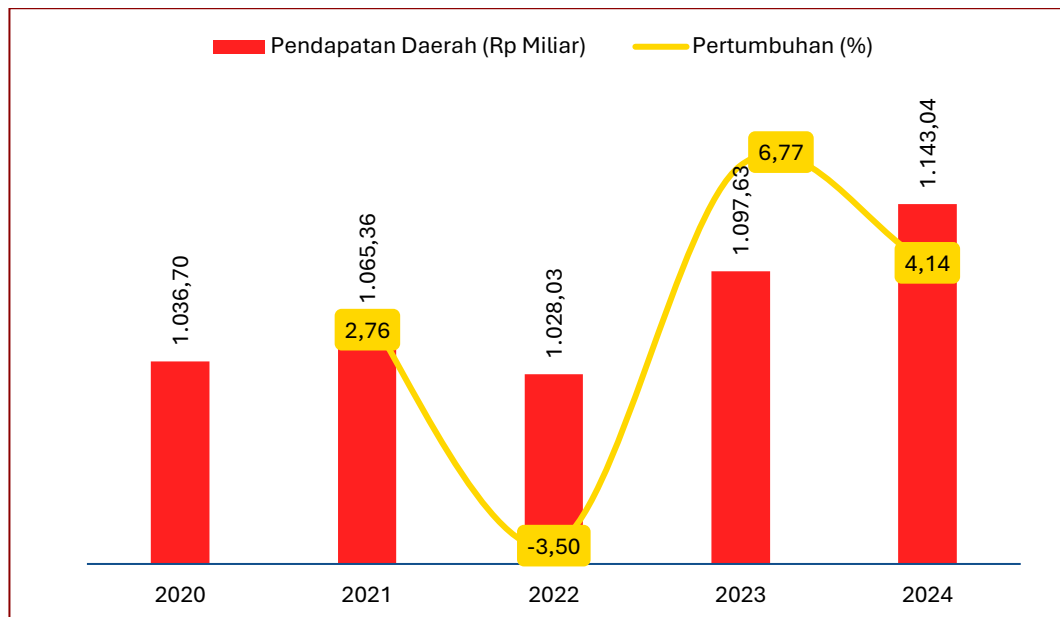
Kode	Uraian	Realisasi (Rp)					r	g
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pendapatan Daerah	1.036.704.391.445,44	1.065.364.286.682,04	1.028.027.894.699,09	1.097.626.313.980,84	1.143.043.620.976,92	2,54%	1,97%
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	44.055.621.274,44	46.759.858.387,04	55.408.021.053,09	54.296.104.748,84	44.351.945.284,92	1,08%	0,13%
1.1.1	Pajak Daerah	12.861.852.315,11	13.130.701.944,00	21.424.802.112,00	20.151.124.369,00	16.690.134.937,00	10,53%	5,35%
1.1.2	Retribusi Daerah	2.467.318.627,00	3.257.739.071,00	14.688.479.262,00	16.071.857.103,00	19.059.218.199,00	102,73%	50,51%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.347.617.748,00	5.074.401.622,00	3.958.461.193,13	3.562.723.845,00	3.699.230.788,19	22,00%	9,52%
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	26.378.832.584,33	25.297.015.750,04	15.336.278.485,96	14.510.399.431,84	4.903.361.360,73	-28,77%	-28,58%
1.2	Pendapatan Transfer	722.028.634.171,00	980.634.255.295,00	972.619.873.646,00	1.043.330.209.232,00	1.075.745.907.823,00	11,34%	8,30%
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	682.838.699.920,00	939.067.861.605,00	923.813.984.840,00	990.420.464.734,00	1.036.179.654.915,00	11,93%	8,70%
1.2.1.1	Dana Perimbangan			701.147.899.960,00	756.070.408.854,00	793.261.919.415,00	6,38%	6,37%
1.2.1.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya			222.666.084.880,00	234.350.055.880,00	242.917.735.500,00	4,45%	4,45%
1.2.1.2.1	Dana Desa			219.070.681.880,00	234.350.055.880,00	237.180.396.000,00	4,09%	4,05%
1.2.1.2.1	Insentif Fiskal			3.595.403.000,00		5.737.339.500,00	59,57%	26,32%
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.189.934.251,00	41.566.393.690,00	48.805.888.806,00	52.909.744.498,00	39.566.252.908,00	1,67%	0,19%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			44.925.133.806,00	45.279.381.672,00	39.566.252.908,00	-5,91%	-6,15%
1.2.2.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			3.880.755.000,00	7.630.362.826,00		96,62%	96,62%
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	270.620.136.000,00	37.970.173.000,00	0,00	0,00	22.945.767.869,00	-62,77%	-38,95%
1.3.1	Pendapatan Hibah					13.207.680.000,00	-	-
1.3.2	Pendapatan Lainnya	270.620.136.000,00	37.970.173.000,00	0	0	9.738.087.869,00	-80,16%	-48,57%

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)					r	g
		2020	2021	2022	2023	2024		
2	Belanja	1.035.264.004.104,00	1.076.587.745.659,00	1.053.281.447.741,00	1.074.389.967.120,00	1.136.562.852.638,00	2,40%	1,88%
2.1	Belanja Operasi	582.197.337.553,00	633.718.870.021,00	630.470.986.646,00	629.432.980.886,00	717.351.572.311,00	5,54%	4,26%
2.1.1	Belanja Pegawai	365.904.697.961,00	336.613.956.837,00	351.057.657.291,00	363.503.467.376,00	407.963.542.267,00	3,02%	2,20%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	199.908.800.677,00	239.902.236.504,00	262.234.172.820,00	251.057.253.815,00	244.050.159.928,00	5,57%	4,07%
2.1.3	Belanja Hibah	13.531.958.915,00	54.604.544.680,00	12.745.716.535,00	13.688.764.695,00	64.317.340.120,00	151,03%	36,58%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	2.851.880.000,00	2.598.132.000,00	4.433.440.000,00	1.183.495.000,00	1.020.529.996,00	-6,33%	-18,58%
2.2	Belanja Modal	143.366.541.808,00	145.733.333.116,00	134.826.465.820,00	143.930.366.225,00	113.789.558.574,00	-5,01%	-4,52%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	-	3.106.646.000,00	-	-	-	-	-
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.463.521.001,00	18.640.357.443,00	16.231.502.731,00	40.339.889.861,00	16.953.255.560,00	1,12%	-24,58%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.982.874.265,00	53.492.045.002,00	56.280.047.562,00	38.294.193.763,00	13.454.993.358,00	22,55%	-6,65%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.848.553.219,00	70.489.284.671,00	62.287.840.527,00	59.852.411.271,00	77.118.165.072,00	12,98%	8,69%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.071.593.323,00	5.000.000,00	27.075.000,00	5.443.871.330,00	6.263.144.584,00	5090,83%	8,99%
2.3	Belanja Tidak Terduga	13.983.940.146,00	2.731.885.932,00	3.757.058.103,00	2.844.504.241,00	2.681.589.050,00	-18,24%	-28,13%
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	13.983.940.146,00	2.731.885.932,00	3.757.058.103,00	2.844.504.241,00	2.681.589.050,00	-18,24%	-28,13%
2.4	Belanja Transfer	295.716.184.597,00	294.403.656.590,00	284.226.937.172,00	298.182.115.768,00	302.740.132.703,00	0,63%	0,47%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.597.417.308,00	-	-	3.622.298.147,20		126,76%	126,76%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	294.118.767.289,00	294.403.656.590,00	284.226.937.172,00	294.559.817.620,80	302.740.132.703,00	0,76%	0,58%
	Surplus (Defisit)	1.440.387.341,44	-11.223.458.976,96	-25.253.553.041,91	23.236.346.860,84	6.480.768.338,92	-254,58%	35,09%
3	Pembiayaan	45.698.121.223,88	45.351.150.014,32	34.145.151.037,36	8.891.597.995,45	32.127.944.856,29	40,48%	-6,80%
3.1	Penerimaan Pembiayaan	45.698.121.223,88	47.138.508.565,32	34.145.151.037,36	8.891.597.995,45	32.127.944.856,29	40,74%	-6,80%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan	45.698.121.223,88	47.138.508.565,32	34.145.151.037,36	8.891.597.995,45	32.127.944.856,29	40,74%	-6,80%

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)					r	g
		2020	2021	2022	2023	2024		
	Anggaran Tahun Sebelumnya							
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1.787.358.551,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	0,00	1.787.358.551,00	0,00	0,00	0,00		
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	47.138.508.565,32	34.127.691.037,36	8.891.597.995,45	32.127.944.856,29	38.608.713.195,21	44,99%	-3,91%

2.6.1. Pendapatan Daerah

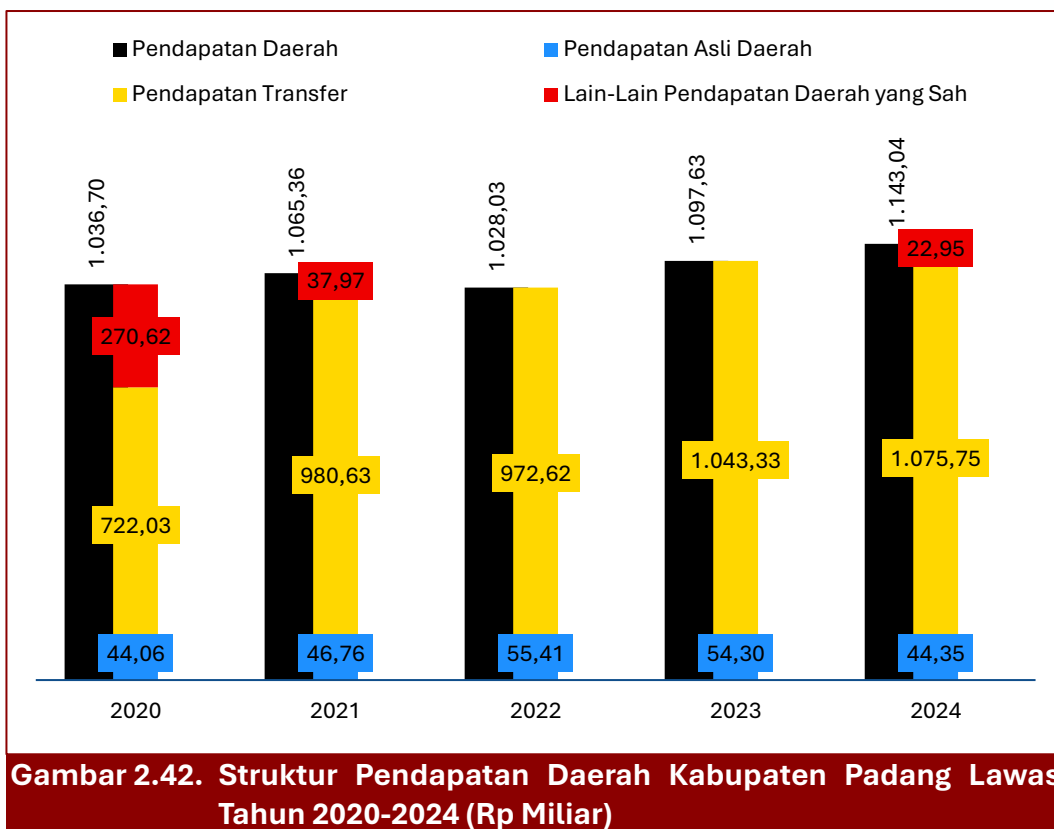
Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Pendapatan ini menjadi sumber utama keuangan daerah yang menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terbagi atas tiga jenis, yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan Transfer; dan 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.41. Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024

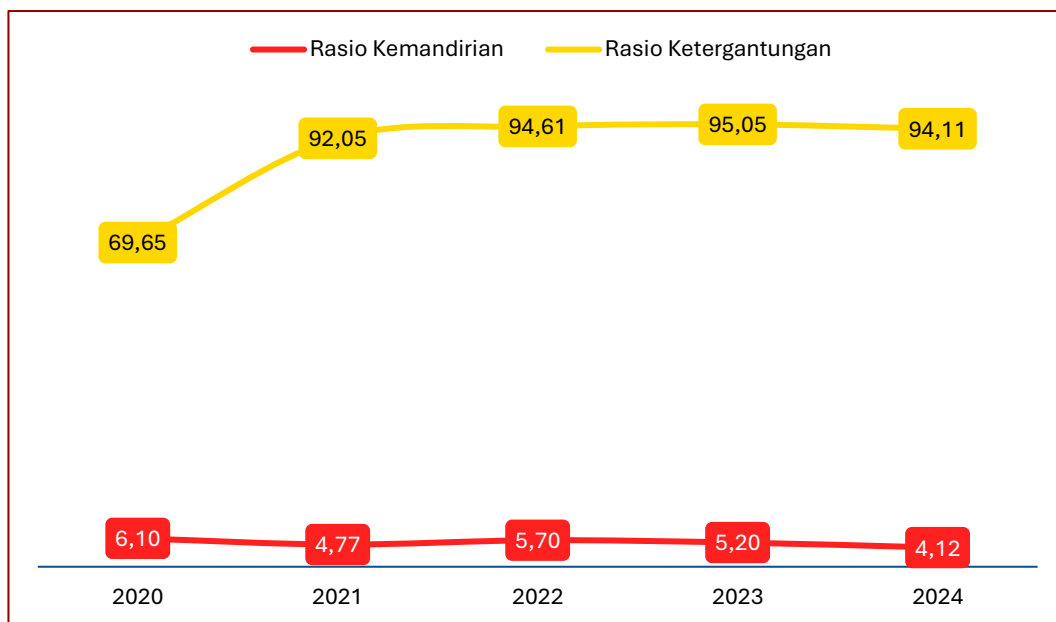
Sumber: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas cenderung meningkat dari Rp 1.036,70 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 1.143,04 miliar pada tahun 2024 atau bertumbuh sebesar 4,14 persen dari tahun sebelumnya. Secara rata-rata, pertumbuhan Pendapatan Daerah periode 2020-2024 sebesar 1,97 persen per tahunnya. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah

Pendapatan Daerah didominasi oleh Pendapatan Transfer yang meningkat dari Rp 722,03 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 1.075,75 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, Pendapatan Daerah relatif stabil pada kisaran Rp 44 miliar selama tahun 2020-2024 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah menurun dari Rp 270,62 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 22,95 miliar pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya ketergantungan daerah terhadap pusat dalam membiayai kebutuhan belanjanya. Peningkatan ini menunjukkan ketidakmampuan daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerahnya selama periode tersebut.



Gambar 2.43. Rasio Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah

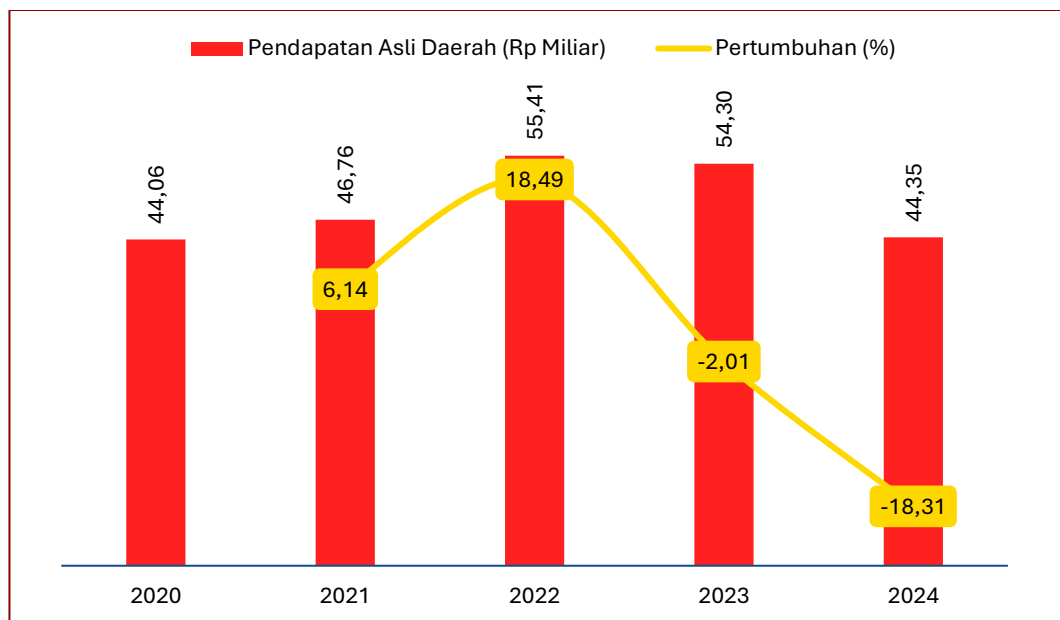
Rasio kemandirian daerah semakin menurun sejak tahun 2020 sebesar 6,10 persen menjadi 4,12 persen pada tahun 2024, sementara rasio ketergantungan terus meningkat dari 69,65 persen pada tahun 2020 menjadi 94,11 persen pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa Kabupaten Padang Lawas semakin bergantung pada pendapatan transfer untuk membiayai pembangunan daerahnya. Untuk meningkatkan kemandirian daerah, maka Kabupaten Padang Lawas perlu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerahnya dan menggali potensi daerah.

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah secara mandiri dari potensi ekonomi yang ada dalam wilayahnya, tanpa bergantung langsung pada pemerintah pusat. PAD merupakan cerminan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya lokal secara efektif dan efisien. Komponen PAD terdiri atas pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah sesuai regulasi. Faktor utama keberhasilan pengoptimalan PAD tidak hanya terletak pada besaran tarif pajak dan

retribusi, tetapi juga pada kualitas manajemen administrasi perpajakan, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban fiskalnya.

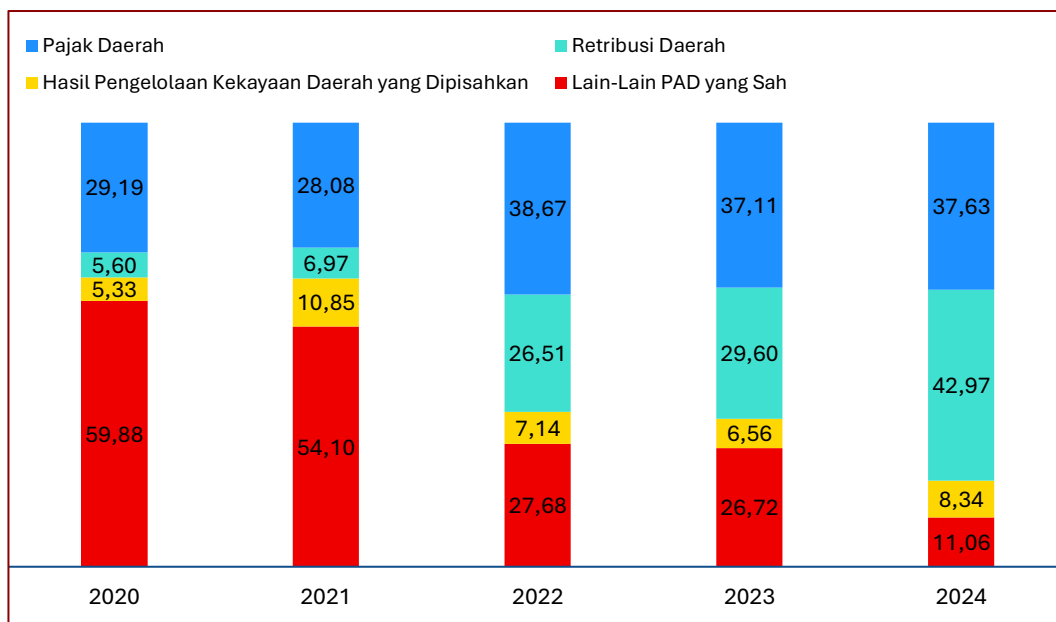
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel gambar berikut:



Gambar 2.44. Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas meningkat dari Rp 44,06 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 55,41 miliar pada tahun 2022, di mana pada tahun ini pendapatan daerah mengalami pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 18,49 persen dari tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2022 merupakan capaian yang tertinggi selama periode 2020-2024. Pendapatan Daerah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 44,35 miliar pada tahun 2024 atau menurun sebesar 18,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Struktur Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada gambar berikut:



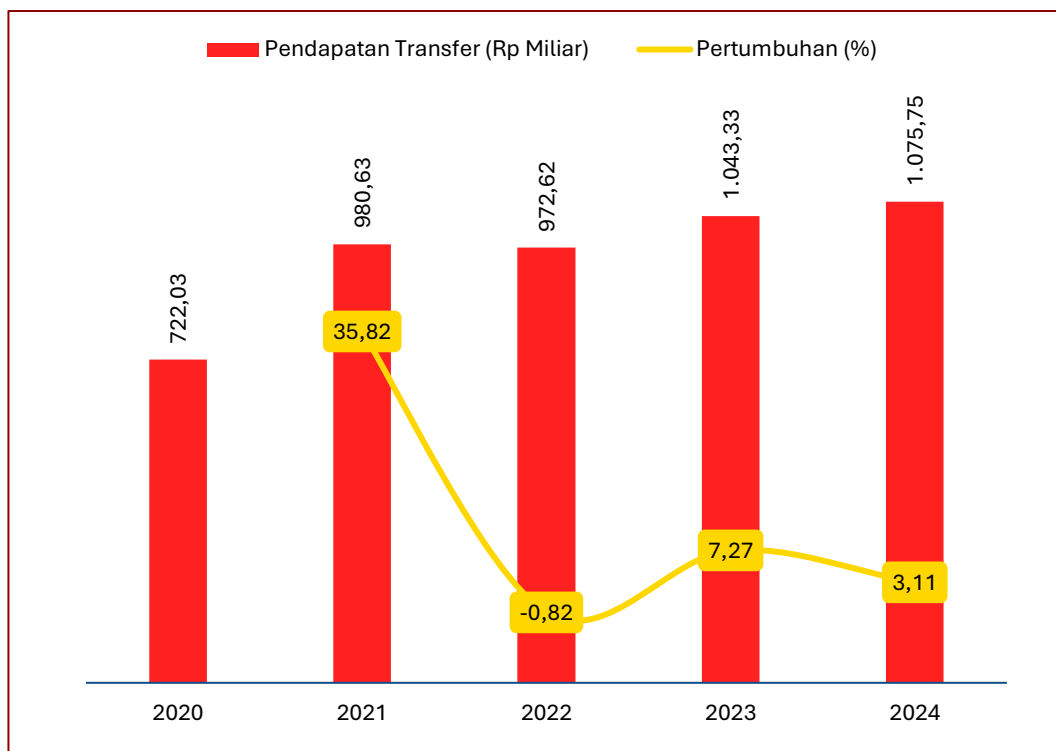
Gambar 2.45. Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah

Pada tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah masih didominasi Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 59,88 persen yang terus mengalami penurunan hingga tahun 2024. Pergeseran ini disebabkan oleh meningkatnya kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara total meningkat dari 34,79 persen pada tahun 2020 menjadi 80,60 persen pada tahun 2024.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atau entitas pemerintahan dari pemerintah pusat atau lembaga lain tanpa harus menanggung beban pengembalian, seperti pajak atau pinjaman. Pendapatan ini berperan penting dalam mendanai berbagai program pemerintahan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya fiskal. Perkembangan Pendapatan Transfer Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:



Gambar 2.46. Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah

Pendapatan Transfer terus meningkat setiap tahunnya dari Rp 722,03 persen pada tahun 2020 menjadi Rp 1.075,75 miliar pada tahun 2024. Sementara pertumbuhannya cenderung menurun dari 35,82 persen pada tahun 2021 menjadi 3,11 persen pada tahun 2024.

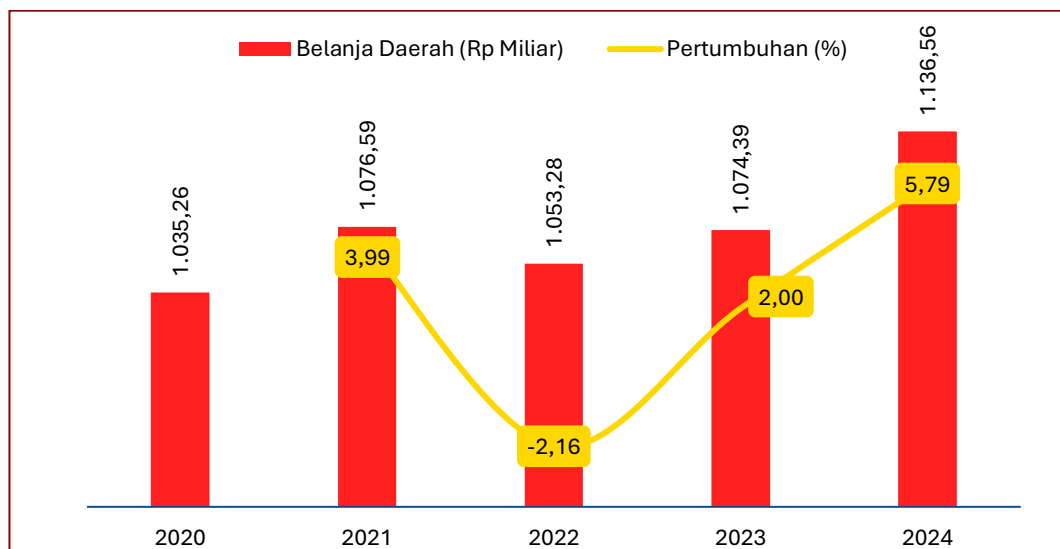
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sumber pendapatan resmi yang diperoleh pemerintah daerah selain dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber yang diakui secara hukum dan digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan serta pembangunan di daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak ada sejak tahun 2022-2023, namun pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menerima Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 22,95 miliar yang bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp 13,21 miliar dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp 9,74 miliar

2.6.2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan komponen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah. Belanja ini mencakup berbagai pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, membangun infrastruktur, serta menyediakan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Belanja daerah tidak hanya memastikan kelancaran administrasi dan operasional pemerintahan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan fasilitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, belanja daerah harus direncanakan secara cermat sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

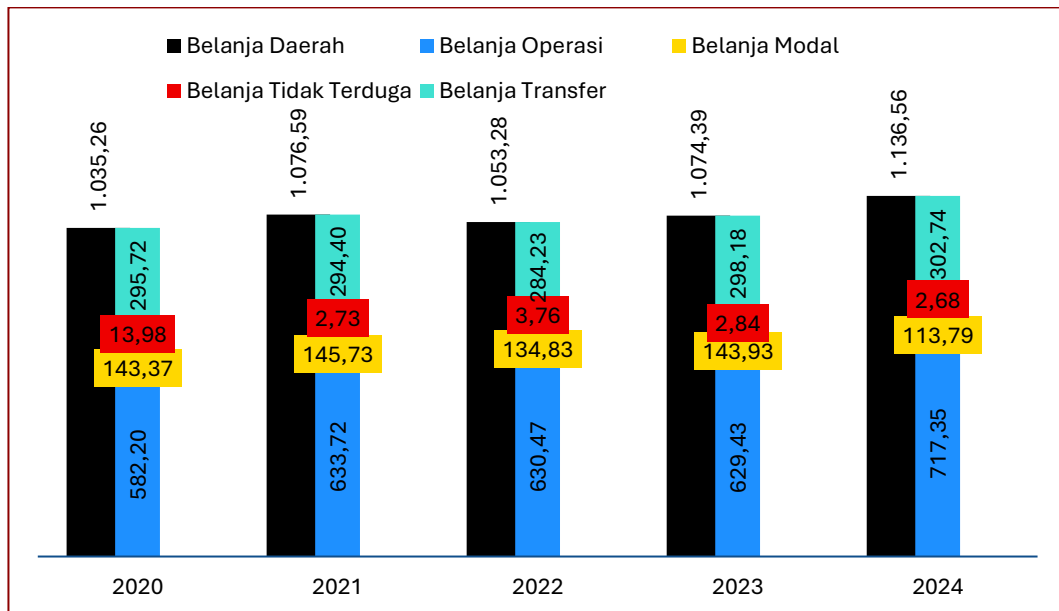
Pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi agar penggunaan dana publik dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan. Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan bahwa setiap rupiah belanja digunakan sesuai dengan peruntukannya, serta melakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Selain itu, belanja daerah yang efektif dapat memperkuat pemerataan pembangunan antar wilayah, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan daya saing daerah secara keseluruhan.



Gambar 2.47. Realisasi dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah

Secara umum, belanja daerah menunjukkan tren meningkat dari Rp 1.035,26 miliar pada 2020 menjadi Rp 1.136,56 miliar pada 2024. Meskipun terdapat sedikit penurunan nominal dari 2021 ke 2022 (dari Rp 1.076,59 miliar ke Rp 1.053,28 miliar), setelah itu belanja daerah kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2021, belanja daerah tumbuh positif sebesar 3,99%. Tahun 2022 terjadi kontraksi pertumbuhan sebesar -2,16%, yang mengindikasikan adanya pengurangan belanja daerah dibanding tahun sebelumnya. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, penghematan anggaran, atau penyesuaian fiskal. Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan pada 2022, belanja daerah menunjukkan peningkatan yang kuat hingga 2024. Kenaikan 5,79% pada 2024 mengindikasikan optimisme dan peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Struktur Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 2.48. Struktur Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah

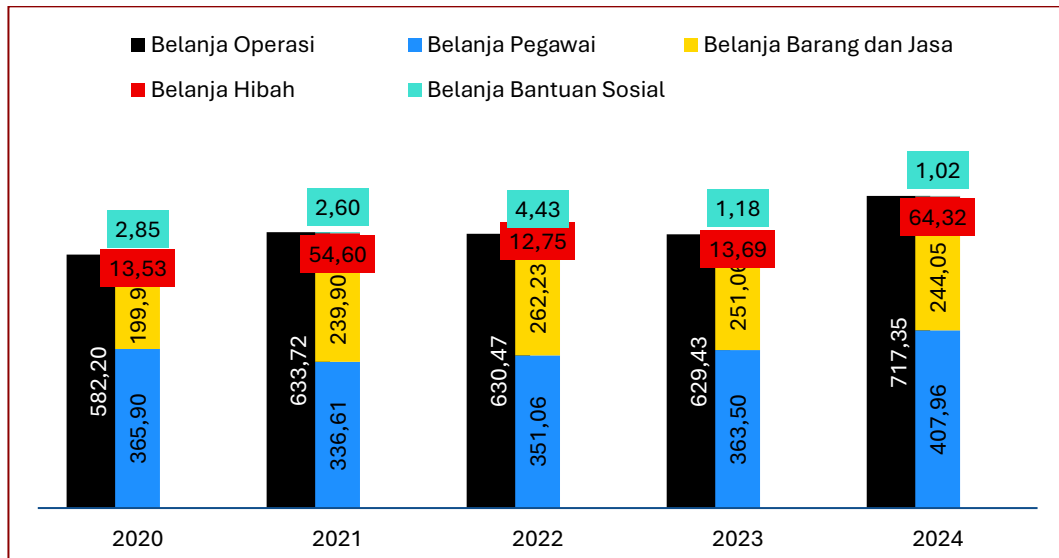
Secara struktur, belanja daerah paling besar berasal dari Belanja Operasi yang terus meningkat dari Rp 582,20 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 717,35 miliar pada tahun 2024. Sementara itu Belanja Modal cenderung menurun dari Rp 143,37 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 113,79

miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama pemerintah daerah masih pada pengeluaran rutin yang mendukung aktivitas pemerintahan sehari-hari. Sementara itu, Penurunan Belanja Modal relatif signifikan menunjukkan potensi perlambatan investasi infrastruktur atau pengadaan aset baru di tingkat daerah. Belanja tidak terduga yang semakin berkurang juga menunjukkan bahwa kondisi risiko lebih terkendali.

A. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan operasional sehari-hari pemerintah. Belanja ini meliputi pembayaran gaji pegawai, pembelian bahan habis pakai, biaya listrik, air, serta pemeliharaan fasilitas dan peralatan. Fungsinya adalah menjaga kelancaran aktivitas pemerintahan tanpa menciptakan aset baru sehingga belanja operasi bersifat konsumtif dan berfokus pada kebutuhan jangka pendek.

Perkembangan Belanja Operasi dan komponen penyusunnya sebagai berikut:



Gambar 2.49. Struktur Belanja Operasi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)

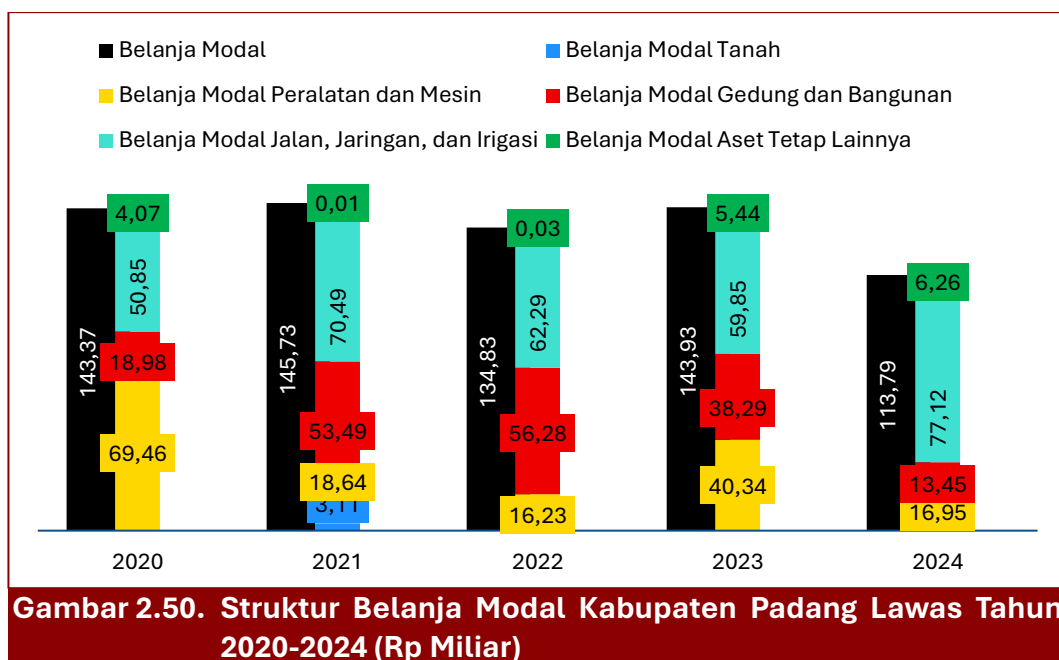
Sumber: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah

Belanja Daerah pada periode 2020-2024 didominasi oleh Belanja Pegawai, yaitu belanja untuk membayar upah atau kompensasi kepada pegawai pemerintah daerah. Belanja Pegawai terus meningkat dari Rp 365,90

miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 407,96 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini juga diikuti oleh Belanja Barang dan Jasa, yaitu belanja untuk barang dan jasa yang manfaatnya kurang dari 12 bulan untuk mendukung program dan kegiatan pemerintah. Belanja barang dan Jas meningkat dari Rp 199,91 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 244,05 miliar pada tahun 2024. Belanja hibah meningkat dari Rp 13,53 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 64,32 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial cenderung menurun dari Rp 2,85 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 1,02 miliar pada tahun 2024.

B. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk investasi dalam pembelian atau pembangunan aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang, seperti pembangunan gedung, pengadaan peralatan atau mesin, serta pengembangan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Belanja modal bersifat produktif karena menambah kapasitas dan nilai aset organisasi, mendukung peningkatan pelayanan, dan mendukung pertumbuhan di masa depan. Perkembangan Belanja Modal Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada gambar berikut:



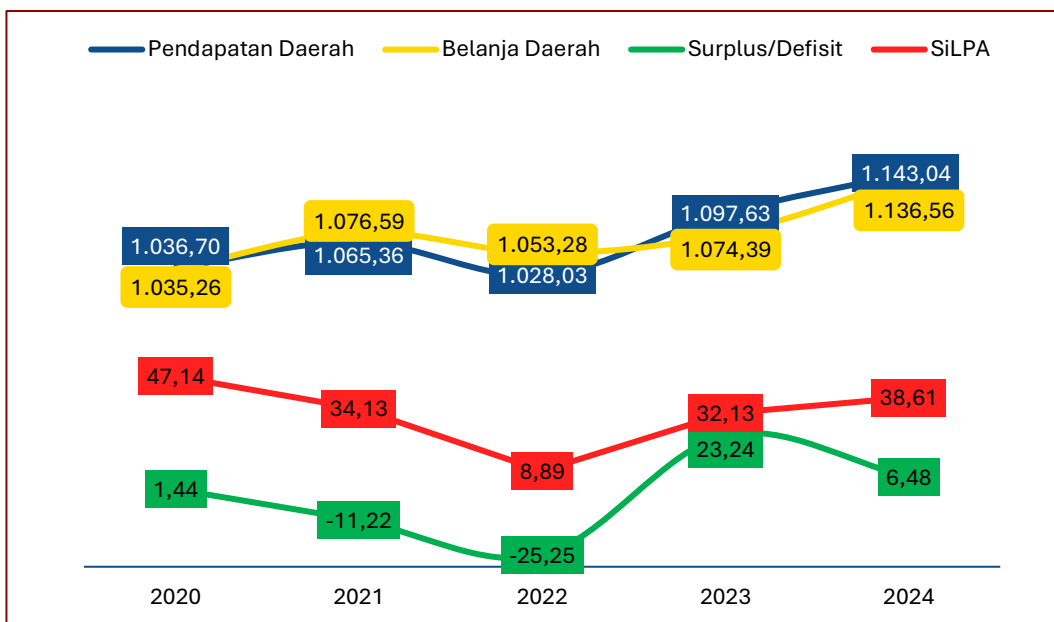
Sumber: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah

Belanja Modal selama periode 2020-2024 didominasi oleh Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang terus meningkat dari Rp 50,85 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 77,12 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, Belanja Modal Gedung dan Bangunan berfluktuasi di mana belanja tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp 56,28 miliar dan belanja terendah pada tahun 2024 sebesar Rp 13,45 miliar. Sementara itu, untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin cenderung menurun dari Rp 69,46 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 16,95 miliar pada tahun 2024. Belanja Aset Modal Tetap Lainnya relatif kecil di mana pada tahun 2024 pengeluaran untuk belanja ini sebesar Rp 6,26 miliar. Gambaran ini menunjukkan bahwa fokus utama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selama periode 2020-2024 adalah peningkatan kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas antar daerah.

2.6.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh sumber dana yang diperoleh oleh pemerintah daerah untuk menutupi defisit anggaran atau membiayai kebutuhan pembangunan yang tidak dapat terpenuhi oleh pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat. Pembiayaan ini mencakup penggunaan dana cadangan, pinjaman, penerbitan obligasi daerah, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi utama pembiayaan daerah adalah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program pembangunan serta menjaga stabilitas keuangan daerah dalam jangka menengah dan panjang. Dalam mengelola pembiayaan daerah, perlu menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan beban keuangan yang berlebihan di masa depan. Pemerintah daerah perlu melakukan analisis kebutuhan dan kemampuan membayar, serta menyusun strategi pembiayaan yang efisien dan transparan.

Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.51. Realisasi Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan SiLPA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah

Secara umum, terdapat tren kenaikan dari 2020 hingga 2024, meskipun ada penurunan pada 2022 dibandingkan dengan 2021. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan penerimaan Kabupaten Padang Lawas. Belanja Daerah juga menunjukkan kecenderungan naik seiring waktu dengan nilai yang cukup dekat dengan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran wilayah secara konsisten mengikuti atau menyesuaikan diri dengan perubahan pendapatan.

Pada 2020, selisih antara Pendapatan dan Belanja sebesar Rp 1,44 miliar. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022, data menunjukkan surplus/defisit bernilai negatif sebesar Rp 11,22 miliar dan Rp 25,25 miliar. Dari 2023 ke 2024, terjadi perbaikan, di mana pada tahun 2023 terjadi surplus sebesar Rp 23,24 miliar yang kemudian menurun pada 2024 menjadi Rp 6,48 miliar. Hal ini mencerminkan upaya penyesuaian kebijakan fiskal yang berhasil mengoreksi defisit di tahun-tahun sebelumnya, meskipun perbaikan tersebut relatif fluktuatif.

SiLPA menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi pada 2020 (Rp 47,14 miliar) menurun drastis pada 2021 dan sangat rendah di 2022 (Rp 8,89 miliar). Di 2023 terjadi pemulihan (32.13) dan di 2024 meningkat lagi (Rp 38,61 miliar).

Pergerakan SiLPA ini mencerminkan kemampuan fiskal Kabupaten Padang Lawas dalam mempertahankan cadangan anggaran. Penurunan tajam di 2021–2022 menunjukkan adanya tekanan fiskal, di mana peningkatan pengeluaran atau kondisi pendapatan yang kurang optimal menyedot cadangan kas, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan adanya langkah-langkah perbaikan manajemen anggaran.

Meskipun pendapatan dan belanja hampir seimbang, terdapat titik-titik krusial di mana defisit muncul (2021–2022). Fluktuasi kecil pada surplus/defisit dapat menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berada dalam kondisi sensitif sehingga setiap perubahan kecil pada pendapatan atau pengeluaran memiliki dampak signifikan terhadap keseimbangan fiskal. Pemulihan yang terlihat di 2023 dengan lonjakan surplus mengindikasikan bahwa terjadi penyesuaian kebijakan, baik dengan pengendalian belanja ataupun optimalisasi penerimaan, untuk memperbaiki kondisi defisit sebelumnya. Namun, kembalinya surplus pada 2024 namun dengan nilai yang relatif kecil (Rp 6,84 miliar) memberikan sinyal bahwa pencapaian keseimbangan masih tergolong rapuh. SiLPA yang menurun signifikan pada 2022 berarti ada periode ketika fleksibilitas fiskal menurun, yang bisa menjadi perhatian tersendiri apabila terjadi kondisi darurat atau kebutuhan mendesak. Pemulihan sebagian pada 2023–2024 walaupun positif, bila dibandingkan dengan kondisi awal 2020, tetap harus diperhatikan agar manajemen keuangan daerah tetap menjaga kestabilan cadangan.

2.6.4. Proyeksi Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menyusun perencanaan APBD untuk periode 2026-2030 dengan mempertimbangkan kondisi masa lalu dan potensi penerimaan di masa mendatang. Proyeksi ini berfungsi sebagai alat strategis dalam pengelolaan fiskal daerah yang membantu pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran secara realistis dan berkelanjutan. Dengan menggunakan proyeksi keuangan, daerah dapat mengidentifikasi potensi sumber pendapatan, mengantisipasi kebutuhan belanja, serta mengelola

pembiayaan agar tercapai keseimbangan fiskal dan efektivitas penggunaan anggaran.

A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Padang Lawas menggunakan berbagai asumsi dasar yang diperlukan dalam menentukan potensi pertumbuhan pendapatan pada masing-masing struktur pendapatan daerah. Kabupaten Padang Lawas telah memberikan evaluasi keuangan di masa lalu yang memberikan data realisasi pendapatan daerah selama periode 2020-2024. Data historis tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang pergerakan dan pola pendapatan daerah. Pola ini dapat dijadikan salah satu dasar untuk perencanaan masa depan. Identifikasi sektor-sektor yang paling produktif dan berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah telah dilakukan sekaligus memberikan gambaran sektor yang memerlukan perhatian lebih. Potensi pertumbuhan berdasarkan data historis diperoleh dari kinerja keuangan di masa lalu. Selain itu, proyeksi pendapatan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan indikator makroekonomi. Hal ini menjadi langkah strategis yang harus dilakukan dalam proyeksi pendapatan daerah. Indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan indikator lainnya, memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi yang lebih luas. Dengan memahami bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi pendapatan daerah, Pemerintah Daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan responsif. Adapun asumsi-asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan pendapatan daerah Kabupaten Padang Lawas untuk tahun anggaran 2025-2029, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu. Laju pertumbuhan pendapatan Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2024 mencapai pertumbuhan sebesar 1,10 persen. Pendapatan Kabupaten Padang Lawas tahun 2020 berada pada Rp 2.122,68 Miliar cenderung mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 mencapai Rp 2.425,69 Miliar. Laju pendapatan ini didukung kemampuan Kabupaten Padang

Lawas dalam mendorong pertumbuhan PAD yang mencapai rata-rata 2,11% (*flat rate*) setiap tahunnya. Asumsi ini telah memperhitungkan penurunan realisasi pendapatan yang terjadi pada tahun 2020. Keberhasilan peningkatan PAD ini juga didukung dengan pengoptimalan pendapatan melalui pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Sementara itu retribusi daerah selama lima tahun terakhir masih belum optimal. Dengan mempertimbangkan penggalan potensi pendapatan asli daerah yang lebih optimal, asumsi pendapatan daerah diproyeksikan akan meningkat.

2. Asumsi indikator makro ekonomi Dalam upaya memperoleh gambaran yang lebih baik dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah, Kabupaten Padang Lawas juga melakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator makro. Indikator makro yang digunakan meliputi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan yang terjadi selama lima tahun sebelumnya.
 - a. Kabupaten Padang Lawas merupakan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) cukup tinggi. Pada tahun 2020 Kabupaten Padang Lawas terdampak Pandemi COVID-19, namun mengalami pertumbuhan ekonomi sampai terjadi kontraksi sebesar 1,18%. Perlahan sebagai usaha pemulihan ekonomi, LPE Kabupaten Padang Lawas setiap tahunnya mengalami peningkatan dan percepatan, yaitu 3,83% pada tahun 2021, 4,61% pada tahun 2022, 5,14% pada tahun 2023, dan 5,02% pada tahun 2024. Pergerakan indikator makro ini menunjukkan resiliensi perekonomian yang baik dan peluang pertumbuhan yang signifikan di Kabupaten Padang Lawas. Kondisi ini memungkinkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.
 - b. Tingkat inflasi di Kabupaten Padang Lawas mengacu kepada inflasi yang terjadi di Kota Padang Sidempuan. Inflasi selama periode 2020

sampai dengan 2024 menunjukkan angka yang cukup terkendali yang bergerak pada 3,27% pada tahun 2020 menjadi 2,46% pada tahun 2024. Meskipun demikian terjadi catatan peningkatan inflasi yang terjadi pada tahun 2022 dimana inflasi sempat mencapai 6,40%

- c. Hasil evaluasi dari tingkat pengangguran masih menunjukkan angka tingkat pengangguran terbuka TPT mencapai 5,47% pada tahun 2024. Kondisi ini meningkat dari sebelumnya tahun 2020 berada pada tingkat 4,11%. Pada tahun 2022 TPT meningkat menjadi 5,90%. Sejak saat itu Kabupaten Padang Lawas berupaya menurunkan TPT yang pada tahun 2024 berhasil mencapai 5,47%. Kabupaten Padang Lawas memperoleh surplus tenaga kerja baru yang membuat tingkat pengangguran menjadi semakin tinggi. Peninjauan dari sisi positif, hal ini memberikan peluang bagi Kabupaten Padang Lawas untuk mengoptimalkan perekonomian dengan memanfaatkan angkatan kerja yang belum bekerja sehingga dapat mendorong potensi perekonomian dan pendapatan daerah secara signifikan.
- d. Dari sisi kemiskinan, angka kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas mencapai 7,87% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan pola penurunan selama periode 2020 sampai dengan 2024. Indikator makro ini memberikan arah bahwa pemerintah dapat mendorong potensi pendapatan daerah lebih tinggi selama lima tahun ke depan. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Kabupaten Padang Lawas berupaya untuk melakukan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui peningkatan jumlah wajib pajak dan sumber-sumber penerimaan pajak serta retribusi daerah. Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan mengoptimalkan titik parkir sebagai sumber penerimaan retribusi parkir di daerah. Ekstensifikasi juga dioptimalkan dengan melakukan pendataan serta pengoptimalan pendataan wajib pajak yang selama ini belum terdata oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas . Dalam hal intensifikasi

pendapatan daerah, pemerintah berupaya mengkaji kembali potensi retribusi dan pajak daerah sehingga dapat memperoleh gambaran nilai optimal atau tarif optimal yang dapat mendukung penerimaan pendapatan daerah sekaligus mengoptimalkan fungsi-fungsi penerimaan pendapatan retribusi daerah.

- e. Peralihan retribusi pajak daerah menjadi pajak daerah yang dirasakan lebih optimal dalam pemungutan dibandingkan dengan retribusi daerah sehingga mampu menjaga stabilitas pendapatan daerah. Peralihan retribusi tertentu menjadi pajak daerah memberikan kepastian hukum, mencegah pengutipan yang tumpang tindih serta mendukung praktik *good governance* bagi Pemerintah Padang Lawas.
3. Kebijakan di bidang keuangan negara dan daerah. Pertimbangan ini didasarkan pada kebijakan keuangan pendapatan transfer baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran berdasarkan kebijakan keuangan negara maupun daerah. Dalam upaya untuk menyusun perencanaan anggaran yang lebih baik, diperlukan upaya proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Padang Lawas selama satu periode ke depan.

Berikut ini adalah proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Padang Lawas untuk tahun anggaran 2026 – 2030.

Tabel 2.65. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026-2030 (Rp)

Kode	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		RKPD 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan Daerah	1.143.201.521.426	1.230.527.231.563	1.276.347.412.807	1.317.637.276.240	1.339.917.970.832	1.424.172.799.781
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	52.709.000.000	59.065.307.115	62.541.023.228	66.013.627.540	68.469.808.310	74.341.820.149
1.1.1	Pajak Daerah	36.467.743.559	40.498.189.255	44.408.187.283	47.128.286.069	49.462.250.627	53.824.719.404
1.1.2	Retribusi Daerah	3.808.436.132	4.119.339.328	4.251.995.394	4.428.451.523	4.457.110.182	4.811.085.157
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.958.461.193	4.281.611.744	4.419.493.508	4.602.900.742	4.632.688.347	5.000.607.397
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	8.474.359.116	10.166.166.787	9.461.347.042	9.853.989.205	9.917.759.153	10.705.408.191
1.2	Pendapatan Transfer	1.063.587.521.426	1.143.360.524.089	1.183.767.829.887	1.220.338.500.650	1.239.960.553.093	1.315.842.685.836
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	988.308.401.000	1.061.935.962.776	1.099.721.134.013	1.132.803.900.108	1.151.859.473.661	1.220.744.790.957
1.2.1.1	Dana Perimbangan	763.410.861.000	818.678.822.797	848.630.326.360	871.292.923.155	888.656.132.236	936.638.354.849
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	51.428.532.000	54.626.920.631	57.418.287.618	59.801.123.866	60.188.125.966	64.968.149.233
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	497.922.064.000	535.516.742.436	552.220.697.060	562.582.411.366	577.947.804.873	601.254.179.716
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	214.060.265.000	228.535.159.731	238.991.341.681	248.909.387.924	250.520.201.397	270.416.025.900
1.2.1.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	224.897.540.000	243.257.139.979	251.090.807.654	261.510.976.953	263.203.341.425	284.106.436.108
1.2.1.2.1	Dana Desa	224.897.540.000	243.257.139.979	251.090.807.654	261.510.976.953	263.203.341.425	284.106.436.108
1.2.1.2.2	Insentif Fiskal						
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75.279.120.426	81.424.561.313	84.046.695.874	87.534.600.542	88.101.079.432	95.097.894.879
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	75.279.120.426	81.424.561.313	84.046.695.874	87.534.600.542	88.101.079.432	95.097.894.879
1.2.2.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya						
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	26.905.000.000	28.101.400.358	30.038.559.692	31.285.148.050	31.487.609.429	33.988.293.796
1.3.1	Pendapatan Hibah						
1.3.2	Pendapatan Lainnya	26.905.000.000	28.101.400.358	30.038.559.692	31.285.148.050	31.487.609.429	33.988.293.796

B. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah adalah estimasi atau perkiraan jumlah pengeluaran pemerintah daerah dalam periode waktu tertentu yang disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Proyeksi ini mencakup berbagai jenis belanja seperti belanja operasi (pengeluaran rutin), belanja modal (investasi pada aset tetap), dan belanja tidak terduga. Tujuan utama proyeksi belanja adalah untuk memastikan bahwa anggaran daerah dapat mengakomodasi prioritas pembangunan sekaligus menjaga keseimbangan fiskal. Dalam penyusunannya, proyeksi belanja daerah memperhitungkan faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat, dan komitmen daerah terhadap program pembangunan. Proyeksi yang akurat membantu pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya secara optimal, memitigasi risiko defisit anggaran, dan mendukung efisiensi penggunaan dana demi pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan pengalokasian anggaran daerah yang pertama adalah menentukan belanja wajib di luar pagu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti belanja transfer, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan yang harus dikeluarkan pada tahun berjalan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan total belanja wajib tersebut menjadi potensi dana yang bisa dialokasikan sebagai pagu indikatif untuk setiap OPD. Selanjutnya, kebijakan perencanaan pagu indikatif OPD difokuskan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Padang Lawas, yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, urusan pilihan, serta urusan pemerintahan penunjang, semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Belanja untuk penyelenggaraan urusan wajib diarahkan pada upaya melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan

- memenuhi kewajiban daerah, seperti peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum yang memadai, serta pengembangan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Penyusunan belanja daerah menggunakan pendekatan berbasis prestasi kerja yang fokus pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan, guna meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan menjamin efektivitas serta efisiensi penggunaan dana.
 4. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan belanja pada kegiatan rutin yang merupakan pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi setiap OPD.
 - b. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang mendukung program pembangunan prioritas dan unggulan OPD, serta program atau kegiatan prioritas yang sudah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
 5. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan memberikan perhatian khusus pada upaya peningkatan investasi di wilayahnya, termasuk pada sektor pendidikan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, perdagangan, serta hotel dan restoran.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam 5 tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel 2.66. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026-2030

Kode	Uraian	Baseline			Proyeksi		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Belanja	1.169.978.932.221	1.230.527.231.563	1.276.347.412.807	1.317.637.276.240	1.339.917.970.832	1.424.172.799.781
2.1	Belanja Operasi	763.672.769.399	777.370.879.545	808.582.616.823	823.177.019.288	848.796.670.984	880.788.707.141
2.1.1	Belanja Pegawai	484.007.171.655	488.687.315.088	503.561.061.390	513.632.282.618	523.904.928.270	539.383.026.835
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	264.919.528.332	273.402.996.861	288.905.140.789	292.545.142.505	306.958.870.828	322.468.567.595
2.1.3	Belanja Hibah	12.230.309.006	13.116.212.016	13.833.668.813	14.591.753.864	15.392.841.151	16.254.840.256
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	2.515.760.406	2.164.355.580	2.282.745.830	2.407.840.302	2.540.030.734	2.682.272.455
2.2	Belanja Modal	107.401.347.571	150.730.979.400	132.612.224.818	141.265.984.761	128.868.766.778	150.484.674.450
2.2.1	Belanja Modal Tanah		30.000.000.000				
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.819.894.658	33.537.140.461	43.465.622.044	49.559.938.132	32.829.778.735	36.348.246.345
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.206.181.133	47.914.273.850	48.632.987.958	49.362.482.777	50.102.920.019	50.854.463.819
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.405.473.600	25.381.692.544	26.364.665.916	27.419.252.553	28.516.022.655	38.656.663.561
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.969.798.180	13.897.872.545	14.148.948.900	14.924.311.299	17.420.045.369	24.625.300.725
2.3	Belanja Tidak Terduga	8.967.038.444	9.146.379.213	9.329.306.797	9.515.892.933	9.706.210.792	9.900.335.008
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	8.967.038.444	9.146.379.213	9.329.306.797	9.515.892.933	9.706.210.792	9.900.335.008
2.4	Belanja Transfer	289.937.776.807	293.278.993.405	325.823.264.370	343.678.379.257	352.546.322.278	382.999.083.182
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.574.879.515	3.770.067.937	3.976.290.653	4.194.191.380	4.424.452.487	4.822.388.682
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	286.362.897.292	289.508.925.468	321.846.973.717	339.484.187.877	348.121.869.791	378.176.694.500

C. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah dalam proyeksi Kabupaten Padang Lawas untuk tahun 2026-2030 bertujuan untuk menekan, menurunkan, atau menjaga nilai SiLPA tetap konstan. Tujuannya adalah menciptakan pembiayaan netto yang positif agar bisa menutup defisit anggaran yang ada. Pada proyeksi penerimaan pembiayaan, kontribusi terbesar berasal dari besaran SiLPA yang diperkirakan menurun selama periode 2026-2030, sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan tidak terdapat pengeluaran pembiayaan.

Secara keseluruhan, kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau defisit anggaran antara lain:

1. Jika APBD mengalami surplus, maka kelebihan kas akan diberdayakan sebagai investasi jangka pendek, seperti deposito, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pendapatan bunga.
2. Jika APBD mengalami defisit, maka sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya akan digunakan untuk menutup defisit tersebut, dan sebagai langkah lanjutan, rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diajukan OPD akan dilakukan.

Adapun proyeksi pembiayaan dan keseluruhan APBD Kabupaten Padang Lawas tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026-2030

Kode	Uraian	RKPD			Proyeksi			
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Pembiayaan	26.777.410.795	0	0	0	0	0	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	26.777.410.795	0	0	0	0	0	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.569.730.795	0	0	0	0	0	
3.1.2	Koreksi perhitungan SiLPA sebelumnya	13.207.680.000	0	0	0	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		0	0	0	0	0	
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah		0	0	0	0	0	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		0	0	0	0	0	0	

2.7. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Permasalahan dan isu strategis daerah mengacu pada tantangan utama yang dihadapi suatu wilayah dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ini bisa meliputi aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur yang membutuhkan perhatian dan solusi terencana. Identifikasi isu strategis penting untuk menentukan prioritas kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Isu strategis daerah biasanya berkaitan dengan permasalahan yang berdampak luas dan berkelanjutan, seperti kemiskinan, pengangguran, degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, keterbatasan sumber daya, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam. Penanganan isu-isu ini memerlukan sinergi antar sektor dan pemangku kepentingan serta perencanaan yang adaptif untuk menghadapi dinamika perkembangan daerah.

2.7.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah ditentukan berdasarkan hasil analisis dari kondisi riil dan analisis data pada gambaran umum daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.68. Permasalahan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029

No	Permasalahan	Keterangan
1	Belum optimalnya penurunan kemiskinan	Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial di Kabupaten Padang Lawas. Meskipun data dari BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin menurun dari 8,37 persen pada tahun 2020 menjadi 7,87 persen pada tahun 2024, namun angka ini masih tergolong tinggi. Capaian pada tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 24,96 ribu orang yang masih miskin.
2	Belum optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangunan SDM yang dilaksanakan hingga saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan. Evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan manusia

No	Permasalahan	Keterangan
		<p>biasanya dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Padang Lawas meningkat cukup tinggi dari 70,08 poin pada tahun 2020 menjadi 73,10 poin pada tahun 2024. Jika ditelaah berdasarkan komponen penyusunnya, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Kabupaten Padang Lawas masih sebesar 9,63 tahun atau berada pada jenjang pendidikan SMA kelas 1. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kualifikasi sumber daya manusia secara rata-rata di Kabupaten Padang Lawas. Ketidakmampuan secara ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dapat menjadi penyebab dari masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Sementara dari sisi kesehatan yang diukur dari Usia Harapan Hidup (UHH), UHH mengalami peningkatan dari 70,98 tahun pada tahun 2020 menjadi 71,67 tahun pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, hal ini masih menunjukkan bahwa dari sisi pembangunan kesehatan masih belum optimal. Kurangnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan sarana-prasarana kesehatan yang kurang memadai dapat menjadi penyebab dari lambatnya peningkatan UHH</p>
3	Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi	<p>Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan sejak pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Pada tahun 2023, Kabupaten Padang Lawas berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya sebesar 5,13 persen, namun pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan sebelumnya, yaitu sebesar 5,02 persen. Kurangnya produktivitas pada sektor-sektor unggulan dapat menjadi penyebabnya. Selain itu, rendahnya investasi terhadap teknologi dan keterampilan tenaga kerja dapat memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi. Rendahnya inovasi terhadap produk-produk yang dihasilkan dapat menjadi penyebab dari melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024.</p>
4	Masih rendahnya kualitas infrastruktur	<p>Pembangunan infrastruktur Kabupaten Padang Lawas masih menghadapi sejumlah masalah. Berdasarkan data, jalan dalam kondisi baik masih pada kisaran 17 persen selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2024, jalan dalam kondisi baik sebesar 17,73 persen. Kemudian, saluran irigasi hanya mencapai sebesar 37,17 persen yang berada dalam kondisi baik. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dan perawatan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Di samping itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum juga dapat menjadi penyebab kerusakan yang terjadi.</p>
5	Degradasi Lingkungan Hidup	<p>Lingkungan hidup merupakan hal yang penting bagi masyarakat untuk bertempat tinggal pada suatu</p>

No	Permasalahan	Keterangan
		wilayah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 70,99 poin. Sementara, bila dilihat berdasarkan komponennya yang masih menjadi permasalahan adalah kualitas udara dan tutupan lahan, di mana masing-masing capaiannya sebesar 58,75 poin dan 52,28 poin. Hal ini menandakan bahwa kualitas udara yang dihirup oleh masyarakat Kabupaten Padang Lawas masih dinilai kurang baik. Selain itu, tutupan lahan berarti terdapat permasalahan pada tutupan lahan daerah yang berpotensi menyebabkan erosi, banjir, dan penurunan produktivitas lahan pertanian.
6	Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas masih menghadapi sejumlah permasalahan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publik. Berdasarkan data Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Padang Lawas mencapai nilai 58,54 poin pada tahun 2024. Meskipun telah terjadi peningkatan dari tahun 2020 sebesar 40,68 poin, hal ini masih menunjukkan beberapa kelemahan dari segi birokrasi pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan peningkatan dari 1,37 poin pada tahun 2020 menjadi 2,17 poin pada tahun 2024. Meskipun meningkat, hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya adaptasi digital pada sistem pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Hal ini dapat disebabkan oleh masih kurangnya pengaplikasian sistem digital dalam pelayanan publik dan perawatan pada situs-situs resmi pemerintah

2.7.2. Isu Strategis Global

Isu strategis global yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:

1. Ekonomi Global

Kondisi perekonomian global dapat mempengaruhi pengembangan ekonomi di Sumatera Utara terutama dalam hal pengembangan sektor perkebunan dan industri yang berorientasi ekspor. Krisis ekonomi global juga dapat memperlambat investasi sektor ekonomi di Sumatera Utara termasuk investasi untuk pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan Laporan World Economic Situation and Prospects 2024 dari PBB, prospek ekonomi global masih menghadapi tantangan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan melambat dari 2,7

persen pada 2023 menjadi 2,4 persen pada 2024, yang berada di bawah tingkat pertumbuhan pra-pandemi sebesar 3,0 persen. Faktor utama yang memperlambat pertumbuhan ini mencakup suku bunga yang masih tinggi, meningkatnya ketegangan geopolitik, perdagangan internasional yang lesu, serta bencana iklim yang semakin sering terjadi.

Isu ekonomi global yang menurut PBB perlu menjadi perhatian di akhir 2024, yaitu: (1) Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global; (2) Ketidakstabilan Geopolitik dan Dampaknya pada Ekonomi; (3) Perubahan Iklim dan Dampaknya pada Ekonomi; (4) Kesenjangan Ekonomi dan Sosial; (5) Peran Teknologi dan Kecerdasan Buatan dalam Ekonomi.

Dalam konteks Sumatera Utara, kondisi ekonomi global yang melemah dapat berdampak pada sektor ekspor utama seperti perkebunan dan industri berbasis ekspor. Penurunan permintaan global dan biaya pinjaman yang lebih tinggi bisa memperlambat investasi di daerah ini, termasuk dalam sektor infrastruktur. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global juga dapat berdampak pada daya saing produk ekspor dari Sumatera Utara akibat fluktuasi harga komoditas dan kebijakan perdagangan internasional yang lebih ketat.

2. Pariwisata Global

Menurut laporan terbaru dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), pariwisata global telah pulih hampir 90% dari tingkat sebelum pandemi pada akhir tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, tercatat sekitar 1,4 miliar wisatawan internasional, meningkat 11% dibandingkan tahun 2023, atau bertambah sekitar 140 juta perjalanan wisata. Pemulihan ini didorong oleh permintaan pasca-pandemi yang kuat, meningkatnya konektivitas udara, serta kebijakan visa yang lebih longgar di banyak negara. Beberapa wilayah bahkan melampaui tingkat wisata sebelum pandemi. Timur Tengah mencatat peningkatan sebesar 32% dibandingkan tahun 2019, sementara Afrika tumbuh 7% lebih tinggi dari tingkat sebelum pandemi. Eropa mengalami sedikit kenaikan (1% di atas 2019), sedangkan Amerika

telah pulih hingga 97%. Di Asia dan Pasifik, pemulihan mencapai 87% dari tingkat sebelum pandemi, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 66% pada akhir 2023. Peningkatan ini juga tercermin dalam pendapatan pariwisata global, yang mencapai rekor USD 1,9 triliun, sekitar 3% lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Laporan juga menyebutkan bahwa belanja wisatawan tumbuh lebih cepat dibandingkan jumlah kunjungan, yang berdampak positif terhadap ekonomi lokal dan sektor usaha kecil di berbagai negara.

Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi dengan potensi wisata unggulan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ini. Berdasarkan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) terbaru, Sumatera Utara menempati peringkat ke-14 dengan skor 3.548. Pengembangan pariwisata di wilayah ini terus berfokus pada destinasi unggulan seperti Danau Toba yang menjadi bagian dari 5 Destinasi Super Prioritas pemerintah.

3. Demografi Global

Menurut data World Population Prospects (2024) Populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 8,2 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 10,2 miliar jiwa pada tahun 2080. Hal ini menjadi tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin Panjang. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2045 tumbuh menjadi 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya Angka Harapan Hidup saat lahir. Di sisi lain terjadi penurunan angka kelahiran

yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Selain itu bertambahnya penduduk lanjut usia dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (childfree), menunda pernikahan dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran, sementara itu perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga menjadi tantangan bagi keluarga dalam menjalankan fungsinya.

4. Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi Global

Menurut laporan World Urbanization Prospects, The 2018 Revision yang dirilis PBB memproyeksikan bahwa populasi dunia akan mencapai 8,5 miliar pada tahun 2030 dan 9,7 miliar pada tahun 2050. Diperkirakan bahwa dalam periode 2015-2050, setengah dari pertumbuhan penduduk dunia diperkirakan terkonsentrasi di sembilan negara: India, Nigeria, Pakistan, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Tanzania, Amerika Serikat, Indonesia dan Uganda. Pada tahun 2018 diperkirakan 55% penduduk dunia tinggal di perkotaan dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 68% di tahun 2050.

Di beberapa negara jumlah penduduk usia kerja semakin meningkat dan perlu direspon dengan memaksimalkan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan promosi peluang kerja produktif dan pekerjaan layak. Pertumbuhan penduduk di atas usia 65 tahun diperkirakan juga semakin meningkat di seluruh dunia dan negara-negara dengan populasi lanjut usia harus menyesuaikan layanan kesehatan, sistem perawatan jangka panjang,

serta meningkatkan keberlanjutan sistem jaminan sosial dan pensiun. Kondisi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi global tersebut juga diperkirakan terjadi di Sumatera Utara dimana berdasarkan hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di tahun 2045 diperkirakan akan meningkat. Begitu juga halnya dengan urbanisasi yang kemungkinan terjadi karena perkembangan Wilayah Metropolitan Medan. Urbanisasi juga kemungkinan terjadi dengan berkembangnya kawasan perkotaan baru yang tumbuh akibat adanya pusat kegiatan ekonomi baru.

5. Disrupsi Teknologi

Disrupsi teknologi telah dirasakan secara global dan terjadi dengan mengganggu pasar dan industri yang ada karena mengubah cara bisnis beroperasi, menciptakan model bisnis baru, dan mendisrupsi model bisnis tradisional. Disrupsi teknologi dapat menjadi tantangan bagi usaha dan industri yang telah berjalan, namun menjadi peluang baru terciptanya wirausaha dan startup. Bangkitnya *e-commerce* yang bahkan memiliki jangkauan pasar dunia mengganggu perdagangan konvensional dan memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan cara baru. Perkembangan teknologi blockchain juga mendisrupsi sistem keuangan yang mengakibatkan terbentuknya sistem transaksi baru. Inovasi dan disrupsi teknologi memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, perekonomian, dan lingkungan yang dirasakan di seluruh dunia. Inovasi dan disrupsi memiliki dampak kompleks yang perlu dipahami untuk menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan yang tepat dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi baru. Inovasi dan disrupsi teknologi yang terjadi secara global berdampak pada perkembangan Provinsi Sumatera Utara di berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam sektor ekonomi tetapi juga mobilitas penduduk dan akses pelayanan publik.

6. Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran tersebut dapat terjadi secara alami, namun sejak tahun 1800-an aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim. Sebagai langkah dalam menghadapi ancaman dampak perubahan iklim yang berjalan semakin cepat, Intergovernmental Negotiating Committee/INC yang kemudian pada tahun 1992 INC mengadopsi sebuah kerangka hukum yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang berpartisipasi di dalamnya dengan tujuan akhir yaitu Common but Differentiated Responsibilities Principle. Dalam keikutsertaannya, Indonesia telah meratifikasi perjanjian paris (Paris Agreement) dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim yang merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim, pada tataran nasional dengan keikutsertaan Paris Agreement akan mendorong perubahan gaya hidup masyarakat menjadi ramah lingkungan serta adaptif terhadap dampak perubahan iklim, ribuan ilmuwan dan pengawas pemerintah sepakat untuk membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5°C. Namun, kebijakan yang ada saat ini menunjukkan kenaikan suhu sebesar 3°C pada akhir abad ini. Emisi yang menyebabkan perubahan iklim berasal dari seluruh belahan dunia dan berdampak pada semua orang, namun beberapa negara menghasilkan lebih banyak emisi dibandingkan negara lain. Tujuh negara penghasil emisi terbesar (Tiongkok, Amerika Serikat, India, Uni Eropa, Indonesia, Federasi Rusia, dan Brasil) menyumbang sekitar setengah dari seluruh emisi gas rumah kaca global pada tahun 2020. Beberapa kerangka dan perjanjian global telah dimiliki dengan tiga kategori tindakan yang harus dilakukan, yaitu: pengurangan emisi; adaptasi terhadap dampak iklim; dan pendanaan untuk penyesuaian yang diperlukan.

7. Sumber Energi Alternatif

Pemanfaatan sumber energi alternatif menjadi inti tantangan perubahan iklim yang dihadapi dunia. Untuk menghindari dampak buruk dari perubahan iklim, berdasarkan Paris Agreement yang diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, Indonesia berkomitmen untuk ambil bagian mengatasi dampak perubahan iklim global dengan melakukan mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% bila dilakukan dengan usaha sendiri, atau 41% dengan bantuan dunia internasional. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil perlu diakhiri karena telah menyumbang hingga lebih dari 75% emisi GRK dan 90% emisi karbon dioksida. Investasi pada sumber energi alternatif yang bersih, mudah diakses, terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan menjadi tantangan ke depan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah berupaya mempercepat pengembangan energi alternatif salah satunya melalui kebijakan yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan kebijakan yang relevan lainnya.

8. Geopolitik dan Geoekonomi di Samudera Hindia

Samudera Hindia sangat penting bagi nasib geopolitik dan ekonomi negara-negara pesisir dan kekuatan di luarnya. Samudera Hindia menjadi jalur pelayaran kapal kontainer, penumpang, dan angkatan laut untuk melintasi rute perdagangan yang membentang di seluruh dunia mulai dari Afrika hingga Timur Tengah, Asia, dan Australia. Sebagai tempat bertemunya kekuatan-kekuatan besar di dunia, Samudera Hindia adalah salah satu kawasan perdagangan dan geopolitik paling berharga di dunia dengan lebih dari 80% minyak dunia melewati perairan Samudera Hindia. Hal ini tidak hanya menjadi titik tumpu persaingan strategis antar negara, seperti Tiongkok-India, namun juga merupakan serangkaian peluang

ekonomi dan pembangunan yang berharga. Berdasarkan hal tersebut, dilaksanakan "Declaration of The Indian Ocean Rim Association on the Principles for Peaceful, Productive and Sustainable Use of The Indian Ocean and Its Resources" tahun 2013 yang memuat tentang kerja sama keselamatan dan keamanan maritim, fasilitasi perdagangan dan investasi, manajemen perikanan, manajemen risiko bencana, kerja sama akademik dan sains teknologi, serta pertukaran pariwisata dan budaya.

2.7.3. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:

1. Bonus Demografi

Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015 dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020- 2035, dimana tingkat kelahiran mengalami penurunan sehingga mengakibatkan persentase penduduk usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan menurun. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi untuk meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Di sisi lain penduduk usia produktif yang dominan dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas (*consuming class*). Masyarakat ini perlu diimbangi dengan pemenuhan sisi produksi dan investasi di dalam negeri agar pasar domestik tetap dapat dikuasai. Bonus demografi juga diproyeksikan akan terjadi di Kabupaten Padang Lawas, di mana penduduk usia produktif meningkat hingga tahun 2029.

2. Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung

Daya dukung sumber daya alam di Indonesia diperkirakan akan mengalami

penurunan. Daya dukung lahan hutan diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektar dari tahun 2025 hingga 2026. Daya dukung ketersediaan air juga diperkirakan mengalami tren menuju kelangkaan di sejumlah wilayah di Indonesia dan di tahun 2029 di sebagian wilayah Sumatera diperkirakan berada pada tingkat langka atau kritis. Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan diperkirakan juga akan semakin menurun dengan meningkatnya alih fungsi lahan dan penurunan kualitas lahan dan air.

Daya dukung keanekaragaman hayati diproyeksikan akan menurun seiring dengan hilangnya habitat, peningkatan pencemaran perubahan iklim, dan persebaran Jenis Asing Invasif (JAI). Daya dukung ekosistem laut mengalami kerentanan seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim. Di sisi lain daya dukung dari ketersediaan energi dan sumber daya mineral di Indonesia cukup besar namun belum sepenuhnya dioptimalkan.

Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun dan mengakibatkan krisis air bersih dengan setidaknya 82% dari 550 sungai di Indonesia berstatus tercemar. Daya tampung kualitas udara juga telah melampaui standar mutu dengan peningkatan konsentrasi polutan setiap tahunnya. Daya tampung lingkungan laut juga mengalami penurunan karena aktivitas yang tidak berkelanjutan dan peningkatan persaingan akan ruang laut. Daya tampung lahan juga mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas.

Sumatera Utara yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah perlu dikembangkan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengembangan ekonomi yang memicu pembangunan fisik secara masif ke depan perlu dilakukan dengan tetap memperhitungkan kondisi lingkungan hidup Sumatera Utara. Pertumbuhan penduduk ke depannya juga akan memicu peningkatan kebutuhan air dan energi yang perlu dikelola secara optimal.

3. Pembangunan IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Dengan ditetapkannya Undang-Undang IKN Nomor 3 Tahun 2022 pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara telah dimulai. Pemindahan ibu kota negara ini tidak hanya memindahkan aktivitas pemerintahan, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan ekonomi (superhub) ekonomi. Pembangunan IKN diharapkan menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan kehidupan yang layak dan modern. Pembangunan IKN sebagai superhub ekonomi melalui pengembangan kluster ekonomi yang berdaya saing dan inovatif perlu menjadi pertimbangan ke depan terutama juga untuk menciptakan konektivitas logistik dan rantai pasok ekonomi secara nasional. IKN yang direncanakan akan menjadi superhub dengan kluster ekonomi baru akan mempengaruhi pengembangan ekonomi di Sumatera Utara karena perubahan konektivitas logistik dan rantai pasok yang saat ini terjadi antara Sumatera dan Jawa

4. Kapasitas Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)

Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara nasional masih dihadapkan pada lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 % dari PDB. Padahal ke depannya kapasitas IPTEKIN menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi.

Penguatan fondasi infrastruktur dasar riset dan inovasi masih menghadapi tantangan pada pemerataan distribusi kuantitas dan kualitas peneliti/periset, serta masih belum optimalnya kuantitas dan kualitas inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah, terutama inovasi berbasis sains dan teknologi yang bersifat applied dan evidence based.

Perluasan kemitraan ekosistem riset dan inovasi juga masih belum

optimal, terutama pada kolaborasi stakeholders dalam meningkatkan difusi dan inkubasi teknologi inovasi yang dapat direplikasi dan berkelanjutan, khususnya dalam pengembangan klaster dan teknologi inovasi berbasis produk unggulan daerah.

5. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB semakin menurun akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan suku bunga. Produktivitas sektor pertanian juga terus melambat dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 yang disebabkan banyak faktor, misalnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya keterampilan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, kelembagaan ekonomi petani dan nelayan, serta berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

6. Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pemanfaatan potensi pariwisata sebagai destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan terus mengukuhkan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi baru, menjadikannya barometer terdepan dalam arena ekonomi kreatif global. Dengan mengangkat kekayaan budaya, seni, dan kearifan lokal, serta mendorong kreativitas talenta, Kabupaten Padang Lawas memiliki peluang untuk meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bersaing di dunia global.

7. Optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi laut

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan Sea Lines of Communication (SLoC) dan ALKI menyebabkan

kontribusi PDB kemaritiman masih berada di kisaran 7,60%. Selain itu, masih juga terdapat tantangan degradasi lingkungan laut, tingginya kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF), dan belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

8. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010-2022 masih relatif tertinggal, dengan nilai US\$7.274,9 per pekerja dan berada di bawah rata-rata pekerja di kawasan ASEAN. Peningkatan produktivitas tenaga kerja juga dihadapkan dengan rendahnya kualitas SDM, yang masih didominasi oleh tingkat pendidikan SMP ke bawah. Tantangan lainnya ialah ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja yang belum baik, dan pasar kerja Indonesia yang belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

2.7.4. Isu Strategis Regional

Isu strategis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan Pembentukan modal manusia. Modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi dari berbagai risiko siklus hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan

kesehatan, serta responsiveness/ketanggapan sistem kesehatan di seluruh wilayah. Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang sedangkan Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

Selanjutnya sistem demokrasi masih prosedural ditandai dengan kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; permasalahan politik elektoral seperti politik uang, politisasi isu SARA; nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi serta sistem kaderisasi partai politik belum maksimal.

Selain hal di atas nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

2. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang. Untuk meningkatkan daya

tarik wisata, diperlukan pembangunan dan perbaikan jalan, bandara, serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan mereka. Selain infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif, seperti pemasaran berbasis e-commerce dan promosi melalui platform media sosial, juga harus diperkuat agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri pariwisata tetapi juga memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya harus menjadi fokus dalam pengembangan sektor ini. Pariwisata berbasis alam dan budaya perlu dikembangkan dengan tetap menjaga ekosistem dan kearifan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku wisata mengenai pentingnya ekowisata serta pengelolaan sampah di kawasan wisata harus ditingkatkan.

3. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan
- Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspon ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspon dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu,

kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (urban sprawl). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga. Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut. Permasalahan dari pelayanan dasar mencakup tiga aspek, yakni

aspek perumahan dan permukiman, aspek kesehatan dan aspek ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi dan pengolahan air limbah dan lumpur tinja. Aspek kesehatan mencakup Jaminan Kesehatan Sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan distribusi tenaga kesehatan. Sedangkan aspek kasus kejahatan, rasa aman dan penyalahgunaan narkoba.

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target, hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi. Pada sisi lain ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi defisit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batubara, Serdang Bedagai dst. Kondisi defisit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkat konsumsi. Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu ke waktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan. Luasan hutan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana kota-kota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada di bawah 30%. Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang. Kurang tersedianya air akan menyebabkan tidak tercapainya target sanitasi dan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat

dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai.

Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah akan meningkat, juga limbah cair dan lumpur tinja serta limbah B3. Peningkatan beban lingkungan ini harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

4. Pembangunan antar daerah serta desa-kota

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi pull factor manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang

berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan green waste dan ruang terbuka hijau.

Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim terlebih pada 2% wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan pengatur iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera.

Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang dilengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang

belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Padang Lawas hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten. Keberadaan potensi bencana yang tinggi ini belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi timur Sumatera Utara dan kepulauan Nias. Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim serta ketidakmampuan alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.

6. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan core value.

Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

2.7.5. Isu Strategis Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan hasil perumusan masalah dan isu strategis dari tingkat global hingga regional. Maka isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan modal dalam pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Padang Lawas secara umum masih berada pada tingkat SMP kelas 3. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah mengingat masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan melalui

peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas dan pemerataan guru ke berbagai wilayah, serta peningkatan jaringan infrastruktur menuju sekolah. Dari sisi kesehatan, Kabupaten Padang Lawas masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan meningkatkan pembangunan fasilitas kesehatan di seluruh kecamatan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, pemerataan dokter dan tenaga kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatannya.

2. Pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan serta sumber daya daerah secara berkelanjutan

Kabupaten Padang Lawas memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pertumbuhan ekonominya. Mayoritas aktivitas perekonomian hingga saat ini masih didominasi sektor primer, terutama pertanian. Kabupaten Padang Lawas juga terdapat wilayah yang memiliki potensi pertambangan. Kabupaten Padang Lawas harus memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya melalui hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk yang bernilai tambah hingga pada akhirnya diharapkan dapat bersaing di pasar ekspor. Di samping itu, Kabupaten Padang Lawas juga memiliki potensi pada Sektor Pariwisata, di mana terdapat sebanyak 20 destinasi wisata. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu memperhatikan hal ini mengingat sektor pariwisata merupakan sektor pertumbuhan ekonomi baru yang dapat berperan sebagai katalis bagi peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berupaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi wisatanya.

3. Peningkatan kualitas Infrastruktur yang resilien terhadap bencana

Infrastruktur merupakan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah untuk kepentingan publik. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas penting untuk memperlancar aktivitas masyarakat dan perekonomian.

Kabupaten Padang Lawas masih menghadapi sejumlah isu yang perlu diperhatikan, seperti rendahnya kualitas jalan, jembatan yang rusak, dan saluran irigasi yang kurang baik. Ketersediaan jalan dan jembatan yang berkualitas penting bagi kelancaran aktivitas masyarakat dan transportasi barang antar daerah. Saluran irigasi yang baik juga berperan penting bagi peningkatan produktivitas pertanian. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan meningkatkan kualitas infrastruktur yang melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan saluran irigasi.

4. Pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan

Isu lingkungan hingga saat ini masih menjadi perhatian dari tingkat global hingga daerah. Lingkungan yang bersih dan aman memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk bertempat tinggal dan menjalankan aktivitasnya. Pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan akan memperhatikan kondisi lingkungan dan sumber daya alam sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak akan merusak lingkungan. Kabupaten Padang Lawas juga akan berupaya untuk menggali potensi PLT EBT (Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber listrik masyarakat dan non-domestik. Kabupaten Padang Lawas juga akan berupaya untuk meningkatkan pengelolaan persampahan daerahnya dengan membangun fasilitas pengolahan sampah daerah.

5. Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas

Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas harus diwujudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berupaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya melalui pengembangan sistem pemerintahan yang transparan berbasis teknologi dan program-program yang inovatif. Pemerintah juga akan meningkatkan kompetensi ASN dengan pendidikan dan pelatihan sehingga menghasilkan SDM yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

6. Transformasi Sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan

Permasalahan kemiskinan masih menjadi isu strategis yang diangkat dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029. Persentase penduduk miskin selama periode 2020 – 2024 telah menurun dari sebelumnya 8,37% pada tahun 2020 menjadi 7,87% pada tahun 2024. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin justru mengalami peningkatan, dari sebelumnya 23,87 ribu jiwa meningkat menjadi 24,96 ribu jiwa. Hal ini menjadi prioritas dalam penanganan penduduk miskin di Kabupaten Padang Lawas. Transformasi sosial menjadi salah satu strategi kunci dalam penanganan kemiskinan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin dalam pembangunan ke depannya. Pemerintah berupaya memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta daya saing ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan

7. Ketahanan Pangan Berkelanjutan menuju Kemandirian Pangan Daerah
Hasil capaian kinerja urusan pangan mengindikasikan peningkatan yang baik dari ketahanan pangan daerah. Skor pola pangan harapan telah meningkat dari 75,20 menjadi 88,60 sampai dengan tahun 2024 serta ketersediaan pangan yang meningkat signifikan dari 23,11% menjadi 60,00% pada tahun 2024. Pemerintah melihat bahwa saat ini pemanfaatan lahan untuk pangan dirasakan belum optimal. Permasalahan sistem irigasi yang terbatas serta sistem teknologi pertanian yang belum berkembang mengakibatkan produktivitas tidak optimal. Kabupaten Padang Lawas perlu lebih mengoptimalkan pembangunan mengingat mayoritas penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Sistem pertanian tradisional cenderung mengakibatkan ketidakstabilan hasil pertanian sehingga perlu lebih dioptimalkan, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan hasil pertanian.



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran ideal mengenai kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh suatu daerah melalui proses pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Visi ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam menentukan kebijakan serta strategi pembangunan sehingga setiap langkah yang diambil dapat mendukung tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Sementara itu, misi adalah pernyataan tentang berbagai langkah strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Misi mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Dalam konteks pembangunan daerah, visi dan misi menjadi landasan bagi perencanaan dan implementasi kebijakan yang berkelanjutan. Visi yang jelas dan terukur memungkinkan pemangku kepentingan untuk menyusun strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Misi yang dirumuskan secara konkret memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki arah yang jelas, mencerminkan prinsip inklusivitas, kesejahteraan sosial, serta peningkatan daya saing daerah. Dengan sinergi antara visi dan misi yang terstruktur, pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat posisi daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Padang Lawas adalah:

BERSAMA MEWUJUDKAN PADANG LAWAS MAU

Adapun makna dari misi ini sebagai berikut:

Mandiri

Masyarakat Padang Lawas yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengelola sumber daya lokal dengan baik

Amanah

Pemerintahan yang jujur, transparan, dan bertanggungjawab, serta menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan tugas sesuai amanat

Jaya

Kejayaan melalui pembangunan ekonomi yang kuat, pengelolaan potensi daerah yang optimal, dan pertumbuhan Badan Usaha Milik Daerah

Unggul

Menjadi daerah yang unggul dalam kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur yang merata dan berkeadilan

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui sepuluh misi pembangunan daerah yaitu :

1. Peningkatan kualitas mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Membangun layanan pendidikan yang inklusif dan dapat diakses masyarakat, kompetensi pendidik yang kuat, proses pembelajaran yang didukung oleh sarana dan prasarana modern, dan manajemen pendidikan yang berorientasi mutu. Membangun layanan kesehatan dengan fasilitas yang terjangkau, penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan, perluasan kepesertaan program jaminan kesehatan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, dan integrasi teknologi kesehatan guna mempermudah akses layanan.

2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Jembatan secara Merata dan Berkeadilan

Mengembangkan infrastruktur berkelanjutan yang memadukan kebutuhan pembangunan dengan pelestarian lingkungan, berwawasan ekonomi jangka panjang, dan bermanfaat sosial, dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan serta mengutamakan penghematan dan efisiensi energi dalam setiap tahap perencanaannya.

3. Membangun Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Kabupaten Padang Lawas membangun infrastruktur pemerintahan yang berkualitas untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas melaksanakan pembangunan gedung perkantoran, pusat layanan masyarakat, dan fasilitas pendukung lainnya yang dirancang dengan standar tinggi, tahan lama, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan aparaturn pemerintahan.

4. Meningkatkan kehidupan beragama yang religius dan harmonis

Membangun masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, mendorong harmoni antar umat beragama yang dilandasi sikap toleransi dan saling menghargai, serta mengembangkan fungsi rumah ibadah dan lembaga keagamaan sebagai pusat pembinaan spiritual sekaligus wadah pemberdayaan sosial dan pendidikan bagi masyarakat

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa

Membangun pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas, mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah, pengembangan sumber daya manusia aparaturn yang kompeten, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

6. Membangun sentra ekonomi rakyat dengan Mengembangkan Koperasi dan UMKM

Membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis komunitas, memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal, dan beridentitas khas yang mengangkat keunikan daerah sebagai daya tarik dan keunggulan kompetitif.

7. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan

Memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap mempertahankan fungsi

ekologis, memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang, dan efisiensi sumber daya. Kabupaten Padang Lawas memanfaatkan potensi sumber daya alam, seperti pertambangan dan perkebunan yang tidak hanya diekspor, namun juga akan dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah.

8. Meningkatkan produktivitas perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan

Penyediaan sarana dan prasarana termasuk infrastruktur pendukung irigasi, jalan dan transportasi, serta penataan dan pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

9. Menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja
Meningkatkan kualitas pencari kerja, aksesibilitas dan pemerataan kesempatan kerja melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penguatan strategi pengurangan kemiskinan ekstrem.

10. Pengembangan destinasi wisata dengan memperhatikan nilai budaya dan kearifan lokal

Mengangkat identitas budaya sebagai daya tarik utama, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama

Untuk menerjemahkan visi dan misi yang telah ditentukan, diperlukan kerangka kerja yang terdefinisi dengan baik untuk setiap misi, mencakup tujuan dan sasaran yang ingin diraih. Tujuan dan sasaran ini akan berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan seluruh urusan pemerintahan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, guna mendukung pencapaian misi yang telah ditetapkan. Capaian keberhasilan setiap misi dapat dievaluasi melalui indikator kinerja sasaran yang disertai target pencapaian yang terukur. Rencana pencapaian sasaran dibuat untuk lima tahun (2025–2029) dengan rincian target tahunan, seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Target Indikator

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Baseline		Proyeksi				Target Transisi (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1		Peningkatan kualitas mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat								
	1.1	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,87	14,24	14,28	14,30	14,32	14,34	14,36
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,63	9,67	9,70	9,72	9,73	9,75	9,78
	1.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Literasi SD (Poin)	0,5682	60,12	64,15	73,41	79,11	85,02	97,91
			Literasi SMP (Poin)	0,4935	52,18	59,88	64,13	70,93	75,175	85,75
			Numerasi SD (Poin)	0,5342	57,92	61,59	67,42	70,31	78,12	85,92
			Numerasi SMP (Poin)	0,496	52,18	58,31	63,52	69,24	74,89	83,04
	1.1.2	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	22,53	24,53	26,75	28,96	30,08	32,10	33,25
	1.1.3	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	N/A	70,00	72,77	75,65	78,65	81,76	85,00
	1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	71,67	72,00	72,33	72,67	73,01	73,35	73,69
	1.2.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	65,94	70,00	73,77	77,75	81,93	86,35	91,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Baseline		Proyeksi				Target Transisi (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	84,12	88,00	88,40	88,79	89,19	89,60	90,00
			Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	156,53	122,00	109,00	97,00	86,00	77,00	75,00
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	N/A	14,50	13,93	13,38	12,86	12,35	11,86
2	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Jembatan secara Merata dan Berkeadilan									
	2.1	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan resilien terhadap bencana	Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	N/A	70,47	70,94	71,42	71,89	72,38
	2.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan infrastruktur (Poin)	N/A	N/A	53,48	57,20	61,19	65,44	70,00
	2.1.2	Terwujudnya daerah yang tangguh bencana	Indeks Risiko Bencana (Poin)	152,76	152,70	152,50	152,15	152,00	151,85	151,85
	2.1.3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	47,66	74,36	75,47	76,60	77,74	78,90	80,08
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	N/A	68,00	68,33	68,67	69,01	69,35	69,69
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%)	N/A	4,00	4,54	5,15	5,84	6,63	7,52

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Baseline		Proyeksi				Target Transisi (2030)	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		2.1.4	Meningkatnya kualitas jembatan	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik (%)	59,00	62,00	65,00	69,00	72,00	75,00	77,00
		2.1.5	Meningkatnya akses transportasi dari desa ke ibu kota kabupaten	Rasio konektivitas (%)	19,06	20,00	20,00	21,00	21,00	22,00	22,00
3	Membangun Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan										
	3.1	Tersedianya Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	70,00	70,47	70,94	71,42	71,89	72,38	
	3.1.1	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	4,10	4,15	4,24	4,32	4,41	4,51	4,60	
4	Meningkatkan kehidupan beragama yang religius dan harmonis										
	4.1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	N/A	67,30	70,24	70,80	73,50	74,10	74,29	
	4.1.1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	60,17	60,65	61,10	61,67	62,87	63,18	63,90	
	4.1.2	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	0,813	0,800	0,720	0,560	0,480	0,710	0,370	
			Indeks Perlindungan Anak (Poin)	71,33	73,50	74,00	74,50	75,00	76,00	76,50	
	4.1.3	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin)	N/A	80,00	81,91	83,86	85,86	87,90	90,00	
	4.1.4	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang harmoni	Indeks Harmoni Indonesia (Poin)	N/A	50,00	53,48	57,20	61,19	65,44	70,00	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Baseline		Proyeksi				Target Transisi (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa									
	5.1	Terwujudnya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	58,54	61,00	62,00	63,00	68,00	70,00	72,00
	5.1.1	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	4,10	4,15	4,24	4,32	4,41	4,51	4,60
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	N/A	95,47	96,36	97,25	98,16	99,08	100,00
	5.1.2	Terwujudnya layanan publik berbasis digital	Indeks SPBE (Poin)	2,17	2,42	2,48	2,54	2,61	2,68	2,74
	5.1.3	Meningkatnya tata kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah (Poin)	15,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00
	5.1.4	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	70,00	71,00	73,00	75,00	76,00	78,00	81,00
	5.1.5	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Level)	2,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
	5.1.6	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	N/A	70,00	71,89	73,84	75,84	77,89	80,00
	5.1.7	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan (Level)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	3,88	4,52	4,80	4,90	5,01	5,11	5,22

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Baseline		Proyeksi				Target Transisi (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			(%)							
		5.1.8 Meningkatnya peran BUMD	RoA BUMD (%)	N/A	0,60	0,72	1,60	1,92	2,60	1,50
6	Membangun sentra ekonomi rakyat dengan Mengembangkan Koperasi dan UMKM									
	6.1	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02	5,35-5,64	5,36-5,65	5,37-5,66	5,38-5,67	5,39-5,69	5,4-5,7
	6.1.1	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	2,00	2,20	2,50	2,70	2,80	3,00	3,10
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	16,00	17,00	18,31	19,73	21,25	22,89	25,00
	6.1.2	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	16,32	17,53-17,67	17,72-17,86	17,92-18,06	18,12-18,26	18,32-18,46	18,52-18,60
	6.1.3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa (%)	0,6217 (IDM)	64,00	53,48	57,20	61,19	65,44	70,00
7	Mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan									
	7.1	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam	Kontribusi Sektor Penggalan dan Pertambangan (%)	0,44	0,46	0,49	0,51	0,53	0,56	0,59
			Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan (%)	41,61	41,19	40,78	40,37	39,97	39,57	39,18
	7.1.1	Meningkatnya nilai tambah hilirisasi produk Perkebunan dan pertambangan	Nilai Tambah Sektor Penggalan dan Pertambangan (Rp Juta)	80.661,79	83.081,64	85.574,09	88.141,32	90.785,56	93.509,12	96.314,40

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Baseline		Proyeksi				Target Transisi (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			Nilai Tambah Sub-Sektor Perkebunan (Rp Juta)	7.844.782,76	7.923.230,59	8.002.462,89	8.082.487,52	8.163.312,40	8.244.945,52	8.327.394,98
	7.2	Meningkatnya pembangunan yang ramah lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	67,52	69,70	70,35	71,38	71,66	72,53	73,56
	7.2.1	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Poin)	N/A	19,78	19,78	25,00	30,00	45,00	60,00
	7.2.2	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ Eq)	N/A	1.000,00	1.148,70	1.319,51	1.515,72	1.741,10	2.000,00
	7.2.3	Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	N/A	5,00	6,23	7,76	9,67	12,04	15,00
8	Meningkatkan produktivitas perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan									
	8.1	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan (Rp juta)	125,73	140,09	156,10	173,93	193,80	215,94	240,60
	8.1.1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Laju Pertumbuhan PDRB Sub-Sektor Pertanian (%)	6,45	6,61	6,78	6,95	7,13	7,31	7,50
			Laju Pertumbuhan PDRB Sub-Sektor Peternakan (%)	6,06	6,21	6,36	6,51	6,67	6,83	7,00
	8.1.2	Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub-Sektor Perikanan (%)	5,59	5,73	5,88	6,03	6,18	6,34	6,50

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Baseline		Proyeksi				Target Transisi (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		8.1.3 Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	76,75	77,00	77,20	77,30	77,60	77,85	78,00
9	Menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja									
	9.1	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,87	7,79-7,67	7,72-7,61	7,64-7,56	7,57-7,5	7,50-7,45	7,43-7,4
	9.1.1	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Persentase PPKS yang tertangani (%)	60,00	70,00	71,89	73,84	75,84	77,89	80,00
	9.2	Meningkatnya lapangan kerja, produktivitas tenaga kerja, dan kewirausahaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,47	5,30	5,01	4,74	4,48	4,23	4,00
	9.2.1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp juta/kapita)	129,20	135,67	142,45	149,57	157,05	164,90	173,15
	9.2.2	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi (%)	1,47	5,00	6,60	8,71	11,49	15,16	20,00
	9.2.3	Meningkatnya minat pemuda untuk berwirausaha	Rasio Kewirausahaan (%)	5,99	6,08	6,16	6,25	6,33	6,42	6,51
10	Mengembangkan destinasi wisata berbasis budaya dan kearifan lokal									
	10.1	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	0,90	1,13	1,56	1,75	1,85	1,92	2,05
	10.1.1	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan	Pertumbuhan kunjungan	50,00	11,11	2,00	1,96	1,92	1,89	1,85

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Baseline			Proyeksi			Target Transisi (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		ekonomi kreatif	wisatawan (%)							
			Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%)	N/A	20,00	20,60	21,22	21,85	22,51	23,19
		10.1.2 Terwujudnya berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	51,12	52,28	52,30	52,32	52,62	52,91	53,21

Tabel 3.2. Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Padang Lawas 2025-2029 dengan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2045

No	Arah Pembangunan RPJPD	Misi RPJMD
1	Kesehatan untuk Semua	1 Peningkatan kualitas mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
2	Pendidikan Unggul dan Merata	1 Peningkatan kualitas mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3	Masyarakat Sejahtera dan Terlindungi	9 Menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja
4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	6 Membangun sentra ekonomi rakyat dengan Mengembangkan Koperasi dan UMKM
		10 Pengembangan destinasi wisata dengan memperhatikan nilai budaya dan kearifan lokal
		7 Mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan
5	Penerapan Ekonomi Hijau	7 Mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan
		3 Membangun Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
6	Transformasi Digital	5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa
7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	6 Membangun sentra ekonomi rakyat dengan Mengembangkan Koperasi dan UMKM
8	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	6 Membangun sentra ekonomi rakyat dengan Mengembangkan Koperasi dan UMKM
9	Stabilitas Ekonomi Makro	8 Meningkatkan produktivitas perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan
10	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa
11	Pemahaman wawasan kebangsaan, ideologi pancasila dan Trantibunlinmas	4 Meningkatkan kehidupan beragama yang religius dan harmonis

No	Arah Pembangunan RPJPD		Misi RPJMD
12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	4	Meningkatkan kehidupan beragama yang religius dan harmonis
13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	4	Meningkatkan kehidupan beragama yang religius dan harmonis
14	Keluarga Berkualitas, Kestaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	4	Meningkatkan kehidupan beragama yang religius dan harmonis
15	Lingkungan Hidup Berkualitas	3	Membangun Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
		7	Mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan
16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	8	Meningkatkan produktivitas perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan
17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	2	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Jembatan secara Merata dan Berkeadilan

Tabel 3.3. Penyeragaman Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029		
	Indikator	2025	2029	Indikator	2025	2029	Indikator	2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30	7,60	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30	7,60	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,35-5,64	5,39-5,69
2	PDB per Kapita (Rp juta)	78,40	115,30	PDB per Kapita (Rp juta)	78,40	115,30	PDRB per Kapita (Rp Juta)	69,99	92,42
3	Kontribusi PDB Provinsi (%)	5,20	5,30	Kontribusi PDB Provinsi (%)	5,20	5,30	Nilai PDRB Kabupaten (Rp juta)	20.375.151,83	28.867.470,76
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	2,82 - 3,32	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	2,82 - 3,32	Tingkat Kemiskinan (%)	7,79-7,67	7,50-7,45
5	Rasio Gini (Poin)	0,303 - 0,305	0,207 - 0,231	Rasio Gini (Poin)	0,303 - 0,305	0,207 - 0,231	Rasio Gini (Poin)	0,217	0,192
6	Indeks Modal Manusia (Poin)	0,54	0,57	Indeks Modal Manusia (Poin)	0,54	0,57	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,70	76,12
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00	16,88	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00	16,88	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton Co2 Eq)	1.000,00	1.741,10
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	77,20	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	77,20	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	69,70	72,53
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,30	5,30

3.2. Penahapan Pembangunan

Penahapan kebijakan pembangunan merupakan kerangka prioritas tahunan yang dirumuskan secara berjenjang guna mewujudkan visi dan misi kepemimpinan daerah. Dalam kurun waktu 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menetapkan fokus kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Penahapan Pembangunan

Tahun	Fokus	Keterangan
2026	Fokus Pembangunan Dasar	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada tahap awal pembangunan jangka menengah memfokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar, melalui pembangunan sekolah unggulan SD dan SMP di setiap kecamatan, sekolah rakyat untuk masyarakat miskin, serta RSUD berstandar nasional, Puskesmas di setiap kecamatan, dan Posyandu di setiap desa, dengan memastikan ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan. Selain itu, pemerintah akan memetakan masyarakat miskin untuk bantuan sosial tepat sasaran, menginisiasi hilirisasi produk pertanian dan pertambangan untuk meningkatkan daya saing, serta mengembangkan sektor pariwisata untuk menarik wisatawan. Dari sisi pemerintahan, sistem berbasis digital akan diperkuat untuk mempermudah akses pelayanan publik dan menyederhanakan regulasi. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi akan ditingkatkan, termasuk pembangunan infrastruktur tangguh bencana dan rehabilitasi rumah layak huni. Untuk isu lingkungan, pemerintah akan membangun TPA dengan sistem sanitary landfill guna mencegah pencemaran lingkungan.
2027	Peningkatan Kualitas	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui pelatihan guru, penyelesaian pembangunan sekolah unggulan, dan penyediaan sarana berkualitas, serta pembangunan RSUD berstandar internasional, distribusi merata tenaga kesehatan terlatih, dan penerapan Universal Health Coverage. Di sektor ekonomi, hilirisasi produk akan ditingkatkan, tenaga kerja dilatih sesuai kebutuhan industri, dan pariwisata dikembangkan melalui peningkatan SDM, promosi destinasi, serta pembangunan alun-alun kota, pusat kuliner, Islamic Center, dan rumah adat. Revitalisasi pasar Sibuhuan juga dilakukan untuk mendukung pedagang. Dari sisi pemerintahan, kompetensi ASN ditingkatkan, sistem digital dioptimalkan, dan Pusat Pemerintahan Terpadu serta Rumah Dinas Bupati dibangun. Untuk lingkungan, pemerintah mendorong energi baru terbarukan, meningkatkan layanan persampahan, dan mengembangkan TPA serta TPST.
2028	Pemantapan dan Inovasi	Pada tahun 2028, Kabupaten Padang Lawas akan memantapkan pembangunan sebelumnya dengan meningkatkan sarana

Tahun	Fokus	Keterangan
		sekolah berbasis teknologi digital untuk ekosistem pembelajaran modern, menyediakan fasilitas rumah sakit canggih, serta melakukan riset dan inovasi untuk produk unggulan daerah yang kompetitif di pasar ekspor. Pariwisata akan diperkuat melalui promosi digital dan pembangunan stadion multifungsi sebagai investasi ekonomi. Tata kelola pemerintahan ditingkatkan dengan penguatan kompetensi digital ASN dan pengembangan sistem elektronik untuk mempermudah administrasi. Infrastruktur telekomunikasi dan internet inklusif akan dikembangkan agar seluruh masyarakat mendapat akses informasi yang merata, disertai perluasan layanan pengelolaan sampah serta pengembangan TPA dan TPST.
2029	Pemerataan dan Digitalisasi	Pada tahap ini, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan memajukan pemerataan akses di berbagai wilayah dengan memperkuat pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan berkualitas, didukung guru dan dokter kompeten yang terdistribusi merata, ekosistem pembelajaran digital, sarana kesehatan canggih, pelayanan optimal, dan jaminan sosial inklusif. Produk unggulan daerah terus dikembangkan melalui riset untuk menjaga daya saing di pasar ekspor, sementara tenaga kerja ditingkatkan keterampilannya, termasuk literasi digital, agar kompetitif. Sektor pariwisata diperkuat dengan prinsip 6A, melanjutkan pembangunan stadion, dan pemerintahan dioptimalkan melalui digitalisasi pelayanan publik, transparansi, serta peningkatan kompetensi ASN. Infrastruktur terus diperbarui seiring perkembangan teknologi, literasi digital masyarakat ditingkatkan, dan pengelolaan sampah dioptimalkan melalui penyediaan tempat sampah, pengumpulan inklusif, serta pemanfaatan TPA dan TPST untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi, menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2030	Optimalisasi dan Keberlanjutan	Pada tahap ini, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan mengoptimalkan dan melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Penahapan pembangunan daerah akan menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunannya secara terarah. Uraian penahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Lawas akan dijelaskan pada sub-bab berikut:

3.2.1. 2026: Fokus Pembangunan Dasar

Pada tahap awal pembangunan daerah jangka menengah difokuskan pada pembangunan dasar pada pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus disediakan oleh

pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah unggulan untuk jenjang pendidikan SD dan SMP pada setiap kecamatan. Pembangunan sekolah unggulan dilakukan agar setiap masyarakat pada setiap kecamatan dapat memperoleh akses yang sama untuk pendidikan. Selain itu, pemerintah akan menginisiasi pembangunan sekolah rakyat untuk meningkatkan akses masyarakat terkategori miskin pada pendidikan. Kemudian, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, maka pada tahap ini Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berupaya untuk menginisiasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang telah memenuhi standar nasional. Selain itu, pemerintah juga akan memastikan ketersediaan Puskesmas pada setiap kecamatan dan Posyandu pada setiap desa agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan di setiap wilayah. Pemerintah juga akan memastikan ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan memenuhi kebutuhan setiap wilayah. Pada tahap ini pemerintah juga akan memetakan masyarakat-masyarakat miskin atau rentan. Upaya ini dilakukan agar bantuan dan jaminan sosial diberikan oleh pemerintah tepat sasaran sesuai dengan kebutuhannya.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berupaya untuk menginisiasi hilirisasi produk-produk pertanian. Padang Lawas memiliki potensi pada sektor pertanian dan pertambangan sehingga hal ini perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah akan berupaya untuk memulai hilirisasi produk-produk pertanian dan pertambangan sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah. Di samping itu, pemerintah juga akan memperhatikan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Destinasi wisata yang ada akan dikembangkan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan nusantara dan mancanegara. Pemerintah juga akan mulai menggali potensi dan peluang investasi daerah yang diharapkan akan mendorong investasi domestik dan asing ke daerah.

Dari sisi pemerintahan, pemerintah akan menguatkan sistem pemerintahan berbasis digital. Pemerintah akan membangun dan memperbaiki aplikasi atau situs pelayanan pemerintah. Pembangunan sistem dimaksudkan untuk meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan publik. Selain itu, pemerintah juga akan menyederhanakan regulasi sehingga masyarakat dapat mengurus administrasinya dengan mudah dan cepat.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan meningkatkan kualitas infrastrukturnya melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, terutama pada wilayah yang belum memiliki akses pada pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah juga akan memperbaiki saluran irigasi yang masih bermasalah hingga saat ini. Di samping itu, pemerintah juga akan membangun infrastruktur yang tangguh dan siaga terhadap bencana sehingga risiko bencana dapat dimitigasi. Pemerintah akan berupaya untuk menginisiasi rehabilitasi rumah untuk menyediakan rumah layak huni kepada seluruh masyarakat. Dalam menyikapi isu lingkungan, Kabupaten Padang Lawas akan mulai membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem *sanitary landfill* sebagai sarana penampungan sampah agar tidak mencemari lingkungan masyarakat.

3.2.2. 2027: Peningkatan Kualitas

Pada tahun 2027, pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berupaya meningkatkan kualitas dari sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan meningkatkan kualitas guru/tenaga pendidik melalui pelatihan dan pengembangan sehingga menghasilkan guru yang kompeten. Pemerintah juga akan menyelesaikan pembangunan sekolah unggulan pada tahap ini, serta menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang proses belajar peserta didik. Dari sisi kesehatan, pemerintah akan menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang optimal. Pemerintah akan melanjutkan pembangunan RSUD berstandar

internasional dan penyediaan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah. Dokter dan tenaga kesehatan akan didistribusikan secara merata pada seluruh wilayah. Tenaga kesehatan akan ditingkatkan kompetensinya agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang baik. Pemerintah juga akan meningkatkan perlindungan sosial kepada masyarakat melalui penerapan *Universal Health Coverage* (UHC) pada seluruh masyarakat.

Dari sisi ekonomi, Kabupaten Padang Lawas akan meningkatkan daya saing produk-produk turunan atau hilirisasi. Pemerintah akan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri saat ini dan di masa mendatang. Pada sektor pariwisata, Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan sarana-prasarana pada destinasi wisata. Pemerintah juga akan gencar melakukan promosi destinasi wisata melalui berbagai media untuk menarik wisatawan nusantara dan mancanegara. Pemerintah juga akan menginisiasi pembangunan alun-alun kota dan membangun pusat kuliner di Lapangan Merdeka, di mana hal ini akan menjadi salah satu daya tarik pariwisata Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah juga akan melaksanakan pembangunan *Islamic Center* sebagai ikon dari daerah yang religius dan dapat berperan sebagai destinasi wisata religi, serta pembangunan rumah adat daerah sebagai bentuk pelestarian etnis dan budaya daerah, serta dapat berperan sebagai destinasi wisata budaya. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas juga akan melakukan revitalisasi pasar Sibuhuan dengan pembangunan dan renovasi pasar yang memiliki fasilitas yang layak dan berkualitas sehingga masyarakat kembali tertarik untuk mengunjungi dan berbelanja di pasar. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang berjualan atau pedagang.

Pada sisi pemerintahan, SDM ASN akan ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan sesuai dengan bidangnya. Keterampilan digital ASN juga akan ditingkatkan agar sistem pemerintahan berbasis digital dapat berjalan secara optimal. Hal ini

dimaksudkan untuk meningkatkan SDM ASN yang profesional dan memberikan pelayanan publik yang baik. Pemerintah juga akan menginisiasi kawasan kantor pemerintahan dalam Pusat Pemerintahan Terpadu. Pada tahap ini juga pemerintah akan menginisiasi pembangunan Rumah Dinas Bupati.

Dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah, pemerintah juga akan mendorong pengembangan pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan sebagai sumber energi listrik bagi masyarakat. Pengelolaan sampah juga akan ditingkatkan melalui peningkatan layanan persampahan kepada masyarakat dan melanjutkan pengembangan Tempat Pengolahan Akhir (TPA), serta menginisiasi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

3.2.3. 2028: Pemantapan dan Inovasi

Pada tahun 2028, Kabupaten Padang Lawas akan melakukan pemantapan dari pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, serta melakukan riset dan inovasi pada berbagai aspek. Seluruh sarana dan prasarana sekolah akan ditingkatkan melalui penyediaan fasilitas belajar berbasis teknologi digital sebagai bentuk implementasi dari ekosistem pembelajaran berbasis digital sehingga seluruh siswa pada setiap daerah akan mulai terpapar dengan teknologi digital. Dari segi kesehatan, pemerintah akan meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit dengan teknologi yang canggih sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat meningkat.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas juga akan melakukan riset dan inovasi untuk mengembangkan produk unggulan daerah sehingga produk yang dihasilkan lebih efisien, berkualitas, dan mampu bersaing di pasar ekspor. Pemerintah juga akan meningkatkan daya tarik destinasi wisata dengan promosi yang intens melalui media digital. Kabupaten Padang Lawas juga akan menginisiasi pembangunan stadion yang akan berfungsi sebagai tempat untuk berbagai acara, olahraga, atau pun kegiatan lainnya. Pembangunan stadion ini merupakan suatu investasi yang akan memberikan

manfaat ekonomi di masa mendatang.

Dari segi tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan meningkatkan kompetensi digital pada ASN sekaligus menguatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan situs pemerintah sehingga kualitasnya semakin meningkat dan memudahkan masyarakat untuk mengurus kebutuhan administrasi pada pemerintah.

Pemerintah juga akan mulai berfokus pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan digital yang inklusif di setiap daerah. Pembangunan ini diharapkan akan memberikan masyarakat akses yang sama terhadap jaringan telekomunikasi dan internet sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh informasi yang sama. Pemerintah juga akan terus memperluas layanan pengumpulan sampah, serta penyediaan tempat sampah pada setiap wilayah dan melanjutkan pembangunan dan pengembangan TPA dan TPST.

3.2.4. 2029: Pemerataan dan Digitalisasi

Pada tahap ini pemerintah akan meningkatkan pemerataan akses ke berbagai wilayah. Pemerintah akan melanjutkan pengembangan dan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Pembangunan dari segi pendidikan dan kesehatan akan semakin mantap dengan ketersediaan guru dan dokter yang berkualitas yang terdistribusi secara merata di berbagai wilayah, ekosistem pembelajaran di sekolah sudah berbasis digital, sarana dan prasarana kesehatan yang canggih, pelayanan yang optimal, dan jaminan sosial kepada masyarakat yang inklusif.

Kabupaten Padang Lawas memiliki produk unggulan daerah yang inovatif yang berdaya saing dan terus melakukan riset untuk pengembangan produk-produk unggulan daerah untuk menjaga ketahanan dan daya saingnya di pasar ekspor. Daya saing tenaga kerja juga akan ditingkatkan dengan pelatihan dan pengembangan yang relevan pada perkembangan zaman. Pemahaman terhadap teknologi digital akan ditingkatkan kepada tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Sektor pariwisata juga terus

dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya dengan tetap menerapkan prinsip 6A (*Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary Service, Activities, dan Available Packages*). Pada tahap ini, pemerintah juga akan meneruskan pembangunan stadion yang telah diinisiasi pada tahun sebelumnya.

Sistem pemerintahan sudah matang dengan penerapan teknologi digital pada setiap aspek. Pelayanan pemerintah sudah mulai optimal dengan adanya digitalisasi pada pelayanan publik dan transparansi pada seluruh aktivitas pemerintah. Pemerintah akan terus melakukan pembaruan dari aplikasi dan situs pemerintah melalui riset dan inovasi pada sistem pemerintahan. Pemerintah juga akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN sesuai dengan bidangnya masing-masing. Implementasi pelayanan berbasis digital akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dari segi pelayanan pemerintah kepada publik.

Pembangunan infrastruktur sudah semakin optimal di berbagai wilayah. Digitalisasi sudah mulai dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pemerintah akan terus mengedepankan pembaruan dari infrastruktur yang ada dengan menyesuainya seiring dengan perkembangan teknologi. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas juga terus meningkatkan literasi masyarakat terhadap teknologi digital. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan terus berupaya untuk meningkatkan layanan persampahan, melalui penyediaan tempat sampah sesuai kategori sampah dan pengumpulan sampah yang inklusif sehingga lingkungan menjadi semakin bersih dan sehat. Ketersediaan TPA dan TPST akan dimanfaatkan secara maksimal agar sampah yang terkumpul dapat terkelola dan menghasilkan produk olahan yang bernilai ekonomi.

3.2.5. 2030: Optimalisasi dan Keberlanjutan

Pada tahun 2030, pemerintah tetap akan melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan akan berfokus pada optimalisasi pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dan pengembangan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang telah dibangun.

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan kerangka panduan yang berfungsi untuk mengarahkan langkah-langkah konkret dalam pencapaian tujuan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan. Strategi mencakup rencana jangka menengah hingga panjang yang mendefinisikan prioritas, sasaran, serta pendekatan yang akan ditempuh untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang, sementara arah kebijakan adalah garis besar kebijakan yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta pengalokasian sumber daya.

Dalam pemerintahan daerah, strategi dan arah kebijakan diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2025-2029, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap sasaran daerah dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.5. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan kualitas mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			
1.1	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing			
1.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Meningkatkan partisipasi siswa pada sekolah		Percepatan wajib belajar 13 tahun Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Peningkatan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah unggulan dan sekolah rakyat Peningkatan kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik serta kesejahteraannya Pengembangan kurikulum yang adaptif berbasis teknologi Penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi siswa
1.1.2	Meningkatnya literasi masyarakat	Meningkatkan minat baca masyarakat		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan Pengembangan perpustakaan digital Penyelenggaraan gerakan membaca masyarakat Peningkatan ketersediaan pojok baca Peningkatan peran keluarga dan lingkungan dalam mendukung kebiasaan membaca sejak usia dini.

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		1.1.3	Meningkatnya prestasi olahraga	Meningkatkan daya saing atlet daerah dan prestasi olahraga	Pembinaan Atlet Berbasis Talent Scouting dan Pelatihan Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur dan Akses Fasilitas Olahraga
		1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat		
		1.2.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses layanan kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan Peningkatan akses layanan kesehatan melalui pembangunan Rumah Sakit Daerah berstandar nasional Peningkatan akreditasi Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Pembangunan RSUD berstandar nasional Peningkatan kualitas dokter dan tenaga kesehatan Pemerataan distribusi dokter dan tenaga kesehatan Percepatan Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat Peningkatan gerakan masyarakat untuk hidup sehat
2	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Jembatan secara Merata dan Berkeadilan				
		2.1	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan resilien terhadap bencana		
			Meningkatnya akses masyarakat	Meningkatkan kualitas	Peningkatan akses masyarakat terhadap

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2.1.1		terhadap infrastruktur berkualitas	infrastruktur yang adil dan merata	<p>sistem penyediaan air minum</p> <p>Peningkatan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah</p> <p>Peningkatan kualitas sistem drainase</p> <p>Penataan dan pembangunan pusat pemerintahan terpadu</p> <p>Pembangunan fasilitas publik (Alun-alun kota dan stadion)</p>
2.1.2	Terwujudnya daerah yang tangguh bencana		Meningkatkan infrastruktur kebencanaan	<p>Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana</p> <p>Peningkatan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Peningkatan desa tangguh bencana</p>
2.1.3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		Meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni	<p>Peningkatan kualitas kawasan permukiman</p> <p>Penurunan kawasan kumuh</p> <p>Peningkatan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) umum permukiman</p>
2.1.4	Meningkatnya kualitas jembatan		Meningkatkan kualitas konstruksi jembatan	<p>Renovasi dan pembangunan jembatan baru sesuai kebutuhan dan standar keselamatan</p> <p>Pemeliharaan dan inspeksi rutin untuk menjaga kondisi jembatan</p> <p>Pembangunan dan peningkatan jembatan gantung bagi desa yang dilintasi perairan sungai</p>

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Percepatan pembangunan jembatan pada jalan penghubung antara desa dengan kecamatan
		2.1.5 Meningkatnya akses transportasi dari desa ke ibukota kabupaten	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	<p>Penerapan teknologi bahan dan konstruksi yang berkualitas tinggi untuk daya tahan jalan.</p> <p>Peningkatan pemeliharaan rutin dan preventif untuk memperpanjang umur jalan</p> <p>Peningkatan akses masyarakat terhadap jalan yang aman dan nyaman</p> <p>Percepatan pembangunan jalan untuk daerah terpencil dan tertinggal</p> <p>Peningkatan konektivitas transportasi antara desa dengan kecamatan</p>
3	Membangun Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan			
	3.1	Tersedianya Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan		
	3.1.1	Meningkatnya pelayanan publik	Membangun sarana dan prasarana pelayanan publik	Pembangunan infrastruktur pelayanan publik
4	Meningkatkan kehidupan beragama yang religius dan harmonis			
	4.1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib		
	4.1.1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Meningkatkan kualitas keluarga	<p>Peningkatan pemberdayaan dalam mewujudkan keluarga sejahtera</p> <p>Meningkatkan kualitas pendidikan agama</p>

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				dan edukasi nilai-nilai toleransi
				Pembangunan Islamic Center sebagai wujud peningkatan nilai-nilai religi
4.1.2	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak		Peningkatan akses perempuan dalam pendidikan dan kesehatan
				Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah
				Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan anak
				Peningkatan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak
4.1.3	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan keamanan lingkungan		Peningkatan perlindungan dan rasa aman terhadap masyarakat
				Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah
				Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
4.1.4	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang harmoni	Meningkatkan kohesi sosial melalui pemberdayaan masyarakat		Penguatan Pendidikan Karakter dan Kesadaran Multikultural
				Peningkatan mediasi dan penyelesaian konflik
				Pemberdayaan organisasi masyarakat dalam menjaga keharmonisan
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa			

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5.1		Terwujudnya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel		
5.1.1		Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik
5.1.2		Terwujudnya layanan publik berbasis digital	Meningkatkan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan integrasi antar perangkat daerah melalui digitalisasi Peningkatan skill SDM ASN berbasis digital Peningkatan cyber security dalam situs dan aplikasi pemerintah
5.1.3		Meningkatnya tata kelola arsip	Meningkatkan kualitas kearsipan daerah	Penerapan digitalisasi dalam pengarsipan dokumen penting pemerintah Peningkatan tata kelola arsip pada setiap perangkat daerah
5.1.4		Meningkatnya profesionalitas ASN	Meningkatkan kualitas ASN yang profesional	Peningkatan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah Penerapan Sistem Merit
5.1.5		Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan pengawasan pemerintahan	Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah Peningkatan manajemen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
5.1.6		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Meningkatkan perencanaan pembangunan yang sinergis	Peningkatan kualitas sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		daerah		daerah
				Peningkatan sinergitas perencanaan antar perangkat daerah
5.1.7		Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan sistem keuangan daerah	Pengoptimalisasian pengelolaan aset dan kekayaan daerah
				Penerapan sistem digitalisasi dalam penerimaan daerah
5.1.8		Meningkatnya peran BUMD	Meningkatkan kapasitas BUMD	Penerapan GCG dalam tata kelola BUMD
				Penerapan model bisnis yang adaptif dan responsif
6	Membangun sentra ekonomi rakyat dengan Mengembangkan Koperasi dan UMKM			
	6.1	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah		
	6.1.1	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Meningkatkan daya saing produk UMKM	Pengembangan kapasitas dan kualitas produk UMKM melalui pelatihan teknis, standarisasi, HaKI dan sertifikasi produk.
				Fasilitasi akses pasar dan pembiayaan bagi UMKM
				Peningkatan penggunaan teknologi digital dan inovasi dalam proses produksi dan pemasaran produk UMKM
				Peningkatan kolaborasi dan kemitraan dengan institusi keuangan, universitas dan swasta
				Revitalisasi pasar tradisional Sibuhuan
				Pengembangan kawasan pasar modern sebagai sentra ekonomi kreatif dan UMKM

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		6.1.2	Meningkatnya daya saing industri	Meningkatkan hilirisasi berbasis agroindustri	<p>Penguatan integrasi antara sektor pertanian dengan industri pengolahan</p> <p>Penyediaan insentif dan kemudahan regulasi bagi pelaku usaha agroindustri</p> <p>Pengembangan infrastruktur dan teknologi pengolahan hasil pertanian yang ramah lingkungan</p>
		6.1.3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Meningkatkan pembangunan dan perekonomian desa	<p>Peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa</p> <p>Pengembangan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang ekonomi di wilayah desa</p> <p>Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) desa</p> <p>Pengembangan BUMDes dan Koperasi untuk mendorong perekonomian desa</p> <p>Pengembangan potensi lokal desa melalui diversifikasi usaha dan inovasi berbasis kearifan lokal.</p> <p>Penguatan kelembagaan desa untuk meningkatkan tata kelola pembangunan dan pengelolaan ekonomi secara partisipatif dan berkelanjutan.</p>
7	Mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan				
		7.1	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam		

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
7.1.1		Meningkatnya nilai tambah hilirisasi produk Perkebunan dan pertambangan	Meningkatkan Kapasitas Pengolahan dan Diversifikasi Produk untuk Meningkatkan Nilai Tambah	<p>Peningkatan investasi pada sektor penggalian dan pertambangan</p> <p>Peningkatan R&D dalam pengolahan hasil tambang dan perkebunan</p> <p>Pengembangan tanaman hortikultura yang terintegrasi dan berkelanjutan</p> <p>Peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk pengolahan hasil tambang dan perkebunan</p>
7.2		Meningkatnya pembangunan yang ramah lingkungan		
7.2.1		Meningkatnya pengelolaan persampahan	Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan	<p>Peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan lingkungan hidup</p> <p>Penguatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup.</p> <p>Peningkatan sistem pengelolaan persampahan melalui pembangunan TPA</p>
7.2.2		Menurunnya emisi gas rumah kaca	Meningkatkan transisi energi baru terbarukan	<p>Pembangunan berbasis teknologi ramah lingkungan</p> <p>Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait emisi gas rumah kaca</p> <p>Pengembangan transportasi rendah emisi</p>
7.2.3		Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	Transisi Energi Berkelanjutan melalui Pengembangan Energi Terbarukan	<p>Pengembangan infrastruktur Energi Baru Terbarukan</p> <p>Peningkatan akses rumah tangga terhadap</p>

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				EBT
8	Meningkatkan produktivitas perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan			
	8.1	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan		
	8.1.1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Peningkatan produktivitas dan pendapatan petani	<p>Penyediaan bibit unggul, pupuk, dan teknologi tepat guna bagi petani.</p> <p>Peningkatan akses pembiayaan petani</p> <p>Penguatan kelembagaan petani dan pengembangan pasar produk pertanian.</p> <p>Pembangunan dan peningkatan irigasi, jalan perkebunan dan pertanian sebagai sarana transportasi angkutan produksi perkebunan dan pertanian</p> <p>Penataan dan pengembangan kawasan perkebunan dan pertanian</p> <p>Peningkatan kualitas produksi perkebunan dan pertanian serta modernisasi perkebunan dan pertanian</p>
	8.1.2	Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya perikanan	Peningkatan hasil budidaya dan pendapatan pembudidaya perikanan	<p>Penyediaan benih unggul dan teknologi budidaya yang efisien.</p> <p>Pembangunan Balai Benih Ikan</p> <p>Fasilitasi akses pembiayaan dan pelatihan bagi pembudidaya perikanan.</p> <p>Pengembangan jaringan pemasaran dan penguatan kelembagaan pembudidaya</p>

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		8.1.3	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Pengelolaan cadangan pangan dan peningkatan produksi pangan berkualitas	<p>perikanan.</p> <p>Optimalisasi produksi pangan melalui penggunaan teknologi dan bibit unggul.</p> <p>Pengelolaan dan distribusi cadangan pangan secara efisien.</p> <p>Peningkatan akses pasar dan stabilisasi harga pangan</p>
9	Menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja				
	9.1	Menurunnya angka kemiskinan			
	9.1.1	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Penguatan program sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkeadilan, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan dan marginal.	<p>Pengembangan dan perluasan jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi kelompok kurang mampu dan rentan.</p> <p>Peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.</p> <p>Pelatihan keterampilan dan akses permodalan bagi kelompok marjinal.</p>	
	9.2	Meningkatnya lapangan kerja, produktivitas tenaga kerja, dan kewirausahaan			
	9.2.1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan, dan perluasan lapangan kerja.	<p>Pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja.</p> <p>Fasilitasi penciptaan lapangan kerja baru, terutama di sektor strategis dan padat karya.</p> <p>Peningkatan perlindungan dan</p>	

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				kesejahteraan tenaga kerja
				Menjalin kemitraan dan meningkatkan peranan swasta dan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam Padang Lawas
				Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pembukaan lapangan kerja baru
	9.2.2	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Penciptaan lingkungan usaha yang kondusif dan menarik bagi investor domestik maupun asing	Penyederhanaan regulasi dan perizinan
				Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi untuk sektor prioritas
				Penguatan transparansi dan kepastian hukum
	9.2.3	Meningkatnya minat pemuda untuk berwirausaha	Meningkatkan Akses dan Dukungan terhadap Kewirausahaan bagi pemuda	Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan
				Fasilitasi pendanaan dan akses kredit untuk pemula
				Pemberian insentif kepada pelaku usaha
10	Mengembangkan destinasi wisata berbasis budaya dan kearifan lokal			
	10.1	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata daerah		
	10.1.1	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan sarana dan prasarana sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
				Peningkatan promosi destinasi wisata dan produk kreatif di pasar domestik dan internasional.
				Peningkatan keterampilan SDM Pariwisata

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Fasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
10.1.2	Terwujudnya berkebudayaan maju	Penguatan pelestarian budaya dan adaptasi budaya		<p>Perlindungan dan pelestarian warisan budaya serta nilai-nilai tradisional.</p> <p>Pengembangan nilai-nilai budaya dalam pendidikan</p> <p>Pelestarian budaya melalui pembangunan rumah adat Padang Lawas</p> <p>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional</p>

3.4. Program Prioritas

Program prioritas adalah program utama yang dipilih sebagai fokus utama dalam suatu periode perencanaan untuk mencapai target pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditetapkan. Program ini diprioritaskan karena memiliki dampak strategis, mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional atau daerah, serta menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Penetapan program prioritas mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, urgensi, serta potensi hasil yang akan dicapai. Fokus pada program prioritas memungkinkan pengalokasian anggaran dan sumber daya secara terarah sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan dapat lebih optimal, serta dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dapat lebih terasa.

Tabel 3.6. Program Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah

No	Program Prioritas	Kegiatan Strategis Daerah
1.	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan	Pembangunan sekolah unggulan SD dan SMP di setiap kecamatan
		Pembangunan sekolah rakyat tahun 2026
		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah SD dan SMP sesuai standar pendidikan nasional
		Pemenuhan distribusi guru dan peningkatan kualitas guru
		Penyediaan program beasiswa untuk siswa kurang mampu dan guru berprestasi
		Pemberian insentif dan fasilitas untuk guru-guru di daerah terjauh dan tertinggal
		Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah
		Pengembangan perpustakaan digital
		Pembangunan stadion sebagai wadah olah raga dan pembinaan atlet
		Peningkatan kegiatan kejar Paket B dan Paket C dalam rangka peningkatan kualitas SDM angkatan kerja produktif
		Penguatan pendidikan berbasis keagamaan dan kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan
2.	Program Peningkatan Kualitas	Pemberian insentif daerah bagi guru MDA dan Pesantren serta guru tahfidz
		Penguatan program UHC

No	Program Prioritas	Kegiatan Strategis Daerah
	Kesehatan yang Merata	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Perluasan layanan kesehatan hingga ke pelosok dengan menambah Puskesmas Rawat Inap Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pemenuhan tenaga kesehatan ke setiap Puskesmas Pemberian insentif untuk tenaga kesehatan di daerah terjauh dan tertinggal Pengembangan Posyandu setiap dusun dan peningkatan kesejahteraan Kader penggerak Posyandu Gerakan masif untuk sosialisasi masyarakat hidup sehat
3.	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan Peningkatan akses rumah layak huni melalui bedah rumah Penurunan kawasan permukiman kumuh Peningkatan akses air minum aman Peningkatan akses sanitasi aman Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung (konektivitas) antar Desa dan antar Kecamatan
4.	Program Peningkatan Ketahanan Daerah	Pemetaan desa rawan bencana Pembentukan desa tangguh bencana dan budaya sadar bencana bagi masyarakat Peningkatan <i>respon time</i> terhadap bencana
5.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pengembangan Pusat Pemerintahan Terpadu Pembangunan Mall Pelayanan Publik Pembangunan Kantor DPRD
6.	Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama	Pembangunan Islamic Center Pembangunan alun-alun kota sebagai pusat kreativitas dan sarana interaksi sosial Optimalisasi peran FKUB dan para pemuka adat dalam menjaga kerukunan umat
7.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Pembentukan <i>layanan help desk (call center)</i> untuk permasalahan rumah tangga Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan Perempuan dan anak Edukasi parenting sebelum pernikahan
8.	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Peningkatan kualitas SDM ASN untuk penyelenggara pelayanan publik Optimalisais kinerja sistem dan metode pelayanan publik (SOP yang transparan,

No	Program Prioritas	Kegiatan Strategis Daerah
		pembuatan aplikasi online)
		Optimalisasi kinerja pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (media sarana pengaduan dan survei kepuasan publik secara berkala)
		Peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik
		Peningkatan disiplin ASN dan PPPK serta pemberian penghargaan kepada ASN dan PPPK berprestasi di Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas
9.	Program Peningkatan Ekonomi Rakyat	<p>Revitalisasi Pasar Sibuhuan</p> <p>Pembangunan Pusat Kuliner dan pusat UKM di Lapangan Merdeka</p> <p>Bantuan modal kerja dan pendampingan untuk pelaku usaha UKM</p> <p>Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan</p> <p>Perlindungan sosial kepada pelaku usaha pertanian, perikanan dan UKM melalui BPJS Ketenagakerjaan</p> <p>Pemetaan dan pengembangan produk-produk unggulan Daerah</p> <p>Peningkatan kemandirian desa melalui BUMDes dan Koperasi Merah Putih</p>
10.	Program Penggalian Potensi Sumber Daya Alam	<p>Pengembangan industri pengolahan berbasis kelapa sawit dan karet untuk produk turunan</p> <p>Pengembangan tanaman hortikultura yang terintegrasi dan berkelanjutan</p> <p>Pengembangan peluang investasi pada sektor pertambangan</p>
11.	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	<p>Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Pengolahan Sampah (<i>Circular Economy</i>)</p> <p>Peningkatan layanan persampahan</p> <p>Pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber EBT</p>
12.	Program Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan	<p>Pemberian bantuan bibit unggul dan alat-alat mesin pertanian</p> <p>Pemberian bantuan benih unggul untuk budidaya perikanan</p> <p>Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI)</p> <p>Pemberian bantuan benih unggul dan pangan bermutu tinggi untuk peternakan</p> <p>Pengawasan dan penertiban penyaluran pupuk bersubsidi dan alat-alat pertanian dan</p>

No	Program Prioritas	Kegiatan Strategis Daerah
		perkebunan
		Pengembangan pusat peternakan modern
		Peningkatan kualitas irigasi dan pembangunan jalan tani untuk pertanian dan perkebunan
		Optimalisasi penyuluh pertanian, perikanan, dan peternakan
		Bantuan modal kerja untuk kelompok tani, pembudidaya ikan, dan peternakan
		Perlindungan sosial kepada petani, pembudidaya ikan, dan peternak melalui BPJS Ketenagakerjaan
		Hilirisasi hasil-hasil pertanian, perikanan, dan peternakan
13.	Program Penataan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Penertiban administrasi perizinan perkebunan
		Penyediaan bantuan bibit perkebunan
		Peningkatan kesadaran dan penataan pemberian hak perolehan atas tanah masyarakat dan lembaga perkebunan lainnya
		Penyelesaian lahan transmigrasi dan konflik agraria lainnya
14.	Program Penurunan Kemiskinan	Pemetaan keluarga miskin/rentan menurut desa/kelurahan
		Pemberian bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan keluarga miskin/rentan
		Pemberian beasiswa kepada siswa keluarga miskin
		Peningkatan jaminan sosial kepada keluarga miskin
		Pemberdayaan masyarakat miskin
15.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pendirian Balai Latihan Kerja (BLK)
		Pelatihan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai kebutuhan DUDI dan calon Wirausaha melalui BLK
		Membuat MoU dan PKS dengan perusahaan swasta untuk tenaga kerja lokal dan penyandang disabilitas
		Peningkatan kerjasama dengan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri
		Penyusunan potensi dan peluang investasi daerah (Buku Profil Investasi Daerah)
16.	Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Berbasis Budaya	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (Ripparkab) Padang Lawas
		Peningkatan daya tarik destinasi wisata melalui pengembangan situs dan cagar budaya
		Pengembangan kurikulum pendidikan untuk

No	Program Prioritas	Kegiatan Strategis Daerah
		kebudayaan lokal
		Pengembangan pariwisata berbasis agrowisata
		Pembangunan taman budaya sebagai wadah seni dan pengembangan budaya
		Pagelaran event budaya dengan kalender event
		Pembangunan Rumah Adat Daerah
17.	Program Peningkatan Kemandirian Daerah	Optimalisasi perangkat daerah untuk penerimaan daerah
		Penentuan target pendapatan berdasarkan potensi melalui kajian sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain yang sah
		Pengintegrasian data penerimaan pendapatan daerah melalui digitalisasi
		Pemanfaatan aset-aset yang belum produktif
		Pendirian dan pengembangan BUMD sebagai sumber PAD

Program Prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
1	Peningkatan kualitas mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat				
	1.1	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	
	1.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah		Literasi SD (Poin)	
				Literasi SMP (Poin)	
				Numerasi SD (Poin)	
				Numerasi SMP (Poin)	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah dalam Pendidikan Menengah (APS)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Program Pengelolaan Pendidikan
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	1.1.2	Meningkatnya literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	
			Meningkatnya layanan perpustakaan	Nilai Tingkat Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	Program Pembinaan Perpustakaan

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		1.1.3	Meningkatnya prestasi olahraga		
				Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	
				Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (%)	
	1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat		Umur Harapan Hidup (Tahun)	
		1.2.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	
				Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			makanan minuman		
2	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Jembatan secara Merata dan Berkeadilan				
	2.1	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan resilien terhadap bencana		Indeks Infrastruktur (Poin)	
	2.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin)	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Program Pengembangan Permukiman
	2.1.2	Terwujudnya daerah yang tangguh bencana		Indeks Risiko Bencana (Poin)	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
	2.1.3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%)	

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
		2.1.4	Meningkatnya kualitas jembatan	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik (%)	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
		2.1.5	Meningkatnya akses transportasi dari desa ke ibukota kabupaten	Rasio konektivitas (%)	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3	Membangun Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan				
	3.1	Tersedianya Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan		Indeks Infrastruktur (Poin)	
		3.1.1	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4	Meningkatkan kehidupan beragama yang religius dan harmonis				

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
4.1		Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib		Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	
	4.1.1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas		Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
	4.1.2	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak		Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	
				Indeks Perlindungan Anak (Poin)	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak
	4.1.3	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin)	
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	4.1.4	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang		Indeks Harmoni Indonesia (Poin)	

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		harmoni			
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa				
	5.1	Terwujudnya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	
		5.1.1	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		5.1.2	Terwujudnya layanan publik berbasis digital	Indeks SPBE (Poin)	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		5.1.3	Meningkatnya tata kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah (Poin)	

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip
5.1.4		Meningkatnya profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Program Kepegawaian Daerah
5.1.5		Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Level)	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
5.1.6		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.1.7		Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel		Opini BPK atas Laporan Keuangan (Level)	
				Persentase PAD terhadap	

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Pendapatan Daerah (%)	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Persentase Penurunan SILPA	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		5.1.8	Meningkatnya peran BUMD	RoA BUMD (%)	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
6	Membangun sentra ekonomi rakyat dengan Mengembangkan Koperasi dan UMKM				
	6.1	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
		6.1.1	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			simpan pinjam		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
				Pertumbuhan Wirausaha	
		6.1.2	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		6.1.3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa (%)	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Program Penataan Desa
			Meningkatnya efektivitas kerjasama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa
7	Mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan				
	7.1	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam		Kontribusi Sektor Penggalian dan Pertambangan (%)	
				Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan (%)	
		7.1.1	Meningkatnya nilai tambah hilirisasi produk	Nilai Tambah Sektor Penggalian dan	

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		Perkebunan dan pertambangan		Pertambangan (Rp Juta)	
				Nilai Tambah Sub-Sektor Perkebunan (Rp Juta)	
			Meningkatnya ketersediaan data geologi	Persentase peta geologi wilayah yang tersedia dan terbaru	Program Pengelolaan Aspek Geologi
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi hortikultura	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
7.2		Meningkatnya pembangunan yang ramah lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	
	7.2.1	Meningkatnya pengelolaan persampahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Poin)	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan sampah yang terkelola di fasilitas pengolahan sampah	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
	7.2.2	Menurunnya emisi gas rumah kaca		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO ₂ eq)	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	7.2.3	Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan		Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	
			Meningkatnya tata	Persentase Rumah Tangga	Program Pengelolaan Energi Baru

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			kelola energi baru terbarukan	Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	Terbarukan
8	Meningkatkan produktivitas perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan				
	8.1	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan (Rp juta)	
	8.1.1	Meningkatnya kesejahteraan petani		Laju Pertumbuhan PDRB Sub-Sektor Pertanian (%)	
				Laju Pertumbuhan PDRB Sub-Sektor Peternakan (%)	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV	
	8.1.2	Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya perikanan		Laju Pertumbuhan PDRB Sub-Sektor Perikanan (%)	
			Meningkatnya produksi	Jumlah Produksi Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			perikanan tangkap	Tangkap	Tangkap
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		8.1.3	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
9	Menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja				
	9.1	Menurunnya angka kemiskinan		Persentase Penduduk Miskin (%)	
		9.1.1	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Persentase PPKS yang tertangani (%)	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Program Rehabilitasi Sosial
			Meningkatnya jaminan sosial	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	9.2	Meningkatnya lapangan kerja, produktivitas tenaga kerja, dan kewirausahaan		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		9.2.1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp juta/kapita)
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		9.2.2	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi (%)
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Promosi Penanaman Modal
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor	Program Pelayanan Penanaman Modal
		9.2.3	Meningkatnya minat pemuda untuk berwirausaha		Rasio Kewirausahaan (%)
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (%)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
10	Mengembangkan destinasi wisata berbasis budaya dan kearifan lokal				
	10.1	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata daerah			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)
		10.1.1	Meningkatnya nilai		Pertumbuhan kunjungan

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		tambah pariwisata dan ekonomi kreatif		wisatawan (%)	
				Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%)	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	10.1.2	Terwujudnya berkebudayaan maju		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

3.5. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara ditujukan sebagai pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global. Kabupaten Padang Lawas termasuk pada Wilayah Pengembangan (WP) Selatan yang diarahkan pada fokus pengolahan hasil pertanian dan industri ringan. Kabupaten Padang Lawas memiliki volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas pertanian, mendukung industri lokal dan pariwisata. Konsep pengembangan Kabupaten Padang Lawas diarahkan untuk 1) pengembangan perkebunan sawit dan peternakan modern; 2) Revitalisasi sistem irigasi dan ketahanan pangan; dan 3) Pengembangan energi terbarukan berbasis biomassa. Wilayah Kabupaten Padang Lawas didominasi oleh Sektor Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet sehingga memiliki potensi untuk pengolahan produk olahan turunan pertama dan kedua dari kelapa sawit dan karet, seperti Oleokimia, bioplastik, sabun, kosmetik, produk lateks, rempah-rempah kemasan.

Tabel 3.8. Produksi Kelapa Sawit dan Karet (Ton)

Kecamatan	Sawit		Karet
	TBS	MS	
Aek Nabara Barumun	71.025,75	15.625,66	2.047,39
Barumun	22.801,00	5.016,22	1.275,52
Barumun Baru	20.400,89	4.488,20	-
Barumun Selatan	21.014,40	4.623,17	2.238,82
Barumun Tengah	49.429,70	10.874,53	2.081,82
Barumun Barat	20.084,66	4.418,62	-
Batang Lubu Sutam	24.914,94	5.481,62	599,40
Huristak	70.348,66	15.476,71	3.427,98
Hutaraja Tinggi	242.705,22	53.395,15	318,93
Sosa Timur	48.685,93	10.702,11	-
Lubuk Barumun	76.933,42	16.925,35	2.420,78
Sihapas Barumun	20.861,69	4.589,57	665,76
Sosa	59.116,43	13.005,61	1.128,38
Sosa Julu	30.344,33	6.675,75	-
Ulu Sosa	15.354,98	3.378,10	-
Sosopan	12.565,80	2.764,48	1.081,25
Ulu Barumun	13.576,53	2.986,84	901,97
Padang Lawas	820.124,00	180.427,35	18.188,00

Sumber: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Padang Lawas

Pada tahun 2024, Kabupaten Padang Lawas memproduksi Tandan Buah Segar Sawit (TBS) sebesar 820.124,00 ton, Minyak sawit (MS) sebesar 180.427,35 ton karet sebesar 18.188 ton. Data ini menunjukkan bahwa melimpahnya produksi hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada Tahap I (2025-2029) akan melakukan hilirisasi produk-produk turunan kelapa sawit dan karet dengan pembangunan industri melalui peningkatan investasi Sektor Industri dan peningkatan keterampilan SDM untuk mengolah produk turunannya.

Kabupaten Padang Lawas juga memiliki potensi pada Sektor Pariwisata. Potensi wisata prioritas pada Kabupaten Padang Lawas, meliputi Wisata Alam, Sejarah, dan Budaya. Pengembangan paket wisata untuk Kabupaten Padang Lawas diarahkan pada Ekowisata dan Wisata Alam dan merupakan prioritas ketiga dalam paket pengembangan wisata di Sumatera Utara. Pada periode pembangunan jangka menengah 2025-2029 ini, maka Kabupaten Padang Lawas akan meningkatkan fasilitas ekowisata, akomodasi, dan akses jalan. Kabupaten Padang Lawas memiliki 20 destinasi wisata yang tersebar di beberapa kecamatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Destinasi Wisata Kabupaten Padang Lawas

No	Nama Desa	Kecamatan	Tempat Wisata	Jenis Wisata
1	Sayur Matua	Aek Nabara Barumun	Pertanian Berbasis Teknologi (Dewi Tani)	Wisata Agro
2	Aliaga	Hutaraja Tinggi	Danau Buatan	Wisata Buatan
3	Tamiang	Batang Lubu Sutam	Air Terjun Sampuran	Wisata Alam, Wisata Tirta.
4	Siparau	Barumun Tengah	Candi Sipamutung	Wisata Sejarah, Wisata Spiritual, Wisata Budaya.
5	Paringgonan	Ulu Barumun	Aek Milas	Wisata Alam
6	Siraisan	Ulu Barumun	Aek Siraisan	Wisata Alam
7	Botung	Batang Lubu Sutam	Air Terjun Sipatabung	Wisata Alam, Wisata Tirta
8	Sihiuk	Lubuk Barumun	Air Terjun Sihiuk	Wisata Alam, Wisata Tirta
9	Hapung	Ulu Sosa	Aek Hapung	Wisata Alam
10	Parapat	Ulu Sosa	Goa Liang Namuap	Wisata Alam

No	Nama Desa	Kecamatan	Tempat Wisata	Jenis Wisata
11	Ujung Batu	Sosa	Danau Gayambang	Wisata Alam
12	Siborna	Sosa Julu	Aek Lakkut	Wisata Alam
13	Sangkilon	Lubuk Barumun	Candi Sangkilon	Wisata Sejarah, Wisata Spiritual, Wisata Budaya
14	Sayur Mahincat	Barumun Selatan	Tor Sinaongan	Wisata Alam
15	Binabo Jae	Barumun Baru	Makam Ompung Parmata Sapihak	Wisata Sejarah
16	Hasahatan	Barumun Baru	Bagas Godang	Wisata Sejarah, Wisata Budaya.
17	Hutabaru Siundol	Sosopan	Sungai Oruon	Wisata Alam, Wisata Tirta
18	Padang Garugur	Barumun Tengah	Candi si Djoreng Belangah, Danau si Djoreng Belangah, Lubang Jepang dan Hulu Balang	Wisata Alam, Wisata Tirta, Wisata Sejarah
19	Binanga Tolu	Sosopan	Air Mancur dan Budidaya Ikan Air Tawar	Wisata Alam, Wisata Tirta
20	Ujung Batu III	Hutaraja Tinggi	Agro dan Kebudayaan	Wisata Agro

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas

Pada tahap pertama pembangunan (2025-2029) Kabupaten Padang Lawas akan meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan untuk menuju destinasi wisata sehingga wisatawan dapat berkunjung ke destinasi wisata dengan lancar. Ketersediaan akomodasi dan makan minum di daerah destinasi wisata perlu ditingkatkan sehingga wisatawan menunjang aktivitas pariwisata di Kabupaten Padang Lawas.



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah rangkaian kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah (dinas, badan, atau unit organisasi pemerintah daerah) untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Program ini menjadi dasar dalam merancang anggaran, pengelolaan sumber daya, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Capaian dan target indikator program dan pagu anggaran untuk masing-masing urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan															
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,62	99,70		99,73		99,75		99,77		99,80		99,82	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Pake t B	%	85,53	88,30		88,35		88,40		88,45		88,48		88,50	
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangk an Kurikulum Muatan Lokal	%	40,00	50,00	0	60,00	40.000.000.000	70,00	41.200.000.000	80,00	42.436.000.000	90,00	43.709.080.000	100,00	45.020.352.400
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks pemerataan guru	Poin	30,00	40,00		45,00		50,00		55,00		60,00		65,00	
		Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidikan	%	80,00	85,00	0	90,00	30.000.000.000	95,00	30.900.000.000	100,00	31.827.000.000	100,00	32.781.810.000	100,00	33.765.264.300
	Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Di perbarui	%	80,00	90,00	0	90,00	0	90,00	188.400.000	100,00	194.052.000	100,00	199.873.560	100,00	205.869.767
	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase pengembang an bahasa dan sastra	%	70,00	75,00	0	80,00	150.000.000	85,00	198.500.000	90,00	204.455.000	95,00	210.588.650	100,00	216.906.310
	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap	%	N/A	50,00	400.000.000	52,50	448.397.460	55,13	522.020.000	57,88	834.100.000	60,78	910.000.000	63,81	973.510.000

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif													
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		Pengembangan Kebudayaan																
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	N/A	70,00		73,50		77,18		81,03		85,09		89,34			
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	N/A	75,00	25.000.000		30.000.000		102.100.000		180.200.000		880.000.000		220.000.000		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	257.895.186.827	B	272.625.507.363	B	275.594.243.124	B	276.068.399.649	B	278.391.194.035	BB	286.742.929.856		
2	Dinas Kesehatan																	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	%	50,00	55,00	5.000.000.000	60,00	5.150.000.000	65,00	5.304.500.000	70,00	5.463.635.000	75,00	5.627.544.050	80,00	5.796.370.372		
	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	%	80,00	85,00	0	87,00	0	90,00	10.000.000.000	93,00	10.300.000.000	95,00	10.609.000.000	100,00	10.927.270.000		
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	40,00	50,00	1.000.000.000	55,00	1.030.000.000	60,00	1.060.900.000	65,00	1.092.727.000	70,00	1.125.508.810	75,00	1.159.274.074		
	Program akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	70,00	80,00	2.000.000.000	80,00	2.060.000.000	85,00	2.121.800.000	85,00	2.185.454.000	90,00	2.251.017.620	90,00	2.318.548.149		

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	200.000.000.000	B	206.000.000.000	B	212.180.000.000	B	218.545.400.000	B	225.101.762.000	BB	231.854.814.860
3	RSUD Sibuhuan															
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	Per 100.000 KH	156,53	122,00		109,00		97,00		86,00		77,00		75,00	
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	N/A	14,50	33.000.000.000	13,93	33.336.547.579	13,38	35.003.374.958	12,86	36.753.543.706	12,35	38.591.220.891	11,86	40.520.781.936
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	39.665.029.899	B	40.891.783.401	B	42.878.872.571	B	45.022.816.200	B	47.273.957.010	BB	49.637.654.860
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	N/A	50,00	5.035.757.050	55,00	6.407.045.050	60,00	5.817.417.050	65,00	5.667.417.050	70,00	5.367.417.050	75,00	5.000.000.000
		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	N/A	40,00		45,00		50,00		55,00		60,00		65,00	
	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	%	N/A	0,00	7.000.000.000	10,00	0	20,00	0	30,00	0	40,00	0	50,00	0
	Program pengelolaan dan pengembangan	Persentase Cakupan Drainase	%	43,00	45,00	200.000.000	48,00	400.000.000	51,00	1.200.000.000	56,00	1.300.000.000	60,00	650.000.000	65,00	600.000.000

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	sistem drainase	dalam Kondisi Baik															
	Program pengembangan permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	%	N/A	53,00	1.150.000.000	54,59	1.184.500.000	56,23	1.220.035.000	57,91	1.256.636.050	59,65	1.294.335.132	61,44	1.333.165.185	
	Program penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	N/A	40,00	13.881.416.850	45,00	14.300.000.000	47,00	15.600.000.000	50,00	15.850.000.000	55,00	13.100.000.000	65,00	12.000.000.000	
	Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	%	41,14	45,00	14.156.982.850	47,00	13.942.548.850	50,00	11.342.548.850	53,00	11.742.548.850	55,00	16.042.548.850	57,00	18.000.000.000	
	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	%	80,00	90,00	1.354.600.000	90,00	1.354.600.000	90,00	1.154.600.000	100,00	1.500.000.000	100,00	1.600.000.000	100,00	1.700.000.000	
	Program pengelolaan aspek geologi	Persentase peta geologi wilayah yang tersedia dan terbaru	%	N/A	N/A	0	50,00	5.850.000.000	60,00	6.025.500.000	70,00	6.206.265.000	80,00	6.392.452.950	90,00	6.584.226.539	
	Program pengelolaan energi baru terbarukan	Persentase Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	%	N/A	N/A	0	10,00	11.700.000.000	13,00	12.051.000.000	16,90	12.412.530.000	21,97	12.784.905.900	28,56	13.168.453.077	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	8.866.745.474	B	12.064.540.838	B	12.223.362.322	B	12.343.362.322	B	9.875.362.322	BB	10.171.623.191	
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan																

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	N/A	75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		
	Program pengembangan perumahan	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	N/A	70,00	40.000.000	75,00	120.000.000	80,00	0	85,00	0	9,00	0	95,00	0	0
	Program kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	N/A	50,00	0	53,00	250.000.000	57,00	0	63,00	0	65,00	0	67,00	0	0
	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Ditingkahi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	N/A	40,00	150.000.000	44,00	154.500.000	48,00	159.135.000	52,00	163.909.050	55,00	168.826.322	60,00	173.891.111	
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	%	67,00	72,00	1.500.000.000	75,00	1.545.000.000	76,00	1.591.350.000	77,00	1.639.090.500	78,00	1.688.263.215	80,00	1.738.911.111	
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah	%	N/A	60,00	1.615.546.684	62,00	1.750.000.000	64,00	1.900.000.000	66,00	1.950.000.000	70,00	2.100.000.000	72,00	2.300.000.000	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	73,63	75,00	1.700.000.000	77,25	1.751.000.000	79,57	1.803.530.000	81,95	1.857.635.900	84,41	1.913.364.977	86,95	1.970.765.926
		Rasio Konektivitas	%	N/A	20,00		20,00		21,00		21,00		22,00		22,00	
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	N/A	64,00	890.001.320	65,00	890.001.320	65,00	890.001.320	70,00	890.001.320	70,00	890.001.320	75,00	890.001.320
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	2.763.171.147	B	3.006.345.147	B	3.096.535.501	B	3.189.431.566	B	3.285.114.513	BB	3.383.667.949
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran															
		Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	N/A	50,00		51,50		53,00		54,50		56,00		57,50	
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	N/A	60,00	200.000.000	62,00	206.000.000	64,00	212.180.000	66,00	218.545.400	68,00	225.101.762	70,00	231.854.815
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	N/A	40,00		45,00		50,00		55,00		60,00		65,00	
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan	%	N/A	70,00	120.000.000	74,00	123.600.000	78,00	127.308.000	82,00	131.127.240	86,00	135.061.057	90,00	139.112.889

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	penyelamatan non kebakaran	Kebakaran															
		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	N/A	50,00		57,00		64,00		71,00		78,00		85,00		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	3.250.000.000	B	3.347.500.000	B	3.447.925.000	B	3.551.362.750	B	3.657.903.633	BB	3.767.640.741	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																
		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	N/A	55,00		60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		
	Program penanggulangan bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	N/A	50,00	350.000.000		350.000.000		360.000.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000	
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	N/A	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	5.379.489.112	B	5.541.375.904	B	5.707.839.112	B	5.823.716.924	B	6.037.216.924	BB	19.355.408.356	
8	Dinas Sosial																
	Program pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan	%	N/A	80,00	1.811.906.500	90,00		95,00		100,00	1.902.501.825	100,00	1.997.626.916	100,00	2.097.508.261	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial															
		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	%	N/A	80,00		82,00			84,00		86,00		88,00		90,00	
		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	%	N/A	45,00		50,00			55,00		60,00		65,00		70,00	
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam	%	N/A	60,00		64,00			68,00		72,00		76,00		80,00	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Pelayanan Sosial															
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	N/A	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	N/A	50,00		54,00		58,00		62,00		66,00		70,00		
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	N/A	55,00		58,50		62,00		65,50		69,00		72,50		
	Program rehabilitasi sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	N/A	60,00	590.627.800	62,70	3.273.686.926	65,40	3.630.000.000	68,10	3.811.500.000	70,80	4.002.075.000	73,50	4.202.178.750	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	N/A	66,00		68,50		71,00		73,50		76,00		78,50		
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan	%	N/A	50,00		54,00		58,00		62,00		66,00		70,00		

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif													
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya																
		Indeks Kesejahteraan Sosial Penyangang Disabilitas	Poin	N/A	65,00		68,00		71,00		74,00		77,00		80,00			
		Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Poin	N/A	54,00		57,50		61,00		64,50		68,00		71,50			
		Indeks Peranan Sosial	Poin	N/A	55,00		57,00		59,00		61,00		63,00		65,00			
		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	N/A	57,00		59,85		62,84		65,98		69,28		72,75			
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	%	N/A	43,00		45,15		47,41		49,78		52,27		54,88			
	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	N/A	44,00		46,20	0	48,51	0	50,94	918.897.500	53,48	53,48	56,16	964.842.375	1.013.084.493	1.063.738.717
		Indeks Kebutuhan Dasar	Poin	N/A	30,00		31,50		33,08		34,73		36,47		38,29			
		Indeks Keberdayaan Ekonomi	Poin	N/A	35,00		36,75		38,59		40,52		42,54		44,67			

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	N/A	50,00		52,50		55,13		57,88		60,78		63,81	
		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	N/A	80,00		81,60		83,23		84,90		86,59		88,33	
	Program penanganan bencana					100.000.000		0		200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000
		Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	%	N/A	70,00		71,40		72,83		74,28		75,77		77,29	
		Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	N/A	75,00		76,50		78,03		79,59		81,18		82,81	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	4.000.000.000	B	4.120.000.000	B	4.243.600.000	B	4.370.908.000	B	4.502.035.240	BB	4.637.096.297

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
9	Dinas Ketenagakerjaan															
	Program perencanaan tenaga kerja	Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Dokumen	N/A	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	0	0	0	0
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	%	N/A	50,00	100.203.200	51,50	7.186.492.000	53,05	2.949.825.333	54,64	3.066.417.333	56,28	3.066.417.333	57,96	3.066.815.333
	Program penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	59,00	77,00	0	80,00	150.000.000	100,00	225.000.000	100,00	225.000.000	100,00	225.000.000	100,00	225.000.000
	Program hubungan industrial	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Orang	N/A	20,00	17.383.500	25,00	242.713.500	30,00	242.713.500	35,00	242.713.500	40,00	242.713.500	45,00	242.713.500
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	2.283.889.198	B	10.370.804.511	B	6.331.137.844	B	6.658.729.844	B	6.674.729.844	BB	6.716.127.844
10	Dinas Lingkungan Hidup															
	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	N/A	80,00	0	85,00	0	90,00	0	95,00	0	97,00	0	100,00	300.000.000
	Program pengendalian pencemaran	Indeks Kualitas Air	Poin	50,00	55,00	3.811.375.200	56,00	201.459.600	58,00	222.381.960	58,00	222.474.196	59,00	222.483.420	61,00	162.484.342
		Indeks	Poin	91,02	91,30		91,44		91,58		91,72		91,86		92,00	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kualitas Udara															
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	54,12	55,00		56,00		57,00		58,00		60,00		61,00		
	Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH	%	N/A	45,00	1.000.000.000	46,35	1.045.000.000	47,74	1.092.025.000	49,17	1.141.166.125	50,65	1.192.518.601	52,17	1.246.181.938	
	Program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	N/A													
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	%	N/A	70,00	0	80,00	96.000.000	85,00	106.000.000	90,00	118.000.000	95,00	0	100,00	175.000.000	
	Program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	N/A													
	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	N/A	70,00	602.820.500	75,00	225.000.000	80,00	225.000.000	85,00	230.000.000	90,00	235.000.000	95,00	235.000.000	
	Program	Persentase	%	N/A	70,00	0	73,50	70.000.000	77,18	70.000.000	81,03	75.000.000	85,09	75.000.000	89,34	80.000.000	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup															
	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	N/A	100,00	0	100,00	0	100,00	54.000.000	100,00	54.000.000	100,00	54.000.000	100,00	55.000.000	
	Program pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	N/A	50,00	15.600.000	70,00	2.704.000.000	75,00	2.650.000.000	80,00	2.605.000.000	85,00	2.355.000.000	90,00	2.000.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	2.251.574.938	B	2.730.001.241	B	2.683.637.626	B	2.791.268.705	B	2.765.051.440	BB	2.508.070.579	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
	Program pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	N/A	70,00		72,10		74,26		76,49		78,79		81,15		
						23.550.000		25.198.500		26.962.395		28.849.763		30.869.246		33.030.093	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	N/A	74,00		76,22		78,51		80,86		83,29		85,79		
	Program pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	N/A	55,00		56,93		58,92		60,98		63,11		65,32		
						69.500.000		74.365.000		79.570.550		85.140.489		91.100.323		97.477.345	
		Persentase Akta Kelahiran yang	%	N/A	60,00		62,10		64,27		66,52		68,85		71,26		

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Diterbitkan bagi yang Melaporkan															
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	N/A	54,00		55,89		57,85		59,87		61,97		64,14		
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	N/A	57,00		59,00		61,06		63,20		65,41		67,70		
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	N/A	40,00	234.909.200	41,40	251.352.844	42,85	268.947.543	44,35	287.773.871	45,90	307.918.042	47,51	329.472.305	
	Program pengelolaan profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	N/A	75,00	0	80,00	0	85,00	300.000.000	90,00	0	95,00	0	100,00	300.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	3.623.429.756	B	4.935.585.960	B	7.502.926.977	B	5.023.821.866	B	5.375.139.396	BB	5.955.109.056	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
	Program penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	N/A	20,00	200.000.000	20,60	206.000.000	21,22	212.180.000	21,85	218.545.400	22,51	225.101.762	23,19	231.854.815	
	Program peningkatan kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	N/A	9,00	100.000.000	10,00	100.000.000	15,00	200.000.000	15,00	200.000.000	20,00	290.000.000	25,00	300.000.000	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	N/A	60,00		62,70		65,52		68,47		71,55		74,77		
						100.000.000		110.000.000		150.000.000		175.000.000		2.000.000.000		735.001.000	
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	N/A	55,00		57,48		60,06		62,76		65,59		68,54		
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	N/A	50,00		52,25		54,60		57,06		59,63		62,31		
						1.413.364.300		1.500.000.000		1.750.000.000		2.000.000.000		2.250.000.000		8.913.364.300	
		Persentase Fasilitasi Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	N/A	45,00		47,03		49,14		51,35		53,66		56,08		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	1.558.412.563	B	2.350.855.613	B	2.305.855.613	B	2.310.855.613	B	2.310.855.613	BB	2.380.181.281	
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
	Program pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	Anak Per Wanita	3,02	3,00		2,95		2,90		2,85		2,80		2,75		
						303.111.000		303.111.000		303.111.000		303.111.000		303.111.000		303.111.000	
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Anak Per 1.000 Wanita	28,50	28,00		27,00		26,00		25,00		24,00		23,00		
	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	%	41,10	43,00	6.442.209.000	45,00	6.442.209.000	47,00	6.442.209.000	50,00	6.442.209.000	52,00	6.442.209.000	55,00	6.442.209.000	
		Persentase	%	21,30	21,00		20,00		18,00		17,00		16,00		15,00		

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)															
	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	N/A	64,00	2.383.600.000	65,00	2.383.600.000	65,00	2.383.600.000	70,00	2.383.600.000	70,00	2.383.600.000	75,00	2.383.600.000	
	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	N/A	0,70		0,90		1,00		1,30		1,50		1,60		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	65,86	67,00	140.000.000	67,50	140.000.000	68,00	140.000.000	68,50	140.000.000	69,00	140.000.000	70,00	140.000.000	
	Program perlindungan perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	N/A	75,00	0	77,00	0	80,00	300.000.000	83,00	300.000.000	85,00	300.000.000	90,00	300.000.000	
	Program peningkatan kualitas keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	N/A	40,00	0	45,00	0	50,00	0	55,00	0	60,00	150.000.000	65,00	150.000.000	
	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam	%	N/A	50,00	100.000.000	55,00	103.000.000	60,00	106.090.000	65,00	109.272.700	70,00	112.550.881	75,00	115.927.407	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Perencanaan, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan															
	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Poin	N/A	66,62	150.000.000	69,11	154.500.000	71,68	159.135.000	74,35	163.909.050	77,13	168.826.322	80,00	173.891.111	
	Program perlindungan khusus anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	100,00	246.181.700	100,00	246.181.700	100,00	246.181.700	100,00	246.181.700	100,00	246.181.700	100,00	246.181.700	
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Poin	71,33	73,50		74,00		74,50		75,00		76,00		76,50		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	6.046.965.753	B	6.233.985.312	B	6.233.985.312	B	6.233.985.312	B	6.233.985.312	BB	6.233.985.312	
14	Dinas Komunikasi dan Informatika																
	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	%	N/A	60,00	100.000.000	63,00	103.000.000	66,15	106.090.000	69,46	109.272.700	72,93	112.550.881	76,58	115.927.407	
	Program pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Poin	2,17	2,42	200.000.000	2,48	206.000.000	2,54	212.180.000	2,61	218.545.400	2,68	225.101.762	2,74	231.854.815	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	N/A	2,00	400.000.000	2,30	420.000.000	2,64	441.000.000	3,03	463.050.000	3,48	486.202.500	4,00	510.512.625
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	N/A	20,00	350.000.000	24,02	360.500.000	28,85	371.315.000	34,66	382.454.450	41,63	393.928.084	50,00	405.745.926
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	1.000.000.000	B	1.030.000.000	B	1.060.900.000	B	1.092.727.000	B	1.125.508.810	BB	1.159.274.074
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan															
	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	N/A	70,00	45.000.000	72,45	49.998.900	74,99	140.000.000	77,61	187.500.000	80,33	181.000.000	83,14	282.500.000
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	N/A	65,00	20.000.000	67,28	25.000.000	69,63	60.000.000	72,07	80.000.000	74,59	100.000.000	77,20	120.000.000
	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	N/A	20,00	270.000.000	25,00	290.000.000	30,00	300.000.000	35,00	330.000.000	40,00	350.000.000	45,00	380.000.000
	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	N/A	10,00	30.000.000	10,50	30.000.000	11,03	30.000.000	11,58	35.000.000	12,16	40.000.000	12,76	50.000.000
		Pertumbuhan Wirausaha	%	N/A	15,00		18,00		20,00		22,00		25,00		30,00	
	Program pengembangan	Proporsi UKM Menajalin	%	N/A	0,50	0	0,70	0	2,00	150.000.000	2,50	200.000.000	3,00	250.000.000	3,50	300.000.000

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	UMKM	Kemitraan dan Ekspor															
	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	N/A	81,00	2.500.000.000	83,43	2.625.000.000	85,93	2.756.250.000	88,51	2.894.062.500	91,17	3.038.765.625	93,90	3.190.703.906	
	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	N/A	35,00	20.000.000	36,05	25.000.000	37,13	25.000.000	38,25	30.000.000	39,39	35.000.000	40,57	40.000.000	
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	N/A	20,00	350.000.000	21,00	366.864.750	22,05	1.700.000.000	23,15	12.770.000.000	24,31	2.350.000.000	25,53	2.900.000.000	
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	66,67	66,67	100.000.000	77,78	149.995.800	77,78	293.000.000	77,78	357.000.000	88,89	427.000.000	88,89	499.000.000	
	Program pengembangan ekspor	Nilai Ekspor Barang	Rp miliar	N/A	1,30	250.000.000	1,35	299.885.000	1,39	300.000.000	1,44	350.000.000	1,49	400.000.000	1,54	450.000.000	
	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	N/A	100,00	0	100,00	0	100,00	70.000.000	100,00	100.000.000	100,00	150.000.000	100,00	200.000.000	
	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	%	50,00	55,00	75.000.000	65,00	119.783.000	70,00	180.000.000	75,00	240.000.000	80,00	300.000.000	85,00	360.000.000	
	Program Penunjang	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	2.159.014.404	B	2.716.297.479	B	3.052.051.770	B	3.410.282.716	B	3.787.890.105	BB	3.901.526.808	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota																
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																
	Program pengembangan iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	N/A	75,00	650.000.000	77,25	701.085.000	79,57	736.139.250	81,95	772.946.213	84,41	811.593.523	86,95	835.941.329	
	Program promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor	%	N/A	4,00	43.030.900	4,28	321.300.000	4,58	337.365.000	4,90	354.233.250	5,24	371.944.913	5,61	383.103.260	
	Program pelayanan penanaman modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	N/A	50,00	1.500.000.000	53,50	1.693.700.000	57,25	1.777.385.000	61,25	1.697.605.875	65,54	1.695.750.000	70,13	1.746.622.500	
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha	%	N/A	80,00	500.000.000	81,60	552.300.000	83,23	570.097.500	84,90	598.602.375	86,59	628.532.494	88,33	647.388.469	
	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	N/A	85,00	80.000.000	88,00	84.000.000	90,00	88.200.000	95,00	92.610.000	97,00	97.240.500	100,00	100.157.715	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	2.120.718.768	B	5.461.115.829	B	5.734.171.620	B	6.020.880.201	B	6.321.924.211	BB	6.511.581.937	
17	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata																
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	%	70,00	75,00	1.410.000.000	75,00	2.015.000.000	75,00	2.015.000.000	75,00	2.015.000.000	75,00	2.015.000.000	75,00	2.015.000.000	
	Program	Persentase	%	N/A	40,00	2.269.000.000	45,00	1.935.000.000	45,00	1.950.000.000	50,00	1.950.000.000	50,00	1.950.000.000	55,00	2.000.000.000	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Atlet yang Masuk Pelatnas															
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	50,00	11,11	1.300.000.000	2,00	1.535.000.000	1,96	1.600.000.000	1,92	1.310.000.000	1,89	1.310.000.000	1,85	1.635.000.000	
	Program pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	N/A	80,00	955.000.000	82,40	955.000.000	84,87	955.000.000	87,42	955.000.000	90,04	955.000.000	92,74	955.000.000	
	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual	%	N/A	5,00	150.000.000	5,35	160.500.000	5,72	171.735.000	6,13	183.756.450	6,55	196.619.402	7,01	210.382.760	
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	N/A	20,00	100.000.000	21,00	107.000.000	22,05	114.490.000	23,15	122.504.300	24,31	131.079.601	25,53	140.255.173	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	2.331.000.000	B	1.923.824.008	B	1.934.000.000	B	1.923.824.008	B	1.928.824.008	BB	1.923.824.008	
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																
	Program pembinaan perpustakaan	Nilai Tingkat Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	Poin	N/A	80,00	200.000.000	83,20	208.000.000	86,53	216.320.000	89,99	224.972.800	93,59	233.971.712	97,33	243.330.580	
	Program pelestarian koleksi nasional	Persentase Koleksi Nasional dan	%														

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Naskah Kuno yang Dimiliki															
	Program pengelolaan arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	N/A	67,00	100.000.000	69,01	103.500.000	71,08	107.122.500	73,21	110.871.788	75,41	114.752.300	77,67	118.768.631	
	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	N/A	55,00	150.000.000	56,65	155.250.000	58,35	160.683.750	60,10	166.307.681	61,90	172.128.450	63,76	178.152.946	
	Program perizinan penggunaan arsip	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	N/A	20,00	70.000.000	20,60	72.450.000	21,22	74.985.750	21,85	77.610.251	22,51	80.326.610	23,19	83.138.041	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	600.000.000	B	618.000.000	B	636.540.000	B	655.636.200	B	675.305.286	BB	695.564.445	
19	Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan																
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	N/A	0,90		0,99		1,00		1,00		1,00		1,01		
						1.020.000.000		1.020.000.000		1.020.000.000		1.020.000.000		1.020.000.000		1.020.000.000	
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	N/A	0,58		0,60		0,60		0,70		0,70		0,80		
	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	%	N/A	70,00	148.000.000	73,50	158.000.000	77,18	168.000.000	81,03	178.000.000	85,09	188.000.000	89,34	198.000.000	
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan	%	N/A	50,00	285.000.000	52,50	285.000.000	55,13	285.000.000	57,88	285.000.000	60,78	285.000.000	63,81	285.000.000	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	masyarakat veteriner	Menular Strategis (PHMS)															
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV	%	N/A	43,00		45,15		47,41		49,78		52,27		54,88		
	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	N/A	65,00		68,25		71,66		75,25		79,01		82,96		
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	N/A	55,00	15.000.000	57,75	15.000.000	60,64	15.000.000	63,67	20.000.000	66,85	20.000.000	70,20	20.000.000	
	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	146,79	150,20	80.400.000	150,40	181.440.000	150,60	211.680.000	150,80	241.920.000	151,00	272.160.000	151,20	272.160.000	
	Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3.996,09	3.945,80	320.400.000	3.949,60	363.920.000	3.953,40	432.072.000	3.957,20	497.762.400	3.961,00	576.558.880	3.964,80	576.558.880	
	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Terlaksananya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	%	25,00	25,00	178.290.000	25,00	50.000.000	25,00	50.000.000	25,00	50.000.000	25,00	50.000.000	25,00	50.000.000	
	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita	29,58	29,80	138.290.000	29,90	15.522.000	30,00	104.650.000	30,10	189.080.000	30,20	206.010.000	30,30	206.010.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	3.523.000.000	B	3.523.000.000	B	3.523.000.000	B	3.523.000.000	B	3.523.000.000	BB	3.523.000.000	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kabupaten/Kota																
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan															
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	N/A	2,00	679.010.000	2,30	679.010.000	2,65	779.010.000	3,04	879.010.000	3,50	979.010.000	4,02	1.079.010.000
	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	%	N/A	70,00	48.567.500	73,50	48.567.500	77,18	58.567.500	81,03	68.567.500	85,09	78.567.500	89,34	88.567.500
	Program penyuluhan pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	N/A	40,00	269.415.000	42,00	269.415.000	44,10	379.415.000	46,31	489.415.000	48,62	599.415.000	51,05	709.415.000
	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	60,00	62,95	1.530.000.000	66,04	1.985.000.000	69,28	2.290.000.000	72,68	2.595.000.000	76,25	2.900.000.000	80,00	3.205.000.000
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	88,60	89,00	2.670.000.000	89,20	3.405.000.000	89,40	4.130.000.000	89,60	4.855.000.000	89,80	5.580.000.000	90,00	6.305.000.000
	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	N/A	30,00	430.000.000	27,00	475.000.000	24,30	520.000.000	21,87	565.000.000	19,68	610.000.000	17,71	655.000.000
	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	N/A	70,00	1.450.000.000	73,50	1.900.000.000	77,18	2.350.000.000	81,03	2.800.000.000	85,09	3.250.000.000	89,34	3.700.000.000
	Program Penunjang	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	4.000.000.000	B	4.000.000.000	B	4.000.000.000	B	4.000.000.000	B	4.000.000.000	BB	4.000.000.000

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota																
21	Sekretariat Daerah																
		Efektivitas Kerjasama Daerah	%	N/A	78,00		80,34		82,75		85,23		87,79		90,42		
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Poin	N/A	80,00	7.444.499.660	85,00	7.819.095.545	87,00	7.547.321.025	90,00	7.691.812.190	94,00	7.973.343.890	100,00	8.212.544.207	
		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	N/A	75,00		77,25		79,57		81,95		84,41		86,95		
	Program perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	N/A	76,50	1.445.801.000	78,80	2.064.795.875	81,16	2.103.323.375	83,59	2.144.923.375	86,10	2.173.923.375	88,68	2.239.141.076	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	23.139.368.198	B	19.864.656.052	B	21.906.682.802	B	20.597.683.102	B	21.981.986.402	BB	22.641.445.994	
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah																
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	N/A	90,00	5.000.000.000	100,00	5.150.000.000	100,00	5.304.500.000	100,00	5.463.635.000	100,00	5.627.544.050	100,00	5.796.370.372	
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	N/A	90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada	%	N/A	90,00	1.150.000.000	100,00	1.184.500.000	100,00	1.220.035.000	100,00	1.256.636.050	100,00	1.294.335.132	100,00	1.333.165.185	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	pembangunan daerah	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia															
		Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	N/A	90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
		Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	N/A	90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
		Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	%	N/A	90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%	N/A	90,00	1.000.000.000		1.030.000.000		1.060.900.000		1.092.727.000		1.125.508.810		1.159.274.074	
		Persentase	%	N/A	90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah															
		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Daerah	%	N/A	90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	N/A	90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Program riset dan inovasi daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	%	N/A	90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
						1.000.000.000		1.030.000.000		1.060.900.000		1.092.727.000		1.125.508.810		1.159.274.074	
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	N/A	90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
		Persentase Fasilitasi,	%	N/A	90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah															
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	20.000.000.000	B	20.600.000.000	B	21.218.000.000	B	21.854.540.000	B	22.510.176.200	BB	23.185.481.486	
23	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah																
		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	N/A	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	N/A	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00
	Program pengelolaan keuangan daerah				250.000.000.000		295.595.013.201		307.418.813.729		307.418.813.729		316.286.664.125		307.418.813.729		307.418.813.729
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	N/A	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00
		Persentase Penurunan SILPA	%	N/A	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Program	Persentase	%	N/A	100,00	850.000.000	100,00	863.035.900	100,00	897.557.336	100,00	897.557.336	100,00	923.448.413	100,00	897.557.336	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	pengelolaan barang milik daerah	Penambahan Nilai Aset Tetap															
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	3,88	4,52		4,80		4,90			5,01		5,11		5,22	
	Program pengelolaan pendapatan daerah	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	%	N/A	72,00	1.300.000.000	74,16	1.475.434.500	76,38	1.534.451.880	78,68	1.534.451.880	81,04	1.578.714.915	83,47	1.534.451.880	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	N/A	76,00		78,28		80,63		83,05		85,54		88,10		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	38.426.156.210	B	39.614.594.031	B	41.199.177.792	B	41.199.177.792	B	42.387.615.613	BB	41.199.177.792	
24	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia																
		Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Program kepegawaian daerah	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	N/A	70,00	3.200.000.000	72,45	3.296.000.000	74,99	3.394.880.000	77,61	3.496.726.400	80,33	3.601.628.192	83,14	3.709.677.038	
		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	N/A	74,00		76,59		79,27		82,05		84,92		87,89		

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		a															
		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	N/A	75,00		77,63		80,34		83,15		86,06		89,08		
		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	N/A	80,00		83,20		86,53		89,99		93,59		97,33		
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%	N/A	77,00	3.700.000.000	80,85	3.811.000.000	84,89	3.925.330.000	89,14	4.043.089.900	93,59	4.164.382.597	98,27	4.289.314.075	
		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	N/A	65,00		68,25		71,66		75,25		79,01		82,96		
		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	N/A	70,00		73,50		77,18		81,03		85,09		89,34		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	30.000.000.000	B	30.900.000.000	B	31.827.000.000	B	32.781.810.000	B	33.765.264.300	BB	34.778.222.229	
25	Inspektorat																
	Program penyelenggaraan pengawasan	Tindakan lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	85,00	85,00	233.627.800	85,00	250.000.000	85,00	250.000.000	85,00	250.000.000	85,00	250.000.000	85,00	250.000.000	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	220.000.000
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	220.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	15.000.000.000	B	15.450.000.000	B	15.913.500.000	B	16.390.905.000	B	16.882.632.150	BB	17.389.111.115	
26	Sekretariat DPRD																
	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahunan	%	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
		Persentase Penetapan Ranperda Tahunan	%	N/A	100,00	8.300.000.000	100,00	8.549.000.000	100,00	8.805.470.000	100,00	9.069.634.100	100,00	9.341.723.123	100,00	9.621.974.817	
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
27	Kecamatan Barumun																
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	%	N/A	100,00	1.058.128.974	100,00	1.089.872.844	100,00	1.122.569.029	100,00	1.156.246.100	100,00	1.190.933.483	100,00	1.226.661.487	
	Program	Persentase	%	N/A	100,00	714.237.058	100,00	735.664.169	100,00	757.734.095	100,00	780.466.117	100,00	803.880.101	100,00	827.996.504	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan															
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	343.891.917	100,00	354.208.674	100,00	364.834.934	100,00	375.779.982	100,00	387.053.382	100,00	398.664.983	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase laporan dan dokumen pemerintahan umum yang disusun tepat waktu	%	N/A	100,00	317.438.692	100,00	326.961.853	100,00	336.770.709	100,00	346.873.830	100,00	357.280.045	100,00	367.998.446	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan sesuai jadwal	%	N/A	100,00	211.625.795	100,00	217.974.569	100,00	224.513.806	100,00	231.249.220	100,00	238.186.697	100,00	245.332.297	
28	Kecamatan Lubuk Barumun																
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	%	N/A	100,00	822.015.094	100,00	846.675.547	100,00	872.075.813	100,00	898.238.088	100,00	925.185.230	100,00	952.940.787	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	554.860.188	100,00	571.505.994	100,00	588.651.174	100,00	606.310.709	100,00	624.500.030	100,00	643.235.031	
	Program Koordinasi Ketentraman dan	Persentase desa/kelurahan yang	%	N/A	100,00	267.154.906	100,00	275.169.553	100,00	283.424.639	100,00	291.927.378	100,00	300.685.200	100,00	309.705.756	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Ketertiban Umum	melaksanakan program pemberdayaan															
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase laporan dan dokumen pemerintahan umum yang disusun tepat waktu	%	N/A	100,00	246.604.528	100,00	254.002.664	100,00	261.622.744	100,00	269.471.426	100,00	277.555.569	100,00	285.882.236	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan sesuai jadwal	%	N/A	100,00	164.403.019	100,00	169.335.109	100,00	174.415.163	100,00	179.647.618	100,00	185.037.046	100,00	190.588.157	
29	Kecamatan Huristak																
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	%	N/A	100,00	514.479.274	100,00	529.913.652	100,00	545.811.062	100,00	562.185.394	100,00	579.050.955	100,00	596.422.484	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	347.273.510	100,00	357.691.715	100,00	368.422.467	100,00	379.475.141	100,00	390.859.395	100,00	402.585.177	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	167.205.764	100,00	172.221.937	100,00	177.388.595	100,00	182.710.253	100,00	188.191.561	100,00	193.837.307	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase laporan dan dokumen pemerintahan umum yang	%	N/A	100,00	154.343.782	100,00	158.974.096	100,00	163.743.319	100,00	168.655.618	100,00	173.715.287	100,00	178.926.745	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		disusun tepat waktu															
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan sesuai jadwal	%	N/A	100,00	102.895.855	100,00	105.982.730	100,00	109.162.212	100,00	112.437.079	100,00	115.810.191	100,00	119.284.497	
30	Kecamatan Barumun Selatan																
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	%	N/A	100,00	391.446.865	100,00	403.190.271	100,00	415.285.979	100,00	427.744.559	100,00	440.576.895	100,00	453.794.202	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	264.226.634	100,00	272.153.433	100,00	280.318.036	100,00	288.727.577	100,00	297.389.404	100,00	306.311.087	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	127.220.231	100,00	131.036.838	100,00	134.967.943	100,00	139.016.982	100,00	143.187.491	100,00	147.483.116	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase laporan dan dokumen pemerintahan umum yang disusun tepat waktu	%	N/A	100,00	117.434.060	100,00	120.957.081	100,00	124.585.794	100,00	128.323.368	100,00	132.173.069	100,00	136.138.261	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan sesuai jadwal	%	N/A	100,00	78.289.373	100,00	80.638.054	100,00	83.057.196	100,00	85.548.912	100,00	88.115.379	100,00	90.758.840	
31	Kecamatan Batang Lubu Sutam																

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	%	N/A	100,00	793.474.028	100,00	817.278.248	100,00	841.796.596	100,00	867.050.494	100,00	893.062.009	100,00	919.853.869
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	535.594.969	100,00	551.662.818	100,00	568.212.702	100,00	585.259.083	100,00	602.816.856	100,00	620.901.361
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	257.879.059	100,00	265.615.431	100,00	273.583.894	100,00	281.791.410	100,00	290.245.153	100,00	298.952.507
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase laporan dan dokumen pemerintahan umum yang disusun tepat waktu	%	N/A	100,00	238.042.208	100,00	245.183.475	100,00	252.538.979	100,00	260.115.148	100,00	267.918.603	100,00	275.956.161
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan sesuai jadwal	%	N/A	100,00	158.694.806	100,00	163.455.650	100,00	168.359.319	100,00	173.410.099	100,00	178.612.402	100,00	183.970.774
32	Kecamatan Hutaraja Tinggi															
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	%	N/A	100,00	977.901.906	100,00	1.007.238.964	100,00	1.037.456.132	100,00	1.068.579.816	100,00	1.100.637.211	100,00	1.133.656.327
	Program Pemberdayaan	Persentase desa/kelurahan	%	N/A	100,00	660.083.787	100,00	679.886.300	100,00	700.282.889	100,00	721.291.376	100,00	742.930.117	100,00	765.218.021

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Masyarakat Desa dan Kelurahan	n yang melaksanakan program pemberdayaan															
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	317.818.120	100,00	327.352.663	100,00	337.173.243	100,00	347.288.440	100,00	357.707.094	100,00	368.438.306	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase laporan dan dokumen pemerintahan umum yang disusun tepat waktu	%	N/A	100,00	293.370.572	100,00	302.171.689	100,00	311.236.840	100,00	320.573.945	100,00	330.191.163	100,00	340.096.898	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan sesuai jadwal	%	N/A	100,00	195.580.381	100,00	201.447.783	100,00	207.491.226	100,00	213.715.963	100,00	220.127.442	100,00	226.731.265	
33	Kecamatan Aek Nabara Barumon																
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	%	N/A	100,00	633.416.865	100,00	652.419.371	100,00	671.991.952	100,00	692.151.711	100,00	712.916.262	100,00	734.303.750	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	427.556.384	100,00	440.383.076	100,00	453.594.568	100,00	467.202.405	100,00	481.218.477	100,00	495.655.031	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan	%	N/A	100,00	205.860.481	100,00	212.036.296	100,00	218.397.384	100,00	224.949.306	100,00	231.697.785	100,00	238.648.719	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif													
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		program pemberdayaan																
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase laporan dan dokumen pemerintahan umum yang disusun tepat waktu	%	N/A	100,00	190.025.060	100,00	195.725.811	100,00	201.597.586	100,00	207.645.513	100,00	213.874.879	100,00	220.291.125		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan sesuai jadwal	%	N/A	100,00	126.683.373	100,00	130.483.874	100,00	134.398.390	100,00	138.430.342	100,00	142.583.252	100,00	146.860.750		
34	Kecamatan Sosa																	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	%	N/A	100,00	898.685.373	100,00	925.645.934	100,00	953.415.312	100,00	982.017.771	100,00	1.011.478.305	100,00	1.041.822.654		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	606.612.627	100,00	624.811.005	100,00	643.555.336	100,00	662.861.996	100,00	682.747.856	100,00	703.230.291		
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	292.072.746	100,00	300.834.929	100,00	309.859.976	100,00	319.155.776	100,00	328.730.449	100,00	338.592.362		
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase laporan dan dokumen pemerintahan umum yang disusun tepat	%	N/A	100,00	269.605.612	100,00	277.693.780	100,00	286.024.594	100,00	294.605.331	100,00	303.443.491	100,00	312.546.796		

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif													
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		waktu																
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan sesuai jadwal	%	N/A	100,00	179.737.075	100,00	185.129.187	100,00	190.683.062	100,00	196.403.554	100,00	202.295.661	100,00	208.364.531		
35	Kecamatan Barumun Tengah																	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	%	N/A	100,00	816.567.164	100,00	841.064.179	100,00	866.296.104	100,00	892.284.987	100,00	919.053.537	100,00	946.625.143		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	551.182.835	100,00	567.718.320	100,00	584.749.870	100,00	602.292.366	100,00	620.361.137	100,00	638.971.971		
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	265.384.328	100,00	273.345.858	100,00	281.546.234	100,00	289.992.621	100,00	298.692.399	100,00	307.653.171		
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase laporan dan dokumen pemerintahan umum yang disusun tepat waktu	%	N/A	100,00	244.970.149	100,00	252.319.254	100,00	259.888.831	100,00	267.685.496	100,00	275.716.061	100,00	283.987.543		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan sesuai jadwal	%	N/A	100,00	163.313.433	100,00	168.212.836	100,00	173.259.221	100,00	178.456.997	100,00	183.810.707	100,00	189.325.029		
36	Kecamatan Sihapas Barumun																	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	%	N/A	100,00	593.841.464	100,00	611.656.708	100,00	630.006.409	100,00	648.906.601	100,00	668.373.799	100,00	688.425.013
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	400.842.988	100,00	412.868.278	100,00	425.254.326	100,00	438.011.956	100,00	451.152.314	100,00	464.686.884
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	192.998.476	100,00	198.788.430	100,00	204.752.083	100,00	210.894.645	100,00	217.221.485	100,00	223.738.129
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase laporan dan dokumen pemerintahan umum yang disusun tepat waktu	%	N/A	100,00	178.152.439	100,00	183.497.012	100,00	189.001.923	100,00	194.671.980	100,00	200.512.140	100,00	206.527.504
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan sesuai jadwal	%	N/A	100,00	118.768.293	100,00	122.331.342	100,00	126.001.282	100,00	129.781.320	100,00	133.674.760	100,00	137.685.003
37	Kecamatan Ulu Barumun															
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	%	N/A	100,00	561.522.075	100,00	578.367.737	100,00	595.718.769	100,00	613.590.332	100,00	631.998.042	100,00	650.957.983
	Program Pemberdayaan	Persentase desa/kelurahan	%	N/A	100,00	379.027.400	100,00	390.398.223	100,00	402.110.169	100,00	414.173.474	100,00	426.598.678	100,00	439.396.639

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Masyarakat Desa dan Kelurahan	n yang melaksanakan program pemberdayaan															
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	182.494.674	100,00	187.969.515	100,00	193.608.600	100,00	199.416.858	100,00	205.399.364	100,00	211.561.345	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase laporan dan dokumen pemerintahan umum yang disusun tepat waktu	%	N/A	100,00	168.456.622	100,00	173.510.321	100,00	178.715.631	100,00	184.077.100	100,00	189.599.413	100,00	195.287.395	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan sesuai jadwal	%	N/A	100,00	112.304.415	100,00	115.673.547	100,00	119.143.754	100,00	122.718.066	100,00	126.399.608	100,00	130.191.597	
38	Kecamatan Sosopan																
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	%	N/A	100,00	608.294.003	100,00	626.542.823	100,00	645.339.108	100,00	664.699.281	100,00	684.640.259	100,00	705.179.467	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	410.598.452	100,00	422.916.405	100,00	435.603.898	100,00	448.672.015	100,00	462.132.175	100,00	475.996.140	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan	%	N/A	100,00	197.695.551	100,00	203.626.417	100,00	209.735.210	100,00	216.027.266	100,00	222.508.084	100,00	229.183.327	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif													
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		program pemberdayaan																
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase laporan dan dokumen pemerintahan umum yang disusun tepat waktu	%	N/A	100,00	182.488.201	100,00	187.962.847	100,00	193.601.732	100,00	199.409.784	100,00	205.392.078	100,00	211.553.840		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan sesuai jadwal	%	N/A	100,00	121.658.801	100,00	125.308.565	100,00	129.067.822	100,00	132.939.856	100,00	136.928.052	100,00	141.035.893		
39	Kecamatan Barumun Baru																	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	%	N/A	100,00	444.187.472	100,00	457.513.096	100,00	471.238.489	100,00	485.375.643	100,00	499.936.913	100,00	514.935.020		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	299.826.543	100,00	308.821.340	100,00	318.085.980	100,00	327.628.559	100,00	337.457.416	100,00	347.581.138		
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	144.360.928	100,00	148.691.756	100,00	153.152.509	100,00	157.747.084	100,00	162.479.497	100,00	167.353.881		
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase laporan dan dokumen pemerintahan umum yang disusun tepat	%	N/A	100,00	133.256.241	100,00	137.253.929	100,00	141.371.547	100,00	145.612.693	100,00	149.981.074	100,00	154.480.506		

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif													
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		waktu																
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan sesuai jadwal	%	N/A	100,00	88.837.494	100,00	91.502.619	100,00	94.247.698	100,00	97.075.129	100,00	99.987.383	100,00	102.987.004		
40	Kecamatan Barumun Barat																	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	%	N/A	100,00	536.934.234	100,00	553.042.261	100,00	569.633.529	100,00	586.722.535	100,00	604.324.211	100,00	622.453.938		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	362.430.608	100,00	373.303.526	100,00	384.502.632	100,00	396.037.711	100,00	407.918.843	100,00	420.156.408		
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	174.503.626	100,00	179.738.735	100,00	185.130.897	100,00	190.684.824	100,00	196.405.369	100,00	202.297.530		
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase laporan dan dokumen pemerintahan umum yang disusun tepat waktu	%	N/A	100,00	161.080.270	100,00	165.912.678	100,00	170.890.059	100,00	176.016.761	100,00	181.297.263	100,00	186.736.181		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan sesuai jadwal	%	N/A	100,00	107.386.847	100,00	110.608.452	100,00	113.926.706	100,00	117.344.507	100,00	120.864.842	100,00	124.490.788		
41	Kecamatan Sosa Julu																	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	%	N/A	100,00	573.233.987	100,00	590.431.006	100,00	608.143.937	100,00	626.388.255	100,00	645.179.902	100,00	664.535.299
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	386.932.941	100,00	398.540.929	100,00	410.497.157	100,00	422.812.072	100,00	435.496.434	100,00	448.561.327
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	186.301.046	100,00	191.890.077	100,00	197.646.779	100,00	203.576.183	100,00	209.683.468	100,00	215.973.972
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase laporan dan dokumen pemerintahan umum yang disusun tepat waktu	%	N/A	100,00	171.970.196	100,00	177.129.302	100,00	182.443.181	100,00	187.916.476	100,00	193.553.971	100,00	199.360.590
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan sesuai jadwal	%	N/A	100,00	114.646.797	100,00	118.086.201	100,00	121.628.787	100,00	125.277.651	100,00	129.035.980	100,00	132.907.060
42	Kecamatan Ulu Sosa															
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	%	N/A	100,00	613.599.019	100,00	632.006.990	100,00	650.967.199	100,00	670.496.215	100,00	690.611.102	100,00	711.329.435
	Program Pemberdayaan	Persentase desa/kelurahan	%	N/A	100,00	414.179.338	100,00	426.604.718	100,00	439.402.860	100,00	452.584.945	100,00	466.162.494	100,00	480.147.369

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Masyarakat Desa dan Kelurahan	n yang melaksanakan program pemberdayaan															
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	199.419.681	100,00	205.402.272	100,00	211.564.340	100,00	217.911.270	100,00	224.448.608	100,00	231.182.066	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase laporan dan dokumen pemerintahan umum yang disusun tepat waktu	%	N/A	100,00	184.079.706	100,00	189.602.097	100,00	195.290.160	100,00	201.148.865	100,00	207.183.331	100,00	213.398.830	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan sesuai jadwal	%	N/A	100,00	122.719.804	100,00	126.401.398	100,00	130.193.440	100,00	134.099.243	100,00	138.122.220	100,00	142.265.887	
43	Kecamatan Sosa Timur																
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	%	N/A	100,00	626.065.935	100,00	644.847.913	100,00	664.193.351	100,00	684.119.151	100,00	704.642.726	100,00	725.782.007	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program pemberdayaan	%	N/A	100,00	422.594.506	100,00	435.272.341	100,00	448.330.512	100,00	461.780.427	100,00	475.633.840	100,00	489.902.855	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan	%	N/A	100,00	203.471.429	100,00	209.575.572	100,00	215.862.839	100,00	222.338.724	100,00	229.008.886	100,00	235.879.152	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif													
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		program pemberdayaan																
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase laporan dan dokumen pemerintahan umum yang disusun tepat waktu	%	N/A	100,00	187.819.781	100,00	193.454.374	100,00	199.258.005	100,00	205.235.745	100,00	211.392.818	100,00	217.734.602		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan sesuai jadwal	%	N/A	100,00	125.213.187	100,00	128.969.583	100,00	132.838.670	100,00	136.823.830	100,00	140.928.545	100,00	145.156.401		
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																	
	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	N/A	40,00	1.700.000.000	42,00	1.720.007.000	44,10	1.830.000.000	46,31	1.830.000.000	48,62	1.830.000.000	51,05	1.830.000.000		
	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Politik	Persentase Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%	N/A	53,00	7.100.000	55,65	1.277.144.006	58,43	1.277.144.006	61,35	1.277.144.006	64,42	1.277.144.006	67,64	1.277.144.006		
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	N/A	44,00	5.049.900	46,20	275.049.900	48,51	275.049.900	50,94	275.049.900	53,48	275.049.900	56,16	275.049.900		
	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi	%	N/A	90,00	500.000.000	90,00	550.000.000	90,00	550.000.000	100,00	550.000.000	100,00	550.000.000	100,00	550.000.000		

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan															
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	N/A	100,00	374.138.250	100,00	374.138.250	100,00	374.138.250	100,00	374.138.250	100,00	374.138.250	100,00	374.138.250	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Poin	N/A	B	1.460.431.341	B	1.996.027.755	B	2.003.041.255	B	1.912.553.755	B	2.010.177.255	BB	2.070.482.573	

Tabel 4.2. Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap 6 PHTC RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	PHTC	Program Prioritas
1.	Penyediaan SDM unggul yang siap bekerja	Peningkatan Kualitas Pendidikan
		Peningkatan Kesempatan Kerja
2.	Peningkatan kualitas layanan, akses dan jaminan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk Sumatera Utara dalam rangka peningkatan Usia harapan Hidup	Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata
		Peningkatan Ekonomi Rakyat
3.	Peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani	Penggalian Potensi Sumber Daya Alam
		Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
		Penataan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
4.	Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang responsif, lincah dan memahami kebutuhan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah
		Peningkatan Kemandirian Daerah
		Peningkatan Kualitas Infrastruktur
5.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur merata, terhubung dan ramah lingkungan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Ketahanan Daerah
6.	Meningkatkan peran desa dan keterlibatan masyarakat untuk menghasilkan kemajuan daerah	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama
		Penurunan Kemiskinan
		Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Berbasis Budaya

Tabel 4.3. Dukungan Program Daerah Terhadap Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten Padang Lawas

No	RPJM Nasional	No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara	No	RPJMD Kabupaten Padang Lawas
1	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	5	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru.	12	Program Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
		6	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal.	13	Program Penataan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan
2	Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	4	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah.	8	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah
				17	Program Peningkatan Kemandirian Daerah
3	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	10	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.	8	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah
		11	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat.		
4	Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	10	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.	8	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah

No	RPJM Nasional	No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara	No	RPJMD Kabupaten Padang Lawas
5	Pemberantasan kemiskinan.	9	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran.	14	Program Penurunan Kemiskinan
6	Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	17	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib.		
7	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	3	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu.	2	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata
8	Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.	1	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal.	1	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan
		11	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat.		
9	Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.	17	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib.	8	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah

No	RPJM Nasional	No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara	No	RPJMD Kabupaten Padang Lawas
10	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.	2	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	7	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender
11	Menjamin pelestarian lingkungan hidup.	14	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana.	11	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
12	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.	6	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal.	12	Program Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
				13	Program Penataan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan
13	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersaitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.	12	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal.	3	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur
		15	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa.		
14	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.	4	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah.	3	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur

No	RPJM Nasional	No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara	No	RPJMD Kabupaten Padang Lawas
		13	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing.	4	Program Peningkatan Ketahanan Daerah
				5	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
				9	Program Peningkatan Ekonomi Rakyat
				16	Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Berbasis Budaya
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.	13	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing.	9	Program Peningkatan Ekonomi Rakyat
		14	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana.	10	Program Penggalan Potensi Sumber Daya Alam
		8	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi.	13	Program Penataan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan
				15	Program Peningkatan Kesempatan Kerja

No	RPJM Nasional	No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara	No	RPJMD Kabupaten Padang Lawas
16	Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.	16	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun.	6	Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama
		17	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib.		
17	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.	7	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal).	16	Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Berbasis Budaya
		8	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi.		

Tabel 4.4. Dukungan Kabupaten Padang Lawas terhadap PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias, Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029) 33 Kabupaten/Kota	2025	Penyusunan kajian akademik tentang bersekolah gratis, Pembentukan Tim Pokja, Validasi data siswa SMA/SMK/SLB Negeri di zona kepulauan Nias, zona Pantai Barat, zona Dataran Tinggi, zona Pantai Timur • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan	Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	- Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang akan melanjutkan SLTA - Melakukan edukasi kepada siswa SLTP agar seluruhnya melanjutkan kepada jenjang SLTA
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	Implementasi Program Bersekolah Gratis •Kepulauan Nias, Pantai Barat, dan Dataran Tinggi			
	2029	Implementasi Program Bersekolah Gratis •Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur			
	2030	Implementasi Program Bersekolah Gratis •Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur			
2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	2025	Melakukan <i>Launching</i> UHC Penyusunan regulasi (Pergub/SK Gub UHC) MoU 33 Kabupaten/Kota Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara Triwulan IV dimulai Oktober 2025	Dinas Kesehatan	1. Dinas Sosial (Pembinaan kepada 2. Dinsos kab/kota untuk melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial	- Dukungan penganggaran APBD Kabupaten/Kota untuk UHC/PBPU yaitu pada Tahun 2025 sebesar 80%, tahun 2026 sebesar 77,5%, tahun 2027 sebesar 75%,

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		<ul style="list-style-type: none"> • 33 Kabupaten/Kota 		Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya), 3. Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan Provsu) 3. Diskominfo (Publikasi Kegiatan),	tahun 2028 sebesar 72,5%, tahun 2029 dan 2030 sebesar 70%. - Melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya - Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota)
	2026	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara <ul style="list-style-type: none"> • 33 Kabupaten/Kota 			
	2027	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara <ul style="list-style-type: none"> • 33 Kabupaten/Kota 			
	2028	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara <ul style="list-style-type: none"> • 33 Kabupaten/Kota 			
	2029	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus <ul style="list-style-type: none"> • 33 Kabupaten/Kota 			

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
	2030	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus • 33 Kabupaten/Kota			
3. Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	2025	Tidak ada	Dinas TPH	- Disperindag ESDM (Memfasilitasi kemitraan antara petani dan pelaku usaha)	Disperindag Kabupaten/Kota: Melakukan fasilitasi dan pameran produk cabai kering di tingkat lokal
	2026	Tidak ada		- Diskop UMKM (Mendorong koperasi tani dan mengkoordinasikan ke koperasi merah putih)	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota: Menyiapkan lahan dan kelompok tani (CPCL) serta pendampingan kelompok tani
	2027	Tidak ada		- PUPR (Perbaikan akses jalan ke sentra produksi dan koordinasi dengan PUPR kab/kota terkait akses jalan)	Dinas Koperasi Kabupaten/Kota: Mendorong pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama yang mengelola SDD
	2028	Tidak ada		- BUMD Dirga Surya (Skema pembelian hasil pertanian cabai merah ketika harga turun)	Total <i>Solar Dry Dome</i> : 70
	2029	Tidak ada		- Biro Pemotda	
	2030	Tidak ada			

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				(fasilitasi kerja sama antar pemerintah daerah) - Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	
4. Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS)	2025	<p>Identifikasi dan pemetaan pelayanan publik yang akan di digitalisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan layanan publik yang akan didigitalisasi, Audit kesiapan infrastruktur dan SDM dan kebijakan pendukung 2. Penyusunan <i>roadmap</i> dan desain awal sistem Layanan digital. <p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. <p>Identifikasi Penetapan Lokasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Survei lapangan untuk identifikasi kebutuhan dan potensi gangguan jaringan. 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pemetaan Lokasi Strategis. 4. Koordinasi kepada Stake Holder dan Penyusunan dokumen perencanaan Teknis dan Administratif. <p>Lokasi Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 33 Kabupaten/Kota 	Dinas Kominfo	<p>DPMPTSP Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Bapenda Disperindag ESDM BPSDM Biro Adpem</p> <p>BUMD: PDAM, Bank Sumut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan kebijakan/regulasi di tingkat Provinsi/Pemda Kabupaten/Kota. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota. 4. Penentuan lokasi <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
	2026	Pembangunan integrasi portal aplikasi 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi . 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 4. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi
		Tidak ada			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2027	Pengembangan dan penambahan 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 4. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. 5. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		Pembangunan dan implementasi serta titik pemasangan jaringan internet 1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. 2. Pemasangan Titik akses Wifi. 3. Sosialisasi Penggunaan. 4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Mointoring. Lokasi Penggunaan: - 25 Kabupaten			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2028	Perluasan area layanan dan akses jaringan internet 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		Tidak ada			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2029	Perluasan area layanan dan akses jaringan internet 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi
		1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. 2. Pemasangan Titik akses Wifi. 3. Sosialisasi Penggunaan. 4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Mointoring. Lokasi Perluasan Area Layanan: - 25 Kabupaten			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
	2030	<p>Evaluasi dan Monitoring</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur <p>Lokasi kegiatan: 33 Kabupaten/Kota</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. 2. Pemasangan Titik akses Wifi. 3. Sosialisasi Penggunaan. 4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Mointoring. <p>Lokasi Perluasan Area Layanan: - 33 Kabupaten/Kota</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota. 4. Penentuan lokasi <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan.
5 a. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)	2025	Tidak ada	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/ AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas Perhubungan terkait Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem	1. Dukungan penanganan akses jalan dalam koridor pembangunan jalan provinsi yang mendukung kawasan prioritas.
	2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2. Penyusunan Leger jalan 3. Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. 			<ol style="list-style-type: none"> 2. Dukungan penyediaan lahan pada rencana

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		<p>Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kab. Pakpak Bharat, Kota Binjai, Kota Padangsidempuan</p> <p>Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan</p> <p>Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan</p> <p>Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Barat</p> <p>4. Pelaksanaan penanganan Jembatan</p> <p>Kawasan Pertumbuhan: Kab. Simalungun, Kab. Samosir</p> <p>Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan</p> <p>Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Mandailing Natal</p> <p>Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat</p> <p>target: jalan 202,84 km jembatan 202,90 m.</p>		melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi	pelebaran yang tidak sesuai dengan Ruang Milik Jalan (RUMIJA).

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
	2027	1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2.Penyusunan Leger jalan 3.Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kota Pematangsiantar, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Dairi, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Dairi, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Afirmasi: Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat 4.Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Serdang Bedagai, Kab. Asahan, Kota Tanjungbalai Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Serdang Bedagai, Kab. Pakpak			

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		Bharat serta target: jalan 130,99 km & jembatan 708,45 m			
	2028	<p>1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED)</p> <p>2.Penyusunan Leger jalan</p> <p>3.Pelaksanaan penanganan Jalan</p> <p>Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Batu Bara, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab Toba, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan</p> <p>Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Padang Lawas</p> <p>Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Langkat</p> <p>Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat</p> <p>Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana : Kab. Langkat</p> <p>4.Pelaksanaan penanganan Jembatan</p> <p>Kawasan Pertumbuhan: Kab. Samosir, Kab.</p>			

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		<p>Tapanuli Tengah, Kab. Dairi</p> <p>Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Tapanuli Selatan</p> <p>Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Pakpak Bharat</p> <p>serta target: jalan 135,10 km & jembatan 438,90 m</p>			
	2029				
	2030	<p>1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED)</p> <p>2.Penyusunan Leger jalan</p> <p>3.Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Selatan</p> <p>Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan</p> <p>Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi</p> <p>Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Barat</p>			

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat 4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Deli Serdang Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Serdang Bedagai Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Serdang Bedagai serta target: jalan 126,20 km & jembatan 51m			
b. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	2025	tidak ada	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/AMDAL, Dinas TPH melakukan pemetaan terhadap kawasan swasembada dan dukungan terhadap irigasi tersier dan kuarter, benih, pupuk, alsintan, penyuluh pertanian. Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas Kominfo untuk	- Dukungan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier - Sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan BUMDes untuk pemeliharaan jaringan irigasi - Pembangunan embung, sumur bor, dan pompanisasi untuk sumber air cadangan. - Digitalisasi sistem irigasi (<i>smart irrigation</i>) berbasis sensor dan
	2026	Tidak ada			
	2027	Akselerasi cakupan layanan target 3.175 Ha. Kabupaten Langkat (DI. Secanggang), Kabupaten Mandailing Natal (DI. Terusan), Kabupaten Padang Lawas (DI. Balakka Sitongkon), Kabupaten Padang Lawas (DI. Sigorbus), Kabupaten Mandailing Natal (DI. Roburan Maga), Kabupaten Simalungun (DI. Raja Maligas), Kabupaten Simalungun (DI. Javaconisasi), Kabupaten Dairi (DI. Buluh Duri), Kabupaten Toba (DI. Hinalang), Kabupaten Tapanuli Utara (DI. Aek Sigeaon), Kabupaten Tapanuli Utara (DI. Hasak I dan II), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Mombangboru), Kabupaten			

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		Samosir (DI. Tele Harian Boho), Kabupaten Humbang Hasundutan (DI. Parmiahian/Hutapaung), Kabupaten Nias (DI. Gido Zebua), Kabupaten Simalungun (DI. Bah Tongguran I), Kabupaten Simalungun (DI. Raja Hombang/Tengah Mangaraja), Kabupaten Padang Lawas Utara (DI. Padang Garugur), Padang Lawas Utara (DI. Napa Tanjung Beringin), Kabupaten Labuhanbatu (DIR. Cinta Makmur), Kabupaten Asahan (DI. Serbangan), Kabupaten Batubara (DI. Simodong), Kabupaten Padang Lawas Utara (DI. Padang Garugur), Kabupaten Labuhanbatu (DIR. Sei Serdang/Sei Rakyat), Kabupaten Mandailing Natal (DI. Terusan), Kabupaten Deli Serdang (DI. Namorambe), Kabupaten Mandailing Natal (DI. Tapus).		publikasi Media	aplikasi. - Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk pengelolaan irigasi. - Integrasi dengan program ketahanan pangan daerah.
	2028	Penguatan jaringan teknis Kabupaten Batubara (DI. Simodong, DI. Purwodadi, DI. Sei Balai, DI. Suka Makmur, DI. Sijambi), Kabupaten Simalungun (DI. Bah Horas Hulu/Tengah), Kabupaten Padang Lawas Utara (DI. Padang Garugur), Kabupaten Padang Lawas (DI. Sigorbus), Kabupaten Labuhanbatu (DIR. Cinta Makmur, DIR. Sei Serdang/sei Rakyat), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI.			

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		Mombangboru), Kabupaten Mandailing Natal (DI. Roburan Maga, Kabupaten Langkat (DIR. Gebang), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Pandurungan/Sitandiang), Kabupaten Karo (DI. Parit Lompaten), Kabupaten Toba (DI. Hinalang), Kabupaten Tapanuli Utara (DI. Sigeaon), Kabupaten Tapanuli Utara (DI. Simok Mok ,DI. Aek Sarulla), Kabupaten Deli Serdang (DI. Medan Krio), Kabupaten Mandailing Natal (DI. Tapus), Kabupaten Dairi (DI. Buluh Duri, Kabupaten Mandailing Natal (DI. Siulang Aling), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Badiri Lopian)			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
c. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah	2025	Tidak ada	Dinas PKP	Dinas PUPR terkait dukungan terkait Tata Ruang, Jalan, dan Keciptakaryaan (sanitasi dan air minum), BPBD koordinasi terhadap Rehab rumah akibat bencana Biro Adpem	Bupati/Wali Kota: 1. Pendataan dan Validasi Calon Penerima (BNBA = <i>by name by address</i>) 2. SK Kumuh yang dikeluarkan Bupati atau Wali Kota terkait wewenang Provinsi untuk luasan 10 – 15 Ha 3. SK Pokja Penanganan
	2026	- Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survei Lokasi di setiap Kabupaten/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI, Bank Sumut dan lain lain) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Perluasan pemasaran dan kepemilikan			

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		<p>rumah bagi MBR dan ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan <p>•Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Toba, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara</p>		<p>melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi</p> <p>Biro Pemotha (memfasilitasi kerja sama antar Pemerintah Daerah) Badan Kepegawaian dan BP Tapera untuk penyediaan data ASN yang belum memiliki rumah</p> <p>Dinas Kominfo untuk publikasi Media</p>	<p>Kawasan Kumuh pada kabupaten/Kota</p> <p>4. Melakukan sosialisasi kepada MBR dan ASN</p> <p>Dinas yang Membidangi Perumahan Rakyat (di kab/kota): Pelaksana teknis utama di lapangan. Bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan.</p> <p>Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan bantuan teknis konstruksi, menyusun RAB, dan memberikan supervisi teknis kepada pelaksana di lapangan.</p> <p>Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu dalam pembaruan dan</p>
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
					<p>verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal.</p> <p>Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan: Ujung tombak identifikasi awal calon penerima, sosialisasi langsung kepada masyarakat, memfasilitasi gotong royong, dan membantu monitoring di lapangan.</p> <p>Badan Kepegawaian dan BP Tapera: Penyediaan data ASN yang belum memiliki rumah</p>
6. Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).	2025	Tidak ada	Biro Hukum	Dinas PMD Capil (memberikan data/pemetaan desa prioritas kegiatan PRESTICE yaitu desa dengan karakteristik konflik yang tinggi) Diskominfo (Publikasi),	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replikasi Kegiatan Prestice pada tingkat Kabupaten/Kota 2. Edukasi dan Sosialisasi Prestice di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan ke level Kecamatan dan Desa. 3. Pendampingan dari bagian hukum kabupaten/kota dari kasus tidak pidana
	2026	- Pembentukan kelembagaan PRESTICE, Bimbingan Teknis Paralegal Desa dan Edukasi dan Sosialisasi PRESTICE di 25			

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		kabupaten (Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba) - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			ringan yang ditangani oleh PRESTICE
	2027	- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per			

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			
	2028	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan) 			
	2029	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan) 			

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Dukungan PD Provsu		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
	2030	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan. - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan) 			

Tabel 4.5. Dukungan Kabupaten Padang Lawas terhadap Program Prioritas dan Proyek Strategis Provinsi Sumatera Utara

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
PP1. PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL					
1. Pemenuhan 100% Fasilitasi Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara	2025	Tidak ada	Dinas Pendidikan	Disperindag ESDM (pendampingan terhadap akses listrik), Dinas Kominfo (pendampingan terhadap akses internet dan publikasi kegiatan).	Pembangunan akses jalan yang baik ke sekolah yang akan dibangun akses listrik dan layanan internet.
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK – 2028, Karo/SLB - 2029)	2025	tidak ada	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan/hibah lahan yang diperlukan - Pembangunan akses jalan yang baik dari dan ke sekolah - Penyediaan lahan/hibah lahan yang diperlukan - Pembangunan akses jalan yang baik dari dan ke sekolah
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak	2025	Pendataan valid rehab ruang kelas tahun 2026-2029	Dinas Pendidikan	PUPR (Appraisal/Penilaian Kerusakan,	- Penyediaan lahan/hibah lahan yang

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
490 Sekolah		•Provinsi Sumatera Utara (Dokumen Aprasial)		Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	diperlukan
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Pelaksanaan Fisik Tahap III – 190 Ruang Kelas (2028) di 28 Kabupaten/Kota			
		•Medan, Binjai, Langkat, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Simalungun, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapteng, Sibolga, Padangsidempuan, Mandailing Natal, Padang Lawas.			
	2029	Monitoring, Evaluasi & Pemutakhiran Data (2029)			
	2030	Tidak ada			
4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	2025	Pendataan Kebutuhan Ruang Kelas Baru (mendesak), Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap I sebanyak 57 RKB di 15 Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo	Penyediaan atau hibah Lahan dari kabupaten/kota untuk lokasi Pembangunan RKB sesuai kebutuhan.

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		<ul style="list-style-type: none"> •Deli Serdang, Langkat, Dairi, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Simalungun, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Asahan 		(Publikasi kegiatan)	Pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah.
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Pembangunan Ruang Kelas Baru sebanyak 30 Ruang Kelas Baru di 13 Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> •Binjai, Langkat, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Asahan, Tanjungbalai, Samosir, Toba, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Sibolga Pembangunan 2 unit Sekolah Baru			
	2029	Tidak ada			
05. Optimalisasi Sarana dan Prasarana BLK Provsu menuju BLK Tematik Bioindustri dan Pariwisata	2025	tidak ada	DISNAKER	Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral:	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara
	2026	tidak ada		Disperindag ESDM	
	2027	tidak ada		bersifat mendukung dan lintas sektor,	
	2028	tidak ada			
	2029-2030	tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				<p>bukan pelaksana utama pelatihan. Maka Disperindag ESDM mendukung proyek strategis BLK, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjadi penghubung antara pelaku industri/perusahaan dengan Disnaker dan BLK. • Memfasilitasi program magang industri dan penempatan lulus BKL ke industri lokal. • Disperindag ESDM dapat menjadi mitra dalam pengembangan program pelatihan vokasi di BLK melalui fasilitasi pelatihan berbasis proyek industri, penyediaan 	<p>kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan sarana dan prasarana pendukung sesuai kewenangan kabupaten 2. Memfasilitasi kerja sama antara BLK dan perusahaan lokal untuk program magang, pelatihan kerja, atau penyerapan tenaga kerja berbasis potensi daerah

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				instruktur ahli dari sektor industri dan akses terhadap bantuan alat pelatihan.	
				<p>Dinas Pendidikan: Dinas Pendidikan memiliki peran dalam proyek strategis ini dalam hal pelatihan kerja, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong sinkronisasi kurikulum SMK/vokasi dengan skema pelatihan BLK agar lulusan SMK lebih siap kerja. • Memastikan kompetensi lulusan SMK sejalan dengan kebutuhan industri dan program pelatihan BLK. • Mengintegrasikan <i>teaching factory</i> di 	

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
					<p>SMK dengan fasilitas pelatihan BLK untuk <i>menciptakan ekosistem pelatihan dual system.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong peserta didik SMK mengikuti sertifikasi kompetensi melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang terhubung dengan BLK. • Bersama Disnaker, mendata dan menyiapkan guru produktif/tenaga pelatih yang memenuhi standar pelatihan. <p>Dinas Koperasi dan UMKM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan hasil pelatihan BLK dengan program inkubasi usaha UMKM

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				<ul style="list-style-type: none"> • Membina lulusan BLK agar mampu mengembangkan usaha mandiri berbasis keahlian yang telah diperoleh • Menyediakan pendampingan usaha lanjutan bagi peserta pelatihan BLK yang ingin berwirausaha • Menyediakan ruang inkubasi bisnis di sentra-sentra UMKM daerah yang terhubung dengan BLK • Membantu lulusan BLK yang berwirausaha dalam promosi dan digitalisasi produk melalui <i>E-commerce</i> dan platform digital UMKM. 	

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
					<p>uji kompetensi dan sertifikasi bagi peserta pelatihan BLK untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bekerja sama dengan Disnaker dalam menyusun kurikulum pelatihan di BLK yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif. <p>Dinas Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjangkau dan Memberdayakan Kelompok Rentan Sosial. • Integrasi Program Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Kerja. • Bersinergi dengan Disnaker dalam memanfaatkan Data

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan program pelatihan BLK tepat sasaran, terutama bagi warga miskin dan rentan sosial. <ul style="list-style-type: none"> • Melalui tenaga pekerja sosial, Dinas Sosial dapat melakukan pendampingan bagi peserta pelatihan selama dan setelah masa pelatihan, untuk memastikan mereka mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh, baik untuk bekerja maupun memulai usaha secara mandiri. Badan Kepegawaiaan Daerah:	

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				<ul style="list-style-type: none"> • BKD berperan dalam mendukung ketersediaan ASN dengan kompetensi teknis dan manajerial yang relevan, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BLK, baik sebagai instruktur, tenaga administrasi, maupun pengelola program pelatihan. • Melakukan pemetaan dan perencanaan kebutuhan SDM aparatur di bidang pelatihan vokasional agar sejalan dengan arah pengembangan BLK, termasuk dalam pengadaan, rotasi, dan pengembangan karier ASN yang 	

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
					<p>ditempatkan di unit-unit pelatihan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BKD dapat mengintegrasikan program pelatihan teknis fungsional dan manajerial bagi ASN yang bertugas di lingkungan BLK ke dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pelatihan. • Berperan dalam membangun sistem penilaian kinerja yang berbasis <i>output</i> dan dampak, termasuk mengawasi efektivitas kinerja ASN di BLK dalam menyelenggarakan pelatihan yang berdampak

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
					langsung terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja. Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan
PP2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI					
6. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030	2025	1. Inisiasi dan konsolidasi melalui rapat rapat koordinasi tahun 2025 2. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2025 • Provinsi Sumatera Utara	Dispora	Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan (pembinaan, edukasi dan sosialisasi kepada pelajar untuk dapat menjadi atlet pelajar) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	- Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan liga olahraga pelajar sumut untuk cabor sepak bola dan voli - Melaksanakan <i>side event</i> pada saat pelaksanaan liga olahraga (pameran UMKM) dan sejenisnya
	2026	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2026 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2026 • Provinsi Sumatera Utara			
	2027	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2027 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2027 • Provinsi Sumatera Utara			
	2028	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2028			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2028			
		• Provinsi Sumatera Utara			
	2029	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2029 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2029			
		• Provinsi Sumatera Utara			
	2030	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2030 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2030 Penguatan <i>Legacy</i> & Keberlanjutan Tahun 2030			
		• Provinsi Sumatera Utara			
7. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030	2025	Inisiasi konsolidasi melalui pertemuan koordinasi Tahun 2025	Dispora	Dinas pendidikan / Cabang Dinas Pendidikan (Edukasi dan Sosialisasi bagi Pelajar Difabel untuk dapat mendata dan membina atlet sesuai potensi dan minat siswa)	NPC Kabupaten/Kota dan Dispora Kabupaten/Kota memperkuat perekrutan dan pembinaan para atlet disabilitas pelajar di Kabupaten/Kota
	2026	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2026 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2026-2027			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		•Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2027	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2027 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2027-2028		Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	
		•Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2028	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2028 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2028-2029			
		•Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2029	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2029 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2029-2030			
		•Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2030	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2030 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2030 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			

PP 3. KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU

8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (<i>Sumut e-Health Integration system</i>)	2025	Penyusunan Kajian dan Bisnis Proses <i>Platform e-Health Integration System</i> Tahun 2025 Pembangunan Aplikasi Tahun 2025 <i>Launching</i> Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2025 •33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo (Penyediaan Web, Server dan Publikasi Kegiatan)	-Penyediaan data kepesertaan JKN Kabupaten/Kota -Sosialisasi dan edukasi <i>platform</i> kepada faskes tingkat Kabupaten/Kota
	2026	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			
	2027	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2027 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		33 Kabupaten/Kota			
	2028	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2028 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029			
		33 Kabupaten/Kota			
	2029	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2029 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029			
		33 Kabupaten/Kota			
	2030	-			
9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)	2025	Tidak ada	Dinas Kesehatan	Badan Kepegawaian (Pelaksanaan assesmen kompetensi dokter spesialis sesuai kebutuhan, Pembinaan Monitoring kepada Badan Kepegawaian kab/kota agar Dokter Spesialis	-Menyediakan data dokter umum yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa dokter spesialis dan Mengidentifikasi jenis dan jumlah spesialis yang dibutuhkan di RSUD atau faskes daerah
	2026	- Pemenuhan Dokter Spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM - Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan Medis Merata) Tahun 2025-2030			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		<ul style="list-style-type: none"> •Sisa Pemenuhan 4 Dokter Spesialis Dasar + 3 Penunjang (4 RSUD di 4 Kabupaten) DTPK Kepulauan Nias RSUD Pratama Lologolu Soguna Bazato (3 Orang) Nias Barat, Pemenuhan 4 Dokter Spesialis Dasar + 3 Penunjang (4 RSUD di 4 Kabupaten), RSUD Lausimomo UPT Dinkes Kabupaten Mandailing Natal, RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, RSUD Pintu Padang Kabupaten Tapanuli Selatan, RSUD Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, RSUD Padangsidimpuan Kota Padangsidimpuan. Lanjutan Sasaran 2025 : 21 Peserta 		<p>yang sudah dididik tidak berpindah tempat kerja) Biro Pemotda (Fasilitasi Penyusunan Dokumen kerja sama dengan USU dan UGM) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan surat komitmen bersama dengan para Bupati/Wali Kota yang menyatakan bahwa peserta dokter spesialis akan kembali ke daerah asal dan RSUD setempat - Menentukan jenis spesialis yang paling dibutuhkan - Kesiapan Sarana dan Prasarana RSUD - Surat Penugasan & Dukungan Legal Formal - penyediaan Akomodasi dokter residen
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM - Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan Medis Merata) Tahun 2025-2030 			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		•Kabupaten/Kota yang terintervensi pada tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029			
10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	2025	Tidak ada	Dinas Kesehatan	PUPR (Manajamen Konstruksi, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Penyediaan Lahan dan Dokumen Legalitas - Menyediakan tenaga non-medis, mendukung rekrutmen tenaga kesehatan, dan pemeliharaan fasilitas Koordinasi Lintas Pemerintahan
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
2030	Tidak ada				
PP4 PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN					
11. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO).	2025	Tidak ada	Dinas Sosial	Disperindag dan Dinas Koperasi UMKM (Dukungan Pelatihan dan Pendampingan bagi sasaran kegiatan Mapro yaitu KUBe dan UEP, fasilitasi keikutsertaan Kelompok Usaha Bersama/Usaha	Dukungan peninjauan calon penerima bantuan agar tepat sasaran. Dukungan koordinasi penyiapan kegiatan pelatihan bagi calon penerima bantuan di kab/kota. Replikasi kegiatan serupa di kab/kota
	2026	Tidak ada			
	2027	Penyaluran bantuan modal usaha dan Pelatihan keterampilan/pengembangan usaha Program Masyarakat Produktif Tahun 2026-2029 - Pendampingan dan monitoring serta Evaluasi lapangan Tahun 2026-2029			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		<ul style="list-style-type: none"> •Sebanyak 550KK (110 KUBE) di 5 (Lima) Kabupaten/Kota: Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Labuhanbatu Utara, Toba, Simalungun serta 400 KK (UEP) di 5 Kabupaten/Kota: Binjai, Padang Lawas, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Dairi 		Ekonomi Produktif Mapro dalam pameran/ <i>expo</i> yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	masing-masing.
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	2025	Tidak ada	DISPERINDAG ESDM	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas TPH : Data pangan strategis dan penyediaan stok • Dinas Perhubungan : Transportasi logistik • Dinas Sosial : Data P3KE <i>by name by address</i> (untuk menentukan titik PMB dilakukan) • Dinas Koperasi & UMKM : Pelibatan UMKM dan Koperasi dalam penyediaan stok 	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan (Tahun 2025-2030): 1. Pendataan kecamatan dan jumlah penduduk miskin dan rawan miskin;
	2026	<p>Konsolidasi kelembagaan, integrasi sistem informasi daerah; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB)</p> <p>Lokasi: Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Tapanuli Utara (akses terbatas), Nias Barat (isolasi logistik), Humbahas (wilayah dataran tinggi), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Dairi (wilayah perbatasan), Kab. Batu Bara (wilayah pesisir), Toba (hinterland), Samosir (wilayah tertutup), Labuhanbatu Selatan (kemiskinan tinggi), Nias</p>			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		Selatan (akses sulit), Padang Lawas (rawan logistik), Padang Lawas Utara (wilayah sulit distribusi), Tapanuli Tengah (akses dan harga tinggi), Langkat (distribusi padat dan IHK)			
	2027	<p>Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 Kabupaten/Kota <p>Lokasi; Karo (rawan inflasi sayur), Deli Serdang (kontributor IHK), Mandailing Natal (kemiskinan ekstrem), Humbahas (akses distribusi sulit), Tapanuli Tengah (harga fluktuatif), Toba (wilayah pegunungan), Nias Barat (daerah pulau terluar), Padang Lawas (akses distribusi), Nias Utara (rawan kemiskinan), Nias Selatan (akses logistik laut), Langkat (wilayah Pantai Timur), Samosir (pulau tengah danau), Serdang Bedagai (penyangga distribusi), Tapanuli Selatan (akses transportasi terbatas), Simalungun (wilayah padat penduduk)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Biro Perekonomian : pelibatan TPID untuk menghitung dampak terhadap pengendalian inflasi • Dinas Kominfo : Publikasi Pelaksanaan • Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat : Pengawasan Pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pendataan jumlah KUMKM penyedia Bahan Kebutuhan Pokok; 3. Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok; 4. kerja sama antar kabupaten dalam penyediaan Bahan Kebutuhan Pokok 5. Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan; 6. Monitoring dan evaluasi
	2028	Tidak ada			
	2029	<p>Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 Kabupaten/Kota 			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		Tebing Tinggi (kota IHK baru), Binjai (urban miskin), Toba (wilayah distribusi luas), Langkat (wilayah perbatasan), Samosir (akses logistik air), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Humbang Hasundutan (wilayah dataran tinggi), Tapanuli Tengah (harga fluktuatif), Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Padang Lawas (akses distribusi sulit), Deli Serdang (wilayah IHK), Karo (rawan inflasi hortikultura), Nias Selatan (logistik laut), Simalungun (distribusi lintas kabupaten), Asahan (wilayah urban pertanian)			
	2030	Tidak ada			
13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan dan verifikasi 2. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (Pekerja rentan yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar) sebanyak 21.000 (APBD dan DBH Sawit) 3. Penguatan peran dan komitmen kabupaten/kota dalam pembiayaan dan regulasi (MoU Pemprov dengan Kabupaten dan Kota) -33 Kabupaten/Kota di Provinsi	DISNAKER	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Dinas Sosial berperan dalam memberikan data dukung DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan penerima termasuk dalam kategori penerima bantuan. 	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Mendukung pelaksanaan agar bisa

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2)			mencapai target <i>Universal Coverage Jamsostek (UCJ)</i> sebesar 60% sesuai RPJMD 2025-2029
	2026	Perluasan kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan dan Validasi Calon Penerima, Mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran BPJS. 	2. Memberikan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga kerja rentan dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan
	2027	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.646 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 	3. Pengalokasian DBH sawit dan APBD dengan persentase pembagian 80 persen kab/kota dan 20 persen provinsi utk perlindungan pekerja rentan miskin ekstrem desil 1 dan 2
	2028	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.647 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan Verifikasi Data Identitas • Menyediakan data kependudukan yang valid (NIK, KK, KTP) sebagai prasyarat utama pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan. 	
	2029	Pembayaran kepesertaan pekerja			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			
	2030	1. Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota 2. Evaluasi menyeluruh dan pencapaian target cakupan 60% UCJ -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara			<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan sistem BPJS, DTKS (Dinas Sosial), dan lembaga lain untuk memastikan data pekerja rentan terverifikasi secara administratif. • Dukungan Pemutakhiran Data DTKS, Bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data identitas dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan iuran BPJS. • Membantu mempercepat proses registrasi atau koreksi data

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
					<p>calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan berperan menyelenggarakan perlindungan sosial bagi pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Perlindungan atas risiko kecelakaan selama bekerja. • Jaminan Kematian (JKm): Santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal. • Jaminan Hari Tua (JHT): Tabungan jangka panjang bagi pekerja saat

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				<ul style="list-style-type: none"> pensiun. • Jaminan Pensiun (JP): Penghasilan berkala untuk pekerja setelah pensiun. • Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Bantuan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK. • Kominfo: Publikasi Kegiatan 	
14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	2025	Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi		PUPR (Dokumen <i>appraisal</i> , pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk revitalisasi panti sosial)	- kab/kota mendukung pelaksanaan pelatihan bimbingan mental, dan pendidikan paket A/B/C bagi penerima manfaat yang dirujuk dari panti sosial provinsi khususnya panti anak dan remaja - Kabupaten/Kota bersama Provinsi melakukan
	2026	Penyusunan dokumen <i>appraisal</i> /penilaian kerusakan bekerja sama dengan Dinas PUPR Penyusunan dokumen perencanaan (jasa konsultan perencanaan) untuk 13 panti sosial Bimbingan keterampilan dasar bagi		Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, Disnaker (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan Kerja	

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi		bagi sasaran Penghuni Panti) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	pemantauan, evaluasi atas keberlanjutan penerima manfaat.
	2027	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (4 unit) 1.PSAR Anak Tanjung Morawa (Kabupaten Deli Serdang) 2.PS Lansia Kisaran (Kabupaten Asahan) 3.PS Gepeng Binjai (Kota Binjai) 4.PS Lansia TRW Pematangsiantar (Kota Pematangsiantar) Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2028	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (4 unit) 1.PS Tuna Susila & Tuna Laras Berastagi (Kabupaten Karo) 2.PS Padangsidimpuan (Kota Padangsidimpuan) 3.PS Siborong-borong (Kabupaten Tapanuli Utara) 4.PS Tebing Tinggi (Kota Tebing Tinggi)			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2029	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (5 unit) 1.PS Anak Sidikalang-Kabanjahe (Kabupaten Dairi & Kabupaten Karo) 2.PS Lausimomo-Hutasalem (Kab.Karo & Kabupaten Toba) 3.PS Anak Gunungsitoli (Kota Gunungsitoli) 4.PS Eks Kusta Belidahan-Sicanang (Kota Medan) 5.PS Pinangsori (Kabupaten Tapanuli Tengah) Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2030	Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			

PP 5 Penguatan Stabilitas Makro Ekonomi dan KESINAMBUNGAN Fiskal Daerah

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
15. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian dan pariwisata	2025	KEK Pariwisata : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba Tidak ada	DISBUDPAREKRAF DAN DINAS KETAPANG TPH	<ul style="list-style-type: none"> Bappelitbang : Menyelaraskan rencana pengajuan KEK Pariwisata dan Pertanian dengan RPJMD, RTRW, RPJPD, dan RIPPARNAS/RIPPAR DA , Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup : Kajian AMDAL dan pengelolaan lingkungan Dinas Ketenagakerjaan : Peningkatan <i>Capacity Building</i> Pariwisata dan Pertanian Dinas Pendidikan : Penguatan Vokasi SMK Pariwisata dan Pertanian 	2025: 'Dukungan kab/kota untuk Pengembangan KEK Pariwisata Koordinasi terkait rencana pengajuan DPSP Danau Toba menjadi KEK 2026: '• Persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba dan Penetapan Lokasi • Penetapan Pebup RTRW; Kesesuaian Dokumen RTRW dan RDTR 2027: '• Penyediaan Lahan (Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KEK dalam hal terdapat lahan yang belum dibebaskan) • Peningkatan infrastruktur kewenangan kabupaten (jalan, air,
	2026	Tidak ada			
	2027	KEK Pertanian • Identifikasi lokasi dan Penlok (Humbang Hasundutan dan Kabupaten potensial lainnya) Tidak ada			
		KEK Pariwisata : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba Tidak ada			
	2028	KEK Pertanian • Identifikasi lokasi dan Penlok (Humbang Hasundutan dan Kabupaten potensial lainnya) Tidak ada			
		KEK Pariwisata : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba Tidak ada			
	2029	KEK Pertanian • Identifikasi lokasi dan Penlok (Humbang Hasundutan dan Kabupaten potensial lainnya) Tidak ada			
		KEK Pariwisata : Kawasan Strategis			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		Pariwisata Nasional Danau Toba Tidak ada			sarana persampahan, sanitasi)
	2030	KEK Pertanian • Identifikasi lokasi dan Pentlok (Humbang Hasundutan dan Kabupaten potensial lainnya) Tidak ada		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR : Percepatan Perda RTRW Perubahan, sinkronisasi lokasi KEK pada RTRW • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan • Biro Hukum : Penetapan Regulasi Perda/Pergub • DPMPTSP : fasilitasi perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota 2028: '• Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian '• Penyediaan Lahan '• Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota 2029: '• Peningkatan SDM Pariwisata '• Penyediaan Lahan '• Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota • Promosi Investasi 2030: '• Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian '• Penyediaan Lahan
		KEK Pariwisata : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba Tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
					<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota • Promosi Investasi
16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	2025	Tidak ada	DISPERINDAG ESDM	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas TPH : Peningkatan Produksi Cabe melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Cabai varietas tahan hama & cocok untuk pengeringan, <i>capacity building</i> bagi petani • Dinas Perkebunan dan Peternakan : Peningkatan Produksi Kelapa, Aren dan Kopi melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Kelapa genjah, Kopi Unggu, Aren, <i>capacity building</i> bagi petani 	Dukungan Kabupaten/Kota: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan Data IKM sektor Kopi, Kelapa, Aren, Cabe (jenis produk, data produksi, nilai omset produksi)
	2026	Tidak ada			Peningkatan <i>capacity building</i> pada IKM (kelapa, cabe, kopi, aren); menyusun regulasi pengembangan hilirisasi,
	2027	Tidak ada			Penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota. Pemasaran, dukungan promosi, <i>capacity buliding</i> diversifikasi produk

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
	2028	Tidak ada		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR : Penguatan Inftratraktur Jalan dan Jembatan • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan 	<p>hilirisasi , Penyediaan Rumah kemas oleh kab/kota</p> <p>Menentukan IKM yang akan dilakukan <i>capacity building</i>, menyusun regulasi pengembangan hilirisasi, penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota, peningkatan akses pembiayaan melalui KUR atau Koperasi, fasilitasi <i>capacity building</i> standarisasi ekspor bagi pelaku IKM.</p>
	2029	Tidak ada			Dukungan pembiayaan KUR , identifikasi IKM berpotensi untuk dilakukan <i>business matching</i> .
	2030	Tidak ada			<i>Branding</i> Ekspor
17. BUMD Reform Program (Penguatan Peran BUMD sebagai Motor Ekonomi)	2025	Tidak ada	-	Bappelitbang:	-
	2026	Tidak ada		Penyusunan konsep dan perencanaan	
	2027	Tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi	2025	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi Barang Milik Daerah yang belum optimal, serta potensi pemanfaatan • Penyusunan skema/proses bisnis pemanfaatan aset BMD • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Proses digitalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah 	BKAD	kesehatan BUMD, GCG Biro Hukum : percepatan fasilitasi regulasi Biro Pemerintahan Otda : Fasilitasi Kerja sama Diskominfo : Publikasi Kegiatan Inspektorat : Audit BUMD	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pengamanan BMD dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan) dari Pemerintah Setempat (Kelurahan atau Kepala Desa)
	2026	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Penyusunan Regulasi penggunaan 		Bapenda Provsu : Dukungan dalam proses bisnis pendapatan melalui pemafaatan aset BMD dengan kerja sama ekonomi Bappelitbang Provsu : Dukungan dalam penyusunan konsep dan perencanaan Diskominfo : Dukungan dalam penyediaan web aplikasi dan promosi	

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		<p>web aplikasi pemanfaatan Barang Milik Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM penilai barang 			<p>OPD Pengguna BMD : Dukungan dalam inventarisir dan pengamanan aset serta pemeliharaan BMD</p>
	2027	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Pengembangan skema pemanfaatan Barang Milik Daerah • Pengembangan sistem informasi atau promosi 			
	2028	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil inventarisasi • Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan <i>platform</i> lain 			
	2029	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) 			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil inventarisasi • Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan <i>platform</i> lain (kerja sama dengan 1 <i>platform</i>) • Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah produktif berkelanjutan 			
	2030	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil inventarisasi • Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui kerja sama ekonomi berkelanjutan 			

PP.6 PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU

19. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren)	2025	Tidak ada	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara:	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi dalam rangka hilirisasi hasil Perkebunan kelapa seperti alat untuk menjadikan air kelapa menjadi minyak kelapa/VCO, dan *coconut milk*, kemudian biji kopi menjadi kopi bubuk dan kopi ekstrak, kemudian aren menjadi gula aren dan bioetanol

2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: pembentukan dan pelatihan UMKM

Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:

1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi
2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				bagi kelompok pekebun dan alat pengolah hasil produksi kelapa, kopi dan aren; 3. Dinas PMD Dukcapil: untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan 4. Diskominfo: untuk publikasi media	
20. Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya	2025	Tidak ada	DISKANLA	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan. • Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudida 	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan kelompok nelayan dan
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				<ul style="list-style-type: none"> ya. • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – Pembangunan infrastruktur pendukung (jalan dan pelabuhan). • Dinas Kominfo: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> pembudidaya kab/kota - Klasterisasi - Sosialisasi dan Edukasi -Replikasi di daerah yang sama
21. Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)	2025	Tidak ada	DISKANLA	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPELITBANG : Integrasi program SEMESTA dalam perencanaan daerah. • Dinas Lingkungan Hidup Provsu : Kebijakan dan pemantauan kualitas lingkungan laut. • Dinas Perhubungan Provsu : Dukungan transportasi laut dan keselamatan pelayaran patroli. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan Nelayan kab/kota - Klasterisasi - Sosialisasi dan Edukasi
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				<ul style="list-style-type: none"> • Satpol PP Provsu : Penegakan perda terkait konservasi laut. • Dinas Pariwisata Provsu : Sinergi dengan wisata bahari berkelanjutan. • Dinas Kominfo Provsu : Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat. • Dinas Koperasi & UKM Provsu : Penguatan kelembagaan nelayan pengawas. • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu : Kesiapsiagaan dan tanggap darurat di laut. • Inspektorat: Pengawasan dan pendampingan 	

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
					jalannya program
22. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir berbasis Masyarakat	2025	Tidak ada	DLHK	1. Dinas Kominfo - Media massa - Publikasi kegiatan 2. Kementerian Kehutanan - Penyediaan Regulasi - Koordinasi program-program	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui DLHK dengan dukungan <i>Stakeholder</i> terkait diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Kehutanan, Kelompok Masyarakat Pesisir dan LSM/NGO/pemerhati Lingkungan. Adapun dukungan kabupaten/kota pada kegiatan ini diantaranya: 1. Kolaborasi <i>Multistakeholder</i> dalam kegiatan 2. Pemberdayaan Masyarakat: Program rehabilitasi yang sukses tidak hanya tentang menanam pohon, tapi juga
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
2030	Tidak ada				

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
					tentang memberdayakan masyarakat. 3. Membantu dalam proses pengadaan lahan dan memastikan status hukum lahan tersebut jelas 4. Pemerintah kabupaten melakukan pemantauan dan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan mangrove berjalan baik dan program mencapai tujuannya.
23. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)	2025	Tidak ada	DISPERINDAG ESDM	TPH : Pembinaan Kelompok Petani dalam penggunaan PLTS . • Bappelitbang : Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota
	2026	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		- Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara			berperan dalam menyiapkan untuk Tahun 2025-2030:
	2027	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara		<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat : Pengawasan Pelaksanaan • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Kelompok Tani (CPCL) 2. data penentuan lokasi 3. pengadaan lahan 4. Data produksi pertanian; kondisi air 5. Data <i>readiness criteria</i>
	2028	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara			
	2029	Evaluasi lokasi baru berdasarkan			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara			
	2030	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara			

PP 7 KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL

24. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan	2025	Tidak ada	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung	1. Dinas Pekerjaan Umum dan	• Memfasilitasi penyediaan benih
	2026	Tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah	2027	Tidak ada	jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan TPH	Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran krusial dalam pembangunan infrastruktur dasar pendukung pertanian. Ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta infrastruktur penunjang lainnya yang memperlancar distribusi hasil panen dan aksesibilitas kawasan pertanian. Penataan ruang juga menjadi fokus penting untuk memastikan kawasan pertanian unggulan tidak terganggu oleh alih fungsi lahan.	<ul style="list-style-type: none"> unggul, pupuk, dan alat pertanian dasar. • Mendorong sinergi antar pemangku kepentingan lokal (petani, penyuluh, BUMDes). • Memfasilitasi pembangunan/peningkatan akses jalan produksi di kawasan unggulan. • Mendukung pembangunan fasilitas pascapanen: gudang, alat pengering, rumah sortasi. • Mengkoordinasikan petani/UMKM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi ekspor dan standar internasional. • Memberikan laporan lengkap atas capaian program, kendala, dan peluang lanjutan. Replikasi di daerah yang sama
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) turut berperan dalam mendorong hilirisasi produk pertanian melalui pengembangan industri pengolahan hasil tani, seperti pengeringan, pengemasan, dan pengolahan lanjutan produk padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Di sisi perdagangan, dinas ini memastikan akses pasar yang lebih luas dan stabil melalui promosi, fasilitasi perdagangan, dan penguatan sistem rantai pasok. Adanya kegiatan Gerakan pangan Murah membuat Dinas Perindustrian,	

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat berkolaborasi dengan Dinas ketahanan Pangan dan TPH dalam menjalankan kegiatan ini	
				3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) memegang peranan sebagai koordinator perencanaan strategis lintas sektor. Bappelitbang merumuskan arah kebijakan, menyusun rencana aksi, serta memastikan sinergi antar-dinas dalam pengembangan kawasan unggulan.	
				4) Diskominfo	

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung (Publikasi)	
25. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan	2025	Penyusunan regulasi teknis, Tim Pelaksana, Kajian awal pada semester II	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: Memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi 2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: Koordinasi pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok peternak 3. Dinas PMD Dukcapil: Untuk pembentukan dan pemberdayaan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi 2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan 3. Pemberian izin usaha untuk koperasi, UMKM, BUMDes yang mengolah hasil produksi berada di
	2026	Tidak ada			
	2027	- Verifikasi CPCL dan sosialisasi awal kepada kelompok peternak di lokasi intervensi pengembangan kawasan yang dilaksanakan mulai bulan april - Pembinaan dan pengawasan serta penguatan kelembagaan peternak yang dilakukan mulai bulan Juli untuk melihat perkembangan kawasan perkebunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2026 - Pemberian 100 ekor sapi potong kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kabupaten Karo, 30 ekor kerbau kepada 3 kelompok tani/ peternak Kabupaten Padang Lawas, 200 ekor domba kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kabupaten Batubara, dan 4000 ekor itik kepada 4 kelompok tani/ peternak di Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan pada bulan September			
	2028	Tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
26. Program Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	2025	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH	PT. Dirga Surya :	Dinas Pertanian Kabupaten
	2026	Tidak ada	Provinsi berperan sebagai inisiator utama program.	memasarkan produksi bibit unggul padi	mempromosikan dan menggunakan bibit unggul padi varietas baru.
	2027	Tidak ada	Mereka bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, penyediaan alokasi anggaran, serta koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.		
	2028	Peningkatan kapasitas penangkar & perluasan lahan produksi benih - Monitoring dan Evaluasi - Promosi varietas baru (ekspos, lomba hasil panen) - Integrasi pemasaran gabah & beras varietas unggul Pendistribusian benih unggul ke daerah lainnya (Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Mandailing Natal)	Dalam implementasinya, mereka juga menetapkan lokasi uji multilokasi dan		

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
	2029	Tidak ada	mendukung		
	2030	Pengembangan produksi benih unggul dan pemasaran di kab/kota sentra provinsi Sumatera Utara dan di Kepulauan Sumatera	pelepasan varietas secara resmi		
27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	2025	Fokus pada persiapan program, pembentukan Tim Pokja FPPS di provinsi dan kabupaten/kota, rekrutmen dan pelatihan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS), pemutakhiran data kelompok tani, koordinasi dengan lembaga keuangan, dan sosialisasi program. • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani dengan lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, serta lembaga penjaminan kredit. Melalui penyediaan data kelompok tani, pelatihan manajemen usaha tani, serta pembentukan kelembagaan petani yang kuat, dinas membantu petani memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar layak mengakses program	a) Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sentral dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembinaan koperasi tani dan UMKM berbasis pertanian. Dinas ini dapat memfasilitasi akses permodalan bagi kelompok tani melalui penguatan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen usaha tani, hingga menjembatani kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan. b) Disperindag	Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan, berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta rekam jejak kelembagaan kelompok
	2026	Mulai pelaksanaan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta monitoring awal terhadap usaha penerima kredit. • 33 Kabupaten/Kota			
	2027	Memperluas cakupan penerima pembiayaan, memperkuat kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan swasta, serta memberikan pelatihan lanjutan kepada FPPS terkait negosiasi bisnis dan pemasaran.			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		<ul style="list-style-type: none"> • 33 Kabupaten/Kota 			
	2028	<p>Mengintegrasikan pemasaran digital dan <i>e-commerce</i>, mengembangkan sistem informasi pembiayaan pertanian berbasis aplikasi, serta melatih FPPS dan kelompok tani dalam penggunaannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • 33 Kabupaten/Kota 	Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan pertanian lainnya.	ESDM berkontribusi dalam mendorong hilirisasi produk pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil tani. Melalui penguatan rantai nilai dan pasar hasil tani, dinas ini dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi petani yang dapat digunakan sebagai modal atau premi asuransi.	
	2029	<p>Melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui koperasi, CSR, dan investor. Mengembangkan usaha hilir di bidang pascapanen dan olahan, memberikan pelatihan manajemen usaha hilir, serta mendorong pemasaran produk hilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 33 Kabupaten/Kota 		<p>c) Dinas Kominfo memainkan peran dalam penyebaran informasi terkait program bantuan iuran premi asuransi dan akses permodalan. Melalui berbagai saluran komunikasi digital dan non-</p>	
	2030	<p>Melaksanakan kajian dampak ekonomi program, menyusun model pendampingan berkelanjutan, dan melatih FPPS menjadi konsultan atau koperasi tani.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 33 Kabupaten/Kota 			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				digital, Kominfo dapat menjamin transparansi program, meningkatkan literasi digital kelompok tani, dan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan permodalan dan asuransi pertanian.	
				e) Dinas Pendesdukcapil memiliki peran strategis dalam verifikasi dan validasi data kependudukan serta kelembagaan desa sebagai basis penyaluran bantuan. Melalui data kependudukan dan basis kelompok tani di desa, Pendesdukcapil memastikan agar	

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				bantuan permodalan maupun iuran premi asuransi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani.	
				f) Diskominfo (Publikasi)	
PP 8 PARIWISATA YANG MENGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)					
28. Dukungan terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	2025	Tidak ada	DISBUDPAREKRAF	KOMINFO : Publikasi Media	1. Memastikan keselarasan Program/Kegiatan dalam Rencana Aksi Tahap II telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan di daerah (RPJMD Kab & RKPD Kab) dan Integrasi RIPDN kedalam renja OPD
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
				DISBUDPAREKRAF : Penguatan Atraksi Budaya dan Pariwisata; Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif; Promosi dan Pemasaran Destinasi; Pengembangan Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata;	2. Menyusun rencana aksi tahunan 3. Memastikan ketersediaan anggaran

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				Kolaborasi dan Sinkronisasi Program; Penguatan Tata Kelola Destinasi;	dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba 4. Penyediaan Lahan yang <i>Clean & Clear</i> (jika terdapat pembangunan fisik)
			PERAN BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) : Koordinasi Pengelolaan Kawasan Pariwisata Strategis; Pengembangan infrastruktur dan Investasi; Promosi dan Branding Kawasan; Pengembangan SDM dan Ekosistem Wisata	PERAN BAPPELITBANG (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah) : Integrasi	5. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 6. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 7. Pendampingan Desa Wisata; 8. Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; 9. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (<i>Homestay/Hotel</i>), Penyedia Jasa Transportasi, Penyeda

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				Perencanaan Pengembangan DPP Danau Toba; Sinkronisasi Program Daerah dengan Nasional; Litbang & Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata; Dukungan Kebijakan Inovatif & Kolaboratif	Jasa <i>Travel Agent</i>); 10. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata 11. Pelaksanaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berskala Nasional
				Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/159/KTPS/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja P3TB Provinsi Sumatera Utara, seluruh Opd Pemprovsu yg termasuk dalam SK Gubsu tersebut berperan dalam	

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba sesuai dengan Rencana Aksi yang disusun	
29. Pengelolaan dan Penataan Kawasan Toba Caldera UGGp dan Kawasan Geopark lainnya	2025	Tidak ada	DISBUDPAREKRAF	1. DISBUDPAREKRAF : Penyaluran Belanja Operasional BP TCUGGp; Pembangunan <i>Visibilities</i> di <i>Geosite</i> ; Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Pariwisata dan Pengelola Desa Wisata; Identifikasi dan Penetapan <i>Cultural Heritage</i> di Kawasan <i>Geopark</i> ; Melaksanakan <i>Event Geofest</i> . 2. DINAS Koperasi &UMK: Melakukan Pelatihan & Pembinaan UMKM terutama di Kawasan <i>Geosite</i> ;	1. Memastikan ketersediaan dukungan anggaran dalam pengelolaan <i>Geosite</i> di masing-masing Kabupaten; 2. Penyusunan muatan Lokal; 3. Bekerja sama dengan BP dalam melaksanakan sosialisasi & edukasi kepada Masyarakat, Pelaku Wisata, Pelajar dan ASN tentang <i>Geopark</i> ; 4. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM terutama dalam pengembangan Geoproduk; 5. Mengidentifikasi dan
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				3. Dinas Pendidikan: Melaksanakan kegiatan <i>Geopark to School</i> dan edukasi terkait Geopark kepada pelajar; 4. Dinas PUPR : Peningkatan kualitas jalan/jembatan di ruas jalan Provinsi yang menghubungkan antar <i>geosite</i> ; 5. Bappeda: Melaksanakan penelitian terkait <i>Geological Heritage/Natural/Biological Heritage/Cultural Heritage</i> di Kawasan Toba Caldera UGGp maupun di Kawasan <i>Geopark</i> yang baru; 6. BPBD : Mitigasi Bencana & Sosialisasi; 7. Dinas LHK :	menginventarisasi serta melakukan penelitian terkait potensi <i>Geological Heritage, Biological/Natural Heritage</i> dan <i>Cultural Heritage</i> ; 6. Rutin melaksanakan <i>Event GeoFest</i> ; 7. Menyusun kajian awal terkait Kawasan <i>Geopark</i> baru; 8. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 9. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 10. Pendampingan Desa Wisata; 11. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (<i>Homestay/Hotel</i>), Penyedia Jasa

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
					Transportasi, Penyedia Jasa <i>Travel Agent</i>); 12. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata
30. Pembentukan & Pengembangan Kawasan Strategis Budaya, Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi yang Terintegrasi (TATABUSE, SIBANDAN, SIPUAN, KARDAPAK dan BAHLIKE)	2025	Tidak ada	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. 2. Dinas PUPR: Pembangunan Kawasan (jika ada pembangunan fisik); Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. 3. Dinas PMD : Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDES Wisata 4. Dinas Kominfo : Penyediaan Fasilitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, sementara kabupaten/kota berperan dalam: 1. Memastikan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis; 2. Penyediaan Lahan yang <i>Clean & Clear</i> (jika terdapat pembangunan fisik); 3. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 4. Pembentukan Tata
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
2030	Tidak ada				

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
					Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 5. Pendampingan Desa Wisata; 6. Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; 7. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (<i>Homestay/Hotel</i>), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa <i>Travel Agent</i>)); 8. Pendampingan Pelaku Usaha pariwisata; 9. Pendataan dan inventarisasi pelaku UMKM; 10. Pendampingan kepada pelaku UMKM; 11. Pelaksanaan Event Budaya, Pariwisata dan

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
					Ekonomi Keratif berskala Nasional
31. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Sumatera Utara	2025	Tidak ada	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. 2. Dinas PUPR: Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. 3. Dinas PMD: Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDes Wisata 4. Dinas Kominfo: Penyediaan Fasilitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan 5. Dinas Pendidikan: Edukasi kepada pelajar tentang Situs Cagar Budaya	1. Memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi; 2. Penyediaan Lahan yang <i>Clean & Clear</i> (jika terdapat pembangunan fisik); 3. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Tingkat kab/kota; 4. Pembentukan Pengelola Kawasan Situs Cagar Budaya; 5. Melaksanakan Program edukasi kepada masyarakat dan pelajar tentang Kawasan Situs Cagar Budaya; 6. Pendataan, Inventarisasi, Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di kab/kota
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
					7. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 8. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 9. Pendampingan Desa Wisata; 10. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (<i>Homestay/Hotel</i>), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa <i>Travel Agent</i>)); 11. Pendampingan Pelaku Usaha pariwisata; 12. Pendataan dan Pendampingan UMKM; 13. Pelaksanaan <i>Event</i> Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional
32. Pelaksanaan Event	2025	Tidak ada	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas	1. Pelaksanaan Side

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
Internasional, pengembangan paket wisata dan digitalisasi promosi pariwisata global	2026	Tidak ada		Perhubungan:	Event saat pelaksanaan Event Internasional;
	2027	Tidak ada		Memastikan ketersediaan transportasi dan	2. Pelaksanaan Promosi melalui media digital dan cetak;
	2028	Tidak ada		lalu lintas saat <i>event</i> internasional dilaksanakan	3. Sosialisasi & Edukasi kepada Pelaku Usaha Pariwisata (Penyedia Jasa Akomodasi (Hotel & <i>Homestay</i>), Penyedia Jasa makan-minum, Penyedia Jasa Transportasi, dan <i>Travel Agent</i>);
	2029	Tidak ada		2. Dinas Kesehatan: Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans	4. Pendataan & pendampingan terhadap UMKM;
	2030	Tidak ada		3. Dinas Koperasi &UMKM: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksanaan <i>event</i> internasional	5. Memastikan kelancaran aksesibilitas terutama saat pelaksanaan <i>Event</i> internasional (Pengaturan lalu lintas; Peningkatan kualitas jalan)
				4. Dinas Kominfo: Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra event-event-pasca event internasional; publikasi kegiatan	
				5. Satpol PP: Keamanan Pelaksanaan <i>Event</i>	

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
					dan ketertiban penyelenggaraan acara 6. Dinas Pemuda dan Olahraga; Pembinaan Pemuda untuk partisipasi dalam penyelenggaraan event (sport, e-sport, dsb)
PP 9 EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI					
33. Sentra industri kreatif di Kawasan Sport Center Sumatera Utara	2025	Tidak ada	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas PUPR: Pembangunan Sentra Industri Kreatif 2. Biro Perekonomian : Menyusun Kajian pembentukan BLUD; Pembentukan BLUD pengelola Sentra Industri Kreatif. 3. Dinas PerindagESDM: Pendataan, Pelatihan &	1. Pendataan Pelaku Industri Kreatif & Data UMKM Potensial; 2. Kurasi Pelaku Ekonomi Kreatif; 3. Fasiitasi HAKI bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; 4. Pelaksanaan Event Ekonomi Kreatif secara rutin di Sentra Industri Kreatif; 5. Promosi terkait Sentra Industri Kreatif melalui media digital dan cetak;
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				Pembinaan IKM Kreatif. 4. Dinas Koperasi UMK: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan UMKM 5. Dinas Kominfo : Penyediaan Fasilitas Digital (Internet, dll) di Kawasan Sentra Industri Kreatif; Publikasi Kegiatan	
34. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif	2025	Evaluasi <i>Platform e-commerce</i> yang sudah ada (SIMITRA)	DISKOP UMKM	KOMINFO : Publikasi Media	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan UMKM binaan kab/kota - Kurasi Produk UMKM - Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam
	2026	Desain dan pengembangan platform <i>e-commerce</i> ; Kurasi awal 100 produk UMKM; Kemitraan dengan <i>platform</i> logistik & <i>payment gateway</i> . Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT		DISKOP UKM : Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	
	2027	<i>Onboarding</i> UMKM; Pelatihan dan fasilitasi <i>branding</i> , dan manajemen toko online. Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
	2028	Pengembangan <i>E-commerce</i> menjadi <i>Marketplace</i> ; Integrasi dengan katalog elektronik, Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT			Galeri - <i>Capacity Building</i>
	2029	Galeri Virtual 3D; Kampanye digital nasional & regional, Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT			
	2030	Kurasi produk ekspor; Promosi virtual di <i>event</i> internasional (<i>virtual expo, marketplace ASEAN</i>), Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> dan Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT			

PP 10 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

35. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	2025	1. Penyusunan SK Tim Forum Pemangku Kepentingan SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 2. Sosialisasi SK Tim forum dan <i>milestone</i> TPB SDGs 2025-2030 3. Updating target capaian SDGs	Bappelitbang	Seluruh Perangkat Daerah	1. Penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs kab/kota se-Sumut tahun 2025-2030
--	------	--	--------------	--------------------------	---

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		<p>tahun 2025 disesuaikan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029</p> <p>4. Penyusunan skema <i>Declaration and Registration System</i></p> <p>5. Pembangunan fitur aplikasi pendaftaran BRS SDGs</p> <p>6. Replikasi, instalasi dan <i>Capacity Building</i> Aplikasi E-Monev SDGs (Inovasi)</p> <p>7. Menyusun Draf Rancangan Awal RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030</p> <p>8. <i>Launching</i> dan Pelaksanaan BRS <i>pilot project</i> sekaligus penyerahan sertifikat kepada 15 UMKM</p> <p>9. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review (VLR)</i> Kabupaten/Kota</p> <p>10. Modifikasi Aplikasi E-Monev SDGs</p> <p>11. <i>Workshop E-Monev</i> dengan Bappeda/Bapperida/Bappelitbang Kabupaten/Kota</p> <p>12. Menyusun <i>draf Monev</i> capaian SDGs tahun 2025</p>			<p>2. Dukungan pelaksanaan skema BRS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs : identifikasi UMKM/IMK serta pelaku usaha</p> <p>3. Dukungan pelaksanaan <i>North Sumatera SDGs Action Awards</i></p> <p>4. Dukungan proses penginputan E- Monev Kabupaten/Kota</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs</p>
	2026	<p>1. Inovasi <i>Business Registration System Policy TPB/SDGs</i></p> <p>2. Diseminasi Skema BRS TPB/SDGs (Kolaborasi dengan Dinas Koperasi</p>			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		<p>dan UMKM pada acara FYP, BRS SDGs dijadikan kurikulum)</p> <p>3. Menyusun Laporan Monev TPB/SDGs Tahun 2025</p> <p>4. Finalisasi Draf RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 melalui desk per pilas TPB/SDGs</p> <p>5. <i>Launching</i> Aplikasi e-Monev</p> <p>6. Pelaksanaan skema <i>Declaration and Registration System BRS TPB/SDGs</i></p> <p>7. Diseminasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030</p> <p>8. Penyusunan Rancang Bangun aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI)</p> <p>9. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review (VLR)</i> Kabupaten/Kota</p> <p>10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2026</p> <p>11. Sosialisasi <i>North Sumatra SDGs Action Award 2027</i> (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)</p>			
	2027	<p>1. Pembangunan aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI)</p> <p>2. Menyusun Laporan Monev TPB/SDGs Tahun 2026</p> <p>3. Forum <i>Business Registration</i></p>			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		<p>System (BRS)</p> <p>4. <i>North Sumatra SDGs Action Award 2027</i> (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)</p> <p>5. <i>Desk</i> capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2026</p> <p>6. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review</i> (VLR) Kabupaten/Kota</p> <p>7. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2027</p> <p>8. Sosialisasi penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI)</p>			
	2028	<p>1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2027</p> <p>2. Finalisasi aplikasi e-Monev SDGs</p> <p>3. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI)</p> <p>4. <i>North Sumatra SDGs Action Award 2028</i></p> <p>5. <i>Launching</i> aplikasi e-Monev SDGs</p> <p>6. Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs</p> <p>7. <i>Desk</i> capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2027</p> <p>8. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary</i></p>			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		<i>Local Review (VLR)</i> Kabupaten/Kota			
		9. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2028			
	2029	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2028 2. Pelaksanaan Skema BRS 3. Finalisasi integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA 4. <i>Launching</i> integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA 5. Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs 6. <i>Desk</i> capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2028 7. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) 8. <i>North Sumatra SDGs Action Award 2029</i> 9. Pelaksanaan Skema BRS 10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2029			
	2030	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2029 2. <i>Desk</i> capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs tahun 2029			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		3. <i>North Sumatra SDGs Action Award 2030</i> 4. Menyusun Draf Laporan Monev RAD TPB/SGDs Tahun 2026-2030 5. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review (VLR)</i> Kabupaten/Kota 6. Menyusun laporan akhir kegiatan SDGs			
36. Kerja sama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis	2025	- Penyusunan MoU antara APIP dengan APH (Kejaksaan Tinggi, Kepolisian) - Pendampingan Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah	Inspektorat	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Perangkat Daerah yang memiliki Proyek Strategis	Inspektorat kab/kota : Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota
	2026	- Reviu Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara			
	2027	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
	2028	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2029	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2030	- Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			

PP 11. TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

37. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	2025	- Tindak lanjut MoU terkait kerja sama teknis dengan BPS dan Diskominfo dalam pembangunan aplikasi Satu Data (SADAINA Reborn) - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - <i>Launching SADAINA Reborn</i> di Konreg PDRB ISEI (BPS dan	Dinas Kominfo	Seluruh OPD menginput data statistik sektoral	Replikasi aplikasi, menyediakan SDM, menyiapkan regulasi terkait
--	------	--	---------------	---	--

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		Diskominfo) - <i>Updating</i> SK Tim Pelaksana SADAINA - Diseminasi aplikasi dan tupoksi tim SADAINA			
	2026	- Pemanfaatan SADAINA <i>Reborn</i> - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs			
	2027	- Pemanfaatan SADAINA <i>Reborn</i> - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Pemanfaatan SADAINA dan Data Geospasial - Pemanfaatan SMART SADAINA SDGs - Proses bisnis integrasi SADAINA <i>Reborn</i> dengan kab/kota			
	2028	- Pemanfaatan SADAINA <i>Reborn</i> - Proses input dan sinkronisasi data			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		statistik sektoral OPD - Forum Satu data tingkat Daerah - Pengembangan fitur SADAINA (API) - Peningkatan kapasitas user SADAINA <i>Reborn</i> - Pemanfaatan dan replikasi SADAINA <i>Reborn</i>			
	2029	- Pemanfaatan SADAINA <i>Reborn</i> - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu data tingkat Daerah - Menyediakan API (<i>Application Programming Interface</i>) - Peningkatan kapasitas user SADAINA <i>Reborn</i> - Pemanfaatan dan replikasi SADAINA <i>Reborn</i>			
	2030	- Menyediakan API (<i>Application Programming Interface</i>) - Pemanfaatan SADAINA <i>Reborn</i> - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu data tingkat Daerah - Monitoring dan Evaluasi			
PP 12. INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN, JEMBATAN, DAN IRIGASI YANG LANGSUNG BERPENGARUH PADA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL					
38. Pembangunan Ruas	2025	Tidak ada	Dinas PUPR	Dinas Kominfo,	1. Memberikan

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
Jalan Baru Penghubung Wilayah Terisolir atau Strategis yang Merupakan kewenangan Provinsi	2026	Tidak ada			dukungan administratif atas pembangunan jalan yang berada di wilayah kewenangannya, mendukung penyediaan lahan pada trase jalan serta perizinan 2. Menyelaraskan program jalan dengan perencanaan pembangunan daerah dan usulan prioritas lokal. 3. Melaksanakan koordinasi teknis lapangan dan penyedia data kondisi eksisting jalan serta kebutuhan daerah.
	2027	Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan prioritas pada ruas-ruas yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar Kabupaten/Kota •Total penanganan sepanjang 56,20 km difokuskan pada 9 ruas jalan provinsi yang saat ini belum tembus dan sebagian besar masih berupa jalan tanah. Ruas-ruas ini tersebar di wilayah Kab. Mandailing Natal, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Nias Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Samosir		untuk publikasi kegiatan, Dinas LHK mendukung proses penyusunan dokumen lingkungan, AMDAL dan izin pinjam pakai Hutan, Dinas Perhubungan untuk penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	
	2028	Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan prioritas pada ruas-ruas yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar Kabupaten/Kota			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		<ul style="list-style-type: none"> •Penanganan sepanjang 64,63 km akan difokuskan pada 6 ruas jalan provinsi yang belum tembus dan masih dalam kondisi tanah. Lokasi tersebar di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Samosir, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas 			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
39. Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar bagi Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil untuk Mewujudkan Keadilan Pembangunan	2025	Tidak ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan, AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi kegiatan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	1. Pemerintah Kabupaten/Kota: Menyediakan lahan, mengarahkan program RTLH (Air Minum dan Sanitasi), menetapkan penerima bantuan, dan mengalokasikan anggaran daerah. 2. Dinas Perumahan Rakyat kab/kota: Pelaksana utama di lapangan yang mengurus pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan,
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas	
			Utama	Pendukung		
					<p>monitoring, dan pelaporan.</p> <p>3. Dinas PUPR kab/kota: Memberikan dukungan teknis konstruksi, membuat RAB, dan mengawasi pelaksanaan di lapangan.</p> <p>4. Dinas Sosial kab/kota: Membantu memperbaiki dan memverifikasi data kemiskinan lokal.</p> <p>5. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada kab/kota: Melakukan identifikasi penerima bantuan, sosialisasi, memfasilitasi gotong royong, serta membantu pemantauan di lapangan.</p>	
PP13. PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING						
40. Dukungan Pengembangan Sistem	2025	Tidak ada		Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi	Dinas Perhubungan Kab/Kota Pelaksana
	2026	Tidak ada				

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
Angkutan Umum Massal Perkotaan Melalui Pembangunan BRT dan Peningkatan Kereta <i>Commuter</i>	2027	Tidak ada		Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Organisasi membentuk kelembagaan (BLUD) BRT Mebidang, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	operasional harian, koordinator lapangan. Kota Binjai: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT Kab. Deli Serdang: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
41. Subsidi Transportasi Bus Perintis untuk Daerah- Daerah Terpencil	2025	Tidak ada	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan	1. Koordinasi dan Penyediaan Data: Pemerintah kabupaten/kota berperan menyediakan
	2026	Tidak ada			
	2027	Pengadaan, Pembangunan halte dan fasilitas dasar, sosialisasi, pengadaan di 2 kabupaten: Halte. 8			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		unit beroperasi di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Padang Lawas Biaya Operasional 28 unit bus perintis di Kabupaten Deli Serdang (4 bus), Kabupaten Mandailing Natal (4 bus), Kabupaten Nias Barat (20 bus). Biaya Operasional 4 unit bus perintis di Kabupaten Pakpak Bharat (4 bus) dan Kabupaten Nias Selatan (4 bus)		Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	data dan kebutuhan daerah terkait angkutan perintis serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi agar subsidi dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi wilayah terpencil yang membutuhkan akses transportasi.
	2028	Pengadaan armada di 2 Kabupaten, sosialisasi kepada masyarakat (pelajar, petani, pedagang, dll): 8 unit beroperasi di Kabupaten Toba dan Kabupaten Nias Utara Biaya Operasional 28 unit bus perintis di Kabupaten Deli Serdang (4 bus), Kabupaten Mandailing Natal (4 bus), Kabupaten Nias Barat (20 bus). Biaya Operasional 8 unit bus perintis di Kabupaten Pakpak Bharat (4 bus) dan Kabupaten Nias Selatan (4 bus) Biaya Operasional 8 unit bus perintis di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Padang Lawas			2. Fasilitasi Pelaksanaan Program: Kabupaten/kota membantu pelaksanaan program subsidi dengan memastikan armada bus perintis dapat beroperasi di wilayahnya, menyediakan dukungan administratif, dan memantau pelaksanaan layanan agar berjalan lancar
	2029	Pengadaan 8 unit bus perintis di Kabupaten Padang Lawas Utara (4 bus) dan Kabupaten Tapanuli Selatan			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		(4 bus) Biaya Operasional 28 unit bus perintis di Kabupaten Deli Serdang (4 bus), Kabupaten Mandailing Natal (4 bus), Kabupaten Nias Barat (20 bus). Biaya Operasional 8 unit bus perintis di Kabupaten Pakpak Bharat (4 bus) dan Kabupaten Nias Selatan (4 bus) Biaya Operasional 8 unit bus perintis di Kabupaten Serdang Bedagai (4 bus) dan Kabupaten Padang Lawas (4 bus) Biaya Operasional 8 unit bus perintis di Kabupaten Toba dan Kabupaten Nias Utara			dan memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu penyediaan fasilitas pendukung untuk kelancaran operasional, berupa lahan untuk titik keberangkatan 3. Penentuan Rute dan Kebijakan Lokal: Pemerintah daerah menetapkan rute bus perintis yang strategis sesuai kebutuhan wilayah dan sinkron dengan program nasional, serta mengeluarkan kebijakan pendukung agar subsidi bisa dimanfaatkan optimal untuk membuka keterisolasian daerah, yaitu pengusulan dan penetapan trayek dan sosialisasi program kepada masyarakat serta kesiapan infrastruktur jalan di
	2030	Monitoring dan evaluasi (bulanan, triwulan, tahunan); Laporan monitoring Biaya Operasional 28 unit bus perintis di Kabupaten Deli Serdang (4 bus), Kabupaten Mandailing Natal (4 bus), Kabupaten Nias Barat (20 bus) Biaya Operasional 8 unit bus perintis di Kabupaten Pakpak Bharat (4 bus) dan Kabupaten Nias Selatan (4 bus) Biaya Operasional 8 unit bus perintis di Kabupaten Serdang Bedagai (4 bus) dan Kabupaten Padang Lawas (4 bus)			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		Biaya Operasional 8 unit bus perintis di di Kabupaten Toba dan Kabupaten Nias Utara Biaya Operasional 8 unit bus perintis di di Kabupaten Padang Lawas Utara (4 bus) dan Kabupaten Tapanuli Selatan (4 bus)			kabupaten dalam kondisi layak dan aman, yang akan dilalui oleh trayek 4. Pengawasan dan <i>Monitoring</i> : Kabupaten/kota melakukan pemantauan operasional bus perintis di lapangan untuk memastikan layanan tetap berjalan dengan baik, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil.

PP 14. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA

42. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	2025	Tidak ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk dokumen lingkungan dan AMDAL, BPBD menyusun kajian resiko bencana, rencana mitigasi, dan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat pada	1. Penyediaan Data dan Koordinasi: Kabupaten/kota berperan menyediakan data wilayah yang terdampak banjir serta kebutuhan teknis di lapangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				wilayah bencana, Diskominfo untuk publikasi kegiatan	<p>provinsi agar pembangunan bisa tepat sasaran dan efektif (BPBD)</p> <p>2. Fasilitasi Pelaksanaan dan Administrasi: Kabupaten/kota membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan dukungan administratif, perizinan, penyediaan lahan, dan tenaga lokal di wilayahnya (PUPR)</p> <p>3. Pemeliharaan dan Pengawasan: Setelah pembangunan infrastruktur pengendali banjir dilakukan, pemerintah kabupaten/kota turut bertanggung jawab melakukan pemeliharaan,</p>

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
					<p>pengawasan, dan pengendalian agar fasilitas yang dibangun tetap berfungsi sesuai perencanaan dan umur yang diharapkan (PUPR)</p> <p>4. Pemberdayaan Masyarakat dan Kolaborasi: Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pengendalian banjir melalui manajemen drainase, normalisasi sungai, dan pengelolaan ruang terbuka hijau (LHK, Dinas PKP kab/kota)</p> <p>5. Penyesuaian Kebijakan Lokal:</p>

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
					Kabupaten/kota juga menetapkan kebijakan lokal yang mendukung implementasi program pengendalian banjir provinsi, termasuk pengelolaan tata ruang dan penggunaan teknologi mitigasi banjir (LHK, Dinas PKP kab/kota, BPBD)
43. Pembangunan TPST Regional	2025	tidak ada	Dinas PUPR : pelaksana	PUPR:	1. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah 2. Penyediaan dan penentuan lokasi 3. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup kab/kota 4. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan 5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra
	2026	tidak ada		-Penyiapan dokumen Lingkungan,	
	2027	tidak ada		-Dalam pembuatan FS dan DED, dan pembangunan infrastruktur serta pendukungnya,	
	2028	tidak ada		Dinas LHK :	
	2029	tidak ada		- Dukungan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup	
	2030	tidak ada		-Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan	

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				evaluasi, -Dinas Kominfo untuk publikasi media	pengolahan 6. Dukungan SDM
44. Pembangunan PLTSa	2025	Tidak ada	DISPERINDAG ESDM	<ul style="list-style-type: none"> • PUPR : Pembangunan TPST • LHK: Pengelolaan Sampah • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan 	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: Lahan dan wilayah untuk pembangunan PLTSa, Penerapan Sistem Persampahan Terpilah Perizinan 1. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah 2. Penyediaan dan penentuan lokasi 3. Dukungan
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
					<p>pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup kab/kota</p> <p>4. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan</p> <p>5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan</p> <p>6. Dukungan SDM</p>
45 Pengembangan SPAL Regional	2025	Tidak ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, PDAM dalam peningkatan layanan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas kominfo untuk publikasi media	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan tata ruang (PKP Tata Ruang) 2. Membuat regulasi dan menerbitkan perizinan (LHK, DPMPTSP) 3. Sosialisasi kepada masyarakat (Dinas Kesehatan) 4. Dukungan penyediaan lahan (PKP Tata Ruang) 5. Menyediakan alokasi anggaran (BKAD) 6. Pembentukan kelembagaan untuk
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
					mengelola operasional IPLT (Biro Organisasi)
46. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	2025	Rapat koordinasi, pembentukan tim <i>appraisal</i> dan pembentukan pokja rencana Pembangunan Taman Kehati	DLHK	1. Biro Pemerintahan Otda - SK Penlok 2. BPN - Sertifikat Lahan 3. Diskominfo - Publikasi Media	1. Dukungan terhadap pengadaan lahan 2. Penetapan Taman Kehati pada RTRW kab/kota
	2026	Penyusunan dokumen DPPT dan pembebasan lahan			
	2027	Penyusunan dokumen FS, DED, dan dokumen administrasi lainnya			
	2028	Pekerjaan fisik di lapangan sesuai dengan Perdirjen KSDAE Nomor P.5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan <i>Design</i> Dasar (<i>Design</i> Vegetasi dan <i>Design</i> Infrastruktur Taman Kehati)			
	2029	Tahap lanjutan kegiatan penanaman dan pemeliharaan vegetasi serta - Membuat Rencana Kesepakatan Bersama/ kerja sama Pembangunan Taman Kehati sebagai dukungan Pengembangan Kawasan Konservasi Taman Kehati			
2030	1. Pembukaan dan peresmian Taman Kehati serta tahap lanjutan kegiatan penanaman 2. Pemeliharaan vegetasi serta				

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		kegiatan pengembangan 3. Pembentukan UPT Taman Keanekaragaman Hayati			
PP 15. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA					
47. Penguatan Ekonomi Desa untuk Mengurangi Ketergantungan pada Pusat Kota dengan Penguatan Ekonomi Lokal melalui Pembuatan <i>Master Plan</i> Desa Produktif dan Mandiri.	2025	Tidak ada		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	-Menyediakan data potensi desa yang akurat termasuk peta sebaran komoditi unggulan. -Memperbaiki jalan produksi, pasar desa, gudang, sentra dan pengolahan -Memfasilitasi kerja sama antar desa atau antar BUMDes untuk memperkuat rantai pasok. -Memfasilitasi sertifikasi produk (halal, organik, SNI) untuk meningkatkan daya saing. -Pembinaan Penggunaan dana desa untuk ekonomi desa pada Lokus yang di intervensi
	2026	Tidak ada		Dinas Perkebunan (Pemberian bantuan/pelatihan pengembangan komoditas gula aren, kopi, dan kelapa kepada kelompok yang terdapat pada desa yang menjadi sasaran intervensi kegiatan ini)	
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
48. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan bagi Pengelola BUMDES	2025	<p>Pendataan BUMDES/BUMDesma yang akan menerima pemanfaatan kegiatan</p> <p>•27 Kabupaten/Kota yang memiliki desa</p>		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan bagi pengelola BUMDES/Masyarakat Desa).	<p>- Menugaskan tenaga pendamping desa atau penyuluh ekonomi untuk mendampingi operasional BUMDES.</p> <p>- Memfasilitasi akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran digital.</p> <p>- Memfasilitasi sertifikasi kompetensi pengelola BUMDES melalui lembaga pelatihan resmi.</p>
	2026	<p>- Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma</p> <p>- Monitoring dan Evaluasi kegiatan</p> <p>•Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Nias, Simalungun, Asahan, Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Utara, Gunungsitoli, Padangsidempuan, Karo, Toba, Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu (20 Kabupaten/Kota)</p>			
	2027	<p>- pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes/BUMDesma</p> <p>- Monitoring dan Evaluasi kegiatan</p> <p>•*27 Kabupaten/kota yang memiliki desa</p>			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
	2028	- pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan •*27 Kabupaten/kota yang memiliki desa			
	2029	- pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan •*27 Kabupaten/kota yang memiliki desa			
	2030	Tidak ada			

PP 16. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN

49. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota	2025	-Penyusunan perubahan Pergub Hibah Rumah Ibadah dengan mekanisme penyaluran hibah yang memuat alokasi terhadap biaya operasional pengelola dan sarpras rumah ibadah Tahun 2025 -Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran	Biro KESRA	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Inspektorat (pendampingan menyeluruh dan tinjauan terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah)	-
---	------	---	------------	--	---

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030			
		33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2026	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030			
		33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2027	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030			
		33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2028	-Penerimaan Proposal Usulan,			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030			
		33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2029	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030			
		33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2030	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
		2025-2030			
		33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
50. Festival Seni dan Budaya Daerah	2025	Tidak ada	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas Perhubungan : Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat <i>event</i> internasional dilaksanakan 2. Dinas Kesehatan : Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans 3. Dinas Koperasi &UMKM : Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksanaan <i>event</i> internasional 4. Dinas Kominfo : Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra <i>event-event</i> -pasca <i>event</i>	1. Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Proyek Strategis Provinsi; 2. Pelatihan dan pembinaan Sanggar Kesenian Daerah; 3. Pendataan/Inventarisasi potensi Festival Seni Budaya di masing-masing daerah; 4. Memastikan kontinuitas pelaksanaan Festival Seni Budaya di masing-masing daerah 5. Promosi pelaksanaan Festival Seni-Budaya; 6. Penyusunan Kalender Budaya
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
				internasional; publikasi kegiatan 5. Satpol PP : Keamanan Pelaksanaan <i>Event</i> dan ketertiban penyelenggaraan acara	
51. Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat	2025	Tidak ada			Replikasi pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten/kota
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	-Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konflik di Sumatera Utara di Tahun 2028 -Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2028 -Monitoring dan Evaluasi Tahun 2028		Dinas Pendidikan (Koordinasi rekomendasi satuan pendidikan yang membutuhkan pembekalan terhadap edukasi wawasan kebangsaan) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	
		•Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kota Binjai			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat daerah		Dukungan Kabupaten Padang Lawas
			Utama	Pendukung	
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
PP 17. TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB					
52. Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan-Kawasan Kenakalan Remaja (Genk Motor).	2025	Tidak ada	Satpol PP	Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota terkait dukungan personel dalam pelaksanaan kegiatan. Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba di Kab/Kota)
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
53. Pemberantasan Pengguna dan Bandar Narkoba melalui Pemandahan Gembong Narkoba dari Lapas ke Nusakambangan	2025	Tidak ada	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perhubungan (pengaturan lalu lintas untuk pemindahan gembong narkoba) Satpol PP (pendampingan saat pemindahan gembong narkoba)	Penguatan pencegahan narkoba di pemerintahan daerah	
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan pelaksanaan tugas-tugas administratif, pelayanan publik, regulasi, dan pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU merupakan ukuran atau tolok ukur yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan bagi masyarakat, sementara IKD merupakan capaian kinerja pemerintah daerah dalam berbagai aspek pembangunan dan pelayanan sesuai dengan prioritas daerah. IKD lebih luas dan bisa mencakup ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan bagian dari IKD, yaitu indikator spesifik yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu dalam perangkat daerah, digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program tersebut. Capaian kinerja dan target penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,10	73,70	74,30	74,91	75,52	76,12	76,22
2	Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	70,00	70,47	70,94	71,42	71,89	72,38
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	N/A	67,30	70,24	70,80	73,50	74,10	74,29
4	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	58,54	61,00	62,00	63,00	68,00	70,00	72,00
5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02	5,35-5,64	5,36-5,65	5,37-5,66	5,38-5,67	5,39-5,69	5,4-5,7
6	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,87	7,79-7,67	7,72-7,61	7,64-7,56	7,57-7,5	7,50-7,45	7,43-7,4
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	67,52	69,70	70,35	71,38	71,66	72,53	73,56
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,47	5,30	5,01	4,74	4,48	4,23	4,00

Tabel 4.7. Penyeragaman Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Padang Lawas dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029				
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,00	73,35		
2	Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan Ibu dan Anak				
a	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	146	94	a	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	146	94	a	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	122,00	77,00
b	Prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada balita (%)	16,4	12,3	b	Prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada balita (%)	16,4	12,3	b	Prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada balita (%)	14,50	12,35
3	Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (kasus)			Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (kasus)			Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (kasus)				
a	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	90	a	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	90	a	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	70,00	86,35
b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	90	b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	90	b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	88,00	89,60
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	85,00	88,98		
5	Hasil Pembelajaran			Hasil Pembelajaran			Hasil Pembelajaran:				
a	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	-	-	a	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	-	-				
	- Literasi membaca	6,06-12,12	27,27-30,30		- Literasi membaca	6,06-12,12	27,27-30,30				

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	- Numerasi	0,00-3,03	6,06-9,09	- Numerasi	0,00-3,03	6,06-9,09			
b	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	-	-	b	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	-	-	a	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:
	- Literasi membaca	35,99-38,49	41,53-44,03	- Literasi membaca	35,99-38,49	41,53-44,03	- Literasi SD	60,12	85,02
							- Literasi SMP	52,18	75,18
	- Numerasi	33,70-36,20	37,70-40,20	- Numerasi	33,70-36,20	37,70-40,20	- Numerasi SD	57,92	78,12
							- Numerasi SMP	52,18	74,89
c	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,30-10,33	10,83-10,84	c	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,3-10,33	10,83-10,84	b	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)
d	Harapan Lama Sekolah	13,51-13,63	13,86-13,87	d	Harapan Lama Sekolah	13,51-13,63	13,86-13,87	c	Harapan Lama Sekolah
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12	11,12-11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12	11,12-11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,28	25,49
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59			
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	7,79-7,67	7,50-7,45
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	29,27	40,61	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	29,27	40,61	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	23,00	29,20
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor	3,00	5,46

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	Sektor Formal (%)			Formal (%)			Formal (%)		
11	a Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19,00-19,50	15,40-15,10	a Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19,00-19,50	15,40-15,10	a Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	17,53-17,67	18,32-18,46
	b Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	5,20	7,80	b Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	5,20	7,80	b Laju Pertumbuhan PDRB Sub-Sektor Pertanian (%)	6,61	7,31
							c Laju Pertumbuhan PDRB Sub-Sektor Peternakan (%)	6,21	6,83
							d Laju Pertumbuhan PDRB Sub-Sektor Perikanan (%)	5,73	6,34
12	Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata		
	a Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	2,73	a Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	2,73	a Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,13	1,92
	b Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	421,14	b Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	421,14	b Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	2.500	2.700
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	5,45	5,43	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	5,45	5,43			
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		
	a Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (%)	3,20	3,51	a Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (%)	3,20	3,51	a Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian (%)	2,00	3,70
	b Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,63	4,06	b Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,63	4,06	b Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	6,08	6,42
	c Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,79	0,81	c Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,79	0,81	c Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	17,00	22,89

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	d Return on Asset (RoA) BUMD (%)	1,24	1,97	d Return on Asset (RoA) BUMD (%)	1,24	1,97	d Return on Asset (RoA) BUMD (%)	0,60	2,60
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
	a Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27-5,56	4,74-5,20	a Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27-5,56	4,74-5,20	a Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,30	4,23
	b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43,00	50,40	b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43,00	50,40			
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29-61,67	59,48-63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29-61,67	59,48-63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	77,93	79,58
17	Tingkat Penguasaan IPTEK			Tingkat Penguasaan IPTEK					
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	51,18	a Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	51,18			
	b Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	21,49	b Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	21,49	a Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	5,00	12,04
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,00	6,90	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,00	6,90	Indeks Masyarakat Digital	53,00	54,33
20	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,10	9,50	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,10	9,50	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	66,67	88,89
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76-30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76-30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,63	22,38
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45-16,54	17,13-17,41	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45-16,54	17,13-17,41	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	48,81	53,70
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	a Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	2,26	2,33	a Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah (%)	2,26	2,33	a Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	1,61	1,61
	b Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	74,36	81,01	b Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	74,36	81,01	b Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	74,36	78,90
	c Persentase Desa Mandiri (%)	8,44	8,93	c Persentase Desa Mandiri (%)	8,44	8,93	c Persentase Desa Mandiri (%)	0,33	1,32
24	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	71,5	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	71,5	Indeks Reformasi Birokrasi	61,00	70,00
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,42	2,68
26	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	4,15	4,51
27	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	76,77	79,34
28	Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Usulan proksi:			Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Usulan proksi:			Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Usulan proksi:		
	a Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	70,00	75,70	a Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	70,00	75,70	a Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100,00	100,00
	b Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)	60,00	70,00	b Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)	60,00	70,00			
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	58,50	62,00	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	58,50	62,00	Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Poin)	80,00	87,90

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
30	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,58-85,83	86,83-90,08	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,58-85,83	86,83-90,08			
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	0,11	0,19
32	Tingkat Inflasi (%)	1,80-3,80	1,40-3,70	Tingkat Inflasi (%)	1,80-3,80	1,40-3,70	Tingkat Inflasi (%)	Mengacu Kota Padangsidempuan	
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	33,92	a Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	33,92	a Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	0,02	0,03
	b Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	0,14	b Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	0,14			
	c Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	10.402.072,39	c Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	10.402.072,39			
	d Total Kredit/PDRB (%)	25,70	31,49	d Total Kredit/PDRB (%)	25,70	31,49	b Total Kredit/PDRB (%)	0,07	0,09
34	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Rasio Sektor Jasa Keuangan terhadap PDRB (%)	0,79	1,32
35	Disesuaikan dengan karakteristik daerah			Disesuaikan dengan karakteristik daerah			Disesuaikan dengan karakteristik daerah		
	Jumlah Kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/Sister City)			Jumlah Kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/Sister City)					
36	Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)			Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)			Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	57,56 - 57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	57,56 - 57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	52,28	52,33

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	82,62 - 82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	82,62 - 82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	67,30	74,10
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	60,65	63,18
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,370	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,370	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,800	0,710
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	0,581	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	0,581			
42	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup		
a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,20	77,87	a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,20	77,87	a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	69,70	72,53
b	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,00	15,00	b Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,00	15,00	b Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	68,00	69,35
c	Pengelolaan Sampah			Pengelolaan Sampah			Pengelolaan Sampah		
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah (%)	16,00	28,00	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah (%)	16,00	28,00	-Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Poin)	19,78	45,00
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62,00	100,00	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62,00	100,00	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	15,95	15,95
43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan			Ketahanan Energi, Air dan Pangan			Ketahanan Energi, Air dan Pangan		
a	Ketahanan Energi			Ketahanan Energi			Ketahanan Energi		
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850,00	1.282,00	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850,00	1.282,00	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	530,00	589,21

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp Miliar)	170,57	141,18	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp Miliar)	170,57	141,18			
b	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (prevalence of Undernourishment) (%)	7,35	4,48	b Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (prevalence of Undernourishment) (%)	7,35	4,48	b Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (prevalence of Undernourishment) (%)	5,36	4,75
c	Ketahanan Air			c Ketahanan Air			c Ketahanan Air		
	- Kapasitas tampungan air (m ³ /kapita)			- Kapasitas tampungan air (m ³ /kapita)			- Kapasitas Air Baku (m ³ /kapita)	0,64	2,02
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	40,95	53,00	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	40,95	53,00	- Akses rumah tangga terhadap air minum aman (%)	26,00	29,63
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	152,55 - 147,69	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	152,55 - 147,69	Indeks Risiko Bencana (Poin)	152,70	151,85
45	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Juta ton eq2)		
a	Kumulatif	10,06	12,92	a Kumulatif	10,06	12,92			
b	Tahunan	19,04	25,38	b Tahunan	19,04	25,38	a Tahunan (Ton Co ₂ eq)	1.000,00	1.741,10

Tabel 4.8. Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I Aspek Geografi dan Demografi								
1	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	76,75	77,00	77,20	77,30	77,60	77,85	78,00
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	5,53	5,36	5,20	5,05	4,90	4,75	4,61
3	Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh/kapita)	N/A	530,00	544,22	558,82	573,81	589,21	605,02
4	Porsi EBT dalam bauran energi (%)	N/A	5,00	6,23	7,76	9,67	12,04	15,00
5	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	N/A	0,64	0,85	1,14	1,51	2,02	2,69
6	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%)	25,00	26,00	26,86	27,76	28,68	29,63	30,62
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	67,52	69,70	70,35	71,38	71,66	72,53	73,56
8	Penurunan Emisi GRK (Ton Co ₂ Eq)	N/A	1.000,00	1.148,70	1.319,51	1.515,72	1.741,10	2.000,00
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	69,00	69,55	70,00	72,00	74,00	77,00	80,00
10	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Poin)	N/A	19,78	19,78	25,00	30,00	45,00	60,00
11	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	15,90	33,91	35,61	37,39	39,26	41,22	43,28
12	Indeks Risiko Bencana (Poin)	153,00	152,70	152,50	152,15	152,00	151,85	151,85
13	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,96	1,90	1,85	1,80	1,75	1,70	1,65
II Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02	5,35-5,64	5,36-5,65	5,37-5,66	5,38-5,67	5,39-5,69	5,4-5,7
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,87	7,79-7,67	7,72-7,61	7,64-7,56	7,57-7,5	7,50-7,45	7,43-7,4

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	PDRB Per Kapita (Rp ribu)	65.287,57	69.986,85	75.024,37	80.424,48	86.213,29	92.418,76	99.070,89
4	Gini Ratio (Poin)	0,2240	0,2173	0,2108	0,2044	0,1983	0,1924	0,1866
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,47	5,30	5,01	4,74	4,48	4,23	4,00
6	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,10	73,70	74,30	74,91	75,52	76,12	76,22
7	Usia Harapan Hidup (Tahun)	71,67	72,00	72,33	72,67	73,01	73,35	73,69
8	Prevalensi stunting (%)	25,2	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2	13,2
9	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	65,94	70,00	73,77	77,75	81,93	86,35	91,00
10	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	84,12	88,00	88,40	88,79	89,19	89,60	90,00
11	Indeks Pendidikan	0,710	0,720	0,740	0,750	0,770	0,780	0,800
12	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	9,63	9,67	9,70	9,72	9,73	9,75	9,78
13	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13,87	14,24	14,28	14,3	14,32	14,34	14,36
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	60,24	62,05	63,91	65,83	67,80	69,83	71,93
15	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	83,10	85,00	85,98	86,97	87,97	88,98	90,00
16	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	30,34	23,00	24,41	25,91	27,51	29,20	30,99
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	N/A	67,30	70,24	70,80	73,50	74,10	74,29
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	51,12	52,28	52,30	52,32	52,33	52,33	52,33
19	Indeks Perlindungan Anak (Poin)	71,33	73,50	74,00	74,50	75,00	76,00	76,50
20	Indeks Perlindungan Khusus Anak (Poin)	71,33	73,50	74,00	74,50	75,00	76,00	76,50

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	60,17	60,65	61,10	61,67	62,87	63,18	63,90
22	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	87,01	87,88	88,18	88,4	88,6	89	89,2
23	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)	54,35	55,00	55,78	58,89	58,98	59,19	60,00
24	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	0,813	0,800	0,720	0,560	0,480	0,710	0,370
25	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	N/A	55,00	56,87	58,80	60,80	62,86	65,00
III Aspek Daya Saing Daerah								
1	Angka Ketergantungan (Per 100 Penduduk)	54,40	54,28	54,18	54,08	53,98	53,88	53,79
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	16,32	17,53-17,67	17,72-17,86	17,92-18,06	18,12-18,26	18,32-18,46	18,52-18,67
3	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (%)	0,90	1,13	1,56	1,75	1,85	1,92	2,05
4	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	0,70	0,79	0,90	1,02	1,16	1,32	1,50
5	Indeks Akses Keuangan Daerah (Poin)	2,41	2,53	2,59	2,65	2,71	2,77	2,80
6	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (ADHB)	0,015	0,017	0,019	0,021	0,024	0,027	0,030
7	Total Kredit/PDRB ADHB (%)	0,065	0,070	0,075	0,081	0,087	0,093	0,100
8	Rasio Kewirausahaan (%)	5,99	6,08	6,16	6,25	6,33	6,42	6,51
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	77,52	77,93	78,34	78,75	79,16	79,58	80,00
10	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	20,98	22,06	23,19	24,38	25,63	26,94	28,33
11	Indeks Ekonomi Hijau (Poin)	N/A	51,00	52,06	53,14	54,25	55,38	56,53
12	Indeks Ekonomi Biru (Poin)	N/A	30,00	30,45	30,91	31,37	31,84	32,32
13	Indeks Masyarakat Digital (Poin)	40,18	53,00	53,33	53,66	54,00	54,33	54,67
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)	23,96	23,63	23,32	23,00	22,69	22,38	22,08

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
15	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	47,66	48,81	49,99	51,20	52,44	53,70	55,00
16	Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	70,00	70,47	70,94	71,42	71,89	72,38
17	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin)	N/A	50,00	53,48	57,20	61,19	65,44	70,00
18	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (%)	47,66	74,36	75,47	76,60	77,74	78,90	80,08
19	Indeks Desa (%)	0,6217	64,00	53,48	57,20	61,19	65,44	70,00
20	Persentase Desa Mandiri (%)	0,33	0,33	0,66	0,66	1,32	1,32	1,65
21	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,091	0,106	0,123	0,142	0,165	0,192	0,223
22	Inflasi [Kota Padang Sidempuan] (%)	2,46	Mengacu Kota Padangsidempuan					
IV Aspek Pelayanan Umum								
A Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif								
1	Indeks Reformasi Hukum (Poin)	97,14	98,00	98,50	95,50	99,00	99,00	99,00
2	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	58,54	61,00	62,00	63,00	68,00	70,00	72,00
3	Indeks SPBE (Poin)	2,17	2,42	2,48	2,54	2,61	2,68	2,74
4	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	4,10	4,15	4,24	4,32	4,41	4,51	4,60
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,66	87,47	89,24	91,05	92,90	94,78	100,00
6	Indeks Integritas Nasional (Poin)	76,14	76,77	77,41	78,05	78,69	79,34	80,00
B Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial								
1	Persentase Penegakan Perda (%)	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Poin)	N/A	80,00	81,91	83,86	85,86	87,90	90,00
3	Indeks Harmoni Indonesia	N/A	50,00	53,48	57,20	61,19	65,44	70,00

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
C	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan							
1	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	3,06	3,20	3,35	3,50	3,66	3,83	4,00
Indikator Kinerja Kunci								
A	Pendidikan							
1	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	42,00	52,30	53,45	53,50	53,55	53,58	53,60
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,62	99,70	99,73	99,75	99,77	99,80	99,82
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	85,53	88,30	88,35	88,40	88,45	88,48	88,50
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/ MI/ Paket A	89,40	97,80	97,82	97,85	97,88	97,90	97,92
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/ MTs/ Paket B	86,13	92,50	92,53	92,56	92,58	92,60	92,62
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,28	13,28	15,63	18,40	21,65	25,49	30,00
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	N/A	35,49	36,50	37,53	38,60	39,69	40,82
8	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (PAUD)	97,00	97,50	97,65	97,70	97,72	97,74	97,76
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,00	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	78,01	98,00	98,00	98,00	98,00	99,00	99,00
12	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,25	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,29	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
14	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	93,00	94,00	94,10	94,20	94,30	94,35	94,35
15	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (%)	54	72	72	72	72	73	73
16	Proporsi Murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	99	99	99	99	99	99	99
17	Rasio guru/murid sekolah SD/MI	724	725	724	723	722	721	720
18	Rasio guru/murid sekolah SMP/MTs	847	848	847	846	845	844	843
19	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI	73	53	50	48	46	45	44
20	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTS	85	95	94	92	90	88	86
21	Ruang kelas SD/MI kondisi baik (%)	80,70	83,50	83,55	83,60	83,65	83,70	83,70
22	Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik (%)	65,00	68,80	70,00	72,00	72,10	72,20	72,30
23	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidikan	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
B Kesehatan								
1	Angka Kematian Neonatal (Per 1.000 KH)	8,27	9,2	8,4	8	7,6	7,2	6,8
2	Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH)	8,27	12,62	11,63	10,97	10,46	9,96	8,86
3	Angka Kematian Balita (Per 1.000 KH)	9,60	15	13,8	13,1	12,5	11,9	10,9
4	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	111,8	122	109	97	86	77	68
5	Persentase Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)	80	88	89	90	91	92	93
6	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (%)	88	91	91	92	93	94	95

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Persentase Pelayanan Kesehatan (Penyelidikan Epidemiologi) bagi Penduduk terdampak penyakit KLB /Wabah/dan/atau berpotensi KLB/Wabah serta Penyakit Infeksi Emerging (%)	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk berdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau berpotensi Bencana (100%)	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase desa/Kabupaten Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	55	60	75	80	80	85	86
10	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan memenuhi Syarat (%)		30	40	50	60	70	70
11	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) (%)	80	85	85	85	85	85	85
12	Persentase Penduduk Penerima PKG (%)	-	100	100	100	100	100	100
13	Cakupan Kepesertaan JKN (%)	90	100	100	100	100	100	100
14	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan (%)	70	73	74	75	80	85	90
15	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ter-Akreditasi Paripurna (%)	60	65	85	90	100	100	100
16	Persentase ODHIV yang mendapat Pelayanan sesuai Standar(%)	100	100	100	100	100	100	100
17	Cakupan Pemeriksaan Suspek Malaria	1120	1493	900	850	870	850	870

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(Mikroskop,RDT)							
18	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi SIKN (%)	80	90	90	90	90	90	90
19	Persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (%)	90	95	95	95	95	95	95
20	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan (%)	90	100	100	100	100	100	100
21	Ketersediaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (%)	100	100	100	100	100	100	100
22	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terhadap Populasi	5,2 : 1000	5,2 : 1000	5,2 : 1000	5,2 : 1000	5,2 : 1000	5,2 : 1000	5,2 : 1000
23	Persentase Merokok Penduduk Usia 10-21 Tahun(%)	13,4	12,4	12,0	11,5	11	10	9
24	Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT sesuai Standart(%)	70	72	74	76	77	79	80
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (%)	17,73	18,80	19,20	20,60	22,00	23,30	24,00
2	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	59,00	62,00	65,00	69,00	72,00	75,00	77,00
3	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	47,00	50,00	53,00	60,00	65,00	73,00	75,00
4	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik (%)	43,00	45,00	48,00	51,00	56,00	60,00	65,00
5	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
6	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	N/A	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah	N/A	60,00	62,00	64,00	66,00	70,00	72,00
8	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	N/A	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
9	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah	N/A	60,00	62,00	64,00	66,00	70,00	72,00
10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	73,63	75,00	77,25	79,57	81,95	84,41	86,95
11	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	43,00	45,00	48,00	51,00	56,00	60,00	65,00
12	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	N/A	40,00	45,00	47,00	50,00	55,00	65,00
13	Tingkat Kemantapan Jalan	41,14	45,00	47,00	50,00	53,00	55,00	57,00
14	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	80,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00
D Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	Persentase Rumah Layak Huni (%)	67,00	72,00	75,00	76,00	77,00	78,00	80,00
2	Luasan Kawasan Kumuh (%)	30,33	29,00	28,00	27,00	25,00	23,00	20,00
3	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	N/A	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
4	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah	N/A	70,00	75,00	80,00	85,00	9,00	95,00

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	yang Layak Huni							
5	Persentase Luas Kawasan Kumuh	N/A	50,00	53,00	57,00	63,00	65,00	67,00
6	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	N/A	40,00	44,00	48,00	52,00	55,00	60,00
E Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan Pelayanan Kebakaran (%)	80	85,00	85,00	90,00	90,00	100,00	100,00
4	Tingkat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran (menit)	> 15	> 15	> 15	> 15	> 15	> 15	> 15
5	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	N/A	50,00	51,50	53,00	54,50	56,00	57,50
7	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	N/A	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00
8	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00
9	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	N/A	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
10	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	N/A	50,00	57,00	64,00	71,00	78,00	85,00

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Persentase Penanganan Pasca Bencana	N/A	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
12	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	N/A	70,00	74,00	78,00	82,00	86,00	90,00
13	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	N/A	50,00	57,00	64,00	71,00	78,00	85,00
F Sosial								
1	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	1,00	3,00	3,48	4,05	4,70	5,46	6,34
2	Persentase PPKS yang Tertangani (%)	60,00	70,00	71,89	73,84	75,84	77,89	80,00
3	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	N/A	80,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	N/A	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
5	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	N/A	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
6	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	N/A	60,00	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	N/A	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
8	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	N/A	50,00	54,00	58,00	62,00	66,00	70,00
9	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	N/A	55,00	58,50	62,00	65,50	69,00	72,50
10	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	N/A	60,00	62,70	65,40	68,10	70,80	73,50
11	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya	N/A	66,00	68,50	71,00	73,50	76,00	78,50
12	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhannya	N/A	50,00	54,00	58,00	62,00	66,00	70,00
13	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	N/A	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00
14	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	N/A	54,00	57,50	61,00	64,50	68,00	71,50
15	Indeks Peranan Sosial	N/A	55,00	57,00	59,00	61,00	63,00	65,00
16	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhannya	N/A	57,00	59,85	62,84	65,98	69,28	72,75
17	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	N/A	43,00	45,15	47,41	49,78	52,27	54,88
18	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir	N/A	44,00	46,20	48,51	50,94	53,48	56,16

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Miskin							
19	Indeks Kebutuhan Dasar	N/A	30,00	31,50	33,08	34,73	36,47	38,29
20	Indeks Keberdayaan Ekonomi	N/A	35,00	36,75	38,59	40,52	42,54	44,67
21	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	N/A	50,00	52,50	55,13	57,88	60,78	63,81
22	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	N/A	80,00	81,60	83,23	84,90	86,59	88,33
23	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	N/A	70,00	71,40	72,83	74,28	75,77	77,29
24	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	N/A	75,00	76,50	78,03	79,59	81,18	82,81
G	Tenaga Kerja							
1	Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3 (%)	9,91	9,92	9,93	9,95	9,97	9,99	10,00
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan (%)	0,59	0,60	0,63	0,65	0,68	0,69	0,70
3	Dokumen Rencana Tenaga Kerja	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	N/A	50,00	51,50	53,05	54,64	56,28	57,96
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	59,00	77,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang	N/A	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial							
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	TPAK Perempuan (%)	65,86	67,00	67,50	68,00	68,50	69,00	70,00
3	Kasus KDRT (Kasus)	2	2	1	1	1	0	0
4	Status Kabupaten Layak Anak (Kategori)	N/A	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya
5	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	N/A	0,70	0,90	1,00	1,30	1,50	1,60
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	65,86	67,00	67,50	68,00	68,50	69,00	70,00
7	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	N/A	75,00	77,00	80,00	83,00	85,00	90,00
8	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	N/A	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00
9	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
10	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	N/A	66,62	69,11	71,68	74,35	77,13	80,00
11	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	71,33	73,50	74,00	74,50	75,00	76,00	76,50
I	Pangan							

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	88,60	89,00	89,20	89,40	89,60	89,80	90,00
2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	60,00	62,95	66,04	69,28	72,68	76,25	80,00
3	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	60,00	62,95	66,04	69,28	72,68	76,25	80,00
4	Skor Pola Pangan Harapan	88,60	89,00	89,20	89,40	89,60	89,80	90,00
5	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	N/A	30,00	27,00	24,30	21,87	19,68	17,71
6	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	N/A	70,00	73,50	77,18	81,03	85,09	89,34
J Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Air (Poin)	50,00	55,00	56,00	58,00	58,00	59,00	61,00
2	Indeks Kualitas Udara (Poin)	91,02	91,30	91,44	91,58	91,72	91,86	92,00
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin)	54,12	55,00	56,00	57,00	58,00	60,00	61,00
4	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	N/A	80,00	85,00	90,00	95,00	97,00	100,00
5	Persentase RTH	N/A	45,00	46,35	47,74	49,17	50,65	52,17
6	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	N/A	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
8	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
10	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam	N/A	70,00	73,50	77,18	81,03	85,09	89,34

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
11	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	N/A	50,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
K Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)	98,83	98,96	99,17	99,36	99,59	99,8	99,99
2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	92,18	93,20	94,00	98,10	94,20	94,30	95,90
3	Rasio pasangan berakte nikah (%)	56,04	57,00	58,00	58,50	60,00	60,30	60,50
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	N/A	74,00	76,22	78,51	80,86	83,29	85,79
5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	N/A	55,00	56,93	58,92	60,98	63,11	65,32
6	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	N/A	57,00	59,00	61,06	63,20	65,41	67,70
7	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	N/A	40,00	41,40	42,85	44,35	45,90	47,51
L Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Desa Mandiri	1	4	5	5	6	7	8
2	Desa Maju	10	29	32	34	38	40	45
3	Desa Berkembang	213	170	173	178	181	184	187
4	Desa Tertinggal	77	81	79	76	70	68	63
5	Desa Sangat Tertinggal	2	19	14	10	8	4	0

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Persentase Aparatur Desa dan BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	60,00	62,70	65,52	68,47	71,55	74,77
7	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	N/A	55,00	57,48	60,06	62,76	65,59	68,54
8	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	N/A	50,00	52,25	54,60	57,06	59,63	62,31
9	Persentase Fasilitasi Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	N/A	45,00	47,03	49,14	51,35	53,66	56,08
M	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Total Fertility Rate (Anak Per Wanita)	3,02	3,00	2,95	2,90	2,85	2,80	2,75
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Anak Per 1.000 Wanita)	28,50	28,00	27,00	26,00	25,00	24,00	23,00
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	41,10	43,00	45,00	47,00	50,00	52,00	55,00
4	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	21,30	21,00	20,00	18,00	17,00	16,00	15,00
5	Rasio Akseptor KB (%)	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00
6	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	N/A	64,00	65,00	65,00	70,00	70,00	75,00
N	Perhubungan							
1	Rasio Konektivitas (%)	19,06	20,00	20,00	21,00	21,00	22,00	22,00
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	62,00	64,00	65,00	65,00	70,00	70,00	75,00
O	Komunikasi dan Informatika							

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	92,00	70,00	72,77	75,65	78,65	81,76	85,00
2	Persentase rumah tangga dengan akses internet (%)	80,00	80,00	81,91	83,86	85,86	87,90	90,00
3	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	N/A	60,00	63,00	66,15	69,46	72,93	76,58
P Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
1	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	2,00	2,20	2,50	2,70	2,80	3,00	3,10
2	Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian (%)	0,80	2,00	2,50	3,00	3,50	3,70	3,80
3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	16,00	1,00	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
4	Persentase Koperasi Aktif (%)	26,50	29,46	32,75	36,40	40,46	44,98	50,00
6	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	N/A	70,00	72,45	74,99	77,61	80,33	83,14
8	Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	N/A	65,00	67,28	69,63	72,07	74,59	77,20
9	Persentase Koperasi yang Berkualitas	N/A	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00
10	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	N/A	10,00	10,50	11,03	11,58	12,16	12,76
11	Pertumbuhan Wirausaha	N/A	15,00	18,00	20,00	22,00	25,00	30,00
12	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	N/A	0,50	0,70	2,00	2,50	3,00	3,50
Q Penanaman Modal								
1	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	1,47	5,00	6,60	8,71	11,49	15,16	20,00

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(%)							
2	Realisasi PMDN/PMA (Rp Miliar)	7.582,94	906,23	906,73	907,23	907,73	908,23	908,73
3	Jumlah Investor PMDN/PMA (Perusahaan)	25,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
4	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (%)	1,47	-	-	-	-	-	-
5	Realisasi Total terhadap Target Investasi	N/A	75,00	77,25	79,57	81,95	84,41	86,95
6	Persentase Peningkatan Investor	N/A	4,00	4,28	4,58	4,90	5,24	5,61
7	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	N/A	50,00	53,50	57,25	61,25	65,54	70,13
8	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha	N/A	80,00	81,60	83,23	84,90	86,59	88,33
9	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	N/A	85,00	88,00	90,00	95,00	97,00	100,00
R Kepemudaan dan Olahraga								
1	Persentase Wirausaha Muda (%)	70,00	72,10	74,26	76,49	78,79	81,15	83,58
2	Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	N/A	70,00	72,77	75,65	78,65	81,76	85,00
3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	54	60	65	70	75	80	85
4	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	35	45	50	60	65	70	75
5	Jumlah prestasi olahraga	3	5	6	7	7	7	7
6	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	N/A	40,00	45,00	45,00	50,00	50,00	55,00
S Statistik								
1	Indeks Pembangunan Statistik (Poin)	1,60	2,00	2,30	2,64	3,03	3,48	4,00

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Buku Kabupaten dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku PDRB dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
T Persandian								
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	N/A	20,00	24,02	28,85	34,66	41,63	50,00
U Kebudayaan								
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Kegiatan)	10	10	10	10	10	10	10
2	Benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan (Objek)	26	26	26	26	26	26	26
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Objek)	20	20	20	20	20	20	20
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Objek)	26	26	26	26	26	26	26
V Perpustakaan								
1	Indeks Minat Baca (Poin)	50,26	51,13	51,89	52,11	52,78	53,23	53,98
2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (Orang)	495	1.030	1.500	2.100	2.630	3.020	3.820
3	Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	10,20	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00
4	Nilai Tingkat Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	N/A	80,00	83,20	86,53	89,99	93,59	97,33
W Kearsipan								

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Poin)	15,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00
2	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	45,00	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00	25,00
3	Tingkat Ketersediaan Arsip	N/A	67,00	69,01	71,08	73,21	75,41	77,67
4	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	N/A	55,00	56,65	58,35	60,10	61,90	63,76
5	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	N/A	20,00	20,60	21,22	21,85	22,51	23,19
X Pariwisata								
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.250	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	50,00	11,11	2,00	1,96	1,92	1,89	1,85
3	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	N/A	80,00	82,40	84,87	87,42	90,04	92,74
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual	N/A	5,00	5,35	5,72	6,13	6,55	7,01
5	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	N/A	20,00	21,00	22,05	23,15	24,31	25,53
Y Kelautan dan Perikanan								
1	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20	0,20	0,19
2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	4.142,88	4.096,00	4.100,00	4.104,00	4.108,00	4.112,00	4.116,00
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	146,79	150,20	150,40	150,60	150,80	151,00	151,20

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Terlaksananya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5	Angka Konsumsi Ikan	29,58	29,80	29,90	30,00	30,10	30,20	30,30
Z Pertanian								
1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	4,38	4,34	4,30	4,25	4,21	4,17	4,13
2	Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB (%)	41,61	41,19	40,78	40,37	39,97	39,57	39,18
3	Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%)	1,88	1,86	1,84	1,82	1,80	1,78	1,77
4	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan (Rp Juta/kapita)	125,73	140,09	156,10	173,93	193,80	215,94	240,60
5	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	N/A	2,00	2,30	2,65	3,04	3,50	4,02
6	Peningkatan Produksi Hortikultura	N/A	0,90	0,99	1,00	1,00	1,00	1,01
7	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	N/A	0,58	0,60	0,60	0,70	0,70	0,80
8	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	N/A	70,00	73,50	77,18	81,03	85,09	89,34
9	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	N/A	50,00	52,50	55,13	57,88	60,78	63,81
10	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV	N/A	43,00	45,15	47,41	49,78	52,27	54,88
11	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	N/A	65,00	68,25	71,66	75,25	79,01	82,96
12	Persentase Penanganan Dampak Perubahan	N/A	55,00	57,75	60,64	63,67	66,85	70,20

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Iklm Terhadap Pertanian							
13	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	N/A	40,00	42,00	44,10	46,31	48,62	51,05
AA	Perdagangan							
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	6,13	6,15	6,20	6,25	6,30	6,35	6,40
2	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	66,67	66,67	77,78	77,78	77,78	88,89	88,89
3	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	N/A	20,00	21,00	22,05	23,15	24,31	25,53
4	Nilai Ekspor Barang	N/A	1,30	1,35	1,39	1,44	1,49	1,54
5	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	50,00	55,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
AB	Perindustrian							
1	Proporsi jumlah IKM (%)	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	N/A	81,00	83,43	85,93	88,51	91,17	93,90
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	N/A	35,00	36,05	37,13	38,25	39,39	40,57
AC	Perencanaan Pembangunan							
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	N/A	70,00	71,89	73,84	75,84	77,89	80,00

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Dokumen RPJPD yang Ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Dokumen RPJMD yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Dokumen RKPd yang Ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Dokumen RTRW yang Ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd	N/A	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	N/A	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	N/A	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	N/A	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	N/A	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AD Keuangan								
1	Opini BPK atas Pelaporan Keuangan (Level)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	3,88	4,52	4,80	4,90	5,01	5,11	5,22
3	RoA BUMD (%)	N/A	0,60	0,72	1,60	1,92	2,60	1,50
4	Persentase Belanja Pegawai di Luar	N/A	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD							
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	N/A	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	N/A	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
7	Persentase Penurunan SILPA	N/A	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8	Persentase laporan keuangan tepat waktu	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	N/A	72,00	74,16	76,38	78,68	81,04	83,47
11	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	N/A	76,00	78,28	80,63	83,05	85,54	88,10
AE	Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan							
1	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	70,00	71,00	73,00	75,00	76,00	78,00	81,00
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00	12,00	12,00
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	8,00	6,00	8,00	8,00	10,00	12,00	12,00
4	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	70,00	72,45	74,99	77,61	80,33	83,14
6	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai	N/A	74,00	76,59	79,27	82,05	84,92	87,89

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dengan Kompetensinya							
7	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	N/A	75,00	77,63	80,34	83,15	86,06	89,08
8	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	N/A	80,00	83,20	86,53	89,99	93,59	97,33
9	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	N/A	77,00	80,85	84,89	89,14	93,59	98,27
10	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	N/A	65,00	68,25	71,66	75,25	79,01	82,96
11	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	N/A	70,00	73,50	77,18	81,03	85,09	89,34
AF	Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	N/A	30,00	31,78	33,66	35,65	37,76	40,00
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	N/A	40,00	40,95	41,93	42,93	43,95	45,00
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	N/A	20,00	22,37	25,02	27,98	31,29	35,00
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	N/A	15,00	17,23	19,79	22,74	26,12	30,00
5	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	N/A	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	N/A	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	N/A	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Daerah	N/A	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	N/A	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	N/A	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	N/A	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	N/A	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AG	Pengawasan							
1	Indeks Persepsi Korupsi	74,00	80	80	85	85	85	90
2	Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B (%)	95,00	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	85	85	85	85	85	85	85
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Level)	2	3	3	3	4	4	4
5	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Level)	2	3	3	3	4	4	4
6	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
7	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
8	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
AH Sekretariat Daerah								
1	Nilai Evaluasi SAKIP (Poin)	CC	B	B	B	B	B	BB
2	Efektivitas Kerjasama Daerah	N/A	78,00	80,34	82,75	85,23	87,79	90,42
3	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	N/A	80,00	85,00	87,00	90,00	94,00	100,00
4	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	N/A	75,00	77,25	79,57	81,95	84,41	86,95
5	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	N/A	76,50	78,80	81,16	83,59	86,10	88,68
AI Pemerintahan Umum								
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	N/A	40,00	42,00	44,10	46,31	48,62	51,05
2	Persentase Pendidikan Politik dan	N/A	53,00	55,65	58,43	61,35	64,42	67,64

No	Indikator	Realisasi			Proyeksi			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pengembangan Etika serta Budaya Politik							
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	N/A	44,00	46,20	48,51	50,94	53,48	56,16
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	N/A	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 4.9. Proyeksi Indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Kondisi 2024	Target						OPD Penanggung Jawab
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I PENDIDIKAN											
A Pendidikan Dasar dan Menengah											
1	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 tahun	Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	98,40	98,71	99,02	99,32	99,63	99,93	100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Kemampuan Literasi SD/MI	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Nilai	53,32	55,82	58,32	60,82	63,32	65,82	68,32	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	Kemampuan Numerasi SD/MI	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Nilai	51,09	53,99	56,89	59,79	62,69	65,59	68,49	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	Iklim Keamanan SD/MI	Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan	Nilai	73,92	74,82	75,72	76,62	77,52	78,42	79,32	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Kondisi 2024	Target						OPD Penanggung Jawab
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Iklm Kebinekaan SD/MI	Indeks Iklm Kebinekaan di Satuan Pendidikan	Nilai	67,20	68,20	69,20	70,20	71,20	72,20	73,20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	Iklm Inklusivitas SD/MI	Indeks Iklm Inklusivitas di Satuan Pendidikan	Nilai	57,41	59,91	62,41	64,91	67,41	69,91	72,41	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	Kemampuan Literasi SMP/MTs	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Nilai	57,72	58,82	59,92	61,02	62,12	63,22	64,32	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	Kemampuan Numerasi SMP/MTs	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Nilai	55,45	56,95	58,45	59,95	61,45	62,95	64,45	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	Iklm Keamanan SMP/MTs	Indeks Iklm Keamanan di Satuan Pendidikan	Nilai	67,03	68,53	70,03	71,53	73,03	74,53	76,03	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Kondisi 2024	Target						OPD Penanggung Jawab
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Iklm Kebinekaan SMP/MTs	Indeks Iklm Kebinekaan di Satuan Pendidikan	Nilai	67,29	68,29	69,29	70,29	71,29	72,29	73,29	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11	Iklm Inklusivitas SMP/MTs	Indeks Iklm Inklusivitas di Satuan Pendidikan	Nilai	54,03	56,43	58,83	61,23	63,63	66,03	68,43	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
B Pendidikan Kesetaraan											
1	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	21,16	25,26	29,36	33,46	37,56	41,65	45,75	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
C Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											
1	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	80,01	82,97	85,94	88,91	91,88	94,43	96,98	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	15,87	17,66	20,08	23,21	28,60	35,07	41,53	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Kondisi 2024	Target						OPD Penanggung Jawab
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4	Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D IV	Persen	50,23	50,76	51,76	52,76	53,76	54,76	55,76	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
II KESEHATAN											
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	66,9	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	63,2	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	63	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	66	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	38	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Kondisi 2024	Target						OPD Penanggung Jawab
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	98	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	84	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	184	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	127	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara dterduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	69,5	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang	Persen	88,7	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Kondisi 2024	Target						OPD Penanggung Jawab
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan									
III PEKERJAAN UMUM											
1	Penyediaan kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	25	26	31	33	35	38	40	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	0	0,2	0,5	0,8	1	1,2	1,6	DINAS PEKERJAAN UMUM
IV PERUMAHAN RAKYAT											
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	0	20	40	60	80	80	100	DINAS PERKIMHUB
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program	Persen	0	20	40	60	80	80	100	DINAS PERKIMHUB

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Kondisi 2024	Target						OPD Penanggung Jawab
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota	pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni									
V TRANTIBUMLINMAS											
1	Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban umum	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/kota	Persen	80	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP & DAMKAR
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	20	100	100	100	100	100	100	BPBD
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	75	100	100	100	100	100	100	BPBD
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	Persen	80	100	100	100	100	100	100	BPBD

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Kondisi 2024	Target						OPD Penanggung Jawab
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		bencana									
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	80	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP & DAMKAR
VI SOSIAL											
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	14,2	40	45	55	65	75	80	DINAS SOSIAL
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	46	56	66	76	86	95	95	DINAS SOSIAL
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	44,5	54	69	84	90	90	90	DINAS SOSIAL
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya	Jumlah Warga negara gelandangan dan pengemis yang	Persen	34	54	69	84	98	98	98	DINAS SOSIAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Kondisi 2024	Target						OPD Penanggung Jawab
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	gelandangan dan pengemis di luar panti	memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	80,9	100	100	100	100	100	100	DINAS SOSIAL



BAB V

PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang menjadi dasar untuk seluruh kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. Sebagai panduan utama, dokumen ini tidak hanya memberikan arah kepada pemerintah daerah, tetapi juga menjadi referensi bersama bagi seluruh warga Padang Lawas agar dapat ikut berkontribusi secara aktif sesuai dengan kemampuan dan peran masing-masing. Penyusunan dokumen ini mempertimbangkan prinsip-prinsip utama pelaksanaan, meliputi keselarasan antara perencanaan dan pendanaan, mekanisme pengendalian yang efektif, sistem insentif untuk mendorong partisipasi, serta mekanisme perubahan yang fleksibel. Keempat aspek tersebut berfungsi sebagai alat pengaman agar seluruh proses pembangunan tetap pada jalur yang benar dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan. RPJMD 2025-2029 merupakan panduan operasional yang bersifat dinamis dan hidup, bukan sekadar dokumen formal, melainkan mampu menggerakkan seluruh potensi daerah untuk “Bersama Mewujudkan Padang Lawas yang MAJU”. Proses pembangunan selama lima tahun ke depan diharapkan berlangsung dengan terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Kualitas suatu perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh konsistensi antar dokumen perencanaan dan keselarasannya dengan kebijakan pendanaan. Sinergi ini penting untuk memastikan tiga hal penting: 1) kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana; 2) ketersediaan sumber pendanaan yang memadai; dan 3) pemanfaatan anggaran yang optimal. Perencanaan yang terpadu dan berkualitas tidak hanya menjadi panduan operasional bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi acuan bagi pelaku non-pemerintah dalam berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang tepat dan berorientasi hasil. Proses ini mencakup penentuan prioritas pembangunan hingga level teknis proyek dan output, serta pengawasan ketat terhadap implementasinya. Kunci keberhasilannya terletak pada pendekatan kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

- Penguatan tata kelola perencanaan dilakukan melalui:
- Penyelarasan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan kebijakan fiskal
- Pengembangan sistem monitoring terintegrasi yang mencakup aspek perencanaan dan keuangan
- Pembentukan forum konsultasi multi-pihak untuk review dokumen perencanaan
- Penerapan prinsip-prinsip evidence-based planning dengan dukungan data yang akurat

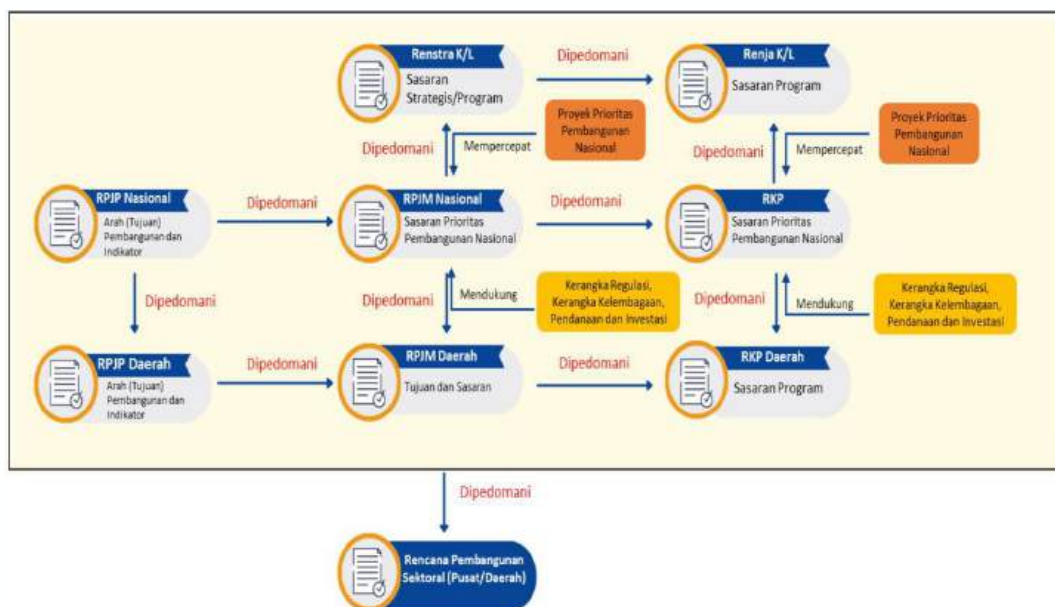
Perencanaan tidak hanya konsisten secara internal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan pembangunan nyata di lapangan. Hasil akhir yang ingin dicapai adalah percepatan pembangunan daerah yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

A. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dengan Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Pusat

RPJMD menempati posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah dan berfungsi sebagai pedoman utama bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan di tingkat daerah mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen-dokumen ini menjadi dasar bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fokus utama RPJMD adalah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah pembangunan, serta indikator pencapaian tujuan pembangunan daerah. RKPD menggunakan RPJMD sebagai pedoman dalam merumuskan tujuan, sasaran, dan program pembangunan tahunan. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah harus mengacu pada rencana pembangunan nasional atau pemerintah pusat, di mana RPJPD mengikuti RPJPN, RPJM Daerah sesuai dengan RPJMN, dan RKP Daerah selaras dengan RKP nasional. Selain itu, seluruh rencana sektoral merujuk pada rencana pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah, maupun pendek/tahunan.

Hubungan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat divisualisasikan dalam suatu diagram atau gambar yang menggambarkan hierarki dan sinkronisasi antar dokumen



Gambar 5.1. Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Dalam rangka memedomani dokumen perencanaan di tingkat pusat dan provinsi terdapat beberapa hal yang diperhatikan antara lain:

1. RPJMD merupakan dokumen perencanaan dengan jangka waktu menengah yang menetapkan arah pembangunan dalam lima tahun ke depan, meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang

mendukung visi dan misi RPJMN serta Visi Indonesia Emas 2045. RPJMD berfungsi sebagai rencana strategis daerah dalam periode tersebut.

2. Penyusunan RPJMD, termasuk penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan indikator pembangunan, harus mengacu pada arah pembangunan dan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMN serta RPJMD tingkat provinsi.
3. Tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD kabupaten harus berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan dalam RPJM di tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, RPJMD kabupaten menjadi acuan bagi sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKP, serta untuk sasaran dan indikator strategis maupun program pada Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten.
4. Sasaran dan indikator strategis atau program dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD digunakan sebagai dasar untuk menyusun sasaran dan indikator program dalam Rencana Kerja (Renja) OPD. Sedangkan tujuan dan sasaran yang ada pada RPJM daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan sasaran dan program di RKP daerah.
5. Sasaran program dalam RKP daerah harus mengacu pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP nasional. RKP daerah juga berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada Renja OPD. Indikator prioritas pembangunan di daerah diimplementasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD, yang digunakan sebagai alat untuk menilai akuntabilitas kinerja OPD.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah juga ditentukan sasaran program pada RPJM Daerah dan RKP Daerah. Sasaran

program daerah tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran program pembangunan daerah.

B. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD, RPJM Daerah, dan RKP Daerah harus didukung oleh sinkronisasi yang baik antara perencanaan dan pendanaan pembangunan. Untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, baik dari pemerintah maupun pihak non-pemerintah, dengan pendekatan yang lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran.

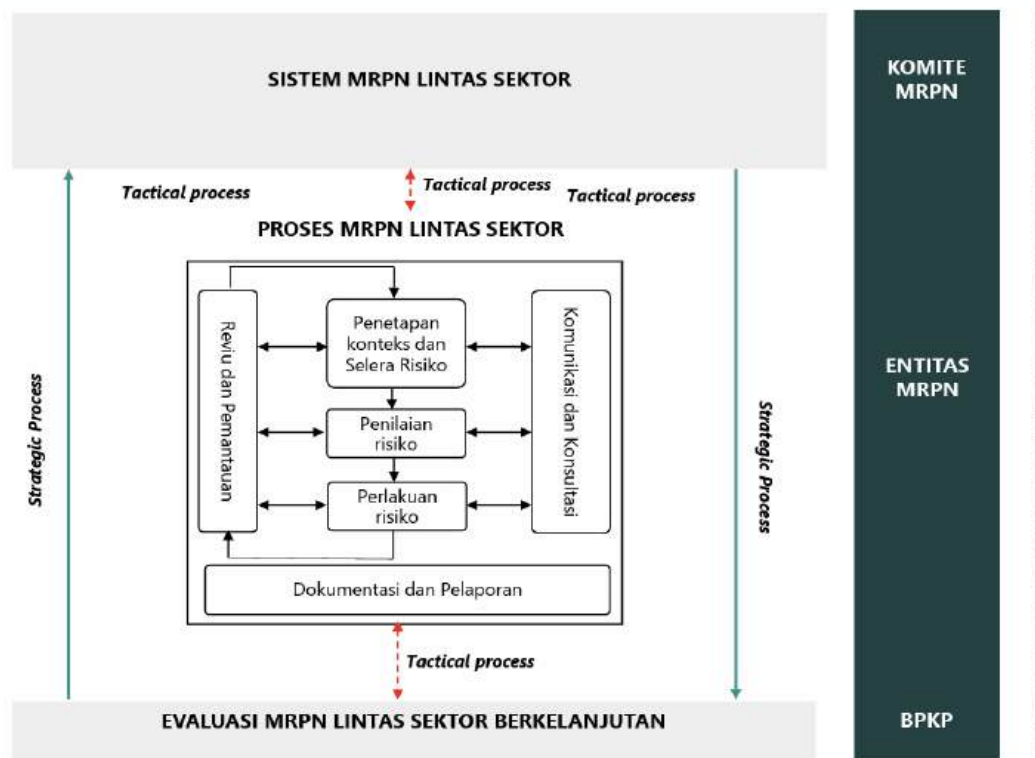
Dalam rangka memaksimalkan penggunaan sumber pendanaan tersebut, kualitas belanja dan pembiayaan pada prioritas pembangunan harus ditingkatkan sesuai dengan tahapan pembangunan yang ada. Selain mengupayakan efisiensi dan efektivitas belanja, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan berbagai sumber pendanaan, seperti Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan utang daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta sumber pendanaan non-APBN/APBD untuk menganggarkan pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

5.1.2. Kerangka Pengendalian

Untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, dibutuhkan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan pemanfaatan sistem elektronik terpadu serta tata kelola data pembangunan yang baik. Pengendalian ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko pada setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Seluruh aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, serta dikombinasikan dengan tata kelola data pembangunan guna mendorong kebijakan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based planning).

Mengenai manajemen risiko, hal ini merujuk pada Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), yaitu kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengelola risiko yang terkait dengan program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, atau jenis risiko tertentu yang bersifat lintas sektor. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

MRPN mengintegrasikan Manajemen Risiko Organisasi yang sudah ada ke dalam sebuah sistem Pengendalian Manajemen Risiko Lintas Sektor yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Kerangka kerja MRPN tersebut dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 5.2. Kerangka Kerja MRPN

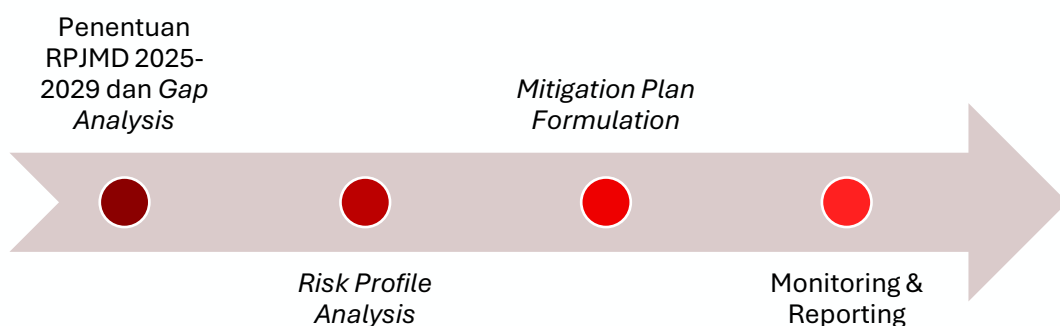
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Sebagai bagian dari entitas dalam MRPN, pemerintah daerah diwajibkan untuk menerapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. Penerapan MRPN di tingkat daerah dilakukan dengan membentuk komite manajemen risiko serta menyusun kebijakan manajemen risiko yang relevan. Proses penerapan ini

meliputi perencanaan kinerja prioritas pembangunan, penentuan objek dan entitas MRPN, serta pelaksanaan proses penilaian risiko (risk assessment). Pengambilan keputusan dan pelaksanaan manajemen risiko sangat penting untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan pembangunan sekaligus mengurangi dampak negatif yang bisa terjadi pada entitas MRPN.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 harus dilakukan secara berkesinambungan dengan perencanaan jangka panjang antar periode dan menjaga sinkronisasi baik dari sisi waktu maupun substansi, dengan merujuk pada RPJPD Kabupaten Padang Lawas, RPJMD Provinsi, dan RPJM Nasional. Langkah ini menjadi krusial agar tujuan pembangunan daerah dapat terealisasi sebagai bagian integral dari visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah, perlu disusun tahapan manajemen risiko yang komprehensif serta integrasi manajemen risiko yang menyeluruh. Selain itu, pembentukan dasar hukum yang memperkuat integrasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembangunan juga diperlukan. Tahapan-tahapan manajemen risiko yang mendukung pencapaian target RPJMD ini dapat divisualisasikan dalam gambar berikut:



Gambar 5.3. Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Rincian penjelasan tahapan-tahapan dalam manajemen risiko di atas

adalah berupa:

1. Perumusan RPJMD periode 2025-2029 dilakukan dengan menetapkan arah kebijakan dan target pencapaian hingga tahun 2029. Proses ini meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan jangka menengah yang diharapkan dapat mengantarkan Kabupaten Padang Lawas mencapai visi "Bersama Mewujudkan Padang Lawas yang MAJU". Penetapan ini perlu didahului dengan analisis kesenjangan (*gap analysis*) terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya. Analisis kesenjangan merupakan metode sistematis untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang tercapai. Dalam konteks penyusunan RPJMD, pendekatan ini berfungsi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan melalui beberapa tahapan penting. Proses analisis dimulai dengan pemetaan menyeluruh berbagai indikator kinerja, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pencapaian pembangunan dari data historis kemudian dibandingkan secara teliti dengan target yang ingin dicapai, sehingga area-area yang tertinggal dapat teridentifikasi. Analisis tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mengevaluasi efektivitas proses implementasi, termasuk kendala struktural dan operasional yang dihadapi.
2. Analisis Profil Risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan asesmen risiko. Proses identifikasi risiko meliputi pengenalan dan evaluasi berbagai potensi risiko, baik internal maupun eksternal, yang dapat menghambat tercapainya target RPJMD 2025-2029. Selanjutnya, asesmen risiko dilakukan untuk mengukur kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dan tingkat keseriusan dampak (*severity*) dari risiko-risiko yang telah teridentifikasi. Penilaian ini membantu memahami tingkat urgensi dan besaran risiko yang dihadapi, sehingga tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat dapat dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.

3. Penyusunan Rencana Mitigasi dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga/Daerah terkait. Proses ini mencakup identifikasi risiko prioritas yang perlu ditangani dan penetapan jadwal pelaksanaan yang jelas untuk rencana mitigasi. Dengan pendekatan ini, rencana mitigasi dapat disusun secara sistematis dan efektif untuk mengatasi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam implementasi RPJMD periode 2025-2029.
4. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan bertujuan memastikan implementasi RPJMD berjalan dengan baik, memungkinkan evaluasi berkala terhadap pencapaian target, serta menjamin partisipasi berbagai pihak dalam proses pembangunan daerah. Proses ini meliputi pemantauan internal terhadap implementasi RPJMD Kabupaten Padang Lawas 2025-2029 dan melibatkan pihak eksternal seperti lembaga pengawas, organisasi masyarakat, atau pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJMD, sekaligus mendapatkan masukan berharga dari berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas implementasi RPJMD.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, terdapat beberapa risiko strategis yang perlu dimitigasi agar tidak menghambat pencapaiannya. Ada pun identifikasi risiko strategis pencapaian tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.1. Identifikasi Risiko Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi RPJMD Kabupaten Padang Lawas

Risiko	Dampak	Rencana Mitigasi	OPD Pelaksana
Keterbatasan anggaran	Program tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya atau dihentikan	Pengajuan anggaran tambahan, realokasi anggaran, efisiensi pengeluaran	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Kurangnya sumber daya manusia	Penurunan kualitas pelaksanaan, kegagalan	Pelatihan SDM, perekrutan tenaga ahli, kerjasama dengan	Dinas Ketenagakerjaan, Badan Kepegawaian

Risiko	Dampak	Rencana Mitigasi	OPD Pelaksana
berkualitas	mencapai target	institusi pendidikan	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegagalan teknologi atau sistem	Gangguan operasional, kehilangan data, keterlambatan pelaporan	Pemeliharaan rutin sistem, <i>backup</i> data, pelatihan teknologi	Dinas Komunikasi dan Informatika
Ketidakstabilan ekonomi	Pengurangan anggaran, penurunan daya beli masyarakat	Diversifikasi sumber pendanaan, program tahan fluktuasi ekonomi	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
Fluktuasi harga komoditas pertanian	Ketidakstabilan pendapatan petani dan penerimaan pajak daerah	Diversifikasi ekonomi, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
Deforestasi dan degradasi lahan	Kerusakan lingkungan, peningkatan risiko bencana alam	Penegakan hukum terhadap <i>illegal logging</i> , program reboisasi	Dinas Lingkungan Hidup
Infrastruktur yang tidak memadai	Hambatan akses, keterlambatan pembangunan	Peningkatan anggaran untuk infrastruktur, perbaikan manajemen proyek	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Bencana alam atau keadaan darurat	Kerusakan infrastruktur, gangguan pelayanan, keterlambatan program	Sistem peringatan dini, rencana kontingensi, asuransi program	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Aspek sosial memperoleh perhatian khusus dalam pembangunan daerah melalui upaya penguatan dialog antar agama dan pendidikan multikultural yang bertujuan menumbuhkan sikap toleransi. Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi terus diperkuat untuk mengembangkan tata kelola yang lebih inklusif. Program-program pencegahan narkoba dan rehabilitasi terpadu dijalankan bersama dengan upaya penegakan hukum yang tegas namun tetap proporsional. Melalui pendekatan komprehensif ini,

diharapkan dapat tercipta lingkungan binaan yang tidak hanya berfungsi optimal dan memiliki nilai estetika, tetapi juga tangguh menghadapi berbagai tantangan. Pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan dan berkeadilan sosial pada akhirnya akan mewujudkan ruang hidup yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Identifikasi dan rancangan strategi manajemen risiko yang tepat untuk setiap upaya pencapaian misi akan membuat pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dapat berjalan lebih efektif serta meminimalkan potensi risiko yang mungkin muncul. Pengendalian RPJMD dilakukan melalui mekanisme pengendalian jangka pendek (tahunan) yang hasilnya disampaikan langsung kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah dibagi menjadi dua bagian.

1. Pengendalian perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan memiliki peran penting dalam menjamin keselarasan dan konsistensi seluruh proses pembangunan. Fungsi utamanya adalah meningkatkan kualitas perencanaan melalui penyempurnaan berkelanjutan terhadap desain program dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu, pengendalian ini juga berfungsi untuk memverifikasi ketersediaan dan kecukupan sumber pendanaan, baik yang berasal dari APBD/APBN maupun dari mitra pembangunan non-pemerintah. Pengendalian ini dilaksanakan dengan berpedoman pada hasil evaluasi komprehensif terhadap dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD). Analisis menyeluruh terhadap capaian dan tantangan dalam implementasi rencana pembangunan sebelumnya menjadi landasan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, proses perencanaan dapat berjalan secara dinamis, responsif, dan mampu mengakomodasi berbagai perkembangan serta kebutuhan aktual di lapangan.

2. Pengendalian pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pembangunan berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Proses ini diimplementasikan melalui sistem pemantauan dan evaluasi (Monev) yang berkelanjutan terhadap capaian kinerja pembangunan jangka pendek (tahunan). Mekanisme ini didukung oleh sistem pelaporan berkala yang memungkinkan pengambilan keputusan korektif secara tepat waktu. Hasil evaluasi tahunan menjadi bahan pembelajaran untuk menyempurnakan siklus perencanaan berikutnya, sekaligus menjamin terwujudnya akuntabilitas kinerja pembangunan.

Efektivitas pengendalian pembangunan membutuhkan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif. Kerangka regulasi ini harus mampu mengintegrasikan dan menyinergikan berbagai aspek penting dalam pengelolaan pembangunan, yang meliputi:

1. Sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur, yang memungkinkan tracking dan penilaian kinerja secara sistematis
2. Mekanisme pengendalian yang responsif, yang mampu memberikan umpan balik dan koreksi secara tepat waktu
3. Manajemen risiko pembangunan yang proaktif, yang dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi kendala sebelum berdampak signifikan
4. Sistem manajemen kinerja yang terukur, yang menetapkan indikator jelas untuk menilai pencapaian target pembangunan

Harmonisasi berbagai regulasi ini menjadi sangat penting untuk menjamin keselarasan antara proses pengendalian dengan kinerja Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sinergi regulasi yang baik akan menjadi fondasi yang kokoh untuk memperkuat sistem manajemen kinerja pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Di sisi kelembagaan, diperlukan pembentukan struktur pengendalian yang komprehensif dengan ciri-ciri:

1. Fungsi Koordinasi Lintas Sektor yang mampu mengintegrasikan pengendalian vertikal (Pemerintah Pusat-Daerah) dan horizontal (antar-OPD)
2. Mekanisme Kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan
3. Sistem Pelaporan Terpadu berbasis teknologi informasi
4. Kapasitas Kelembagaan yang memadai dalam analisis dan pengambilan keputusan

5.1.3. Sistem Insentif

Keberhasilan pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah. Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, pelaku usaha, institusi penelitian, akademisi, dan komunitas masyarakat menjadi faktor penting untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Untuk meningkatkan keterlibatan yang lebih luas dan signifikan, diperlukan sistem insentif yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pelaku pembangunan. Bagi pemerintah, insentif dirancang terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja dan penganggaran daerah, berdasarkan hasil kinerja nyata yang mencakup keselarasan perencanaan dengan pelaksanaan, kesesuaian program dengan anggaran, capaian indikator ekonomi makro, serta realisasi program prioritas daerah. Pendekatan ini bertujuan memotivasi dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam mencapai target pembangunan. Sementara itu, untuk pelaku non-pemerintah, insentif disusun dalam bentuk yang lebih beragam dan praktis, seperti kemudahan perizinan, fasilitas bisnis, akses pembiayaan, dan penghargaan guna mendorong peran aktif sektor swasta dan masyarakat. Insentif ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung kontribusi nyata dari berbagai pihak dalam pembangunan.

Dengan demikian diharapkan tercipta sinergi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan. Sistem ini tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kontribusi memberikan

dampak nyata terhadap percepatan dan keberlanjutan tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat menjadi gerakan kolektif yang memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia di wilayah tersebut.

5.1.4. Mekanisme Perubahan

Dalam menghadapi kompleksitas dinamika pembangunan, dokumen perencanaan daerah harus bersifat adaptif agar dapat menyesuaikan diri dengan faktor eksternal tak terduga. Situasi tak terkontrol seperti ketegangan geopolitik global, ketidakstabilan ekonomi internasional, atau bencana alam dapat mengganggu pencapaian target pembangunan. Jika terjadi penyimpangan signifikan dari rencana awal yang membuat target RPJMD tidak lagi realistis, mekanisme pemutakhiran melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah menjadi langkah krusial. Revisi ini dilakukan berdasarkan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan pembangunan dan analisis kondisi terkini, memastikan target tetap relevan dan dapat dicapai di tengah perubahan situasi. Untuk mendukung pelaksanaan yang efektif dan efisien, pemerintah daerah memanfaatkan transformasi digital melalui sistem elektronik terintegrasi yang mencakup seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi, mempercepat proses, dan memperkuat akurasi pengambilan keputusan. Selain itu, tata kelola data yang kokoh menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan. Dengan data referensi yang terstandar dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Pendekatan yang menggabungkan fleksibilitas perencanaan dengan teknologi digital ini menciptakan ekosistem pembangunan daerah yang tangguh, responsif, dan berbasis bukti. Strategi ini tidak hanya menjamin kelancaran pelaksanaan RPJMD 2025-2029, tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama periode pembangunan.

5.1.5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik yang efektif menjadi fondasi pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Dalam kerangka RPJMD 2025-2029, komunikasi tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga membangun dialog yang konstruktif antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Prinsip "*no one left behind*" diterapkan untuk memastikan semua suara didengar dan setiap kelompok memiliki akses yang adil terhadap informasi pembangunan. Sistem komunikasi publik ini berpijak pada tiga pilar utama. Pertama, tata kelola komunikasi yang terstruktur dan profesional, mengintegrasikan koordinasi antar-sektor dengan inovasi dalam penyampaian pesan. Kedua, penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses, disajikan secara menarik, dan tepat waktu. Ketiga, pendekatan partisipatif berbasis data yang mempertimbangkan keragaman kebutuhan masyarakat. Implementasi dilakukan melalui saluran komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik pemangku kepentingan. Forum OPD menjadi wadah konsultasi teknis antar-perangkat daerah, sementara musyawarah berjenjang dari tingkat kabupaten hingga provinsi menjamin konsistensi kebijakan. Masyarakat luas, termasuk sektor swasta, akademisi, media, dan kelompok rentan, dilibatkan melalui metode komunikasi yang inklusif dan mudah dipahami. Tujuan pendekatan ini adalah mewujudkan pemerintahan yang terbuka, di mana kebijakan pembangunan dapat dipahami dengan jelas oleh publik dan semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Dengan demikian, komunikasi publik tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah secara inklusif.

5.2. Pembiayaan Pembangunan

Untuk mewujudkan visi Padang Lawas sebagai wilayah yang MAJU, diperlukan penguatan kapasitas pembiayaan melalui pendekatan yang inovatif dan kolaboratif. Strategi pembiayaan ini dirancang secara menyeluruh, mengoptimalkan sektor publik dan non-publik dengan menjunjung prinsip tata kelola yang baik. Penguatan Pembiayaan Sektor Publik dilakukan melalui lima strategi utama. Pertama, memperkuat perencanaan pembiayaan dengan menata regulasi daerah, membentuk kelembagaan yang adaptif, dan memanfaatkan teknologi digital dalam proses bisnis. Kedua, mengembangkan kerja sama bilateral dan multilateral untuk memperoleh pembiayaan inovatif dengan syarat yang menguntungkan. Ketiga, mengoptimalkan kerja sama pemerintah dan badan usaha melalui penyempurnaan regulasi dan tata kelola. Keempat, menerapkan skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri lokal dan UMKM. Kelima, mengoptimalkan aset daerah melalui mekanisme seperti daur ulang aset dan penangkapan nilai aset. Untuk Pembiayaan Sektor Non-Publik, berbagai instrumen inovatif dimanfaatkan, termasuk dana pensiun, pasar modal, produk pembiayaan syariah, pembiayaan hijau dan biru, serta blended financing yang menggabungkan beragam sumber dana. Skema berbasis transaksi seperti bursa karbon dan plastik juga dikembangkan untuk menjawab tantangan perubahan iklim.

Keberhasilan pembiayaan bergantung pada penguatan manajemen investasi. Langkah strategis mencakup penyempurnaan proses identifikasi dan penilaian proyek, modernisasi sistem pemantauan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pelibatan sektor swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik menjadi prioritas, didukung oleh perbaikan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM. Dengan pendekatan terintegrasi ini, Kabupaten Padang Lawas membangun ekosistem pembiayaan yang kokoh dan berkelanjutan, menciptakan sinergi optimal antara sektor publik dan non-publik untuk mempercepat pembangunan daerah.

5.3. Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi panduan pelaksanaan pembangunan daerah. Dokumen ini merinci visi, misi, tujuan, sasaran utama, arah kebijakan, indikator kinerja, serta program prioritas selama lima tahun, yang dirancang untuk menjawab tantangan, permasalahan, dan isu strategis daerah guna mencapai visi yang telah ditetapkan. RPJMD ini menjadi acuan bagi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas yang disusun secara tahunan. Sebagai dokumen krusial, RPJMD 2025-2029 berperan penting dalam keberhasilan pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Lawas menuju visi dan misi daerah, yaitu “Bersama mewujudkan Padang Lawas yang MAJU”. Keberhasilan ini bergantung pada:

1. Kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah;
3. Pembangunan yang berpihak kepada masyarakat;
4. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan;
5. Upaya menjaga keseimbangan dan kesinambungan rencana pembangunan.

Pencapaian visi Padang Lawas yang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius, dan Berkelanjutan memerlukan kolaborasi nyata dari semua elemen masyarakat. Dukungan politik, keseriusan pelaksanaan, tanggung jawab kolektif, dan semangat gotong royong menjadi landasan utama gerakan pembangunan daerah. Seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, pelaku usaha, akademisi, kelompok agama, hingga pemuda, diharapkan berkontribusi aktif dengan komitmen penuh. Sinergi ini harus diwujudkan melalui aksi nyata, seperti program pembangunan, pengawasan partisipatif, dan inisiatif lokal yang mendorong kemajuan. Dengan demikian, keberhasilan visi dan misi pembangunan daerah ini akan mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.